



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 /16105/ SETDA/BPKAD tanggal 21 Juli 2024

910 /2096/ DPRD

tentang Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 9.643.008.303.787,00 bertambah sejumlah Rp. 2.450.599.260.505,00 sehingga menjadi Rp. 12.093.607.564.292,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 9.591.122.648.719,00

2. bertambah Rp. 1.762.873.677.335,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 11.353.996.326.054,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 9.643.008.303.787,00

2. bertambah Rp. 2.450.599.260.505,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 12.093.607.564.292,00

Defisit setelah perubahan Rp. (739.611.238.238,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 101.885.655.068,00

b) Bertambah Rp. 892.023.837.552,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 993.909.492.620,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 50.000.000.000,00

b) Bertambah Rp. 204.298.254.382,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 254.298.254.382,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 739.611.238.238,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 8.583.086.550.127,00

2. Bertambah Rp. 1.649.080.530.945,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 10.232.167.081.072,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp. 1.004.100.098.592,00

2. Bertambah Rp. 113.793.146.390,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.117.893.244.982,00

c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	3.936.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp. 3.936.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	7.840.342.490.314,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.448.818.961.200,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 9.289.161.451.514,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	318.077.331.209,00
2. Bertambah	Rp.	<u>76.209.917.924,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 394.287.249.133,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	209.418.071.853,00
2. Bertambah	Rp.	<u>27.391.025.423,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 236.809.097.276,00

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	215.248.656.751,00
2. bertambah	Rp.	<u>96.660.626.398,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan

Rp. 311.909.283.149,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	833.857.025.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>19.674.907.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 853.531.932.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	170.243.073.592,00
2. Bertambah	Rp.	<u>94.118.239.390,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 264.361.312.982,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	5.869.717.700.125,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>1.133.205.989.402,00</u>	
Jumlah belanja Operasi setelah perubahan	Rp.		7.002.923.689.527,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	2.108.154.868.789,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>470.254.450.594,00</u>	
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.		2.578.409.319.383,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	72.086.033.246,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>2.913.966.754,00</u>	
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		75.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	1.593.049.701.627,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>844.224.853.755,00</u>	
Jumlah belanja Transfer setelah perubahan	Rp.		2.437.274.555.382,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	2.446.386.381.327,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(36.876.176.379,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	2.409.510.204.948,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	1.933.659.478.710,00
2. Bertambah	Rp.	<u>81.140.012.693,00</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	2.014.799.491.403,00

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	00,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	6.413.200.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	6.413.200.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	1.482.132.140.088,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.089.129.653.088,00</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	2.571.261.793.176,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.126.500.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(187.500.000,00)</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	939.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	418.938.280.645,00
2. Bertambah	Rp.	<u>234.011.528.205,00</u>
Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	652.949.808.850,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	215.938.739.122,00
2. Bertambah	Rp.	<u>151.342.625.972,00</u>
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	367.281.365.094,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	637.629.788.504,00
2. Bertambah	Rp.	<u>39.375.420.866,00</u>
Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	677.005.209.370,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	821.569.087.712,00
2. Bertambah	Rp.	<u>44.669.793.739,00</u>
Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	866.238.881.451,00

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	13.691.237.806,00
2. Bertambah	Rp.	<u>872.328.705,00</u>

Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 14.563.566.511,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	387.735.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(17.246.893,00)</u>

Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 370.488.107,00

(4) Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	72.086.033.246,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.913.966.754,00</u>

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 75.000.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	894.386.650.239,00
2. Bertambah	Rp.	<u>285.038.507.587,00</u>

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 1.179.425.157.826,00

b Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	698.663.051.388,00
2. Bertambah	Rp.	<u>559.186.346.168,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	<u>1.257.849.397.556,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp.	101.885.655.068,00
2. Bertambah	Rp.	<u>892.023.837.552,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	993.909.492.620,00

b. Pengeluaran

Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>204.298.254.382,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	254.298.254.382,00

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan :
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 12 September 2024



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 12 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (3, 49/2024).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3



KABUPATEN BADUNG

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.986.559.127,00	10.232.167.081.072,00	1.648.080.530.945,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.040.342.490.314,00	9.289.161.451.514,00	1.448.818.961.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	394.287.249.133,00	76.209.917.924,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	27.391.025.423,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00	311.909.283.149,00	96.660.626.398,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00	1.117.893.244.982,00	113.793.146.390,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	853.531.932.000,00	19.674.907.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	264.361.312.982,00	94.118.238.390,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719,00	11.353.986.326.054,00	1.762.873.677.335,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.709.129,00	7.002.923.869.527,00	1.133.206.989.402,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.388.381.327,00	2.409.510.204.948,00	-36.878.176.379,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00	2.014.799.491.403,00	81.140.012.693,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000,00	6.413.200.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00	2.571.261.793.176,00	1.089.129.653.088,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	938.000.000,00	-187.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.106.154.868.789,00	2.578.469.318.383,00	470.254.450.594,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.845,00	662.949.808.850,00	234.011.528.205,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00	367.281.365.094,00	151.342.625.972,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.769.504,00	677.005.209.370,00	39.375.420.866,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00	896.238.881.451,00	44.669.793.739,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00	14.563.568.511,00	872.328.705,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00	370.488.107,00	-17.246.893,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	844.224.853.755,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.850.239,00	1.179.425.157.826,00	285.038.507.587,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00	1.257.849.397.556,00	559.186.346.168,00
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787,00	12.093.607.564.292,00	2.450.599.260.505,00
	Total Surplus/(Defisit)	-51.885.655.068,00	-739.611.238.238,00	-687.725.583.170,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00	993.809.482.620,00	892.023.827.552,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00	963.909.492.620,00	862.023.837.552,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00	739.611.238.238,00	687.725.583.170,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berakuran (SLPA)	0,00	0,00	0,00

Kes-Badung, 12 September 2024



JAWABAN DIRI PRASTA



BERITA ACARA

Nomor : 900/16105/SETDA/BPKAD

Nomor : 900 / 2096 / DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. : Bupati Badung
Dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten
Badung yang beralamat di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan
Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Drs. I Putu Parwata, MK, MM. : Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. I Wayan Suyasa, SH. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Badung.

4. Drs . I Made Sunarta, MM.,M.Si : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang beralamat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi Badung - Bali.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 31 Juli 2024

BUPATI BADUNG,

(I NYOMAN GIRI PRASTA,S.SOS.)

KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG

(Dr. Drs. I PUTU PARWATA,MK,MM)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG

(I WAYAN SUYASA,SH)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG



(Drs. I MADE SUNARTA,MM,M.Si)

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
PENDAPATAN DAERAH	9.591.122.648.719,00	11.294.333.669.559,00	1.703.211.020.840,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,00	10.286.053.757.967,00	1.702.967.207.840,00
Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00	9.289.161.451.514,00	1.448.818.961.200,00
Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	394.287.249.133,00	76.209.917.924,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	27.391.025.423,00
Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00	365.795.960.044,00	150.547.303.293,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00	1.004.343.911.592,00	243.813.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	834.100.838.000,00	243.813.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	170.243.073.592,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	
Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	-
BELANJA DAERAH	9.643.008.303.787,00	12.133.944.907.797,00	2.490.936.604.010,00
BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125,00	6.963.493.780.197,00	1.093.776.080.072,00
Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00	2.360.353.016.303,00	(86.033.365.024,00)
Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00	2.014.012.734.964,00	80.353.256.254,00
Belanja Subsidi	6.413.200.000,00	6.413.200.000,00	
Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00	2.581.876.828.930,00	1.099.744.688.842,00
Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	838.000.000,00	(288.500.000,00)
BELANJA MODAL	2.108.154.868.789,00	2.567.102.517.126,00	458.947.648.337,00
Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00	618.455.576.245,00	199.517.295.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00	386.266.840.935,00	170.328.101.813,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00	676.483.376.984,00	38.853.588.480,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00	870.941.881.451,00	49.372.793.739,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00	14.563.566.511,00	872.328.705,00
Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00	391.275.000,00	3.540.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00	2.528.348.610.474,00	935.298.908.847,00
Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00	1.268.041.922.490,00	373.655.272.251,00
Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00	1.260.306.687.984,00	561.643.636.596,00
Total Surplus/(Defisit)	(51.885.655.068,00)	(839.611.238.238,00)	(787.725.583.170,00)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	154.298.254.382,00	104.298.254.382,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	154.298.254.382,00	104.298.254.382,00
Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00	839.611.238.238,00	787.725.583.170,00





PIMPINAN DPRD KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan arah dan kebijakan umum serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai surat dari Sekretaris Daerah atas Nama Bupati Badung Nomor 900/15981/SETDA/BPKAD Tanggal 25 Juli 2024 perihal: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Tanggal 31 Juli 2024 menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2019-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan

Induk sebesar	Rp. 9.591.122.648.719,00
Bertambah sebesar	Rp. 1.703.211.020.840,00
Pendapatan setelah Perubahan sebesar...	Rp. 11.294.333.669.559,00

II. Belanja

Induk sebesar	Rp. 9.643.008.303.787,00
Bertambah sebesar.....	Rp. 2.490.936.604.010,00
Belanja setelah Perubahan sebesar	Rp. 12.133.944.907.797,00
Defisit sebesar	Rp. (839.611.238.238,00)

III. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Induk sebesar	Rp. 101.885.655.068,00
Bertambah sebesar	Rp. 892.023.837.552,00
Setelah Perubahan sebesar	Rp. 993.909.492.620,00

b. Pengeluaran

Induk sebesar	Rp. 50.000.000.000,00
Bertambah sebesar.....	Rp. 104.298.254.382,00
Setelah Perubahan sebesar.....	Rp. 154.298.254.382,00

- Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan.....	Rp. 839.611.238.238,00

- Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan

Setelah perubahan	Rp. 0

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diajukan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sebelum ditetapkan lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah;

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG,



PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Arsip.



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 707/04-E/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Bupati Badung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung berkewajiban melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Bupati Badung segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah Bupati Badung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KEEMPAT** : Bupati Badung berkewajiban menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- KELIMA : Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Bupati Badung di Mangupura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Badung di Mangupura;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 707/04-E/HK/2024
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 57
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. Kebijakan Umum

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati.

Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan APBD yaitu:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD 2024
Kabupaten Badung

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5
1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2023	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023	10 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)
2	Penyampaian Rancangan (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direvisi oleh APIP	900.1.1.1/4052/BPKAD	9 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.1/4056/BPKAD	9 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
4	Kesepakatan Rancangan P-KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung	100.3.7.1/27/NK/KS/2024 100.3/1220/DPRD/2024	15 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
	Kesepakatan Rancangan P-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung	100.3.7.1/28/NK/KS/2024 100.3/1221/DPRD/2024	15 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Perda tentang P-APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Badung	900.1.1/5252/BPKAD	19 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Badung dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan APBD 2024	100.3/9/HK/2024 100.3.2/1325/DPRD/2024	26 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berakhir)

1	2	3	4	5
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Kabupaten Badung untuk dievaluasi	900.1.1.4/5555/BPKAD	26 Juli 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda P-APBD)

Berdasarkan Tabel I tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana maksud Bab III.A. 1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mulai dari RKPD Perubahan, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana maksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan Umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta untuk penganggaran target Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- b. pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- c. penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- d. penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- c. pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;
- g. penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah/lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Kabupaten Badung dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli Masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan *stunting*, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. dalam rangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir c.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- d. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- e. belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan

- f. belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah, yaitu:

- a. pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; dan
- c. pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

III. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target pendapatan daerah semula Rp9.591.122.648.719,00 bertambah Rp1.703.211.020.840,00 menjadi Rp11.294.333.669.559,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Target pendapatan daerah dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2024

Ornamen	P. APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		Persentase (%)	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		Persentase (%)	Target	Salisiasi Target P-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD 2024 (Rp)	Persentase dan selisih target P-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD 2024 (%)	Perubahan dari selisih target P-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target	realisasi k/d per Juli					
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8:5	10=5:5	11=6:8
Pendapatan Daerah	7.498.385.773.983,00	7.217.252.183.430,60	96,51%	9.591.122.648.719,00	4.466.235.764.413,47	46,57%	11.200.313.009.559,00	1.703.211.020.840,00	17,76%	39,54%
Pendapatan Asli Daerah	6.534.205.018.001,00	6.308.865.160.034,79	96,48%	8.281.086.550.127,00	3.960.666.143.387,02	46,19%	10.286.063.767.967,00	1.702.967.207.340,00	19,86%	38,51%
Pajak Daerah	5.830.067.627.510,00	5.670.972.090.001,77	97,37%	7.340.342.450.314,00	3.491.110.004.609,62	44,53%	9.282.101.031.514,00	1.402.918.961.200,00	18,49%	37,59%
Retribusi Daerah	127.395.800.150,00	157.680.575.234,00	123,13%	318.077.331.209,00	391.015.950.723,78	80,21%	394.287.240.133,00	76.200.917.974,00	33,96%	48,60%
Jual Pengalihan Kekayaan Daerah Yang Di Milikan	154.899.650.591,00	203.305.789.637,90	104,31%	209.418.071.833,00	234.571.891.513,79	111,89%	235.809.097.276,00	27.291.026.423,00	13,08%	99,03%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,	38.133.807.740,00	271.037.905.200,72	71,09%	2.15.248.656.751,00	43.410.590.839,63	20,17%	365.795.960.144,00	150.547.203.203,00	69,94%	11,89%
Pendapatan Transfer	944.097.754.992,00	907.565.437.433,00	96,13%	1.484.108.098.392,00	505.148.981.424,00	50,31%	1.004.341.911.592,00	243.813.000,00	0,02%	50,30%

1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:3	8	9=8:5	10=9:5	11=6:3
Transfer Transfer Yusuf	728.075.386.000,00	668.555.318.417,00	95,24%	833.657.035.000,00	412.092.400.608,00	49,12%	834.101.838.050,00	243.813.008,00	0,03%	49,13%
Transfer Transfer Detail	218.215.968.092,00	209.018.059.421,00	95,78%	170.243.073.592,00	93.058.580.816,00	54,66%	170.243.073.592,00	0,00	0,00%	54,66%
Lain-Lain Pendapatan Detail yang Saja	0,00	871.589.917,81	0,00%	3.036.000.000,00	410.639.507,15	0,00%	3.036.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Pendapatan Berkas	0,00	0,00	0,00%	3.036.000.000,00	118.632.602,45	0,00%	3.036.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Selain Dengan Kerjasama perguruan tinggi	0,00	831.589.917,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula Rp8.583.086.550.127,00 bertambah Rp1.702.967.207.840,00 menjadi Rp10.286.053.757.967,00 atau 91,07% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dirinci sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung
sampai dengan Juli 2024

Uraian	Perubahan APBD 2024 (Rp)	Realisasi s/d Juli 2023 (Rp)	Realisasi s/d Juli 2024 (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	10.286.053.757.967,00	3.263.549.536.323,02	3.960.666.143.387,02	38,51
a Pajak Daerah	9.289.161.451.514,00	2.863.767.045.136,13	3.491.110.004.609,62	37,58
b Retribusi Daerah	394.287.249.133,00	83.544.695.912,16	191.615.656.723,78	48,60
c Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	236.809.097.276,00	194.284.515.874,35	234.521.891.513,79	99,03
d Lain-Lain PAD yang Sah	365.795.560.044,00	121.953.279.400,38	43.418.590.539,83	11,87

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 Rp3.960.666.143.387,02 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2023 sebesar Rp3.263.549.536.323,02 atau meningkat sebesar Rp697.116.607.064,00. Apabila diprediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar Rp6.789.713.388.663,46 lebih rendah dari rencana target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.286.053.757.967,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.496.340.369.303,54.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung serta memperhatikan perkiraan asumsi makro.

Pemerintah Kabupaten Badung agar tetap realistis dan cermat dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target Pendapatan Asli Daerah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

- 1) Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target Pendapatan Pajak Daerah semula Rp7.840.342.490.314,00 bertambah Rp1.448.818.961.200,00 menjadi Rp9.289.161.451.514,00 atau 82,25% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.491.110.004.609,62 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2023 sebesar Rp2.863.767.045.136,13 atau meningkat sebesar Rp627.342.959.473,49. Apabila diprediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juli tahun 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar Rp5.984.760.007.902,21 lebih rendah dari rencana target Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.289.161.451.514,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Pajak Daerah sebesar Rp3.304.401.443.611,79.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Pajak Daerah:

- 1) pajak hotel sebesar Rp4.619.572.122.216,00 berkurang Rp4.619.572.122.216,00 menjadi Rp0,00;
- 2) pajak restoran sebesar Rp1.536.627.999.303,00 berkurang Rp1.536.627.999.303,00 menjadi Rp0,00;
- 3) pajak hiburan sebesar Rp320.722.605.442,00 berkurang Rp320.722.605.442,00 menjadi Rp0,00;
- 4) pajak reklame sebesar Rp7.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- 5) pajak penerangan jalan sebesar Rp224.411.640.543,00 berkurang Rp224.411.640.543,00 menjadi Rp0,00;
- 6) pajak parkir sebesar Rp13.500.413.160,00 berkurang Rp13.500.413.160,00 menjadi Rp0,00;

- 7) pajak air tanah sebesar Rp67.988.833.912,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- 8) pajak pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp60.717.600,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) semula Rp266.009.637.286,00 bertambah Rp100.042.655.109,00 menjadi Rp366.052.292.395,00;
- 10) pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp783.948.520.852,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024; dan
- 11) pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp0,00 bertambah Rp8.063.611.086.755,00 menjadi Rp8.063.611.086.755,00.

Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak;
2. perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait pencetakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp318.077.331.209,00 bertambah Rp76.209.917.924,00 menjadi Rp394.287.249.133,00 atau 3,49% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.615.656.723,78 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2023 sebesar Rp83.544.695.912,16 atau meningkat sebesar Rp108.070.960.811,62. Apabila diprediksi Pendapatan Retribusi daerah Tahun 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar Rp328.483.982.955,05 lebih rendah dari rencana target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp394.287.249.133,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Retribusi Daerah sebesar Rp65.803.266.177,95.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah:

- 1) retribusi jasa umum semula Rp203.784.599.689,00 bertambah Rp6.310.014.444,00 menjadi Rp210.094.614.133,00;
- 2) retribusi jasa usaha semula Rp90.792.731.520,00 bertambah Rp55.399.903.480,00 menjadi Rp146.192.635.000,00; dan
- 3) retribusi perizinan tertentu semula Rp23.500.000.000,00 bertambah Rp14.500.000.000,00 menjadi Rp38.000.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Badung serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana maksud butir C.2.a. 1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

- 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir 1)a) harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a. 1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Sedangkan, untuk hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75 dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp209.418.071.853,00 bertambah Rp27.391.025.423,00 menjadi Rp236.809.097.276,00 atau 2,10% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp234.521.891.513,79 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2023 sebesar Rp194.284.515.874,35 atau meningkat sebesar Rp40.237.375.639,44.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan juga berdasarkan atas realisasi penyerahan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Pemilik Modal (KPM). Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula Rp202.985.189.908,00 bertambah Rp31.536.701.605,00 menjadi Rp234.521.891.513,00;
- 2) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp364.601.885,00 berkurang Rp364.601.885,00 menjadi Rp0,00; dan
- 3) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) semula Rp6.068.280.060,00 berkurang Rp3.781.074.297,00 menjadi Rp2.287.205.763,00.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Badung yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir C.2.a,2).b) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris/pengawas dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp215.248.656.751,00 bertambah Rp150.547.303.293,00 menjadi Rp365.795.960.044,00 atau 3,24% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.418.590.539,83 lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2023 sebesar Rp121.953.279.400,38 atau menurun sebesar Rp78.534.688.860,55. Apabila diprediksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar Rp74.431.869.496,85 lebih rendah dari rencana target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp365.795.960.044,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp291.364.090.547,15.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp4.896.396.452,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- 2) jasa giro semula Rp5.791.993.005,00 bertambah sebesar Rp26.018784.908,00 menjadi Rp31.810.777.913,00;
- 3) hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp10.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- 4) pendapatan bunga sebesar Rp9.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- 5) pendapatan denda pajak daerah semula Rp204.550.267.294,00 bertambah Rp123.498.660.785,00 menjadi Rp328.048.928.079,00;
- 6) pendapatan dari pengembalian semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.007.600,00 menjadi Rp1.007.600,00; dan
- 7) pendapatan BLUD semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.028.850.000,00 menjadi Rp1.028.850.000,00.

Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung agar tetap realistis dan cermat dalam perencanaan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi Pendapatan Daerah, sehingga perencanaan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi Pendapatan Daerah dimaksud.

2. Pendapatan Transfer

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.004.100.098.592,00 bertambah Rp243.813.000,00 menjadi Rp1.004.343.911.592,00 atau 8,89% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp833.857.025.000,00 bertambah Rp243.813.000,00 menjadi Rp834.100.838.000,00 atau 7,39% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain:
 - 1) dana perimbangan semula Rp756.255.486.000,00 bertambah Rp243.813.000,00 menjadi Rp756.499.299.000,00 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp80.858.081.000,00 bertambah Rp243.813.000,00 menjadi Rp81.101.894.000,00, tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
 - b) dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp402.567.701.000,00 tidak mengalami perubahan dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp402.567.701.000,00;
 - c) dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:
 - (1) dana alokasi khusus fisik sebesar Rp38.872.272.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.12 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.872.272.000,00; dan
 - (2) dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp233.957.432.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp233.957.432.000,00.
 - 2) insentif fiskal sebesar Rp30.780.370.000,000 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.780.370.000,00; dan
 - 3) dana desa sebesar Rp46.821.169.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.821.169.000,00.
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp170.243.073.592,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Target Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.053.073.592,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:

- (a) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp65.011.581.473,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- (b) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp32.387.299.700,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- (c) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp42.290.760.291,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- (d) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp68.075.082,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024; dan
- (e) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp30.295.357.046,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024.

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5197/PADFE/BPKAD tanggal 12 Agustus 2024 hal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk Kabupaten Badung dialokasikan sebesar Rp210.284.636.087,00 sebagai berikut:

- (a) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp68.732.301.246,00;
- (b) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp53.858.269.610,00;
- (c) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp57.225.479.402,00;
- (d) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp279.330.658,00; dan
- (e) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp30.189.255.171,00.

Pemerintah Kabupaten Badung juga mengalokasikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah atas Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/4884/PADFE/BPKAD tanggal 31 Juli 2024 hal Kewajiban Definitif Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, untuk Kabupaten Badung dialokasikan sebesar Rp53.886.676.895,00 sebagai berikut:

- (a) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp20.336.628.052,00;
- (b) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp17.146.357.561,00;
- (c) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp16.328.619.660,00; dan

- (d) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp75.071.622,00.

Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

1. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dari hak Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
 2. penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. dalam rangka mendukung Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Badung untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana maksud butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- 2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp190.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir C.2.b.5).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.936.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

- B. Kebijakan Belanja Daerah Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung semula Rp9.643.008.303.787,00 bertambah Rp2.490.936.604.010,00 menjadi Rp12.133.944.907.797,00 atau 25,83% dari dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu:
1. penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.133.944.907.797,00 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Rancangan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2024

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Target		Perubahan (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp) Target	Realisasi 2024	4=3-2	5	6	7=6-5	Perentase (%)	Target P-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Perentase dari Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Target P-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Perentase (%)	Zerobase dan Target P- APBD Tahun Anggaran 2024 dari Target dari Jicollasai Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9=8-5	10=9-5	11=10-9						
Belanja Daerah	8.542.741.852.056,00	7.287.690.714.205,00	38,31%	9.645.008.303.787,00	4.356.966.842.685,00	45,18%	12.133.944.907.797,00	2.490.936.604.010,00	25,83%	35,91%						
Belanja Daerah	8.284.526.227.336,00	4.200.419.353.205,00	96,87%	5.099.717.730.125,00	3.146.787.656.251,00	59,61%	6.063.493.780.197,00	1.093.776.083.072,00	18,63%	45,18%						
Belanja Daerah	1.982.829.164.147,00	1.437.909.605.470,00	76,37%	3.416.356.381.327,00	1.107.328.500.755,00	45,26%	2.369.353.016.303,00	-86.033.365.024,00	-3,52%	46,91%						
Belanja Daerah	1.733.119.018.806,00	1.565.419.095.596,98	90,32%	1.953.659.478.710,00	694.679.325.030,00	35,93%	2.014.012.794.964,00	80.383.286.250,00	4,10%	34,19%						
Belanja Daerah	2.035.319.000,00	1.131.803.244,00	55,51%	6.413.200.000,00	1.524.057.810,00	23,78%	6.413.200.000,00	0,00	0,00%	23,78%						
Belanja Daerah	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Belanja Daerah	1.585.686.578.785,00	1.585.686.578.785,00	95,16%	1.482.132.140.038,00	1.342.786.559.626,00	90,67%	2.531.876.826.930,00	1.093.744.588.842,00	74,20%	82,01%						
Belanja Daerah	276.500.000,00	272.000.000,00	98,37%	1.126.500.000,00	509.000.000,00	50,51%	838.000.000,00	-208.500.000,00	-25,61%	67,90%						
Belanja Daerah	1.343.603.798.402,00	1.045.909.078.682,00	77,73%	2.108.154.868.789,00	910.730.159.427,00	42,74%	2.567.302.517.126,00	489.947.648.337,00	21,77%	12,10%						
Belanja Daerah	289.982.501.214,00	163.387.995.513,00	56,54%	418.038.380.645,00	38.250.980.000,00	7,06%	618.455.576.345,00	199.817.295.600,00	47,02%	9,30%						
Belanja Daerah	901.602.237.666,00	372.867.673.241,00	93,44%	915.038.730.122,00	48.277.019.904,00	22,39%	386.265.840.935,00	170.328.101.813,00	78,88%	12,50%						

	1	2	3	4-3,2	5	6	7-5,5	8	9-8,5	10-9,5	11-10,8
Belanja Modal Gedung dan		429.292.635.982,00	397.076.064.584,00	76,84%	637.620.788.504,00	84.526.513.840,00	13,26%	676.483.376.504,00	39.853.582.480,00	5,90%	12,50%
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Instalasi		303.642.065.020,00	217.260.031.027,93	71,56%	821.560.087.712,00	144.060.512.983,00	17,51%	870.911.981.451,00	49.372.793.739,00	5,67%	10,61%
Belanja Modal Asepi, Pemukiman, dan Instalasi		15.778.078.811,00	14.855.287.321,00	94,15%	13.091.237.806,00	0,00	0,00%	14.303.306.511,00	972.228.705,00	6,77%	0,00%
Belanja Modal Asepi, Pemukiman, dan Instalasi		10.216.399.649,00	9.840.100.193,00	96,26%	397.735.900,00	0,00	0,00%	397.735.900,00	3.640.000,00	0,91%	0,00%
Belanja Modal Asepi, Pemukiman, dan Instalasi		89.324.365.806,00	21.363.145.003,00	23,91%	72.080.032.240,00	5.342.412.892,00	7,41%	75.080.000.000,00	2.913.966.754,00	3,89%	3,12%
Belanja Modal Asepi, Pemukiman, dan Instalasi		89.324.365.806,00	21.363.145.003,00	23,91%	72.080.032.240,00	5.342.412.892,00	7,41%	75.080.000.000,00	2.913.966.754,00	3,89%	3,12%
Belanja Modal Asepi, Pemukiman, dan Instalasi		1.823.287.460.512,00	1.627.007.437.568,00	89,23%	1.593.049.701.877,00	894.106.120.115,00	56,13%	2.528.348.610.474,00	935.238.908.947,00	58,73%	35,36%

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan
 - b. disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula Rp346.651.250.995,00 berkurang Rp38.715.458.701,00 menjadi Rp307.935.792.294,00 atau 18,81% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.636.576.252.890,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:

- 1) kegiatan pengelolaan pendidikan dasar
semula Rp336.199.844.115,00 berkurang
Rp39.686.875.023,00 menjadi
Rp296.512.969.092,00; dan
- 2) kegiatan pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) semula Rp10.451.406.880,00 bertambah
Rp971.416.322,00 menjadi Rp11.422.823.202,00.

Terhadap berkurangnya alokasi anggaran SPM Bidang Pendidikan maka Pemerintah Kabupaten Badung harus tetap memprioritaskan pemenuhan target capaian indikator SPM Bidang Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah

Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta butir E.2.a.11 dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula Rp9.172.827.583,00 berkurang Rp435.905.306,00 menjadi Rp8.736.922.277,00 atau 0,70% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Kesehatan Rp1.253.952.425.940,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:

- 1) sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp584.352.400,00 tidak mengalami perubahan;
- 2) sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif semula Rp954.665.816,00 berkurang Rp242.731.121,00 menjadi Rp711.934.695,00;
- 3) sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Sebesar Rp1.105.243.800,00 tidak mengalami perubahan;
- 4) sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi tetap dari semula Rp82.518.520,00 berkurang Rp54.198.280,00 menjadi Rp28.320.240,00;
- 5) sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus semula Rp772.305.220,00 berkurang Rp27.062.240,00 menjadi Rp745.242.980,00;
- 6) sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat semula Rp94.217.160,00 berkurang Rp27.099.140,00 menjadi Rp67.118.020,00;
- 7) sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar semula Rp1.622.531.116,00 berkurang Rp114.537.425,00 menjadi Rp1.507.993.691,00;
- 8) sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) semula Rp2.293.605.711,00 bertambah Rp81.101.780,00 menjadi Rp2.374.707.491,00;
- 9) sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil semula Rp709.795.360,00 berkurang Rp27.099.140,00 menjadi Rp682.696.220,00;
- 10) sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin semula Rp324.969.620,00 bertambah Rp2.823.800,00 menjadi Rp327.793.420,00;
- 11) sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir semula Rp515.068.960,00 berkurang Rp37.103.540,00 menjadi Rp487.965.420,00; dan

- 12) sub kegiatan pelayanan kesehatan balita sebesar Rp113.553.900,00 tidak mengalami perubahan.

Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM Bidang Kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan Tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp22.844.884.251,00 berkurang sebesar Rp822.457.822,00 menjadi Rp22.022.426.429,00 atau 0,95% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.326.317.994.488,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:

- 1) kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota semula Rp9.844.395.882,00 berkurang Rp1.013.349.800,00 menjadi Rp8.831.046.082,00; dan
- 2) kegiatan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik semula Rp13.000.488.369,00 bertambah Rp325.694.652.631,00 menjadi Rp338.695.141.000,00.

Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 8.2.a.31 dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp3.894.041.210,00 bertambah Rp338.779.384.907,00 menjadi Rp342.673.426.117,00 atau 0,60% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp311.376.206.181,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota semula Rp302.234.840,00 bertambah Rp342.371.191.277,00 menjadi Rp342.673.426.117,00; dan
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota semula Rp3.591.806.370,00 bertambah Rp338.773.998.907,00 menjadi Rp342.365.805.277,00.

Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula Rp25.290.925.108,00 bertambah sebesar Rp977.721.977,00,00 menjadi Rp26.268.647.085,00 atau 18,37% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp142.995.939.710,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:

- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum semula Rp2.895.940.400,00 bertambah Rp56.270.204,00 menjadi Rp2.952.210.604,00,00;
- 2) pelayanan informasi rawan bencana semula Rp192.239.609,00 bertambah Rp19.071.171,00 menjadi Rp211.310.780,00;
- 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar Rp275.671.932,00 tidak mengalami perubahan;
- 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana semula Rp4.216.110.032,00 bertambah Rp105.603.402,00,00 menjadi Rp4.321.713.434,00,00;
- 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran semula Rp17.710.963.135,00 bertambah Rp796.777.200,00,00 menjadi Rp18.507.740.335,00.

Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM bidang Transibumlinmas maka Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Transibumlinmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula Rp5.840.611.197,00 bertambah Rp368.984.232.402,00 menjadi Rp374.824.843.599,00 atau 23,99% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Sosial Rp24.521.473.478,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:

- 1) kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti semula Rp1.407.294.927,00 berkurang Rp18.366.035,00 menjadi Rp1.388.928.892,00,00;
- 2) kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti semula Rp1.407.294.927,00 berkurang Rp18.366.035,00 menjadi Rp1.388.928.892,00;
- 3) kegiatan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti semula Rp1.407.294.927,00 berkurang Rp18.366.035,00 menjadi Rp1.388.928.892,00;
- 4) kegiatan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti semula Rp1.407.294.927,00 berkurang Rp18.366.035,00 menjadi Rp1.388.928.892,00;
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota semula Rp211.431.489,00 bertambah Rp115.623.340,00 menjadi Rp327.054.829,00.

Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM bidang Sosial Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi capaian SPM bidang Sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E. 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:
 - a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN1), dianggarkan semula Rp153.374.705.074,00 berkurang Rp112.237.468.933,00 menjadi Rp41.137.236.141,00 atau 0,34% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau;
 - b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2) dianggarkan Rp131.345.102.713,00 berkurang Rp43.401.192.398,00 menjadi Rp87.943.910.315,00 atau 0,74% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada Tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN3), dianggarkan semula Rp1.949.878.814.216,00 berkurang Rp1.172.199.890.483,00 menjadi Rp777.678.923.733,00 atau 6,41% dari total belanja daerah, yang diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM Tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial;

- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN4), dianggarkan semula Rp156.552.978.865,00 bertambah Rp658.125.414.442,00 menjadi Rp814.678.393.307,00 atau 6,71% dari total belanja daerah, yang diarahkan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian;
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5), dianggarkan semula Rp2.170.236.341.209,00 bertambah Rp541.022.458.755,00 menjadi Rp2.711.258.799.964,00 atau 22,34% yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur Tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut;
- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN6), dianggarkan semula Rp5.908.946.537,00 berkurang Rp174.182.523,00 menjadi Rp5.734.764.014,00 atau 0,05% dari total belanja, yang diarahkan pada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; dan
- g. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7), dianggarkan Rp1.932.047.971.838,00 berkurang Rp1.187.817.083.917,00 menjadi Rp744.230.887.921,00 atau 6,13% dari total belanja daerah, yang diarahkan pada pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerjasama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Serentak.

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Badung dengan Prioritas Pembangunan Nasional
pada RAPBD Perubahan Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Total Anggaran dalam APBD TA 2024 (Rp)	Total Anggaran dalam R Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Rasio Alokasi PN Perubahan terhadap Total Belanja daerah RAPBD P TA 2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan (PN1)	153.374.705.074,00	41.137.236.141,00	(112.237.468.933,00)	0,34
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Penguasaan (PN2)	131.345.102.718,00	87.943.910.315,00	(43.401.192.398,00)	0,72
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	1.949.878.814.216,00	777.078.923.733,00	(1.172.199.890.483,00)	6,41
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Keladayaan (PN4)	156.552.078.968,00	814.678.393.307,00	658.125.414.442,00	6,71
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	2.170.236.341.209,00	2.711.258.700.964,00	541.022.458.755,00	22,34
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	5.908.946.537,00	5.734.764.014,00	(174.182.523,00)	0,05
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	1.932.047.971.838,00	744.230.887.921,00	(1.187.817.083.917,00)	6,13
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	6.459.344.860.452,00	5.182.662.915.095,00	(1.316.681.945.057,00)	42,71
	Total Belanja Daerah	9.643.008.303.757,00	12.133.944.997.797,00	2.490.936.604.010,00	20,53

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar mencermati kembali dan mengupayakan untuk meningkatkan dukungan anggaran terhadap prioritas nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Badung sebesar 82,33%.

4. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 yang tertuang pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024, meliputi:
 - a. pertanian, kelautan, IKM UMKM, dan pariwisata;
 - b. pendidikan, IPTEK, dan kesehatan;
 - c. tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
 - d. adat, tradisi, seni, dan budaya;
 - e. lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
 - f. infrastruktur; dan
 - g. tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran dalam rangka Sinkronisasi terhadap prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi Tahun 2024

No.	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam APBD TA 2024 (Rp)	Total Anggaran dalam R. Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Bertambah/- Berkurang	Rasio Terhadap Total Belanja Daerah RAPBD P TA 2024
1.	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	236.684.115.747,00	149.727.481.942,00	(86.956.633.805,00)	1,23
2.	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2.789.022.913.463,00	5.421.901.539.953,00	2.632.878.646.490,00	44,58
3.	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	40.976.514.910,00	46.546.041.878,00	5.569.526.968,00	0,36
4.	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	181.484.534.045,00	1.046.488.334.265,00	865.003.800.220,00	8,62
5.	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	135.598.164.600,00	354.962.963.618,00	229.264.799.018,00	3,01
6.	Infrastruktur	2.109.070.310.580,00	2.843.729.333.669,00	734.659.023.089,00	23,44
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	2.122.017.634.630,00	2.207.017.046.939,00	84.999.412.309,00	18,19
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.614.954.187.975,00	12.080.372.762.264,00	4.465.418.574.289,00	99,56
	Total Belanja Daerah	9.643.008.303.787,00	12.133.044.907.797,00	2.490.036.604.010,00	

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyelaraskan program prioritas pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2024.

5. Pendanaan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan
Penyediaan anggaran untuk fungsi Pendidikan semula Rp1.948.215.526.305,00 atau 20,20% dari total belanja daerah Rp9.643.008.303.787,00 pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 bertambah menjadi Rp2.463.190.816.282,00 atau 20,30% dari total belanja daerah Rp12.133.944.907.797,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan uraian perhitungan Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan		Jumlah APBD TA 2024 (Rp)	Persentase dari total anggaran Pendidikan (%)	Jumlah RPAPBD TA 2024 (Rp)	Persentase dari total anggaran Pendidikan (%)
1	2		3	4	5	6
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan	1.580.333.971.939,00	81,12%	1.486.408.382.397,00	59,53%
		1) Belanja Operasi	1.103.888.635.846,00	56,66%	983.481.056.375,00	39,93%
		a)belanja pegawai	805.223.681.866,00	41,33%	697.987.521.216,00	28,34%
		b)belanja barang dan jasa	232.107.064.050,00	12,94%	227.210.288.987,00	9,22%
		c)belanja hibah	45.569.390.430,00	2,34%	57.583.246.172,00	2,34%
		d)belanja bantuan sosial	988.500.000,00	0,05%	700.000.000,00	0,03%
		2) Belanja Modal	476.445.336.093,00	24,46%	482.927.326.022,00	19,61%
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan	249.143.159.473,00	12,79%	746.402.784.621,00	30,30%
		1) Belanja Operasi	247.812.472.135,00	12,72%	681.216.160.583,00	27,66%
		a)belanja pegawai	17.789.675.181,00 ,00	0,91%	18.867.720.465,00	0,77%
		b)belanja barang dan jasa	114.064.600.954,00	5,85%	138.765.302.330,00	5,63%

1	2	3	4	5	6
	c)belanja hibah	115.958.196.000,00	5.95%	523.613.437.787,00	21.26%
	d)belanja bantuan sosial	-	0.00%	-	0.00%
c.	2) Belanja Modal	1.330.687.938,00	0.07%	65.156.324.038,00	2.65%
	Urusan Bidang Perpustakaan	25.543.597.723,00	1.31%	32.629.282.688,00	1.32%
	1) Belanja Operasi	25.519.730.836,00	1.31%	25.753.662.166,00	1.05%
	a) belanja pegawai	23.745.552.344,00	1.22%	23.745.552.344,00	0.98%
	b) belanja barang dan jasa	1.774.178.492,00	0.09%	2.008.109.822,00	0.08%
	c) belanja hibah	-	0.00%	-	0.00%
	d) belanja bantuan sosial	-	0.00%	-	0.00%
d.	2) Belanja Modal	23.866.887,00	0.00%	6.869.620.522,00	0.28%
	Urusan Bidang Kemudahan dan Olahraga	50.233.649.827,00	2.58%	64.411.839.742,00	2.61%
	1) Belanja Operasi	44.953.022.027,00	2.31%	49.089.506.181,00	1.99%
	a) belanja pegawai	-	0.00%	-	0.00%
	b) belanja barang dan jasa	29.591.678.169,00	1.52%	30.799.293.369,00	1.25%
	c) belanja hibah	15.361.343.858,00	0.79%	18.290.212.812,00	0.74%
	d) belanja bantuan sosial	-	0.00%	-	0.00%
e.	2) Belanja Modal	5.280.627.800,00	0.27%	15.322.333.561,00	0.62%
	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kemudahan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	42.961.147.343,00	2.21%	153.344.526.834,00	6.23%
	1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intern Pemerintah Daerah	39.702.112.243,00	2.04%	90.992.906.355,00	3.69%
	2) Sub Kegiatan Pembentukan Pasukabraka	3.259.035.100,00	0.17%	3.309.467.100,00	0.13%
	3) Analisis Perencanaan dan Penyuluhan Bantuan Keuangan	-	0.00%	59.042.163.379,00	2.40%
2.	Anggaran Pungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	1.948.215.526.305,00	20.20%	2.463.190.816.282,00	20.30%
3.	Total Belanja Daerah	9.643.008.303.787,00		12.133.944.907.797,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20.20%		20.30%	

Berdasarkan Tabel 7 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E. 1 a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Badung sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyediaan Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut, dialokasikan untuk:

- 1) program pada urusan bidang pendidikan yang antara lain diuraikan pada program pengelolaan pendidikan Rp761.169.086.845,00 atau 32,71% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 2) program pada urusan bidang kebudayaan antara lain diuraikan pada:
 - a) program pengembangan kebudayaan Rp204.507.598.322,00 atau 8,79% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - b) program pembinaan sejarah Rp10.794.605.340,00 atau 0,44% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - c) program pengelolaan permuseuman Rp66.158.314.162,00 atau 2,84% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - d) program pengembangan kesenian tradisional Rp77.464.978.922,00 atau 3,32% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
 - e) program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Rp365.322.863.506,00 atau 15,70% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 3) program pada urusan kepemudaan dan olahraga diuraikan pada:
 - a) program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Rp61.272.465.576,00 atau 2,63% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - b) program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Rp949.641.556,00 atau 0,04% total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
 - c) program pengembangan kapasitas kepramukaan Rp2.189.732.610,00 atau 0,09% total anggaran untuk fungsi pendidikan.

4) program pada urusan keperpustakaan antara lain diuraikan pada:

- a) program pembinaan perpustakaan Rp7.413.151.307,00 atau 0,32% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
- b) program Pengelolaan Arsip menjadi Rp554.009.072,00 atau 0,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan Anggaran kesehatan dialokasikan semula Rp1.208.024.357.808,00 atau 16,79% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN Rp7.196.621.922.460,00 pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 bertambah menjadi Rp1.253.952.425.940,00 atau 12,83% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN Rp9.773.591.891.494,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan Alokasi anggaran Kesehatan antara lain tercantum pada:

- 1) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rp601.858.849.826,00 atau 47,99% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan;
- 2) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rp10.686.439.288,00 atau 0,85% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan;
- 3) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Rp590.103.572,00 atau 0,05% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan; dan
- 4) program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Rp2.229.607.612,00 atau 0,18% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - a) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - c) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care);
 - d) konsumsi TTD ibu hamil;
 - e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (*baduta*);
 - i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering*, *utastibig*, dan *stunting*);
 - j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
 - a) tuberkulosis (TBC);
 - b) HIV;
 - c) malaria; dan
 - d) penyakit menular lainnya.
- 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
 - a) diabetes melitus;
 - b) hipertensi; dan
 - c) penyakit tidak menular lainnya.
- 5) penguatan jejaring pelayanan primer, melalui pemenuhan:
 - a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - b) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
 - c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);

- d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uro neurology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
- a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - b) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
 - c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uro neurology);
 - d) tenaga kesehatan di labkesda;
 - e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
 - f) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Badung secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E. 1.b. Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Perhitungan Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	Jumlah R-PAPBD TA 2024 (Rp)
1	Total Belanja Daerah	9.643.008.303.787,00	12.133.914.907.797,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a) belanja bagi hasil	894.386.660.239,00	1.268.041.922.490,00
	b) belanja bantuan keuangan	698.663.051.388,00	1.260.306.687.984,00
	Jumlah (a+b)	1.593.049.701.627,00	2.528.348.610.474,00
3	Selisih (1-2)	8.049.958.602.160,00	9.605.596.297.323,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% X Selisih)	3.219.983.440.864,00	3.842.238.518.929,20

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	Jumlah R-PAPBD TA 2024 (Rp)
1	a) Belanja Modal	2.108.154.868.789,00	2.567.102.517.126,00
	1) Tanah	418.938.280.645,00	618.455.576.245,00
	2) Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00	386.266.840.935,00
	3) Bangunan dan Gedung	637.629.788.504,00	676.483.376.984,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	821.569.087.712,00	870.941.881.451,00
	5) Aset tetap lainnya	13.691.237.806,00	14.563.566.511,00
	6) Aset lainnya	387.735.000,00	391.275.000,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.685.969.650,00	1.826.979.857,00
	c) Belanja pemeliharaan	120.665.052.185,00	129.937.666.091,00
2	a) Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00	2.581.876.828.930,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	838.000.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	3.713.764.531.012,00	5.281.581.992.007,00
Persentase belanja infrastruktur Daerah terhadap Minimal Belanja Infrastruktur Publik		46%	55%

Berdasarkan Tabel 8 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik semula Rp3.713.764.531.012,00 bertambah menjadi Rp5.281.581.992.007,00 atau 55% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Terhadap komponen perhitungan belanja hibah dan bansos pada Tabel 8 agar memperhitungkan belanja hibah dan bantuan sosial yang berkaitan dengan infrastruktur berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas publik, untuk itu agar disesuaikan.

Pemerintah Kabupaten Badung harus tetap mengupayakan pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana maksud butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung semula Rp41.992.196.861,00 bertambah Rp5.729.879.914,00 menjadi Rp47.722.076.775,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) alokasi belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat semula Rp9.456.068.460,00 bertambah Rp185.737.590,00 menjadi Rp9.641.806.050,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; dan
- 2) alokasi belanja Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp32.536.128.401,00 bertambah Rp5.544.142.324,00 menjadi Rp38.080.270.725,00 atau 0,31% dari total belanja daerah,

yang antara lain tercantum pada program yang mendukung pengawasan yaitu:

- 1) program penyelenggaraan pengawasan semula Rp1.029.393.390,00 bertambah Rp70.254.500,00 menjadi Rp1.699.647.890,00; dan
- 2) program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dianggarkan semula Rp2.702.547.182,00 bertambah Rp4.551.910.072,00 menjadi Rp7.254.457.254,00.

Kabupaten Badung belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b. *review* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- c. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- d. *review* laporan keuangan;
- e. kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probitiy audit*, *review* laporan kinerja, *review* LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f. sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis *output* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan

g. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, oprasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan *investigatif*, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran yang tercantum pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp18.984.768.461,00 bertambah Rp1.618.675.915,00 menjadi Rp20.603.444.376,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada kegiatan:

- 1) kegiatan pengembangan kompetensi teknis semula Rp5.038.880.000,00 bertambah Rp1.801.448.000,00 menjadi Rp7.240.631.000,00; dan
- 2) kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional semula Rp2.617.495.000,00 berkurang Rp60.371.000,00 menjadi Rp2.557.124.000,00.

Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja

daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting*.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran penurunan *prevalensi* kekurangan (*underweight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi stunting* (kurus) pada anak balita semula Rp919.302.117.301,00 bertambah Rp18.600.610.619,00 menjadi Rp937.902.727.920,00 atau 7,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang antara lain tercantum pada:

- 1) sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Rp564.746.220,00 antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja bahan lainnya Rp418.788.000,00;
- 2) sub kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional Rp3.909.658.620,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.244.833.920,00, Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp685.000.000,00, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp843.700.000,00;
- 3) sub kegiatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan Rp12.299.993.035,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp12.294.265.000,00;
- 4) sub kegiatan fasilitasi tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp9.097.483.916,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.232.931.200,00, Belanja Belanja Bimbingan Teknis Rp500.000.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (baju alat bali) Rp125.000.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata

Rp211.789.900,00 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp152.250.000,00; dan

- 5) sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah Rp196.986.271.532,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (*upakara pemelaspas*) Rp534.300.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp151.843.533.263,00.

Uraian belanja pada sub-sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* serta memprioritaskan alokasi belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta berpedoman butir E.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Alokasi anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan Ekstrem Rp910.475.490.195,00 bertambah Rp25.777.707.135,00 menjadi Rp936.253.200.000,00 atau 7,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang antara lain tercantum pada:

- 1) sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha Tani Rp17.394.045.791,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Lainnya Rp7.515.000.000,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.678.961.891,00, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.057.500.000,00;

- 2) sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Rp266.558.558.157,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Lainnya Rp258.825.690.877,00;
- 3) sub kegiatan fasilitasi tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp3.097.483.916,00,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.232.931.200,00, Belanja Belanja Bimbingan Teknis Rp500.000.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (baju adat bali) Rp125.000.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cindramata Rp211.789.900,00 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp152.250.000,00;
- 4) sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Rp118.465.383.816,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 Rp111.132.000.000,00; dan
- 5) sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah Rp196.986.271.532,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp151.843.533.263,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp534.300.000,00.

Uraian belanja pada sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila dirinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.l.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Alokasi Anggaran dalam rangka pengendalian inflasi di daerah

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengendalian inflasi di daerah semula Rp45.294.244.430,00 bertambah Rp1.913.406.499,00 menjadi Rp47.207.650.929,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain dianggarkan pada:

- 1) sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap Rp1.542.567.064,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp1.248.600.000,00, Belanja Modal Mesin Proses Apung Rp169.125.000,00;
- 2) sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Rp9.325.628.250,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp1.815.356.290,00, Belanja Subsidi kepada BUMN (padi In Hibrida) Rp5.281.200.000,00, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp996.025.200,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp176.300.000,00, Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp407.958.300,00, Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp440.000.000,00;
- 3) sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp17.394.045.791,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.057.500.000,00, Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.678.961.891,00, dan Belanja Modal Jalan Lainnya Rp7.515.000.000,00;
- 4) sub kegiatan penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota Rp2.756.686.883,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp2.321.874.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp191.680.000,00, dan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp101.400.000,00; dan
- 5) sub kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Rp1.512.413.348,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp365.030.954,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp853.272.000,00.

Uraian belanja pada sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir c.l.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi pemerintah Kabupaten Badung agar tetap fokus terhadap pengendalian inflasi antara lain:

- (1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
- (2) pengendalian laju alih fungsi lahan;
- (3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
- (4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan
- (5) pengawasan harga dan operasi pasar,

sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.c) dan butir E.2.ad.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

d. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran TP-PKK semula Rp3.145.778.116,00 berkurang Rp48.294.200,00 menjadi Rp3.097.483.916,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga *anti trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan

pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil), Melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan
 - f) pendidikan dan kecetrampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkolaborasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/ kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan

berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran untuk Forkompinda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp90.532.900,00 bertambah Rp28.889.376.898,00 menjadi Rp28.979.909.798,00 atau 0,24% dari total Belanja Daerah.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain tercantum pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir E.2.v.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran untuk FKUB semula Rp2.909.055.932,00 berkurang Rp134.725.932,00 menjadi Rp2.774.330.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran yang ada untuk tetap mengoptimalkan dan menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Badung.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam APBD.

- g. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp399.309.016.840,00 atau 9,37% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.261.759.931.766,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 belum memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang

Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan alokasi anggaran dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda (Paskibraka)

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Badan Kesatuan Bangsa semula Rp5.362.215.502,00 bertambah Rp50.432.000,00 menjadi Rp5.412.647.502,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka sebagaimana maksud butir E.2.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- i. Alokasi anggaran dalam rangka Peningkatan Investasi

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan investasi semula Rp11.852.470.780,00 bertambah Rp2.619.717.145,00 menjadi Rp14.472.187.925,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain dianggarkan pada:

- 1) sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri Rp2.685.432.600,00;
- 2) sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota sebesar Rp10.770.131.325,00;

- 3) sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri Rp547.213.200,00;
- 4) sub kegiatan pengawasan penanaman modal Rp40.877.800,00;
- 5) sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha Rp293.713.200,00; dan
- 6) sub kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Rp134.819.800,00.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tetap mengarah kepada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama peningkatan investasi antara lain:

- 1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS); dan
- 2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia,

sebagaimana ditegaskan pada butir C.1.m.2).d) dan butir E.2.ad.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp5.869.717.700,125,00 bertambah sebesar Rp1.093.776.080.072,00 atau 18,63% menjadi sebesar Rp6.963.493.780.197,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai semula Rp2.446.386.381.327,00 berkurang sebesar Rp86.033.365.024,00 atau 3,52% menjadi Rp2.360.353.016.303,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar

Rp2.255.078.668.303 atau 18,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus tetap konsisten dalam pengalokasian belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp982.354.945.962,00 berkurang Rp29.039.667.028,00 atau 2,96% menjadi Rp953.315.278.934,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir C.3.a. 1).h).(1), butir C.3.a. 1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
2. Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:
 - a) belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) belanja iuran jaminan kesehatan ASN semula Rp59.134.928.665,00 bertambah Rp2.236.471.204,00 atau 3,78% menjadi Rp61.371.399.869,00 sebagaimana Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No.	Komponen Perhitungan	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
1.	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	699.435.377.850,00	667.202.194.342,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62.591.563.062,00	68.972.895.286,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.982.010.066,00	7.032.811.966,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.891.051.784,00	48.585.076.234,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.991.696.845,00	9.358.520.380,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.112.036.439.787,00	1.048.620.147.766,00
2.	Jumlah Belanja	1.932.928.139.414,00	1.849.771.645.974,00
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	77.317.125.576,56	73.990.865.838,96
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada P APBD	59.134.928.665,00	61.371.399.869,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(18.182.196.911,56)	(12.619.465.969,96)

Berdasarkan tabel 9 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp73.990.865.838,96 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp12.619.465.969,96.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

(2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD semula Rp103.211.684,00 tidak mengalami perubahan yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 10 sebagai berikut;

Tabel 10
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No.	Komponen Perhitungan	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
1.	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	932.190.000,00	932.190.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	116.209.800,00	157.206.300,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.351.675.500,00	1.351.675.500,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.366.950,00	151.366.950,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00
2.	Jumlah Belanja	2.551.442.250,00	2.612.438.750,00
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	102.057.690,00	104.497.550,00
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	103.211.684,00	103.211.684,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	1.153.994,00	(1.285.866,00)

Berdasarkan Tabel 10 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp104.497.550,00 atau terdapat selisih kurang Rp1.285.866,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH semula sebesar Rp11.520.000,00 tidak mengalami perubahan, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)
1.	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.425.000,00	61.425.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.158.468,00	9.158.468,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	110.565.000,00	110.565.000,00
2.	Jumlah Belanja	181.148.468,00	181.148.468,00
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	7.245.938,72	7.245.938,72
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	11.520.000,00	11.520.000,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	4.274.061,28	4.274.061,28

Berdasarkan Tabel 11 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a. 1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(4) belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada:

(a) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

1) belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN semula sebesar Rp1.460.673.303,00 bertambah sebesar Rp86.372.819,00 atau 5,91% menjadi Rp1.547.046.122,00; dan

- 2) belanja iuran jaminan kematian ASN semula Rp3.999.085.475,00 bertambah sebesar Rp223.584.183,00 atau 5,59% menjadi Rp3.999.085.475,00,

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

- (a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp1.601.285.266,42 atau terdapat selisih kurang Rp54.239.144,42; dan
(b) belanja iuran jaminan kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp4.803.855.799,26 atau terdapat selisih kurang Rp804.770.324,26.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (5) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

- 1) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp200.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 2) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp400.000,00 tidak mengalami perubahan;
- 3) belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00 tidak mengalami perubahan; dan
- 4) belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp12.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(6) hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah, antara lain:

a) belanja gaji dan tunjangan DPRD semula Rp45.375.656.934,00 berkurang sebesar Rp4.333.326.250,00 atau 9,55% menjadi Rp41.042.330.684,00, yaitu:

(1) belanja uang representasi DPRD semula Rp932.190.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 atau 2,15% menjadi Rp952.190.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Uang Representasi DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan Perubahan APBD TA 2024			
	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3.	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	37	1.575.000,00	58.275.000,00
4.	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	40	5.355.000,00	63.735.000,00
5.	Uang representasi x 14 Bulan (Januari-Desember)			892.290.000,00
Penambahan DPRD Baru (Pejabatikan Bulan Agustus)				
6.	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	1	1.680.000,00	1.680.000,00
7.	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	4	1.575.000,00	6.300.000,00
8.	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	5	3.255.000,00	7.980.000,00
9.	Uang representasi x 5 Bulan (Agustus-Desember)			39.900.000,00
10.	Total Uang Representasi	45		932.190.000,00
11.	Alokasi Uang Representasi pada R-PAPBD TA 2024			952.190.000,00
Selisih (angka 11- angka 10)				20.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.351.675.500,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% dari uang representasi.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (8) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD semula Rp151.366.950,00 bertambah sebesar Rp26.851.250,00 atau 17,74% menjadi Rp178.218.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula Rp8.570.100.000,00 berkurang sebesar Rp1.146.600.000,00 atau 13,38% menjadi Rp7.423.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 13 sebagai berikut;

Tabel 13
Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	40	14.700.000,00	7.056.000.000,00
2	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 5 Bulan	5	14.700.000,00	367.500.000,00
3	Total Tunjangan Komunikasi Intensif	45	14.700.000,00	7.423.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD TA 2024			7.423.500.000,00
3	Selisih (angka 2 - angka 1)			-

Berdasarkan Tabel 13 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebesar Rp7.423.500.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan secara terus menerus dalam konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (10) belanja tunjangan reses DPRD semula Rp1.852.200.000,00 berkurang sebesar Rp602.700.000,00 atau 32,54% menjadi Rp1.249.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 14 sebagai berikut;

Tabel 14
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD tinggi) Periode Lama	40	14.700.000,00	588.000.000,00
2.	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD tinggi) Periode Baru	45	14.700.000,00	661.500.000,00
3.	Total Tunjangan Reses			1.249.500.000
4.	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD TA 2024			1.249.500.000
	Selisih (angka 2 - angka 1)			-

Berdasarkan Tabel 14 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebesar Rp1.249.500.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mempertahankan secara terus menerus dalam konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(11) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja:

- (a) belanja tunjangan perumahan DPRD semula Rp22.305.600.000,00 berkurang sebesar Rp2.775.000.000,00 atau 12,44% menjadi Rp19.530.600.000,00;
- (b) belanja tunjangan transportasi DPRD semula Rp9.361.200.000,00 berkurang sebesar Rp948.600.000,00 atau 10,13% menjadi Rp8.412.600.000,00; dan

(c) belanja uang jasa pengabdian DPRD semula Rp382.410.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 atau 7,84% menjadi Rp412.410.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- (12) penyediaan anggaran belanja dana operasional Pimpinan DPRD semula Rp372.960.000,00 berkurang sebesar Rp26.880.000,00 atau 7,21% menjadi Rp346.080.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 15 sebagai berikut;

Tabel 15
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2024		Jumlah (Rp)
1.	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 Bulan	12.600.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD Lama	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	13.440.000,00
2.	Penambahan Wakil Ketua DPRD Baru	2,5 x 1 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	6.720.000,000
3.	Jumlah Dana Operasional		346.080.000,00
4.	Alokasi Dana Operasional pada APBD		346.080.000,00
5.	Selisih (angka 4 - angka 3		-

Berdasarkan Tabel 15 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebesar Rp346.080.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (13) belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp19.321.523.822,00 bertambah sebesar Rp6.446.893.997,00 atau 50,07% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp12.874.629.825,00 dapat dianggarkan dengan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp15.429.080.636,95.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah namun belum mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah.

(14) tambahan penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.048.620.147.766,00 berkurang sebesar Rp63.416.292.021,00 atau 5,70% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.112.036.439.787,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp615.508.410.919,00 berkurang sebesar Rp4.695.970.268,00 atau 0,76% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 Rp620.204.381.187,00;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Rp58.955.493.552,00 berkurang sebesar Rp9.172.534.589,00 atau 13,46% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 Rp68.128.028.141,00;
- c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp383.397.872,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;

- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp373.772.845.423,00 berkurang sebesar Rp49.547.787.164,00 atau 11,70% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 Rp423.320.632.587,00;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp251.100.826.849,00 berkurang sebesar Rp10.126.727.722,00 atau 3,88% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp261.227.554.571,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Badung dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Badung juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.1).h).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- f. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp93.035.339.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024;
- g. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp4.166.009.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.5).a).(5).(e).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

h. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN semula Rp568.691.200,00 bertambah sebesar Rp470.310.400,00 atau 82,70% menjadi Rp1.039.001.600,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

- (15) belanja honorarium semula Rp1.193.280.000,00 bertambah Rp50.700.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (16) belanja pegawai BOSP
Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BOSP semula Rp12.600.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

- (17) belanja pegawai BLUD
Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD semula Rp30.334.142.706,00 bertambah Rp14.462.634.000,00 atau 47,68% menjadi Rp44.796.776.706,00.
Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang/Jasa semula Rp1.933.659.478.710,00 bertambah sebesar Rp80.353.256.254,00 menjadi Rp2.014.012.734.964,00 atau 4,16% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahteruskan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

- 1) belanja barang semula Rp426.162.091.106,00 bertambah sebesar Rp47.432.920.747,00 menjadi Rp473.595.011.853,00 atau 11,13% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) belanja barang pakai habis semula Rp125.803.278.611,00 bertambah sebesar Rp47.379.779.497,00 menjadi Rp473.183.058.108,00 atau 11,13% yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak semula Rp16.137.611.163,00 bertambah sebesar Rp1.004.695.045,00 atau 6,23% menjadi Rp17.142.306.208,00;
 - (2) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik semula Rp18.482.293.194,00 bertambah sebesar Rp5.592.966.141,00 atau 30,26% menjadi Rp24.075.259.335,00;
 - (3) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas semula Rp31.654.873.129,00 bertambah sebesar Rp1.908.158.418,00 atau 6,03% menjadi Rp33.563.031.547,00;

- (4) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya semula Rp21.857.574.350,00 bertambah sebesar Rp2.349.567.940,00 atau 10,75% menjadi Rp24.207.142.290,00;
- (5) belanja obat-obatan-obat semula Rp33.214.239.267,00 bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 27,10% menjadi Rp42.214.239.267,00;
- (6) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat semula Rp65.219.333.346,00 bertambah sebesar Rp5.101.842.359,00 atau 7,82% menjadi Rp70.321.175.705,00;
- (7) belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya semula Rp107.435.000,00 berkurang sebesar Rp103.435.000,00 atau 96,28% menjadi Rp4.000.000,00;
- (8) belanja makanan dan minuman rapat semula Rp22.910.408.225,00 bertambah sebesar Rp11.738.556.675,00 atau 51,24% menjadi Rp34.648.964.900,00;
- (9) belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan semula Rp271.880.000,00 berkurang sebesar Rp214.150.000,00 atau 78,77% menjadi Rp57.730.000,00; dan
- (10) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan semula Rp15.592.869.582,00 bertambah sebesar Rp1.737.791.847,00 atau 11,14% menjadi Rp17.330.661.429,00.

b) belanja barang tak pakai habis semula Rp358.812.495,00 bertambah sebesar Rp53.141.250,00 menjadi Rp411.953.745,00 atau 14,81% yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) belanja komponen-komponen rambu-rambu sebesar Rp159.562.500,00 tidak mengalami perubahan; dan
- (2) belanja pipa-pipa lainnya semula Rp199.249.995,00 bertambah sebesar Rp53.141.250,00 atau 26,67% menjadi Rp252.391.245,00.

Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).2).c).(1).(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebagaimana butir 1).a).(22) dan butir 1).a).(23) di atas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) belanja jasa semula Rp896.373.903.740,00 berkurang sebesar Rp28.699.484.937,00 atau 3,20% menjadi Rp867.674.418.803,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) belanja jasa kantor semula Rp643.496.029.200,00 berkurang sebesar Rp24.913.476.857,00 atau 3,87% menjadi Rp618.582.552.343,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja jasa tenaga pendidikan semula Rp85.757.932.800,00 berkurang Rp11.710.896.000,00 atau 13,66% menjadi Rp74.047.036.800,00;
 - (2) belanja jasa tenaga kesehatan semula Rp25.722.537.760,00 berkurang Rp13.719.825.000,00 atau 53,34% menjadi Rp12.002.712.760,00;
 - (3) belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum semula Rp33.147.002.440,00 bertambah Rp870.743.940,00 atau 2,63% menjadi Rp34.017.746.380,00;
 - (4) belanja jasa tenaga administrasi semula Rp100.461.035.880,00 berkurang Rp5.303.989.795,00 atau 5,28% menjadi Rp95.157.046.085,00;
 - (5) belanja jasa tenaga ahli semula Rp23.982.380.525,00 bertambah Rp1.234.474.664,00 atau 5,15% menjadi Rp25.216.855.189,00;

- (6) belanja jasa penyelenggaraan acara semula Rp9.351.886.219,00 bertambah Rp5.770.647.500,00 atau 61,71% menjadi Rp15.122.533.719,00;
- (7) belanja jasa pengolahan sampah semula Rp8.772.192.256,00 berkurang Rp7.609.082.256,00 atau 86,74% menjadi Rp1.163.110.000,00;
- (8) belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan semula Rp20.249.444.044,00 bertambah Rp4.640.030.250,00 atau 22,91% menjadi Rp24.889.474.294,00; dan
- (9) belanja penambahan daya semula Rp2.697.253.310,00 bertambah Rp1.288.440.298,00 atau 47,77% menjadi Rp3.985.693.608,00.

Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b) Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja iuran jaminan/asuransi Rp138.990.505.594,00 berkurang sebesar Rp9.834.594.496,00 atau 6,61% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.825.100.090,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Badung agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran

PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Keptsertaan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Badung tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(d). dan butir C.3.a.2).c).(2).(e). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa tanah sebesar Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
- d) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin semula Rp50.263.569.892,00 bertambah sebesar Rp8.308.691.489,00 atau 16,53% menjadi Rp58.572.261.381,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) belanja sewa excavator semula Rp1.058.090.000,00 bertambah sebesar Rp291.375.000,00 atau 27,54% menjadi Rp1.349.465.000,00;
 - (2) belanja sewa alat besar darat lainnya semula Rp11.358.958.560,00 bertambah sebesar Rp644.160.000,00 atau 5,67% menjadi Rp12.003.118.560,00;
 - (3) belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan semula Rp15.368.605.184,00 bertambah sebesar Rp6.497.810.085,00 atau 42,28% menjadi Rp21.866.415.269,00;
 - (4) belanja sewa kendaraan bermotor penumpang semula Rp15.497.350.000,00 bertambah sebesar Rp257.582.794,00 atau 1,66% menjadi Rp15.754.932.794,00; dan
 - (5) belanja sewa mebel semula Rp1.008.524.385,00 bertambah sebesar Rp427.455.500,00 atau 42,38% menjadi Rp1.435.979.885,00.
- e) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp5.674.041.591,00 berkurang sebesar Rp83.100.000,00 atau 1,49% menjadi Rp5.590.941.591,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) belanja sewa bangunan gedung kantor semula Rp4.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.000.000,00 atau 300,00% menjadi Rp16.000.000,00;
 - (2) belanja sewa bangunan gudang sebesar Rp180.000.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - (3) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan semula Rp1.502.475.000,00 berkurang sebesar Rp13.700.000,00 atau 0,91% menjadi Rp1.488.775.000,00;
 - (4) belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga semula Rp80.149.000,00 berkurang sebesar Rp13.500.000,00 atau 16,84% menjadi Rp66.649.000,00;

- (5) belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya semula Rp1.729.574.600,00 bertambah sebesar Rp160.000.000,00 atau 9,25% menjadi Rp1.889.574.600,00;
 - (6) belanja sewa lahan semula Rp1.208.082.991,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 atau 2,07% menjadi Rp1.233.082.991,00;
 - (7) belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp17.300.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - (8) belanja sewa hotel semula Rp857.460.000,00 berkurang sebesar Rp252.900.000,00 atau 29,49% menjadi Rp604.560.000,00; dan
 - (9) belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp95.000.000,00.
- f) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa aset tetap lainnya semula Rp2.225.097.000,00 bertambah sebesar Rp130.900.000,00 atau 5,88% menjadi Rp2.355.997.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) belanja sewa audio visual sebesar Rp253.080.000,00 tidak mengalami perubahan;
 - (2) belanja sewa alat peraga kesenian semula Rp441.400.000,00 berkurang sebesar Rp9.500.000,00 atau 2,15% menjadi Rp431.900.000,00;
 - (3) belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya semula Rp1.325.045.000,00 bertambah sebesar Rp139.375.000,00 atau 10,52% menjadi Rp1.464.420.000,00; dan
 - (4) belanja sewa tanaman semula Rp205.572.000,00 bertambah sebesar Rp1.025.000,00 atau 0,50% menjadi Rp206.597.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

g) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) belanja jasa konsultasi konstruksi semula Rp10.109.891.892,00 berkurang sebesar Rp389.948.732,00 atau 3,86% menjadi Rp9.719.943.160,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- (2) belanja jasa konsultasi non konstruksi semula Rp14.572.534.251,00 berkurang sebesar Rp1.869.067.050,00 atau 12,83% menjadi Rp12.703.467.201,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

- (3) belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) semula Rp1.685.969.650,00 bertambah sebesar Rp141.010.207,00 atau 8,36% menjadi Rp1.826.979.857,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

Penganggaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(2).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (4) belanja beasiswa pendidikan PNS semula Rp392.000.000,00 berkurang sebesar Rp392.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- (5) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan semula Rp19.004.470.174,00 bertambah sebesar Rp102.300.502,00 atau 0,54% menjadi Rp19.106.770.676,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- (6) belanja sewa aset tidak berwujud semula Rp75.200.000,00 bertambah sebesar Rp99.800.000,00 atau 132,71% menjadi Rp175.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Badung.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten. Sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(2).i).ii dan butir C.3.a.2).c).(2).i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan, penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(2).i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 3) belanja pemeliharaan semula Rp120.665.052.485,00 bertambah sebesar Rp9.272.613.609,00 atau 7,68% menjadi Rp129.937.666.094,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin semula Rp67.873.657.637,00 bertambah Rp2.122.752.667,00 atau 3,13% menjadi Rp70.001.410.304,00;
 - b) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan semula Rp27.441.963.012,00 bertambah Rp6.779.199.362,00 atau 24,70% menjadi Rp34.221.162.374,00;
 - c) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp25.300.600.336,00 bertambah sebesar Rp206.990.000,00 atau 0,82% menjadi Rp25.507.590.336,00;
 - d) belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp25.350.000,00 tidak mengalami perubahan; dan
 - e) belanja pemeliharaan aset tidak berwujud semula Rp18.481.500,00 bertambah sebesar Rp163.671.580,00 atau 885,60% menjadi Rp182.153.080,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir C.3.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 4) belanja perjalanan dinas Rp138.057.838.480,00 bertambah sebesar Rp30.537.454.990,00 atau 28,40% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp107.520.383.490,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rincian objek belanja:
- a) perjalanan dinas dalam negeri Rp127.205.454.830,00 bertambah sebesar Rp26.950.873.940,00 atau 26,88% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.254.578.890,00; dan
 - b) belanja perjalanan dinas luar negeri Rp10.852.383.650,00 bertambah sebesar Rp3.586.579.050,00 atau 49,36% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.265.804.600,00.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan

Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a. Sekretariat Daerah sebesar Rp16.670.897.800,00 atau 1,44% dari total belanja pada Sekretariat Daerah; dan
- b. Sekretariat DPRD sebesar Rp45.563.189.480,00 atau 22,37% dari total belanja pada Sekretariat DPRD.

Mengingat Pemerintah Kabupaten Badung belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kesehatan, alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dan Jaminan Kesehatan DPRD, Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori pengawasan dan pemenuhan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja serta mengoptimalkan dan/atau meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar SPM, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, optimalisasi bidang perhubungan untuk mengatasi kemacetan serta mendukung kegiatan pada event-event internasional, dan dukungan anggaran untuk mendukung prioritas nasional, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp169.552.058.735,00 bertambah sebesar Rp28.109.596.660,00 atau 19,87% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp141.442.462.075,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp24.055.926.000,00 bertambah sebesar Rp6.850.200.000,00 atau 39,81% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.205.726.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp5.535.426.000,00 bertambah sebesar Rp242.200.000,00 atau 4,58% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.293.226.000,00; dan

- (2) belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp18.520.500.000,00 bertambah sebesar Rp6.608.000.000,00 atau 17,11% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.912.500.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- b) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp145.496.132.735,00 bertambah sebesar Rp21.259.396.660,00 atau 17,11% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.236.736.075,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Rp35.504.885.735,00 bertambah sebesar Rp2.387.962.660,00 atau 7,21% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.116.923.075,00; dan

- (2) belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat Rp109.991.247.000,00 bertambah sebesar Rp18.871.434.000,00 atau 20,71% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.119.813.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, uang yang diberikan kepada RT atau

dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(5).(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp36.983.563.476,00 bertambah sebesar Rp36.983.563.476,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).(ii). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 7) belanja barang dan jasa BOSP semula Rp80.474.026.243,00 berkurang sebesar Rp53.964.322.189,00 atau 66,31% menjadi Rp27.109.704.054,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 8) belanja barang dan jasa BOK Puskesmas semula Rp8.047.076.800,00 berkurang sebesar Rp12.237.400,00 atau 5,12% menjadi Rp7.634.839.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- 9) belanja barang dan jasa BLUD semula Rp152.974.482.771,00 bertambah sebesar Rp10.493.151.298,00 atau 6,86% menjadi Rp163.467.634.069,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

9. Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebesar Rp6.413.200.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) belanja subsidi kepada BUMN semula Rp5.281.200.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) belanja subsidi kepada BUMD semula Rp500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- 3) belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta semula Rp632.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Belanja Subsidi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal, belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Kabupaten Badung harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud butir C.3.a.4).(i) dan butir C.3.a.4).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

10. Belanja Hibah

Belanja Hibah semula Rp1.482.132.140.088,00 bertambah sebesar Rp1.099.744.688.842,00 atau 74,20% menjadi Rp2.581.876.828.930,00 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) belanja hibah kepada pemerintah pusat semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp141.628.774.491,00 atau 100,00% menjadi Rp141.628.774.491,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) belanja hibah kepada pemerintah daerah Lainnya semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp128.588.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp128.588.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 3) belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp1.467.293.836.658,00 bertambah sebesar Rp816.222.408.761,00 atau 55,63% menjadi Rp2.283.516.245.419,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- 4) belanja hibah dana BOS semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp14.196.100.190,00 atau 100,00% menjadi Rp14.196.100.190,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).(ii). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial semula Rp1.126.500.000,00 berkurang sebesar Rp288.500.000,00 atau 25,61% menjadi Rp838.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 16, sebagai berikut:

Tabel 16
Tren Belanja Bantuan Sosial Terhadap Belanja Dacrah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Persentase (%)	Total Belanja Dacrah	Persentase (%)
APBD TA 2021	27.234.000.000,00	0,00	0,00	3.268.403.627.706,00	0,83
APBD TA 2022	27.337.700.000,00	953.500.000,00	3,52	3.828.075.978.390,00	0,73
APBD TA 2023	276.500.000,00	272.000.000,00	98,37	8.542.741.852.056,00	0,00
RP-APBD TA 2024	838.000.000,00	569.000.000,00 (s.d Juli)	67,90	12.133.944.907.797,00	0,01

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta butir C.3.a.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Badung sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan dacrah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Dacrah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp4.048.710.000,00 berkurang sebesar Rp890.594.600,00 atau 22,00% menjadi Rp3.158.115.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Badung mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota, sebagaimana maksud butir C.a.5).d).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Badung agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Badung belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti belum memenuhi alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00, alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kesehatan, alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, mengalokasikan anggaran untuk mendukung event-event internasional serta belanja wajib dalam penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

12. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp2.108.154.868.789,00 bertambah sebesar Rp458.947.648.337,00 atau 21,77% menjadi Rp2.567.102.517.126,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula Rp418.938.280.645,00 bertambah sebesar Rp199.517.295.600,00 atau 47,62% menjadi Rp618.455.576.245,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja Modal Tanah sebesar Rp618.455.576.245,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp215.938.739.122,00 bertambah sebesar Rp170.328.101.813,00 atau 78,88% menjadi Rp386.266.840.935,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) belanja modal alat besar semula Rp26.187.496.498,00 bertambah sebesar Rp1.653.727.000,00 atau 6,31% menjadi Rp27.841.223.498,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) belanja modal alat besar darat semula Rp25.250.924.730,00 bertambah sebesar Rp1.451.302.000,00 atau 5,75% menjadi Rp26.702.226.730,00;

- b) belanja modal alat besar apung semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp169.125.000,00 atau 100,00% menjadi Rp169.125.000,00; dan

- c) belanja modal alat bantu semula Rp969.871.768,00 bertambah sebesar Rp33.300.000,00 atau 3,56% menjadi Rp936.571.768,00.

- 2) belanja modal alat angkutan semula Rp54.156.565.735,00 bertambah sebesar Rp22.300.621.406,00 atau 41,18% menjadi Rp76.457.187.141,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) belanja Modal alat angkutan darat bermotor semula Rp51.156.069.635,00 bertambah sebesar Rp22.745.157.406,00 atau 44,46% menjadi Rp73.901.227.041,00;

- b) belanja modal alat angkutan darat tak bermotor semula Rp82.583.600,00 bertambah sebesar Rp69.671.500,00 atau 84,36% menjadi Rp152.255.100,00;

- c) belanja modal alat apung bermotor semula Rp2.640.412.500,00 berkurang sebesar Rp892.717.500,00 atau 33,81% menjadi Rp1.747.695.000,00; dan
 - d) belanja modal alat apung tak bermotor semula Rp277.500.000,00 bertambah sebesar Rp378.510.000,00 atau 136,40% menjadi Rp656.010.000,00.
- 3) belanja modal alat bengkel dan alat ukur semula Rp612.078.802,00 bertambah sebesar Rp1.257.114.240,00 atau 244,26% menjadi Rp1.869.193.042,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- a) belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp39.718.020,00 tidak mengalami perubahan;
 - b) belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp57.698.100,00 tidak mengalami perubahan; dan
 - c) belanja modal alat ukur semula Rp514.662.682,00 berkurang sebesar Rp1.257.114.240,00 atau 244,26% menjadi Rp1.771.776.922,00.
- 4) belanja modal alat pertanian semula Rp722.603.886,00 bertambah sebesar Rp31.754.463.657,00 atau 4394,45% menjadi Rp32.477.067.543,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat pengolahan sebesar Rp32.477.067.543,00;
- 5) belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula Rp38.643.298.020,00 bertambah sebesar Rp25.975.344.020,00 atau 67,22% menjadi Rp64.618.642.040,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal alat kantor semula Rp5.750.982.307,00 bertambah sebesar Rp4.361.657.270,00 atau 75,84% menjadi Rp10.112.639.577,00;
 - b) belanja modal alat rumah tangga semula Rp31.284.156.662,00 bertambah sebesar Rp21.119.808.541,00 atau 67,51% menjadi Rp52.403.965.203,00; dan
 - c) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat semula Rp1.608.159.051,00 bertambah sebesar Rp493.878.209,00 atau 30,71% menjadi Rp2.102.037.260,00.
- 6) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula Rp6.117.322.974,00 bertambah sebesar Rp9.861.045.565,00 atau 153,66% menjadi Rp16.278.368.539,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal alat studio semula Rp4.563.858.424,00 bertambah sebesar Rp9.831.199.395,00 atau 215,66% menjadi Rp14.395.057.819,00;
 - b) belanja modal alat komunikasi semula Rp1.832.974.800,00 bertambah sebesar Rp29.846.170,00 atau 1,63% menjadi Rp1.862.820.970,00; dan
 - c) belanja modal peralatan pemancar sebesar Rp20.489.750,00 tidak mengalami perubahan.

- 7) belanja modal alat laboratorium semula Rp373.053.000,00 bertambah sebesar Rp1.123.022.000,00 atau 301,04% menjadi Rp1.496.075.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) belanja unit alat laboratorium semula Rp78.903.000,00 berkurang sebesar Rp21.978.000,00 atau 27,85% menjadi Rp56.925.000,00; dan
 - b) belanja modal alat peraga praktek sekolah semula Rp294.150.000,00 bertambah sebesar Rp1.145.000.000,00 atau 389,26% menjadi Rp1.439.150.000,00.
- 8) belanja modal komputer semula Rp11.429.480.634,00 bertambah sebesar Rp60.513.795.315,00 atau 529,45% menjadi Rp71.943.275.949,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) belanja modal komputer unit semula Rp8.481.703.503,00 bertambah sebesar Rp10.055.148.417,00 atau 118,55% menjadi Rp18.536.851.920,00; dan
 - b) belanja modal peralatan komputer semula Rp2.947.777.131,00 bertambah sebesar Rp30.458.646.898,00 atau 1.711,75% menjadi Rp53.406.424.029,00.
- 9) belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian semula Rp166.299.709,00 tidak mengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal sumur sebesar Rp166.299.709,00;
- 10) belanja modal alat keselamatan kerja semula Rp385.060.000,00 bertambah sebesar Rp250.300.000,00 atau 65,00% menjadi Rp635.360.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) belanja modal alat deteksi semula Rp4.928.400,00 tidak mengalami perubahan;
 - b) belanja modal alat pelindung semula Rp5.118.210,00 tidak mengalami perubahan; dan
 - c) belanja modal alat SAR semula Rp526.417.500,00 berkurang sebesar Rp283.105.500,00 atau 53,78% menjadi Rp243.312.000,00.
- 11) belanja modal alat peraga semula Rp300.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebesar Rp300.000.000,00;
- 12) belanja modal rambu-rambu semula Rp19.999.528.200,00 bertambah sebesar Rp651.476.500,00 atau 3,26% menjadi Rp20.651.004.700,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp20.651.004.700,00;

- 13) belanja modal peralatan olahraga semula Rp9.456.200,00 bertambah sebesar Rp113.809.982,00 atau 1.203,55% menjadi Rp123.266.182,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp123.266.182,00;
- 14) belanja modal peralatan dan mesin BOSP semula Rp8.124.300.021,00 bertambah sebesar Rp1.158.432.637,00 atau 14,26% menjadi Rp9.282.732.658,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebesar Rp9.282.732.658,00; dan
- 15) belanja modal peralatan dan mesin BLUD semula Rp17.023.997.777,00 berkurang sebesar Rp7.174.043.644,00 atau 42,14% menjadi Rp9.849.954.133,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.500.000.000,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp31.236.793.556,00 bertambah sebesar Rp21.422.398.635,00 atau 68,58% menjadi Rp52.659.192.191,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat kedokteran semula Rp31.236.793.556,00 bertambah sebesar Rp21.422.398.635,00 atau 68,58% menjadi Rp52.659.192.191,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

- c. belanja modal gedung dan bangunan semula Rp637.629.788.504,00 bertambah Rp38.853.588.480,00 atau 6,09% menjadi Rp676.483.376.984,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) belanja modal bangunan gedung semula Rp632.563.833.488,00 bertambah sebesar Rp39.195.268.480,00 atau 6,20% menjadi Rp671.759.101.968,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- 2) belanja modal monumen semula Rp600.431.412,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti;
 - 3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti semula Rp2.465.523.604,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Tugu/Tanda Batas; dan
 - 4) belanja modal gedung dan bangunan BLUD semula Rp2.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp341.680.000,00 atau 17,08% menjadi Rp1.658.320.000,00.
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp821.569.087.712,00 bertambah Rp49.372.793.739,00 atau 6,01% menjadi Rp870.941.881.451,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- 1) belanja modal jalan dan jembatan semula Rp682.629.161.012,00 bertambah Rp35.574.590.555,00 atau 5,21% menjadi Rp718.203.751.567,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) belanja modal jalan semula Rp635.385.072.212,00 bertambah Rp33.166.222.050,00 atau 5,22% menjadi Rp668.551.294.262,00; dan
 - b) belanja modal jembatan semula Rp47.244.088.800,00 bertambah Rp2.408.368.505,00 atau 5,10% menjadi Rp49.652.457.305,00.
 - 2) belanja modal bangunan air semula Rp138.668.778.000,00 bertambah Rp13.558.589.704,00 atau 9,78% menjadi Rp152.227.367.704,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) belanja modal bangunan air irigasi semula Rp40.316.601.000,00 bertambah Rp10.600.000.000,00 atau 26,29% menjadi Rp50.916.601.000,00; dan
 - b) belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam semula Rp98.352.177.000,00 bertambah Rp2.958.589.704,00 atau 3,01% menjadi Rp101.310.766.704,00.

- 3) belanja modal instalasi semula Rp271.148.700,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) belanja modal instalasi air bersih/air baku sebesar Rp256.783.700,00 tidak mengalami perubahan; dan
 - b) belanja modal instalasi lain semula Rp14.365.000,00 tidak mengalami perubahan.
 - 4) belanja modal jaringan semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp239.613.480,00 atau 100,00% menjadi Rp239.613.480,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal jaringan listrik.
- e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp13.691.237.806,00 bertambah Rp872.328.705,00 atau 6,37% menjadi Rp14.563.566.511,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) belanja modal bahan perpustakaan semula Rp197.219.000,00 bertambah Rp49.513.135,00 atau 25,11% menjadi Rp246.732.135,00;
 - 2) belanja modal aset tetap lainnya BOS semula Rp400.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 atau 25,00% menjadi Rp300.000.000,00; dan
 - 3) belanja modal aset tetap lainnya BOSP semula Rp13.094.018.806,00 bertambah Rp922.815.570,00 atau 7,05% menjadi Rp14.016.834.376,00.
- f. belanja modal aset lainnya semula Rp387.735.000,00 bertambah Rp3.540.000,00 atau 0,91% menjadi Rp391.275.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah,

berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi agar memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Badung wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

13. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan butir C.3.c.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp72.086.033.246,00 bertambah Rp2.913.966.754,00 atau 4,04% menjadi Rp75.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan

perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c.1).b).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

14. **Belanja Transfer**

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp1.593.049.701.627,00 bertambah Rp935.298.908.847,00 atau 58,71% menjadi Rp2.528.348.610.474,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

a. belanja bagi hasil semula Rp894.386.650.239,00 bertambah Rp373.655.272.251,00 atau 41,78% menjadi Rp1.268.041.922.490,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- 1) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula Rp812.324.249.032,00 bertambah Rp246.500.777.623,00 atau 30,35% menjadi Rp1.058.825.026.655,00; dan
- 2) belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa semula Rp82.062.401.207,00 bertambah Rp127.154.494.628,00 atau 154,95% menjadi Rp209.216.895.835,00.

Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah namun sudah mengalokasikan Belanja Bagi Hasil untuk Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta butir C.3.d.2).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah tersebut dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. belanja bantuan keuangan semula Rp698.663.051.388,00 bertambah Rp561.643.636.596,00 atau 80,39% menjadi Rp1.260.306.687.984,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 17, sebagai berikut:

Tabel 17
Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Total Belanja Daerah	Persentase (%)
APBD TA 2021	99.896.833.427,00	97.610.724.121,00	97,71	3.268.403.627.706,00	32,72
APBD TA 2022	151.713.793.169,00	149.272.077.464,00	98,39	4.284.094.412.266,00	28,24
APBD TA 2023	1.075.623.541.403,00	971.690.888.135,39	90,34	8.542.741.842.036,00	7,94
RP APBD TA 2024	1.260.306.687.984,00	505.909.459.251,00	40,14	12.133.944.907.797,00	9,63

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- 1) belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota semula Rp321.692.030.238,00 bertambah Rp412.500.000.000,00 atau 128,23% menjadi Rp734.192.030.238,00; dan
- 2) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa semula Rp376.971.021.150,00 bertambah Rp149.143.636.596,00 atau 39,56% menjadi Rp526.114.657.746,00.

Dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.b.4). b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit,

1. Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp101.885.655.068,00, bertambah Rp892.023.837.552,00 atau 875,51% menjadi Rp993.909.492.620,00 yang diuraikan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp101.885.655.068,00 bertambah sebesar Rp892.023.837.552,00 atau 875,51% menjadi Rp993.909.492.620,00 atau 8,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam objek:

- 1) pelampauan penerimaan PAD semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp731.736.528.488,55 atau 100,00% menjadi Rp731.736.528.488,55;
- 2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp249.716.357.644,00 atau 100,00% menjadi Rp249.716.357.644,00;
- 3) penghematan belanja semula Rp101.885.655.068,00 berkurang sebesar Rp101.885.655.068,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; dan
- 4) sisa belanja lainnya semula tidak dianggarkan bertambah Rp12.456.606.487,45 atau 100,00% menjadi Rp12.456.606.487,45.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan pengeluaran pembiayaan semula Rp50.000.000.000,00, bertambah Rp104.298.254.382,00 atau 208,60% menjadi Rp154.298.254.382,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp154.298.254.382,00 atau 1,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. Kescesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

A. Kescesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dan telah disampaikan kepada Gubernur Bali sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

B. Kescesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	ZIR/BAHUS RKPD		ZIR/BAHUS KUA-PPAS		PERUBAHAN RAPBD	
		Jumlah Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran Rp	Jumlah Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran Rp	Jumlah Program dan Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran Rp
1.	Jumlah Program	131	51.234.943.162.179,00	133	12.133.944.907.797,00	131	51.234.943.162.179,00
2.	Jumlah Kegiatan	562	51.234.943.162.179,00	583	12.133.944.907.797,00	562	51.234.943.162.179,00
3.	Jumlah Sub Kegiatan	875	51.234.943.162.179,00	875	12.133.944.907.797,00	875	51.234.943.162.179,00

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Badung agar terus mempertahankan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung agar mempedomani Bab IV butir A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- V. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut:
1. terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp5.133.811.605.786,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.133.944.907.797,00; dan
 2. jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) program.

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung. Apabila hal tersebut disebabkan oleh Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung agar mengkonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

VI. Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, serta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- C. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, dan penambahan Sub kegiatan baru dalam RAPBD yang tidak tercantum dalam KUA dan PPAS perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- E. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu:
- 1) penanggulangan kemiskinan;
 - 2) peningkatan investasi;
 - 3) pengendalian *stunting* melalui digitalisasi administrasi;
 - 4) peningkatan penggunaan PDN; dan
 - 5) pengendalian inflasi antara lain:
 - a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
 - b) pengendalian laju alih fungsi lahan;
 - c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
 - d) penguatan tata kelola logistik daerah; dan
 - e) pengawasan harga dan operasi pasar,
- sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- F. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a) rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - b) pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
 - c) pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan;
 - d) pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan
 - e) pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat;
 - a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- 4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali,

sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ak.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- G. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka Pemerintah Kabupaten Badung agar mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ hal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;

- H. Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengendalian Inflasi mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
- 2) pengendalian laju alih fungsi lahan;
- 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
- 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan
- 5) pengawasan harga dan operasi pasar.

Selanjutnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.2).c) dan butir E.2.ab.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- I. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana" yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:
- a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

sebagaimana maksud butir C.3.c.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Badung agar melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- K. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Badung agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir C.3.c.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain:
1. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/pesarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 2. pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 3. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- L. Pemerintah Kabupaten Badung harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus mengganggu seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah;
- M. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- N. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ap.21) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- O. Pemerintah Kabupaten Badung dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% pada akhir Tahun 2024 sesuai amanat pada butir E.2.ab.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- P. Pemerintah Kabupaten Badung harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020;
- Q. Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk Tahun Anggaran 2024 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- R. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain:
1. penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 2. pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
- S. Pemerintah Kabupaten Badung juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan provinsi antara lain:
1. penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018;
 2. perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019;

3. pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018;
 4. pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018;
 5. integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019;
 6. penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019;
 7. pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019;
 8. pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019;
 9. kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratiima, dan Simbol Keagamaan;
 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat; dan
 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
- T. Dalam rangka mengendalikan jumlah kasus positif rabies di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung agar mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian rabies, termasuk pengendalian rabies di sektor hulu dengan vaksinasi hewan penular rabies dan pengendalian populasi hewan penular rabies, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies.
- U. Pemerintah Kabupaten Badung melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD , Batas Maksimal Defisit APBD , dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024;
- V. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp249.589.900.443,93 terdiri dari:
- (1) pendapatan diterima dimuka sebesar Rp28.371.544.072,51; dan
 - (2) utang belanja sebesar Rp221.218.356.371,42.

Pemerintah Kabupaten Badung agar mengalokasikan belanja untuk pembayaran kewajiban tersebut sebagai prioritas yang berpedoman pada butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Badung; dan
- X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.





PIMPINAN DPRD KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR
8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 707/04-E/HK/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024, maka perlu di lakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat DPRD dengan TAPD Kabupaten Badung tanggal 11 September 2024, disetujui bersama untuk diadakan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 11 September 2024

DPRD KABUPATEN BADUNG
KETUA SEMENTARA,



I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	RAPBD KESEPAKATAN DPRD	RAPBD SETELAH EVALUASI PROVINSI	SELISIH
PENDAPATAN	11.294.333.669.559,00	11.353.996.326.054,00	59.662.656.495,00
BELANJA	12.133.944.907.797,00	12.093.607.564.292,00	(40.337.343.505,00)
SURPLUS / (DEFISIT)	(839.611.238.238,00)	(739.611.238.238,00)	100.000.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	993.909.492.620,00	993.909.492.620,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	154.298.254.382,00	254.298.254.382,00	100.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	839.611.238.238,00	739.611.238.238,00	(100.000.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

DPRD KABUPATEN BADUNG
KETUA SEMENTARA,



PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA



KABUPATEN BADUNG

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,00	10.232.167.081.072,00	1.649.080.530.945,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00	9.289.161.451.514,00	1.448.818.961.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	394.287.249.133,00	76.209.917.924,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	27.391.025.423,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00	311.909.283.149,00	96.660.626.398,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00	1.117.893.244.982,00	113.793.146.390,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	853.531.932.000,00	19.674.907.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	264.361.312.982,00	94.118.239.390,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719,00	11.353.996.326.054,00	1.762.873.677.335,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125,00	7.002.923.689.527,00	1.133.205.989.402,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00	2.409.510.204.948,00	-36.876.176.379,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00	2.014.799.491.403,00	81.140.012.693,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000,00	6.413.200.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00	2.571.261.793.176,00	1.089.129.653.088,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	939.000.000,00	-187.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789,00	2.578.409.319.383,00	470.254.450.594,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00	652.949.808.850,00	234.011.528.205,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00	367.281.365.094,00	151.342.625.972,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00	677.005.209.370,00	39.375.420.866,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00	866.238.881.451,00	44.669.793.739,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00	14.563.566.511,00	872.328.705,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00	370.488.107,00	-17.246.893,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	844.224.853.755,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00	1.179.425.157.826,00	285.038.507.587,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00	1.257.849.397.556,00	559.186.346.168,00
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787,00	12.093.607.564.292,00	2.450.599.260.505,00
	Total Surplus/(Defisit)	-51.885.655.068,00	-739.611.238.238,00	-687.725.583.170,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00	739.611.238.238,00	687.725.583.170,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	211.849.507.259,00	219.224.491.611,00	3.324.501.382.855,00	3.528.681.404.962,00	1.784.078.544.233,00	2.105.040.667.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.579.927.088,00	5.633.722.072.744,00	525.142.145.656,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	588.000.000,00	588.000.000,00	1.148.841.657.873,00	1.096.174.845.224,00	481.725.963.893,00	497.519.132.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.567.621.766,00	1.593.693.977.607,00	-36.873.644.159,00	
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	588.000.000,00	588.000.000,00	1.103.888.635.846,00	1.045.678.849.143,00	476.445.336.093,00	482.196.798.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.333.971.939,00	1.527.875.647.965,00	-52.458.323.974,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.954.707.955,00	40.637.276.435,00	812.630.044.861,00	1.250.554.551.162,00	82.438.457.149,00	349.210.324.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.068.502.010,00	1.599.764.875.614,00	704.696.373.604,00	
2	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	44.953.022.027,00	50.495.996.081,00	5.280.627.800,00	15.322.333.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233.649.827,00	65.818.329.642,00	15.584.679.815,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	211.849.507.259,00	219.224.491.611,00	3.324.501.382.855,00	3.528.681.404.962,00	1.784.078.544.233,00	2.105.040.667.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.579.927.088,00	5.633.722.072.744,00	525.142.145.656,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	211.080.507.259,00	218.455.491.611,00	1.060.192.178.761,00	1.072.003.751.107,00	147.832.179.047,00	181.054.510.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.024.357.808,00	1.253.058.261.615,00	45.033.903.807,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	618.637.530.889,00	799.302.153.320,00	99.157.360.580,00	126.314.714.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.794.891.469,00	925.616.867.403,00	207.821.975.934,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0100	RSD Mangusada	184.810.000.000,00	190.000.000.000,00	417.375.131.395,00	245.306.078.756,00	46.650.820.690,00	51.853.968.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00	-166.865.905.043,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0200	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	2.268.278.000,00	2.324.235.775,00	2.142.569.706,00	2.430.935.206,00	119.018.294,00	186.152.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.588.000,00	2.617.088.000,00	355.500.000,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0300	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	1.529.304.000,00	1.735.873.787,00	1.440.063.411,00	1.570.582.620,00	87.090.589,00	163.141.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00	206.569.787,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0400	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.658.164.489,00	1.811.526.000,00	1.537.471.929,00	1.751.089.600,00	118.039.560,00	157.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00	252.613.611,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0500	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.750.543.921,00	1.752.087.047,00	1.613.769.375,00	1.763.524.357,00	134.074.546,00	178.296.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00	193.976.664,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0600	UPTD. Puskesmas Kuta I	2.252.058.000,00	2.345.089.367,00	1.910.848.070,00	2.048.977.717,00	336.874.930,00	308.745.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00	110.000.000,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0700	UPTD. Puskesmas Kuta II	1.166.290.000,00	1.376.652.000,00	1.102.319.000,00	1.349.471.337,00	62.897.000,00	99.212.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00	283.467.613,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0800	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	3.350.762.364,00	3.350.762.364,00	3.092.209.097,00	3.375.922.180,00	252.677.262,00	642.623.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00	673.659.190,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0900	UPTD. Puskesmas Mengwi I	3.138.699.000,00	3.325.623.134,00	2.793.124.670,00	2.956.935.484,00	343.028.330,00	363.187.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00	183.970.134,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	1.02.0.00.0.00.01.1000	UPTD. Puskesmas Mengwi II	2.276.304.199,00	2.444.093.000,00	2.161.212.220,00	2.333.552.055,00	111.432.979,00	155.615.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.645.199,00	2.489.167.172,00	216.521.973,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.1100	UPTD. Puskesmas Mengwi III	1.614.765.197,00	1.823.345.081,00	1.539.264.397,00	1.852.993.188,00	73.116.800,00	154.176.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00	394.788.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.1200	UPTD. Puskesmas Petang I	1.395.130.000,00	1.517.512.464,00	1.281.006.272,00	1.540.332.576,00	112.253.728,00	144.146.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00	291.219.108,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.1300	UPTD. Puskesmas Petang II	1.306.522.000,00	1.469.031.000,00	1.197.610.969,00	1.409.870.909,00	107.091.031,00	100.591.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00	205.760.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.1400	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	2.538.686.089,00	3.154.660.592,00	2.368.047.361,00	3.011.331.802,00	166.402.728,00	232.904.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00	709.786.441,00		
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170.000.000,00	170.000.000,00	964.606.573.322,00	1.207.993.649.234,00	882.909.799.542,00	1.163.034.710.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.516.372.864,00	2.371.028.360.104,00	523.511.987.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000,00	170.000.000,00	964.606.573.322,00	1.207.993.649.234,00	882.909.799.542,00	1.163.034.710.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.516.372.864,00	2.371.028.360.104,00	523.511.987.240,00		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.000.000,00	2.000.000,00	42.522.092.468,00	43.483.665.664,00	267.291.335.636,00	267.892.540.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00	1.562.778.077,00		
1	04	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.000.000,00	2.000.000,00	42.522.092.468,00	43.483.665.664,00	267.291.335.636,00	267.892.540.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00	1.562.778.077,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.000.000,00	7.000.000,00	129.424.718.221,00	132.184.808.654,00	9.590.724.871,00	10.822.158.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.015.443.092,00	143.006.966.819,00	3.991.523.727,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	2.000.000,00	2.000.000,00	44.917.938.696,00	45.602.075.262,00	283.751.409,00	283.751.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00	684.136.566,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	68.146.596.003,00	70.073.422.755,00	6.550.361.500,00	6.618.714.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.696.957.503,00	76.692.137.055,00	1.995.179.552,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	16.360.183.522,00	16.509.310.637,00	2.756.611.962,00	3.919.692.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00	1.312.207.609,00		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	23.867.184.237,00	27.336.681.160,00	9.169.044,00	39.948.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.876.353.281,00	27.376.630.060,00	3.500.276.779,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	2.000.000,00	2.000.000,00	23.867.184.237,00	27.336.681.160,00	9.169.044,00	39.948.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.876.353.281,00	27.376.630.060,00	3.500.276.779,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.954.707.955,00	40.637.276.435,00	812.630.044.861,00	1.250.554.551.162,00	82.438.457.149,00	349.210.324.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.068.502.010,00	1.599.764.875.614,00	704.696.373.604,00		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000,00	25.000.000,00	175.317.558.542,00	175.852.522.325,00	37.690.480.037,00	191.378.885.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.008.038.579,00	367.231.408.296,00	154.223.369.717,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	175.317.558.542,00	175.852.522.325,00	37.690.480.037,00	191.378.885.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.008.038.579,00	367.231.408.296,00	154.223.369.717,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.000.000,00	2.000.000,00	20.083.721.059,00	21.249.148.408,00	10.809.180,00	10.809.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094.530.239,00	21.259.957.588,00	1.165.427.349,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00	2.000.000,00	20.083.721.059,00	21.249.148.408,00	10.809.180,00	10.809.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094.530.239,00	21.259.957.588,00	1.165.427.349,00		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	20.298.582.710,00	20.823.119.835,00	25.997.532,00	25.997.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.324.580.242,00	20.849.117.367,00	524.537.125,00		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	20.298.582.710,00	20.823.119.835,00	25.997.532,00	25.997.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.324.580.242,00	20.849.117.367,00	524.537.125,00		
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.000.000,00	1.000.000,00	27.260.897.061,00	28.101.516.673,00	524.084.400,00	776.458.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00	1.092.993.812,00		
2	14	2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	20.596.602.888,00	21.795.114.468,00	43.096.400,00	291.593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639.699.288,00	22.086.708.068,00	1.447.008.780,00		
2	14	2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	6.664.294.173,00	6.306.402.205,00	480.988.000,00	484.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145.282.173,00	6.791.267.205,00	-354.014.968,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.406.707.955,00	2.589.276.435,00	93.503.347.761,00	99.645.339.249,00	36.880.919.245,00	39.378.925.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.384.267.006,00	139.024.264.583,00	8.639.997.577,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.406.707.955,00	2.589.276.435,00	93.503.347.761,00	99.645.339.249,00	36.880.919.245,00	39.378.925.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.384.267.006,00	139.024.264.583,00	8.639.997.577,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.000.000,00	10.000.000,00	71.532.027.922,00	74.820.238.265,00	408.377.156,00	26.164.233.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940.405.078,00	100.984.471.546,00	29.044.066.468,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.000.000,00	71.255.283.282,00	74.723.493.625,00	408.377.156,00	26.164.233.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.663.660.438,00	100.887.726.906,00	29.224.066.468,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	79.759.415,00	79.759.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.759.415,00	79.759.415,00	0,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	196.985.225,00	16.985.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.985.225,00	16.985.225,00	-180.000.000,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.000.000,00	2.000.000,00	26.300.835.926,00	26.587.947.906,00	151.060.607.574,00	668.872.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.361.443.500,00	27.256.819.908,00	-150.104.623.592,00		
2	17	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.000.000,00	2.000.000,00	24.232.015.148,00	24.605.775.868,00	262.607.574,00	569.872.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494.622.722,00	25.175.647.870,00	681.025.148,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.525.000.000,00	144.725.000.000,00	202.989.298.179,00	201.950.002.417,00	177.356.919.173,00	23.209.045.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.346.217.352,00	225.159.047.826,00	-155.187.169.526,00		
3	17	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	2.068.820.778,00	1.982.172.038,00	150.798.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00	-150.785.648.740,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.954.707.955,00	40.637.276.435,00	812.630.044.861,00	1.250.554.551.162,00	82.438.457.149,00	349.210.324.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.068.502.010,00	1.599.764.875.614,00	704.696.373.604,00		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	23.502.000.000,00	38.002.000.000,00	36.500.776.737,00	38.765.819.971,00	0,00	209.916.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00	2.474.959.885,00		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.502.000.000,00	38.002.000.000,00	36.500.776.737,00	38.765.819.971,00	0,00	209.916.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00	2.474.959.885,00		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	247.812.472.135,00	667.309.335.204,00	1.330.687.338,00	66.567.597.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.143.159.473,00	733.876.932.242,00	484.733.772.769,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	247.812.472.135,00	667.309.335.204,00	1.330.687.338,00	66.567.597.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.143.159.473,00	733.876.932.242,00	484.733.772.769,00		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	26.259.828.021,00	26.397.824.271,00	23.866.887,00	6.869.620.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00	6.983.749.885,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	25.519.730.836,00	25.753.662.166,00	23.866.887,00	6.869.620.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543.597.723,00	32.623.282.688,00	7.079.684.965,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	740.097.185,00	644.162.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.097.185,00	644.162.105,00	-95.935.080,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.525.000.000,00	144.725.000.000,00	202.989.298.179,00	201.950.002.417,00	177.356.919.173,00	23.209.045.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.346.217.352,00	225.159.047.826,00	-155.187.169.526,00		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.000.000,00	2.000.000,00	19.488.089.154,00	20.532.479.593,00	108.405.708,00	222.832.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596.494.862,00	20.755.311.926,00	1.158.817.064,00		
3	25	3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	19.488.089.154,00	20.532.479.593,00	108.405.708,00	222.832.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596.494.862,00	20.755.311.926,00	1.158.817.064,00		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	89.210.000.000,00	144.410.000.000,00	67.871.425.970,00	71.415.900.764,00	12.569.869.222,00	11.947.737.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.441.295.192,00	83.363.637.986,00	2.922.342.794,00		
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	89.210.000.000,00	144.410.000.000,00	67.871.425.970,00	71.415.900.764,00	12.569.869.222,00	11.947.737.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.441.295.192,00	83.363.637.986,00	2.922.342.794,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.954.707.955,00	40.637.276.435,00	812.630.044.861,00	1.250.554.551.162,00	82.438.457.149,00	349.210.324.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.068.502.010,00	1.599.764.875.614,00	704.696.373.604,00		
2	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	311.000.000,00	311.000.000,00	100.394.931.174,00	98.545.090.331,00	12.989.252.643,00	10.939.475.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.384.183.817,00	109.484.566.185,00	-3.899.617.632,00		
2	27	3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	9.669.846.235,00	10.624.242.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669.846.235,00	10.624.242.945,00	954.396.710,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.525.000.000,00	144.725.000.000,00	202.989.298.179,00	201.950.002.417,00	177.356.919.173,00	23.209.045.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.346.217.352,00	225.159.047.826,00	-155.187.169.526,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	311.000.000,00	311.000.000,00	90.725.084.939,00	87.920.847.386,00	12.989.252.643,00	10.939.475.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.714.337.582,00	98.860.323.240,00	-4.854.014.342,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.954.707.955,00	40.637.276.435,00	812.630.044.861,00	1.250.554.551.162,00	82.438.457.149,00	349.210.324.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.068.502.010,00	1.599.764.875.614,00	704.696.373.604,00		
2	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.000.000,00	2.000.000,00	37.796.769.450,00	31.744.267.328,00	891.391.600,00	1.935.674.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688.161.050,00	33.679.942.108,00	-5.008.218.942,00		
2	31	3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	14.960.892.112,00	11.645.664.692,00	0,00	1.935.674.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960.892.112,00	13.581.339.472,00	-1.379.552.640,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.525.000.000,00	144.725.000.000,00	202.989.298.179,00	201.950.002.417,00	177.356.919.173,00	23.209.045.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.346.217.352,00	225.159.047.826,00	-155.187.169.526,00		
3	31	3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	22.835.877.338,00	20.098.602.636,00	891.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727.268.938,00	20.098.602.636,00	-3.628.666.302,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.954.707.955,00	40.637.276.435,00	812.630.044.861,00	1.250.554.551.162,00	82.438.457.149,00	349.210.324.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.068.502.010,00	1.599.764.875.614,00	704.696.373.604,00		
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	30.000.000,00	30.000.000,00	714.802.763.964,00	1.170.813.936.862,00	1.104.368.273,00	4.509.792.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.907.132.237,00	1.175.323.728.865,00	459.416.596.628,00		
2	01	4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	245.057.391,00	218.007.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.057.391,00	218.007.375,00	-27.050.016,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	80.000.000,00	80.000.000,00	863.821.654.939,00	1.328.117.958.402,00	26.569.219.371,00	50.262.560.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.390.874.310,00	1.378.380.518.583,00	487.989.644.273,00		
4	01	4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	714.112.193.489,00	1.170.150.416.403,00	1.104.368.273,00	4.509.792.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.216.561.762,00	1.174.660.208.406,00	459.443.646.644,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	12.000.000,00	12.000.000,00	196.801.665.934,00	213.438.246.367,00	29.992.885.056,00	37.751.235.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.794.550.990,00	251.189.482.073,00	24.394.931.083,00		
7	01	4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	445.513.084,00	445.513.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.513.084,00	445.513.084,00	0,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	80.000.000,00	80.000.000,00	863.821.654.939,00	1.328.117.958.402,00	26.569.219.371,00	50.262.560.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.390.874.310,00	1.378.380.518.583,00	487.989.644.273,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	149.709.461.450,00	157.967.541.999,00	25.464.851.098,00	45.752.768.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.174.312.548,00	203.720.310.177,00	28.545.997.629,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	149.709.461.450,00	157.967.541.999,00	25.464.851.098,00	45.752.768.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.174.312.548,00	203.720.310.177,00	28.545.997.629,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.263.697.433.505,00	10.949.313.558.008,00	385.463.569.584,00	370.394.946.071,00	3.656.829.093,00	7.292.256.592,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	2.054.256.133.550,00	2.889.961.758.045,00	835.705.624.495,00		
5	01		PERENCANAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	24.809.833.173,00	26.601.642.092,00	305.564.943,00	2.141.712.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00	3.627.956.878,00		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	24.809.833.173,00	26.601.642.092,00	305.564.943,00	2.141.712.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00	3.627.956.878,00		
5	02		KEUANGAN	9.263.691.433.505,00	10.949.307.558.008,00	292.411.545.362,00	269.787.373.759,00	2.924.398.294,00	3.668.545.525,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	1.960.471.678.529,00	2.785.730.474.666,00	825.258.796.137,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.218.783.675.897,00	1.385.967.847.710,00	71.732.184.138,00	73.394.372.264,00	1.887.831.121,00	1.525.812.736,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	1.738.755.750.132,00	2.587.194.740.382,00	848.438.990.250,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	8.044.907.757.608,00	9.563.339.710.298,00	220.679.361.224,00	196.393.001.495,00	1.036.567.173,00	2.142.732.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.715.928.397,00	198.535.734.284,00	-23.180.194.113,00		
5	03		KEPEGAWAIAN	2.000.000,00	2.000.000,00	42.780.779.065,00	48.934.230.495,00	9.812.400,00	894.510.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.790.591.465,00	49.828.740.587,00	7.038.149.122,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000,00	2.000.000,00	26.962.713.789,00	31.024.355.739,00	9.812.400,00	894.510.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.972.526.189,00	31.918.865.831,00	4.946.339.642,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00	2.091.809.480,00		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	25.461.411.984,00	25.071.699.725,00	417.053.456,00	587.488.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00	-219.277.642,00		
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	25.461.411.984,00	25.071.699.725,00	417.053.456,00	587.488.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00	-219.277.642,00		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	2.000.000,00	2.000.000,00	37.930.182.147,00	45.219.240.686,00	4.062.014.714,00	4.248.614.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992.196.861,00	49.467.854.947,00	7.475.658.086,00		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	37.930.182.147,00	45.219.240.686,00	4.062.014.714,00	4.248.614.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992.196.861,00	49.467.854.947,00	7.475.658.086,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	2.000.000,00	2.000.000,00	37.930.182.147,00	45.219.240.686,00	4.062.014.714,00	4.248.614.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992.196.861,00	49.467.854.947,00	7.475.658.086,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	12.000.000,00	12.000.000,00	196.801.665.934,00	213.438.246.367,00	29.992.885.056,00	37.751.235.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.794.550.990,00	251.189.482.073,00	24.394.931.083,00		
7	01		KECAMATAN	12.000.000,00	12.000.000,00	196.356.152.850,00	212.992.733.283,00	29.992.885.056,00	37.751.235.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.349.037.906,00	250.743.968.989,00	24.394.931.083,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	2.000.000,00	2.000.000,00	13.538.823.519,00	14.394.323.957,00	16.406.355,00	732.296.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555.229.874,00	15.126.619.961,00	1.571.390.087,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	2.000.000,00	2.000.000,00	18.526.603.593,00	19.711.802.415,00	284.362.881,00	1.129.755.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810.966.474,00	20.841.557.499,00	2.030.591.025,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	2.000.000,00	2.000.000,00	40.046.500.881,00	42.291.850.348,00	12.334.977.995,00	11.375.583.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.381.478.876,00	53.667.434.158,00	1.285.955.282,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.1001	Kelurahan Kapal	0,00	0,00	5.979.205.297,00	10.414.859.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979.205.297,00	10.414.859.726,00	4.435.654.429,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.1002	Kelurahan Sempidi	0,00	0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00	-534.719.774,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.1003	Kelurahan Abianbase	0,00	0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00	131.377.145,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.1004	Kelurahan Sading	0,00	0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00	990.658.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.1005	Kelurahan Lukluk	0,00	0,00	669.108.172,00	1.299.979.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.108.172,00	1.299.979.377,00	630.871.205,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	2.000.000,00	2.000.000,00	30.811.763.075,00	32.118.706.804,00	3.681.867.225,00	5.341.349.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.493.630.300,00	37.460.056.053,00	2.966.425.753,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.1001	Kelurahan Kerobokan Kelod	0,00	0,00	1.320.040.811,00	1.242.746.451,00	178.571.250,00	344.918.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00	89.053.015,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.1002	Kelurahan Kerobokan Kaja	0,00	0,00	587.776.803,00	853.245.512,00	496.226.615,00	496.226.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00	265.468.709,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.1003	Kelurahan Kerobokan	0,00	0,00	1.466.636.803,00	1.708.680.198,00	101.458.440,00	101.458.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00	242.043.395,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	2.000.000,00	2.000.000,00	36.552.532.212,00	36.212.538.710,00	8.299.682.026,00	9.998.518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852.214.238,00	46.211.057.310,00	1.358.843.072,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.1001	Kelurahan Tuban	0,00	0,00	1.244.687.030,00	1.472.797.430,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00	228.110.400,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	7.01.0.00.0.00.05.1002	Kelurahan Kuta	0,00	0,00	2.117.260.200,00	2.744.536.100,00	185.605.500,00	134.355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00	576.025.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.1003	Kelurahan Kedonganan	0,00	0,00	2.704.673.864,00	2.258.915.830,00	332.428.200,00	332.428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00	-445.758.034,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.1004	Kelurahan Legian	0,00	0,00	1.917.037.330,00	2.196.679.330,00	16.797.600,00	16.797.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00	279.642.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.1005	Kelurahan Seminyak	0,00	0,00	216.196.000,00	289.470.000,00	30.419.700,00	30.419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.615.700,00	319.889.700,00	73.274.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	2.000.000,00	2.000.000,00	27.349.644.606,00	32.604.880.610,00	3.947.681.269,00	5.965.728.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.297.325.875,00	38.570.608.889,00	7.273.283.014,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.1004	Kelurahan Benoa	0,00	0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00	356.130.724,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.1005	Kelurahan Tanjung Benoa	0,00	0,00	1.985.340.101,00	910.951.237,00	0,00	1.665.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00	590.611.136,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.1006	Kelurahan Jimbaran	0,00	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00	0,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	45.579.901.626,00	64.567.339.460,00	0,00	1.394.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.579.901.626,00	65.961.954.460,00	20.382.052.834,00		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.000.000,00	2.000.000,00	45.579.901.626,00	64.567.339.460,00	0,00	1.394.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.579.901.626,00	65.961.954.460,00	20.382.052.834,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.000.000,00	2.000.000,00	45.579.901.626,00	64.567.339.460,00	0,00	1.394.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.579.901.626,00	65.961.954.460,00	20.382.052.834,00		
			TOTAL	9.591.122.648.719,00	11.353.996.326.054,00	5.869.717.700.125,00	7.002.923.689.527,00	2.108.154.868.789,00	2.578.409.319.383,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	9.643.008.303.787,00	12.093.607.564.292,00	2.450.599.260.505,00		

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	9.591.122.648.719,0 0	11.353.996.326.054, 00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,0 0	10.232.167.081.072, 00	
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,0 0	9.289.161.451.514,0 0	
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	394.287.249.133,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00	311.909.283.149,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,0 0	1.117.893.244.982,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	853.531.932.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	264.361.312.982,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKjIP			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.406.812,00	7.406.812,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.612,00	11.040.612,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.129.112,00	15.129.112,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.987.400,00	29.987.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Keuangan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	805.211.081.366,00	760.240.900.019,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.783.984,00	103.783.984,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.441.445,00	2.441.445,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah			

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.283.022,00	926.283.022,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	883.756.512,00	768.956.512,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.283.901,00	37.283.901,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.959.200,00	509.959.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.466.045,00	379.466.045,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.378.400,00	346.378.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.028.693,00	389.028.693,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.121.600,00	151.121.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.994.000,00	76.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.707.700,00	895.707.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.410.000,00	206.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.762.200,00	437.202.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.267.400,00	161.267.400,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar SD			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.614.000,00	159.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.622.200,00	2.672.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	929.400.200,00	929.400.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.858.900,00	756.388.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	41.983.280.645,00	41.983.280.645,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.587.118.708,00	151.843.533.263,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	2.409.198.724,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.100,00	1.091.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.579.619.200,00	8.588.539.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.957.862.284,00	7.957.962.284,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.453.429.158,00	11.360.463.156,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.528.400,00	46.162.800,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	534.000.000,00	534.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.589.909.200,00	2.934.825.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.459.796.584,00	56.192.368.264,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.636.000,00	1.086.689.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.814.680,00	348.619.960,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.965.295.471,00	38.253.563.476,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.905.000.000,00	17.334.040.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.213.006.222,00	7.398.285.208,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.880.528.307,00	8.902.454.876,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	269.823.000,00	269.823.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.871.671,00	305.871.671,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.754.165.300,00	17.408.294.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.850.700,00	58.950.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.702.516.369,00	6.122.890.569,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.495.000,00	1.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.384.500,00	15.484.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.459.156.134,00	4.459.156.134,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar SMP			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.485.850,00	1.270.672.560,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.844.500.000,00	12.295.556.465,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.337.306.502,00	146.367.394.585,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.420.950,00	139.829.450,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.702.118.200,00	28.482.994.709,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.104.000,00	7.104.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.921.074.700,00	5.514.574.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.996.461.600,00	10.586.405.135,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.309.880.310,00	5.513.630.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.309.956.600,00	9.282.798.851,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.253.200,00	31.253.200,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	454.500.000,00	267.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.925.000,00	956.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.073.400,00	1.054.621.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.106.402.460,00	21.451.216.932,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.526.100,00	1.193.898.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.130.684,00	166.130.684,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.792.045.702,00	25.401.418.984,00	
5.1.05	Belanja Hibah	11.752.125.000,00	13.722.340.742,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.911.293.799,00	1.884.447.450,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.613.490.499,00	5.414.379.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.721.186,00	141.719.206,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.415.500,00	1.415.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.766.800,00	145.006.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.161.200,00	894.596.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.565.984.464,00	17.778.854.871,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar TK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.660.700,00	114.660.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.172.672.000,00	9.125.399.778,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	6.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.910.020.000,00	15.582.261.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.05	Belanja Hibah	0,00	170.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	121.695.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.189.700,00	1.131.189.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.724.973.370,00	4.803.731.870,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	287.236.625,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.629.567.415,00	2.439.764.735,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.577.398,00	987.337.398,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.970.846,00	412.970.846,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.047.950,00	118.047.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.513.536,00	426.513.536,00	
5.1.05	Belanja Hibah	13.390.558.500,00	15.005.158.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.461.583,00	105.461.583,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.794.230,00	150.794.230,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	261.097.936,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	206.713.869,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.340.832,00	331.277.832,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.599.000.000,00	6.699.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.408.000,00	26.408.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.349.034.930,00	1.349.034.930,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.806.294,00	69.806.294,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.537.600,00	617.537.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.530.500,00	9.530.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	315.646.421.066,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	518.936.687.873,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.542.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.542.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.323.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.594.636.200,00	3.641.786.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.026.000,00	706.026.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.703.600,00	190.703.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	963.606.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	963.606.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.114.089.777,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.114.089.777,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.818.500,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	14.818.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.220.200,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	605.220.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.332.846.600,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.332.846.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.076.071.216,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.093.735.576,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.219.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	151.219.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.023.907.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.068.307.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.242.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	915.242.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.400.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	338.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.384.275.652,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.384.275.652,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.043.025.700,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	2.043.025.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.601.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	401.234.864,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.063.500,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.180.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.180.000.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	6.698.766.418,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.618.933.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	250.129.300,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.129.300,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	3.699.958.068,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.865.985.439,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	170.295.040,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.481.760,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	18.791.059.928,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.204.540.900,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.326.565.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.326.565.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.079.900,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.079.900,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	11.720.000.000,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	76.218.208.415,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.688.741.512,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.898.071.427,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.925.170.567,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.622.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.622.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	264.542.752,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.742.752,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	79.343.600,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.343.600,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.845.360,00	564.746.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.769.620,00	166.843.420,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.068.960,00	487.965.420,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.553.900,00	113.553.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.452.400,00	98.452.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.665.816,00	711.934.695,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.518.520,00	28.320.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.305.220,00	745.242.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.217.160,00	67.118.020,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.531.431.116,00	1.416.893.691,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.655.711,00	2.281.757.491,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.800,00	850.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.398.912,00	171.373.992,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.742.800,00	14.742.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.043.200,00	849.538.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.481.500,00	517.481.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.013.312,00	178.988.392,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.224.400,00	257.505.080,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.584.900,00	4.584.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.408.000,00	157.408.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.647.590.436,00	9.257.487.740,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.111.486.381,00	3.111.486.381,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.554.106.964,00	28.366.969.788,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.564.272.076,00	118.465.383.816,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.089.100,00	23.089.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.057.220,00	28.958.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.345.500,00	55.755.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.573.900,00	339.573.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.458.400,00	12.458.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.840.000,00	411.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.657.400,00	93.657.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.797.700,00	103.797.700,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.801.136,00	1.381.903.916,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	407.562.025,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.757.700,00	1.757.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.038.512,00	178.789.972,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.465.304,00	206.390.124,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.041.783.760,00	8.875.099.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.970.000,00	176.970.000,00	

Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.127.800,00	1.427.979.600,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.263.012,00	126.063.872,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.671.900,00	207.671.900,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi			

Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.368.700,00	78.368.700,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.999.100,00	177.999.100,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbina Aktif			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.936.172,00	1.788.948.152,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat . Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.691.300,00	361.739.760,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.019.700,00	30.019.700,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	203.290.266.807,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	586.400.000,00	3.711.253.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.237.022.128,00	12.732.574.128,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.065.669.700,00	32.412.396.776,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.903.276.044,00	25.903.276.044,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	30.334.142.706,00	44.796.776.706,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.465.857.294,00	144.728.885.462,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000.000,00	7.011.566.570,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.625.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0200 UPTD. Puskesmas Abiansemal I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.481.706,00	1.813.847.206,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.018.294,00	186.152.794,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.680.000,00	169.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	9.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.900.000,00	117.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	62.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.815.000,00	71.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.900.000,00	106.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.000,00	853.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0300 UPTD. Puskesmas Abiansemal II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.909.411,00	943.428.620,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.090.589,00	163.141.167,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.882.000,00	171.882.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	16.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	107.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	78.510.000,00	78.510.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.377.000,00	56.377.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.900.000,00	74.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0400 UPTD. Puskesmas Abiansemal III			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.545.929,00	1.205.163.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.039.560,00	157.035.500,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.052.000,00	152.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	91.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	68.780.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.735.000,00	48.955.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.900.000,00	56.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.000,00	289.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0500 UPTD Puskesmas Abiansema IV			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.128.375,00	1.145.883.357,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.074.546,00	178.296.228,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMA IV)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	28.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.969.000,00	179.969.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	107.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	77.815.200,00	77.815.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.633.800,00	55.633.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.480.000,00	41.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000,00	43.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0600 UPTD. Puskesmas Kuta I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.125.070,00	1.441.254.717,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.874.930,00	308.745.283,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	10.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	22.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.528.000,00	166.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	12.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.350.000,00	110.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	76.617.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.571.000,00	54.954.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	12.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	85.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000,00	124.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	12.550.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0700 UPTD. Puskesmas Kuta II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.103.000,00	881.255.337,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.897.000,00	85.892.276,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	13.320.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.318.000,00	126.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	12.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	60.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	58.914.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.043.000,00	42.128.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.025.000,00	35.025.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	80.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0800 UPTD. Puskesmas Kuta Selatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.174.636.097,00	2.458.349.180,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.677.262,00	642.623.369,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.600.000,00	87.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	19.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.489.000,00	260.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	24.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.550.000,00	141.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	108.390.000,00	108.390.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.830.000,00	89.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	69.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000,00	64.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0900 UPTD. Puskesmas Mengwi I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.956.645.670,00	2.120.456.484,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.028.330,00	363.187.650,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	37.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.710.000,00	231.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	16.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.950.000,00	166.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	99.000.000,00	99.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.067.000,00	81.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	13.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.100.000,00	101.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000,00	152.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1000 UPTD. Puskesmas Mengwi II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.778.220,00	1.501.118.055,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.432.979,00	135.615.117,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.835.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	229.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.800.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	149.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	98.364.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.752.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	81.388.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	137.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.000,00	297.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1100 UPTD. Puskesmas Mengwi III			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.289.397,00	1.239.018.188,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.116.800,00	154.176.404,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	42.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.722.000,00	185.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	9.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	28.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.900.000,00	111.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	77.355.000,00	77.355.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.298.000,00	55.298.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	9.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	41.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1200 UPTD. Puskesmas Petang I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah undefined			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	927.072.576,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.746.272,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	144.146.532,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.253.728,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined			

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.782.000,00	171.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.450.000,00	92.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	67.600.000,00	67.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.878.000,00	64.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	44.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	79.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1300 UPTD. Puskesmas Petang II			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.148.969,00	865.408.909,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.091.031,00	100.591.091,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	5.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.856.000,00	152.856.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	6.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.950.000,00	99.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	60.021.000,00	60.021.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.583.000,00	57.583.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.800.000,00	117.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000,00	52.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1400 UPTD. Puskesmas Kuta Utara			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.539.087.361,00	2.182.371.802,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.402.728,00	232.904.728,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	60.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.888.000,00	230.888.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	15.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.750.000,00	164.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	105.635.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.975.000,00	73.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000,00	97.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)			
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.354.337,00	140.354.337,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.351.840,00	48.351.840,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.344.949.764,00	26.896.949.764,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.640.381,00	110.982.803,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.636.199,00	89.636.199,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.464.090,00	1.464.090,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.579.700,00	89.579.700,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.837.716,00	132.034.996,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.933.574,00	47.933.574,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.865.346,00	10.865.346,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.723.655,00	284.723.655,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.331.850,00	151.331.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.512.809,00	16.990.659,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.700.576,00	56.700.576,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.504.160,00	2.504.160,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.732.838,00	113.798.118,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.792.256,00	794.260.324,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	15.145.999.052,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	10.854.024,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.991.192,00	298.257.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.156.000,00	162.156.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.803.738,00	599.195.418,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.460.000,00	125.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.790.000,00	42.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.426.400,00	262.226.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.230.000,00	62.860.000,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Persentase luas sawah beririgasi			
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
Indikator Keluaran	: Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.618.584.763,00	3.713.506.263,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.646.600,00	321.942.217,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			
Indikator Keluaran	: Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.756.210,00	818.889.010,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	2.958.589.704,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.166.502,00	1.260.341.302,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai			
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.077.635,00	476.077.635,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.383.293,00	27.383.293,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.352.177.000,00	98.352.177.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.854.140,00	605.854.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai			
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.018.974,00	8.563.474,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.525.000.000,00	9.725.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.663.443,00	570.663.443,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.425.000,00	19.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.574.399.453,00	1.576.700.253,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.091.601.000,00	39.491.601.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.106.848,00	8.106.848,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.546.725.297,00	11.448.005.797,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.504.774.873,00	1.505.178.498,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.241.745,00	448.241.745,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak			
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.927.867,00	801.578.067,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan			
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengembangan sistim persampahan			
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.950.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.562.388,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	0,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			

Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.495.334,00	891.387.312,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung berkondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Persentase bangunan gedung berkondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.485.166,00	104.485.166,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.381.392,00	1.572.060.397,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.288.943,00	181.834.388,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.078.183.000,00	118.817.580.593,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.837.945.000,00	98.569.454.560,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.791.714,00	2.986.847.714,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	97.997.707,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: Persentase fasilitas publik ber kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Gedung Pemerintah Ber kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.988.180,00	416.988.180,00	
5.1.05	Belanja Hibah	841.849.288.998,00	841.849.288.998,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.985.472.000,00	55.782.546.506,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.664.073,00	691.664.073,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.339.341,00	593.339.341,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.448.480,00	1.192.661.981,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.886.335.700,00	1.004.813.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Diganti			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.873.117,00	10.873.117,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.650.528.300,00	29.650.528.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.015.724,00	621.395.304,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	203.312.500.000,00	395.312.500.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.954.476.000,00	34.986.756.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.978.572,00	20.278.572,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.691.345.700,00	32.861.698.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.049.312,00	5.049.312,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.098.000.000,00	11.098.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.769.324,00	792.769.324,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.159.571,00	6.159.571,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.098.000.000,00	17.098.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.724.195,00	703.724.195,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.081.466,00	131.065.466,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	128.588.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.665.749.200,00	318.223.749.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.949.023.073,00	20.385.065.252,00	

Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik			
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.600.743,00	181.600.743,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.941.851,00	8.941.851,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.521.958,00	230.521.958,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.702.836,00	23.702.836,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.143.955,00	91.143.955,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.239.617.372,00	1.178.877.372,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan			
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.533.870,00	515.408.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.323.637,00	2.323.637,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.559.051,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.149.525,00	136.934.125,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	118.784.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.348.527,00	2.348.527,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	173.490.400,00	173.490.400,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.889.940,00	1.246.099.023,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.612.144,00	298.815.448,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.815.036,00	3.815.036,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.470.200,00	2.470.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.694.868,00	2.694.868,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.673.662,00	2.673.662,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.737.623,00	7.737.623,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.414.213.506,00	13.704.213.518,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.156,00	3.870.156,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.336.423,00	18.336.423,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.991.000,00	8.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.314.319,00	3.314.319,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	682.650,00	682.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.345.479,00	325.952.879,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.536.989,00	29.536.989,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.495.600,00	54.495.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.539.672,00	4.539.672,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.510.140,00	238.510.140,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.445.000,00	320.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.406.248,00	234.406.248,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.189.520,00	35.189.520,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	906.626.225,00	1.409.549.225,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.365.000,00	14.365.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.837.006,00	45.837.006,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.635.912,00	353.635.912,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	120.618.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.618.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	697.339.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.609.000,00	0,00	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel				
Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.732.024,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.132.024,00	0,00	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan			
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	78.857.907,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.700,00	7.960.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.977.564,00	292.363.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.296.576,00	7.296.576,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.256.200,00	25.256.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.084.337,00	187.084.337,00	

Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh			
Kegiatan	: 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
Indikator Keluaran	: Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.107.884,00	9.107.884,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.816.704,00	15.816.704,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.885,00	5.298.885,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.190.844,00	102.190.844,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.562,00	6.960.562,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.003.095,00	24.003.095,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.489.508,00	531.643.508,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.285.282,00	201.285.282,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni			
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.448.166.399,00	2.448.166.399,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.787.432,00	2.787.432,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.719.831,00	69.719.831,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.572.643.564,00	3.670.925.445,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			

Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.553.290.155,00	7.729.204.280,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.663.000,00	3.663.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.825.690.877,00	258.825.690.877,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.354.101,00	817.055.101,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.663.000,00	3.663.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.393.333.540,00	3.393.333.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.472.712,00	40.472.712,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.038.100,00	4.038.100,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.509.500,00	4.509.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.284.200,00	3.284.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	36.647.108.569,00	36.932.247.797,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.025.950,00	24.025.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.339.500,00	376.339.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.649.450,00	15.649.450,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.242.800,00	32.242.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.451.409,00	28.451.409,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.760.127,00	23.760.127,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.195.500,00	82.195.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.568.654,00	973.968.654,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.123.400,00	89.123.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.264.610,00	1.033.264.610,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.300.000,00	255.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.564.100,00	36.164.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.150.300,00	122.232.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.133.200,00	9.133.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.561.400,00	36.561.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penegakan Perda dan Perkada			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.590.700,00	8.590.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.205.400,00	11.205.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.271.236,00	2.782.474.060,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.476.300,00	4.476.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.056.700,00	5.663.500,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	41.338.771.568,00	42.288.810.072,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.532.400,00	7.532.400,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.252.300,00	164.252.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.025.600,00	74.025.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.447.900,00	778.241.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.954.800,00	14.954.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.309.200,00	43.309.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.300,00	17.549.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.884.500,00	373.237.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.642.200,00	21.642.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.423.400,00	315.423.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.278.200,00	789.058.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.995.600,00	126.995.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.917.822.000,00	2.953.342.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.410.000,00	74.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.750.000,00	204.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.314.600,00	64.314.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.269.200,00	2.269.200,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.874.800,00	114.874.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.651.033.000,00	4.664.863.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.516.912.000,00	4.516.912.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.400,00	1.188.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.834.200,00	230.834.200,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiiksa			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.100,00	5.642.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.206.100,00	317.233.200,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.595.800,00	6.155.800,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.135.600,00	63.135.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.397.700,00	1.383.923.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.833.500,00	2.833.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.401.500,00	581.229.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.728.565.000,00	1.728.565.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.252,00	5.298.252,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.486.730,00	5.486.730,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.120,00	1.878.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.580.966,00	6.521.522,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.279.454,00	140.816.704,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.698.345,00	13.698.345,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.964.000,00	35.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.775.271.951,00	2.876.191.601,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.678.620,00	34.678.620,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.685.456,00	1.030.846.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.808.627,00	8.808.627,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.508.455,00	22.508.455,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.100.000,00	279.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.879.981,00	740.879.981,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.317.512,00	730.194.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.893.900,00	151.071.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.046.150,00	146.046.150,00	

Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.071.171,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.239.609,00	192.239.609,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.390.564,00	163.390.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.122.408,00	22.122.408,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.692.262,00	3.692.262,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.857.262,00	249.857.262,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.659,00	1.894.659,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.737.817,00	680.057.817,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.845.928,00	3.845.928,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.611.029,00	137.611.029,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.862.124,00	2.762.124,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Pasca Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.989.231,00	1.989.231,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.239.731,00	29.239.731,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.556.619,00	55.772.619,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	124.787.208,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.502.328,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial			
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.051.675,00	8.051.675,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.329.888,00	4.329.888,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	

Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.556.764,00	172.760.060,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.718.036,00	23.718.036,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.795.600,00	21.795.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.528,00	360.528,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.169.044,00	39.948.900,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.370.155,00	40.370.155,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.316.182,00	30.316.182,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.467.531,00	79.615.971,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.102.500,00	605.224.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.788.500,00	44.788.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.615.789,00	54.419.274,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.207.624,00	265.531.189,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.351.804.650,00	2.367.447.101,00	
5.1.05	Belanja Hibah	64.512.000,00	254.512.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.307.834,00	258.849.659,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.819.034,00	325.004.374,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.940.515,00	151.764.315,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.172.447,00	650.255.447,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.055.097,00	3.055.097,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.955.829,00	26.719.554,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.838.462.185,00	7.695.868.585,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.117,00	2.325.117,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.619.087,00	34.619.087,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.418.006,00	97.923.459,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.461.379.086,00	1.549.382.602,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	138.000.000,00	138.000.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.976.248,00	171.917.707,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.455.241,00	155.034.961,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	198.629.172,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	759.885.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.175.789.580,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.251.200,00	494.351.200,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.541.760.460,00	4.249.768.260,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.707.060,00	114.607.920,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.228.760,00	96.400.660,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi			

Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.235.260,00	56.072.160,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan			
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.148.935.900,00	1.146.535.900,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.254.840,00	167.402.440,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlindungnya Hak-Hak Pekerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.187.716,00	87.274.620,00	

Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.954.200,00	238.954.200,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.270.816,00	49.653.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.473.200,00	173.473.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.475.508,00	52.518.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.260.560,00	42.297.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.887.000,00	3.887.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.386.587.390,00	16.961.111.208,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.169.600,00	11.169.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.787.100,00	2.787.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.775.000,00	6.775.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.381.200,00	17.381.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.017.000,00	186.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.762.400,00	7.762.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.598.500,00	26.598.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.087.000,00	11.087.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.421.200,00	271.918.400,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.345.200,00	54.345.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	8.610.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.141.920,00	875.706.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.509.300,00	90.909.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	69.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00	
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.180.500,00	500.180.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.886.200,00	12.886.200,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani			

Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	101.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.841.280,00	526.253.900,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Kekerasan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.480.000,00	235.480.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.888.600,00	304.710.600,00	

Kegiatan	: 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.175.880,00	243.286.580,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.588.200,00	8.588.200,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak			
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.901.330,00	53.901.330,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Skor Kabupaten Layak Anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.043.800,00	9.043.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.007.220,00	46.081.440,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.528.400,00	54.528.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.056.300,00	15.056.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.151.000,00	16.151.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.705.000,00	1.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	69.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah KIE Perlindungan khusus anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.594.900,00	19.594.900,00	

Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan			
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik			
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Beras			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.437.055.004,00	5.657.653.048,00	
5.1.05	Belanja Hibah	214.372.200,00	214.372.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan			
Indikator Keluaran	: Informasi Stok Pangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.215.200,00	16.915.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.692.948.011,00	2.757.019.328,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.414.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.780.336,00	1.881.431.485,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase (%) Desa Tahan Pangan			
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan			

Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.248.200,00	2.248.200,00	
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)			
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.812.484,00	94.603.484,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.165,00	1.458.165,00	
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.801.364,00	57.751.348,00	
Program	: 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.287,00	7.251.287,00	
Kegiatan	: 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.546.575,00	151.546.575,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.752.441,00	90.985.521,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.547.085,00	169.850.925,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	39.895.901.028,00	41.900.479.421,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.494.256,00	27.494.256,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.222.043,00	68.222.043,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.345.978,00	9.345.978,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.993.612,00	24.979.287,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.428.800,00	61.428.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.757.350,00	3.757.350,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	183.731.984,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.107.050.395,00	3.107.050.395,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.959.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.198.960,00	107.598.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.461.952,00	930.573.828,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.890.000,00	524.393.859,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.671.200,00	5.671.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.478.720,00	127.478.720,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.568.660,00	1.565.374.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.545.700,00	7.545.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.570.700,00	287.755.680,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.300.500,00	420.284.340,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.188.402,00	1.168.356.935,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.403.097,00	117.513.857,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.011.381,00	108.180.761,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.653.201,00	95.846.281,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.653.201,00	95.846.281,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.995.557,00	156.995.557,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.575.683.896,00	18.987.145.236,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	120.157.471.740,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	245.666.892,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.847.913,00	264.748.833,00	
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.205.806,00	88.205.806,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.486,00	2.675.486,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.167.660,00	567.284.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Indikator Hasil	: Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
Kegiatan	: 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			

Sub Kegiatan	: 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.923,00	0,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.238.191,00	25.764.591,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.655.533,00	503.097.433,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.278,00	4.898.278,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Terkelolanya Persampahan			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.766.354,00	162.766.354,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.117,00	101.763.202,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.957.878.730,00	62.446.431.355,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.200.000.000,00	3.859.698.942,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.622.611.786,00	103.872.091.893,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang terdaur ulang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.114.727.679,00	1.523.769.768,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.359.857,00	5.359.857,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.225.438,00	3.225.438,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.351.115.700,00	13.774.623.126,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.309.910,00	19.792.410,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.804.747,00	3.804.747,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.180,00	819.180,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.700.719,00	135.700.719,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.073.116,00	144.073.116,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.932.020,00	47.932.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.721.855,00	1.044.110.865,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.990.000,00	9.990.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.910.849,00	17.910.849,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.324.000,00	9.324.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.999.176,00	82.999.176,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.769.220,00	46.844.500,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.664.680,00	498.492.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.274.025,00	275.574.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.458.477,00	565.458.477,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.626.725.592,00	1.905.212.492,00	

Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.451.879,00	524.451.879,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.886.758,00	243.886.758,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.431.545.522,00	1.434.214.432,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.355.723,00	124.495.093,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.846.692,00	85.976.362,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.265.104,00	123.265.104,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.351.600,00	4.351.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.042.300,00	4.042.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.592.400,00	4.884.300,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.863.357.737,00	13.377.312.444,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.713.400,00	4.713.400,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.484.300,00	3.484.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.800.700,00	137.400.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.842.700,00	9.842.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.840.800,00	26.840.800,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.997.532,00	25.997.532,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.057.116,00	107.345.316,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.997.600,00	5.997.600,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.264.220,00	117.264.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.874.252,00	429.526.252,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.570.000,00	28.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penataan Desa			
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan penataan desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.616.900,00	18.616.900,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa			
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.206.142,00	1.429.621.612,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.517.900,00	131.630.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.639.300,00	209.639.400,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	192.000.000,00	192.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.058.052,00	141.322.052,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.086.200,00	32.188.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.954.100,00	30.754.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.368.800,00	689.728.500,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.685.400,00	497.003.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.815.800,00	56.815.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.666.875,00	18.666.875,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.145.778.116,00	2.973.736.416,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Total Fertility Rate (TFR)			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.896.700,00	48.089.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.358.200,00	11.358.200,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.200.000,00	175.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.629.460,00	36.530.320,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Persentase Advokasi Komunikasi KIE			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.640.000,00	20.640.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.518.700,00	462.213.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.700,00	149.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.832.720,00	204.943.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	186.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.781.600,00	45.731.600,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.265.500,00	544.691.080,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.756.800,00	10.756.800,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.231.200,00	174.108.200,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Faskes yang Melayani KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.080.000,00	68.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.140.000,00	361.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.486.100,00	71.486.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.559.433,00	676.680.685,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung KB yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.898.160,00	71.935.060,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	94.200.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indikator Hasil	: Persentase Kelompok kegiatan yang aktif			
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.209.200,00	91.209.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Persentase Kelompok yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.948.700,00	58.948.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan			
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.878.600,00	13.878.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.491.200,00	5.491.200,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	33.997.099.626,00	35.117.736.286,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.953.900,00	8.953.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.289.900,00	2.289.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.118.200,00	5.118.200,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.738.248,00	240.113.648,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.620.316,00	462.335.716,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.745.700,00	8.745.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.294.000,00	12.294.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.700,00	133.415.148,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.857.377.640,00	13.857.377.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.600,00	20.250.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.742.000,00	257.622.952,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.426.320,00	72.426.320,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.070.061.676,00	2.297.056.676,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.227.500,00	12.227.500,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.230.404,00	349.736.464,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.050.000,00	42.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.329.103.112,00	1.396.377.792,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.075.000,00	302.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.315.695,00	45.315.695,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	529.347.649,00	818.411.296,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			
Kegiatan	: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.259.800,00	451.259.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.208.177,00	38.208.177,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.514.000.000,00	20.044.589.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.703.371.608,00	27.905.716.323,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.371.230,00	65.371.230,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
Indikator Keluaran	: Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.265.845,00	19.515.845,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.059.576,00	103.359.043,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.258.029.990,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.027.784,00	757.916.744,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.800,00	646.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.231.992,00	1.296.934.772,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.259.550,00	493.707.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.329.100,00	92.329.100,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.100,00	1.456.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.300,00	1.558.300,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Indikator Keluaran	: Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	3.564.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.643.400,00	63.643.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.463.800,00	14.463.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.759.500,00	286.759.500,00	

Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.248.265,00	193.248.265,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.405.915,00	49.446.595,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.082.375,00	47.123.055,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.077.348.311,00	17.597.696.516,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.264.400,00	20.264.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.848.000,00	2.848.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.079.600,00	9.079.600,00	

Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.949.603,00	84.166.455,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.268.820,00	22.268.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.230.700,00	176.230.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.788.300,00	11.788.300,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.296.000,00	40.296.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.711.379,00	2.711.379,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	198.629.172,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.628.749,00	49.628.749,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	358.748.407,00	358.748.407,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.704.480,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	129.815.180,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.452.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	167.452.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.769.220,00	139.769.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.902.660,00	717.219.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.696.824,00	121.031.824,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.225.121,00	170.335.821,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.143.164,00	203.143.164,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.785.222.987,00	8.251.355.761,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25.848.970,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.119.142,00	19.119.142,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.887.748,00	153.887.748,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Hubungan Media			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.887.726,00	57.887.726,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.555.534,00	7.555.534,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.920.344,00	44.920.344,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung			
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.470.745,00	63.470.745,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.370.674.291,00	3.890.987.311,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.702.112.243,00	39.630.081.703,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25.730.007.155,00	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.322.600,00	970.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.757.004.950,00	1.539.561.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.883.900,00	177.883.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.054.200,00	3.054.200,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)			
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.182.900,00	7.182.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.699.200,00	4.699.200,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.619.000,00	8.619.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.607.574,00	410.037.552,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.254.100,00	6.254.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.297.300,00	213.297.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.361.696,00	32.361.696,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.833.116,00	50.833.116,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.206.327,00	51.381.447,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.396.000,00	28.396.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.792.000,00	9.792.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.769.220,00	121.869.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.121.500,00	623.943.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.369.712,00	29.369.712,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	159.834.450,00	
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Indikator Hasil	: Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			
Kegiatan	: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.054.700,00	10.054.700,00	
Kegiatan	: 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah izin yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.395.400,00	4.395.400,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi			
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.766.500,00	160.766.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.057.200,00	78.057.200,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.257.420,00	72.150.010,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.594.300,00	31.594.300,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Indikator Hasil	: Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian			
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian			
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.327.700,00	583.619.900,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.966.800,00	97.966.800,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan UMKM			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas SDM UMKM			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.811.900,00	12.811.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.620.560,00	54.657.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.205.200,00	96.205.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.007.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0009 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.138.160,00	42.175.060,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.128.370,00	352.165.270,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan UMKM			
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.646.865,00	919.683.765,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.502.520,00	259.316.320,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)			
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.245.600,00	5.245.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.267.500,00	5.267.500,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.317.100,00	10.317.100,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPSTP			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.042.200,00	3.042.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.709.300,00	1.342.839.200,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.640.600,00	16.640.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.536.700,00	13.034.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.781.280,00	530.781.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.008.800,00	90.008.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.656.000,00	85.656.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	231.734.034,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	209.916.651,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	249.750.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.365.000,00	679.365.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.544.220,00	122.544.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.292.600,00	829.152.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.555.000,00	190.555.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)			
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.300,00	1.810.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.631.300,00	77.631.300,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase tersusunnya peta potensi investasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.222.200,00	19.222.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.143.800,00	286.143.800,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)			
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.363.450,00	1.703.363.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.405.600,00	546.705.600,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPSTP)			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.131.600,00	11.831.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.098.612.152,00	2.192.193.952,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.236.700,00	11.296.700,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.066.400,00	263.496.400,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPSTP)			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.819.800,00	134.819.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.713.200,00	293.713.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.877.800,00	40.877.800,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPSTP)			
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang terkelola dengan baik			

Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.420.500,00	147.920.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.342.700,00	346.342.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.712.100,00	141.212.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.823.300,00	57.823.300,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.832.656,00	256.342.956,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.986.300,00	383.892.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.579.772.500,00	6.085.631.454,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	3.700.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000.000,00	11.336.294.061,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Cabang Olahraga			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.851.832,00	1.447.062.632,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.380.621.728,00	20.811.371.728,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.051.376.040,00	3.533.376.040,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.102.059.503,00	3.217.297.403,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.546.700,00	34.958.400,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan			

Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.045.600,00	350.045.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	959.660.050,00	959.660.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.081.100,00	251.081.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.945.860,00	629.745.860,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.083.700,00	7.083.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.750.890,00	62.750.890,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.924.825,00	9.924.825,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.112.380,00	2.112.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.872.580,00	3.872.580,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.936.865,00	4.936.865,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.600,00	1.968.600,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.094.800,00	4.094.800,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.400,00	4.320.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.966.000,00	2.966.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.295.700,00	7.295.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.100,00	1.722.100,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.789.675.181,00	18.709.705.181,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.156.200,00	30.156.200,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.054.800,00	7.054.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.688.289,00	715.688.289,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.230.000,00	115.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.988.200,00	25.988.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.364.900,00	60.479.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.076.938,00	796.372.238,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.211.200,00	36.956.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.991.000,00	46.055.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.420.000,00	53.590.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.024.220,00	137.351.780,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.283.956,00	738.121.946,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.752.000,00	48.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.884.000,00	39.884.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.600.000,00	1.341.100.000,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.288.740,00	815.302.530,00	
5.1.05	Belanja Hibah	17.880.000.000,00	18.933.253.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.473.400,00	1.700.473.400,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.989.634.627,00	14.428.428.462,00	
5.1.05	Belanja Hibah	69.805.825.000,00	79.395.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.649.100,00	827.649.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.802.564.500,00	47.796.063.025,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.001.157.000,00	18.778.294.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.916.100,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	21.688.047.605,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.275.854.540,00	21.832.769.630,00	
5.1.05	Belanja Hibah	9.381.534.000,00	44.884.470.012,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Indikator Hasil	: Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah			
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.630.326.340,00	6.132.641.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.938.200,00	375.938.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.467.280.000,00	3.891.799.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.010.000,00	426.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.415.500,00	1.415.500,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan			
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.827.860,00	466.429.985,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.462.400.000,00	319.376.286.716,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.068.550,00	405.360.000,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.563.600,00	33.648.875.911,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.960.000.000,00	3.340.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)			
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.143.920,00	573.153.955,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.413.600,00	680.413.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.272.692,00	663.298.907,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	63.296.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.156.500,00	1.156.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000,00	950.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.652.000,00	6.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.209.700,00	3.209.700,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.935.000,00	47.847.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.568.400,00	10.568.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.928.428,00	206.928.428,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.700,00	10.950.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.575.692,00	65.575.692,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.866.887,00	23.866.887,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.804.400,00	12.804.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.200,00	12.100.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.219.500,00	77.219.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.924.300,00	527.947.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.310.000,00	121.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Indek Pembangunan Literasi masyarakat			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.806.940,00	82.880.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.314.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	6.796.240.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.693.100,00	32.693.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.822.700,00	2.822.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.306.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	49.513.135,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.171.272,00	128.666.832,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.125.180,00	197.397.040,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.939.200,00	48.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.440.840,00	71.377.880,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan			
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.000.940,00	134.074.020,00	
Kegiatan	: 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik			
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.156.024,00	124.341.004,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.211.532,00	82.148.572,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.124.340,00	42.925.340,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.470.892,00	137.618.192,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis Yang diinput pada SIKN dan JIKN			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.165.072,00	83.275.832,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.889.372,00	83.700.132,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.796.420,00	42.832.960,00	
Program	: 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			
Kegiatan	: 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan			
Sub Kegiatan	: 2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			

Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.283.533,00	47.320.073,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan			
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.513.695,00	13.513.695,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.873.120,00	6.873.120,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.851.309.189,00	13.916.824.577,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.796.284,00	41.602.609,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.723.448,00	50.723.448,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.625.037,00	4.625.037,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.603.800,00	263.603.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.779.876,00	10.779.876,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.511.200,00	36.511.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.471.000,00	3.471.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	167.939.448,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.405.708,00	123.765.333,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.631.324,00	37.323.934,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.949.760,00	306.432.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.889.700,00	130.889.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.241.267,00	359.241.267,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.542.600,00	46.542.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.022.400,00	13.142.400,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.572.396,00	136.300.702,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.842.064,00	124.842.064,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.248.600.000,00	1.248.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.606.307,00	530.606.307,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.682.456,00	9.682.456,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah TPI yang memberikan layanan			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya			

Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.507.674,00	605.507.674,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.393.157,00	5.393.157,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.989.736,00	17.989.736,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.388.548,00	100.388.548,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.053.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	300.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	99.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.019.380,00	197.019.380,00	
5.1.05	Belanja Hibah	261.500.000,00	261.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.669.988,00	64.371.408,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari			
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya			

Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.837.147,00	186.837.147,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.807.616,00	20.807.616,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Produksi Olahan Hasil Perikanan			
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.925.752,00	99.925.752,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.763.318,00	325.763.318,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.999.915,00	882.350.917,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata			
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)			
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.898.500,00	601.790.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.590.800,00	4.590.800,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	28.219.450.205,00	28.762.228.188,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah DTW yang memungut retribusi			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.136.132,00	379.183.040,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.513.400,00	5.312.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.655.300,00	83.655.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.793.600,00	11.793.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.532.400,00	242.069.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.372.800,00	40.372.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.222.800,00	55.222.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	940.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.796.600,00	167.320.910,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.000.000,00	999.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.793.790,00	112.874.790,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.419.500,00	222.419.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.324.287.844,00	3.605.374.844,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.210.000,00	16.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.949.284,00	198.208.492,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.494.720,00	126.494.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.065.260,00	2.281.465.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.830.000,00	245.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.264.000,00	117.264.000,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase DTW yang ditata			
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah daya tarik wisata yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.890.948,00	137.038.968,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan yang ditata			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.189.600,00	4.189.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.697.365.100,00	8.764.145.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.289.200,00	94.289.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.529.300,00	58.529.300,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah destinasi yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.504.103.900,00	6.491.291.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.772.803.960,00	6.699.061.540,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.130.487.588,00	7.130.487.588,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.701.600,00	215.701.600,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.202.860,00	135.239.760,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0011 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.231.360,00	128.268.260,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.213.200,00	547.213.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.325.460,00	137.363.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.150.414.180,00	10.770.131.325,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif			
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang berpartisipasi			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.465.360,00	76.502.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.932.000,00	55.932.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang berpartisipasi			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.228.348,00	539.228.348,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.673.250,00	106.673.250,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.004.469,00	84.004.469,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.293.974,00	123.293.974,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Nilai LKjIP			
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.258.000,00	104.553.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.535.869,00	1.803.917.618,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	47.858.013.568,00	40.696.751.629,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.082.870,00	47.082.870,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.739.369,00	14.739.369,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.530.607,00	84.530.607,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.439.147.479,00	1.626.769.225,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.938.359,00	35.938.359,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.802.917,00	405.897.807,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.128.718,00	1.036.633.978,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.566.714,00	52.566.714,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.218.372,00	76.218.372,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	231.734.034,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	967.853.400,00	967.853.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.636.000,00	569.336.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	239.613.480,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik			

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.656.020,00	1.288.256.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.400.000,00	327.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.200.000,00	187.694.475,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	252.647.862,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)			
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.936.864.927,00	5.323.947.677,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	230.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.915.000,00	528.915.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.250.000,00	491.495.233,00	

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.000.000,00	192.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.219.000,00	197.219.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.830.678.650,00	3.594.028.850,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	5.721.200.000,00	5.721.200.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	176.300.000,00	176.300.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.110.360,00	272.658.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.735.000,00	46.735.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.070.600,00	34.070.600,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi			

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.221.100,00	3.221.100,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.781.500,00	64.269.500,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.579.000,00	25.437.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	638.258.998,00	2.747.608.998,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Luas Tanam Padi			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.317.900,00	57.317.900,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.942.583.900,00	4.188.083.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.678.961.891,00	5.678.961.891,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.515.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.333.900,00	37.468.318,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.299.709,00	166.299.709,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.334.878.847,00	1.334.878.847,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.058.131,00	86.058.131,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	

5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.693,00	22.190.693,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	4.386.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.351.917.468,00	3.038.157.408,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	52.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan			
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.352.938.130,00	3.352.816.490,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.263.800,00	414.263.800,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.314.306,00	53.314.306,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.174.160,00	84.174.160,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.122.652,00	609.313.532,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.828.160,00	11.828.160,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.703.170,00	1.484.895.890,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.723.500,00	29.723.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.162.500,00	67.162.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.942.800,00	21.128.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.798.000.000,00	99.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Indikator Keluaran	: terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.053.400,00	5.053.400,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar			
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya data barang kebutuhan pokok dan barang penting			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.198.700,00	6.198.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.056.100,00	32.056.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.350.974,00	447.350.974,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.153.700,00	8.153.700,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung			
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.689.100,00	626.689.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.973.200,00	62.973.200,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			

Indikator Hasil	: Persentase Perlindungan terhadap Konsumen			
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.761.104,00	509.926.964,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.600,00	11.635.600,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.006.100,00	251.006.100,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)			
Kegiatan	: 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.962.700,00	202.176.850,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.200,00	2.095.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.300,00	640.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.821.500,00	3.934.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.672.700,00	2.672.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.126.480,00	126.237.180,00	

Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.285.342.558,00	13.785.706.306,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.787.920,00	97.678.820,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.716.900,00	26.716.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.867.616,00	223.867.616,00	

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.553.000,00	14.553.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.160.000,00	83.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	8.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.081.480,00	135.192.180,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.974.720,00	90.974.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.062.000,00	68.062.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	891.391.600,00	0,00	
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing			
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.222.360,00	694.259.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.940.720,00	88.304.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.066.268.764,00	4.324.573.464,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.700,00	3.461.100,00	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha			
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas			
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.750.820,00	85.824.620,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang terdata di SIINas			
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi Industri yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.900,00	1.175.900,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.854.842,00	42.854.842,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.665.494,00	11.665.494,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.754,00	6.949.754,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	87.633.292.328,00	90.032.378.934,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.976.903,00	809.976.903,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.356.634,00	9.356.634,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.797.384,00	123.797.384,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.647.078,00	10.647.078,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.777.104,00	229.777.104,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.204.913,00	104.204.913,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.711.297.927,00	16.793.707.527,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.367.800.409,00	13.821.312.409,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	532.445,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	153.901.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.890,00	1.329.780,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.601.863,00	3.499.584.093,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.103.951,00	177.103.951,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.632.976,00	177.632.976,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.023.170.945,00	2.033.950.945,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.064.838.613,00	12.282.905.613,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	696.306.410,00	856.306.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.715.574.344,00	9.463.209.038,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.328.895.824,00	4.248.738.525,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	12.874.629.825,00	19.321.523.822,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.990.370,00	35.145.271.270,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.133.092,00	137.440.656,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.783.506,00	66.420.306,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.460.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.594.915,00	270.705.675,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.117.723,00	36.117.723,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.278.579.761,00	3.608.338.541,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.875.024,00	412.782.216,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.177.363.951,00	4.925.084.643,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.235.794,00	2.080.059.805,00	
5.1.05	Belanja Hibah	423.627.615.500,00	842.008.793.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.734.606,00	114.000.096,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.774.906,00	344.774.906,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.379.876.500,00	2.545.468.845,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.245.892,00	93.245.892,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.292.808,00	81.425.553,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.551.159,00	131.949.394,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.012.806,00	97.278.296,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.010.759,00	77.028.989,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.843.097,00	171.975.842,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.829.324,00	49.962.069,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.161.280,00	468.897.280,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.234.976,00	236.850.466,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.261.462,00	423.261.462,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.381.309,00	97.381.309,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.991.208,00	349.391.208,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.577.560,00	168.991.635,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.613.991,00	698.613.991,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.131.528,00	7.131.528,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.355.976,00	62.355.976,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			

Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: cakupan layanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.368.900,00	7.368.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.967.500,00	2.967.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.842,00	10.480.842,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.906.661,00	299.680.937,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.700,00	2.185.700,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.566.775,00	657.566.775,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.626.504,00	150.873.864,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.993.959,00	137.935.926,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.554.000,00	1.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.205.954.631,00	3.025.966.998,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.278.400,00	156.598.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.593.439,00	578.836.010,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.892.000,00	1.317.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.552.780,00	1.339.922.780,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.710.209.739,00	1.713.006.939,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.350.997.190,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.901.874.000,00	2.651.124.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.328.536,00	713.871.726,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.194.609.562,00	17.642.874.805,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.252.485.000,00	24.743.343.647,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.843.620,00	44.843.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.332.703,00	651.332.703,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.184.754.148,00	2.776.536.618,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.760.000,00	128.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.979.012,00	694.748.112,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.978.752.448,00	3.150.904.124,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.462.880,00	310.462.880,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.984.732,00	501.690.779,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.682.864.374,00	2.709.712.974,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.018.769.031,00	15.192.658.031,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.060.492,00	263.143.623,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.172.158,00	162.207.669,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.198.744,00	116.198.744,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.422.075,00	117.422.075,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.357.254,00	124.478.054,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.601.342,00	124.601.342,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.794.193,00	197.794.193,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.535.248,00	1.377.036.728,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.956.982,00	772.037.725,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.595.792,00	1.322.913.214,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.948.925,00	603.391.869,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.325.554,00	689.539.008,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.472.166,00	577.729.966,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.969.130,00	1.105.119.610,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.236.000,00	503.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.590.209.823,00	4.651.661.603,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.474.635,00	253.474.635,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.697.127,00	16.997.127,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.363.308.899,00	5.588.514.835,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.394.489,00	10.394.489,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.510.568.000,00	5.883.723.771,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.027.487,00	1.464.447.987,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.886.721.039,00	20.523.951.061,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.939.024.070,00	8.599.341.452,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.879.247,00	17.879.247,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.720.862,00	14.720.862,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.458.575,00	98.458.575,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.464,00	1.978.464,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.087.649,00	72.275.898,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.996.264,00	17.996.264,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.334.308,00	2.334.308,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.942.605,00	7.942.605,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.791.297,00	78.698.037,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.650.650,00	1.034.925.519,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	424.801.940,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.703.292,00	5.874.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.041.674,00	197.041.674,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.641.764,00	38.641.764,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	210.154.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	549.856.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.914.293,00	132.129.183,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.550.700,00	134.570.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.931.260,00	550.981.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	59.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	8.000.000,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.973.532,00	102.043.716,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.967.000,00	3.267.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.118.614,00	38.718.614,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.436.995,00	12.200.995,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.077.644,00	353.540.732,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.100.376,00	128.916.376,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.251.130,00	56.205.530,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.001.740,00	151.884.500,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.885.547,00	13.885.547,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.755.577,00	6.755.577,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.559,00	5.760.559,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.034.520,00	7.034.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.791.236,00	81.891.236,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.962.742,00	5.962.742,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.306.963,00	49.306.963,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.458.131,00	570.800.131,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.973.968,00	258.340.168,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.267.518,00	48.267.518,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.843.971,00	21.843.971,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.253.310,00	19.400.270,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.685.255,00	201.709.455,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.021.875,00	48.021.875,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.501.980,00	21.501.980,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.031.643,00	48.031.643,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.576.758,00	305.933.658,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.580.268,00	46.580.268,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.023.762,00	961.023.762,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.890.150,00	71.751.110,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.547.580,00	88.547.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.431.214,00	45.431.214,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.165.206,00	30.165.206,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.249.616,00	74.396.576,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.593.835,00	15.593.835,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.539,00	1.015.539,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.724.382,00	4.724.382,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	56.833.948.588,00	57.870.663.533,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.181.770,00	48.181.770,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.879.220,00	11.879.220,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.262.291,00	2.262.291,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.919.850,00	7.919.850,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.333.770.921,00	1.292.197.536,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.293.029,00	11.293.029,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.866.691,00	391.866.691,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.005.002,00	292.005.002,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.696.928,00	41.696.928,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.111.000,00	6.438.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.445.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.620.843,00	23.620.843,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.930.000,00	402.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.990.000,00	214.990.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.623.820,00	111.084.720,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.237.700,00	405.983.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	12.210.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.139.800,00	298.139.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.325.652,00	261.325.652,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.090.726,00	225.090.726,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.872.320,00	362.872.320,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.979.550,00	358.979.550,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.937.144,00	179.027.144,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.531.960,00	231.853.803,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.432.451,00	5.432.451,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.090,00	1.686.090,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00	1.179.425.157.826,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	48.342.578.199,00	65.266.887.936,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.235.426,00	307.731.516,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.920.604,00	30.920.604,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.757.854,00	159.757.854,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.190.781,00	127.990.781,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.323.931,00	411.323.931,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.537.561,00	12.537.561,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.694.938,00	33.694.938,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.756.644,00	100.868.644,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	650.320.473.189,00	1.192.582.509.620,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.548.175,00	276.548.175,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.071.571,00	24.071.571,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.079.673,00	125.079.673,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.381.699,00	30.381.699,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.539.487,00	148.539.487,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.295.240,00	1.074.995.240,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.615.200,00	73.615.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.569.575.194,00	3.569.575.194,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.170.068,00	698.270.068,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.150.158,00	27.150.158,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.243.793,00	1.197.143.793,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.012.231,00	16.012.231,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.437.893,00	26.437.893,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.566.958,00	12.566.958,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.861.568,00	12.861.568,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.271.835,00	4.271.835,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.375.001,00	6.375.001,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	205.897.571.725,00	181.626.379.900,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.397.810,00	14.397.810,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.409.887,00	36.409.887,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.255.473,00	550.255.473,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.943.060,00	75.464.460,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.848.400,00	66.848.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pengadaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.372.568,00	472.613.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	866.194.605,00	1.670.119.209,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	14.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.426.600,00	168.426.600,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.444.500,00	59.764.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.662.300,00	856.182.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.008.452,00	545.598.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	136.308.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Efektivitas pengelolaan pajak daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.291.303,00	133.807.903,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.064.678,00	338.912.178,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	881.052.444,00	881.052.444,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.119.001,00	116.919.001,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.135.084,00	3.135.084,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.889.925,00	823.889.925,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.291.117,00	851.760.417,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.457.496,00	9.457.496,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.839.096,00	2.014.359.096,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.747.795,00	456.747.795,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.027.304,00	2.027.304,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.044.130,00	13.044.130,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.462.692,00	13.462.692,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	23.000.221.932,00	27.367.057.999,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.091.750,00	25.091.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.254.000,00	152.254.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.536.600,00	37.536.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.454.800,00	57.454.800,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.419.448,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.812.400,00	544.510.092,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	350.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.379.500,00	47.379.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.975.200,00	90.975.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.060.000,00	266.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	2.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.970.000,00	61.970.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	32.600.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.722.908,00	11.116.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.800.248,00	343.197.748,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.246.202,00	13.246.202,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.558.308,00	28.492.008,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.791.300,00	180.791.300,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan mutasi dan promosi ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.403.636,00	4.403.636,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.181.680,00	196.205.089,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.104.649,00	78.500.249,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.937.700,00	1.123.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.485.100,00	10.081.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.994.500,00	3.994.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.131.700,00	17.131.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.824.900,00	14.188.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.533.500,00	9.061.700,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja. evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.569.361,00	14.569.361,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.569.361,00	8.569.361,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.936,00	3.200.936,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.654.296,00	624.236.630,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.376.500,00	7.376.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.616.400,00	1.616.400,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			
Indikator Keluaran	: Persentase pengembangan kompetensi teknis			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.021.460,00	56.021.460,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.240.247.416,00	10.832.073.296,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.595.000,00	502.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.529.100,00	15.529.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.503.672.300,00	6.503.655.900,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)			
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.414.567,00	18.414.567,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.632.893,00	14.315.636,00	

Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.377.700,00	7.377.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.195.855,00	285.195.855,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.730.227,00	42.730.227,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: ketersediaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	146.985.587,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.750.000,00	387.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.303.456,00	199.738.073,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: ketersediaan jasa penjunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.314.804,00	42.314.804,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.519.400,00	14.519.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.901.416,00	87.901.416,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.974.720,00	90.974.720,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.649.064,00	455.479.376,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.844.375,00	45.118.031,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.069.192,00	72.069.192,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.538.512,00	24.538.512,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.855.060,00	325.500.420,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.731.100,00	524.731.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.080.697,00	82.080.697,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.688.800,00	213.688.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.950.242,00	230.950.242,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.715.737,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.024.832,00	233.024.832,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.943.455,00	315.943.455,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.208.900,00	240.208.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.851.355,00	207.851.355,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.818.165,00	237.818.165,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.078.106,00	335.078.106,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.430.800,00	239.430.800,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.726.240,00	579.426.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.481.187,00	1.151.413.687,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.003.887.205,00	1.945.046.605,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.213.825,00	134.213.825,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.016.860,00	199.016.860,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.039.042,00	9.039.042,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.133.476,00	5.133.476,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	33.456.306.755,00	33.642.044.345,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.309.460,00	10.215.040,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.878.780,00	190.825.580,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.518.520,00	53.039.345,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.743.200,00	41.743.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: -			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	198.629.172,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	714.143.142,00	900.742.689,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.596.401.572,00	2.596.401.572,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	751.470.000,00	751.470.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.942.708,00	22.632.708,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.329.634,00	45.954.634,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.970.000,00	73.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.200.000,00	360.890.000,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.870.000,00	36.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.105.000,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.610.968,00	208.610.968,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.376.563,00	110.385.063,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.753.589,00	81.753.589,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.432,00	15.250.432,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.195.658,00	52.195.658,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.983.722,00	5.983.722,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.222.458,00	1.225.468.458,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)			
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.098.421,00	882.098.421,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.207.553,00	2.207.553,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.291.549,00	7.520.499.621,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.949.659,00	390.695.659,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.513.084,00	445.513.084,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.555.700,00	11.555.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.921.200,00	8.921.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.213.042.692,00	8.227.044.092,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	2.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.734.200,00	347.734.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.316.900,00	21.316.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.636.800,00	40.636.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.104.862,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	581.312.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.576.635,00	10.576.635,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.908.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.829.720,00	140.407.119,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.750.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.057.760,00	21.057.760,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.270.000,00	79.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.836.300,00	402.116.500,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.870.000,00	23.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.992.000,00	53.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: undefined			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: undefined			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.857.500,00	8.857.500,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.835.600,00	1.835.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.558.716,00	684.363.496,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.141.133,00	31.141.133,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.638.200,00	50.638.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.159.750,00	2.804.955.046,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.648.500,00	10.648.500,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.125.300,00	78.125.300,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.862.468,00	301.862.468,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.312.800,00	37.312.800,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.116.100,00	29.116.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.707.400,00	26.707.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.930.900,00	7.930.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.574.300,00	5.574.300,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.000,00	768.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.544.028,00	389.544.028,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.613.600,00	21.613.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.660.000,00	33.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.104.862,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	623.896.590,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.888.616,00	272.888.616,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.474.265,00	11.474.265,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	151.966.125,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	69.529.488,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.240.073,00	27.240.073,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.272.040,00	90.272.040,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.689.272,00	457.687.792,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.676.020,00	398.154.020,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.677.500,00	35.677.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.200.000,00	221.200.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.338.700,00	12.338.700,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.900,00	1.281.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.984.416,00	577.317.056,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.951.900,00	32.951.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.582.900,00	55.582.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.268.400,00	3.692.896.200,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Penegembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.240.600,00	17.240.600,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.562.500,00	27.562.500,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.624.377,00	375.624.377,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.490.600,00	67.490.600,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.656.700,00	26.656.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.072.300,00	83.072.300,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.070.484,00	9.070.484,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.743.304,00	5.743.304,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.652.984,00	17.609.040,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.006.135,00	35.006.135,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.286.640,00	73.286.640,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.104.862,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.414.187.950,00	4.552.254.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.500,00	388.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.760.992.911,00	1.735.769.611,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.815.513,00	5.815.513,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.677.302.682,00	3.930.413.440,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.010.184,00	28.010.184,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.018.556,00	639.706.356,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.697.163,00	517.440.103,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.117.949,00	70.617.949,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.470.600,00	644.994.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.298.044,00	2.362.454.364,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.884.524,00	619.993.364,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.945.000,00	49.292.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.801.278,00	1.367.138.053,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.745.778.733,00	0,00	

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.203.436,00	8.203.436,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.273.132,00	37.273.132,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.049.183,00	54.049.183,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.225.951.910,00	3.121.112.160,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.769.400,00	9.769.400,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.156.600,00	67.156.600,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.448.081,00	476.448.081,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.537.500,00	67.537.500,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.949.536,00	305.679.736,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.794.036,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.612.100,00	54.612.100,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1001 Kelurahan Kapal			
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.366.700,00	13.366.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.741.483.222,00	4.926.897.522,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.355.375,00	5.474.595.504,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1002 Kelurahan Sempidi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.196.500,00	13.196.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.454.485,00	652.454.485,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.339.366.307,00	1.804.646.533,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1003 Kelurahan Abianbase			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.566.700,00	10.566.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.429.300.609,00	2.560.677.754,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1004 Kelurahan Sading			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.116.700,00	11.116.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.658.500,00	98.578.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.108.198.434,00	2.255.937.034,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1005 Kelurahan Lukluk			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.116.700,00	10.116.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.991.472,00	1.289.862.677,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.966.015,00	141.002.555,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.902.998,00	9.902.998,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.469.210.635,00	18.106.441.036,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.972.690,00	11.721.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.895.500,00	736.439.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.295.886,00	40.295.886,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.185.600,00	58.185.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.104.862,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.116.422.570,00	3.606.170.220,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.890.846,00	421.520.003,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.211.567,00	74.002.923,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.413.553.809,00	1.313.659.026,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.480.955,00	61.480.955,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.740.316,00	423.886.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.406.435,00	764.377.315,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.425.320,00	124.425.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.267.852,00	445.682.072,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.700.212,00	87.700.212,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.165.400,00	176.007.150,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.127.500,00	22.127.500,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.104.314,00	735.217.614,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.473.818,00	47.473.818,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.080.958,00	47.080.958,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.514.779.681,00	3.245.074.133,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.465.831,00	10.465.831,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara			
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.871.942,00	71.871.942,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.523.066,00	420.523.066,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.348.515,00	57.148.515,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.928.050,00	801.928.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.160.800,00	13.160.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.558.300,00	23.558.300,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.1001 Kelurahan Kerobokan Kelod			
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.919.744,00	6.919.744,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.542.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.571.250,00	344.918.625,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.579.067,00	1.235.826.707,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.1002 Kelurahan Kerobokan Kaja			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.722.139,00	6.722.139,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.253.300,00	2.253.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.880.500,00	174.880.500,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.346.115,00	321.346.115,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.801.364,00	844.270.073,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.1003 Kelurahan Kerobokan			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.434.768,00	6.434.768,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.702.975,00	357.933.375,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.458.440,00	101.458.440,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.138.499.060,00	1.344.312.055,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.403.800,00	7.403.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.200,00	5.980.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.765.900,00	19.852.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.068.200,00	1.036.603.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.934.700,00	54.934.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.031.200,00	108.031.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.034.000,00	38.034.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah unit pengadaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.314.612.682,00	5.137.848.733,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	867.265.200,00	1.307.746.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.811.817,00	148.811.817,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.420.729.144,00	2.855.848.367,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.500.000,00	499.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.662.400,00	109.053.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.378.900,00	465.378.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.677.200,00	122.377.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.640.700,00	874.502.296,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.764.400,00	262.764.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.402.000.000,00	3.720.849.893,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.575.000,00	197.575.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.466.352,00	70.466.352,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.456.700,00	23.456.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.636.000,00	23.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.476.775.560,00	2.806.587.260,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.308.100,00	20.308.100,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.906.400,00	98.906.400,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.961.400,00	219.961.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.311.200,00	54.311.200,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1001 Kelurahan Tuban			
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.474.000,00	199.474.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.400.000,00	86.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.038.347.230,00	1.266.457.630,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1002 Kelurahan Kuta			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.247.000,00	833.941.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.250.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.355.500,00	134.355.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.658.147.400,00	1.903.728.900,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1003 Kelurahan Kedonganan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.920.000,00	307.920.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	210.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.428.200,00	122.428.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.389.888.064,00	1.944.130.030,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1004 Kelurahan Legian			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	30.060.000,00	30.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.936.500,00	696.936.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.797.600,00	16.797.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.175.030,00	1.462.817.030,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1005 Kelurahan Seminyak			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.113.000,00	18.113.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.419.700,00	30.419.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.217.200,00	264.491.200,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.393.800,00	10.393.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.610.500,00	553.090.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	99.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.253.943.149,00	14.247.378.222,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.906.400,00	14.906.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.532.355,00	874.773.855,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.019.000,00	72.339.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.808.000,00	71.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	98.441.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	73.492.794,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.871.689.770,00	2.375.602.020,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.963.364,00	914.403.237,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	875.022.990,00	1.625.717.877,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.018.424,00	83.107.088,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.843.196,00	516.708.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.642.996,00	860.888.112,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDaerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.374.320,00	121.374.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.728.700,00	683.658.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	90.170.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.910.000,00	489.890.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	751.005.145,00	751.005.145,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.132.100,00	11.132.100,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.688.480,00	633.276.527,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.230.681.744,00	5.014.517.052,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.438.775,00	35.438.775,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.400,00	999.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.764.938.886,00	5.430.493.136,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.825.900,00	953.281.700,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.756.480,00	419.756.480,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.761.010,00	308.761.010,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.374.000,00	67.574.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.322.691,00	836.485.639,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.014.700,00	7.014.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.729.600,00	23.729.600,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.1004 Kelurahan Benoa			
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			

Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.050,00	4.596.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.523.000,00	306.523.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.005.058,00	1.266.135.782,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.1005 Kelurahan Tanjung Benoa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.050,00	4.596.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.965.000,00	371.628.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.665.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.779.051,00	534.727.187,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.1006 Kelurahan Jimbaran			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.050,00	4.596.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.489.400,00	191.489.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			

Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.643.800,00	5.643.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.066.400,00	4.066.400,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.853.095.744,00	13.749.995.756,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.688.500,00	33.453.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.200,00	544.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.869.600,00	126.433.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.791.800,00	26.262.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.125.000,00	24.125.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.524.310,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	658.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	736.315.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.584.900,00	38.113.900,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	1.501.500,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.974.600,00	467.462.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.510.000,00	19.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	267.373.846,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.815.050,00	149.913.250,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.869.400,00	1.084.527.900,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.300,00	2.998.300,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.259.035.100,00	3.309.467.100,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Indikator Keluaran	: persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik			
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.385.700,00	5.080.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	20.627.840.000,00	19.737.245.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.292.500,00	966.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.679.500,00	32.679.500,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik			
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.461.985.600,00	2.733.886.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	2.279.152.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.546.600,00	12.546.600,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Indikator Keluaran	: Persentase pemberantasan penyakit masyarakat			
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.779.900,00	891.417.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.666.290.832,00	2.181.141.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.985.200,00	401.770.600,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.400.500,00	451.336.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.532.900,00	105.773.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	15.292.123.498,00	

PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



I NYOMAN GIRI PRASTA



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.406.812,00	7.406.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406.812,00	7.406.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.040.612,00	11.040.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040.612,00	11.040.612,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.129.112,00	15.129.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129.112,00	15.129.112,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	29.987.400,00	29.987.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.987.400,00	29.987.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %											
5	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	805.211.081.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.211.081.366,00	0,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	0,00	760.240.900.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.240.900.019,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	103.783.984,00	103.783.984,00	2.441.445,00	2.441.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.225.429,00	106.225.429,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %											
8	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	851.283.022,00	926.283.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.283.022,00	926.283.022,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %											
9	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	883.756.512,00	768.956.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.756.512,00	768.956.512,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.283.901,00	37.283.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.283.901,00	37.283.901,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	509.959.200,00	509.959.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.959.200,00	509.959.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	379.466.045,00	379.466.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.466.045,00	379.466.045,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	346.378.400,00	346.378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.378.400,00	346.378.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %											
15	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	134 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	389.028.693,00	389.028.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.028.693,00	389.028.693,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.121.600,00	151.121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.121.600,00	151.121.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %											
20	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.994.000,00	76.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.994.000,00	76.434.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	193 Unit	842.707.700,00	895.707.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.707.700,00	895.707.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
22	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	206.410.000,00	206.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.410.000,00	206.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	363.762.200,00	437.202.200,00	161.267.400,00	161.267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.029.600,00	598.469.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %											
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %											
24	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	159.614.000,00	159.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.614.000,00	159.614.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
25	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.622.200,00	2.672.200,00	929.400.200,00	929.400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.022.400,00	932.072.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	627.858.900,00	756.388.900,00	174.570.399.353,00	196.236.012.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.198.258.253,00	196.992.401.532,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	32 Paket	841.100,00	1.091.100,00	6.579.619.200,00	8.588.539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.460.300,00	8.589.630.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	246 Paket	7.957.862.284,00	7.957.962.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957.862.284,00	7.957.962.284,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
29	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	9.453.429.158,00	11.360.463.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453.429.158,00	11.360.463.156,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	584.528.400,00	580.162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.528.400,00	580.162.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
32	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	2.589.909.200,00	2.934.825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.909.200,00	2.934.825.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
34	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2789 Orang	67.459.796.584,00	56.192.368.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.459.796.584,00	56.192.368.264,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	246 Orang	1.032.636.000,00	1.086.689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.636.000,00	1.086.689.100,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
36	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	55 Satuan Pendidikan	347.814.680,00	348.619.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.814.680,00	348.619.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
37	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	55.870.295.471,00	55.587.603.476,00	15.093.534.529,00	16.300.740.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.963.830.000,00	71.888.343.560,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	269.823.000,00	269.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.823.000,00	269.823.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	305.871.671,00	305.871.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.871.671,00	305.871.671,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	16.754.165.300,00	17.408.294.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754.165.300,00	17.408.294.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	58.850.700,00	58.950.700,00	3.702.516.369,00	6.122.890.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.367.069,00	6.181.841.269,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
42	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	298 Satuan Pendidikan	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	15.384.500,00	15.484.500,00	4.459.156.134,00	4.459.156.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.540.634,00	4.474.640.634,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %											
44	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	14 Unit	704.485.850,00	1.270.672.560,00	199.181.806.502,00	158.662.951.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.886.292.352,00	159.933.623.610,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
45	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	103.420.950,00	139.829.450,00	25.702.118.200,00	28.482.994.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805.539.150,00	28.622.824.159,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7.104.000,00	7.104.000,00	3.921.074.700,00	5.514.574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.178.700,00	5.521.678.700,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
47	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	2.996.461.600,00	10.586.405.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.461.600,00	10.586.405.135,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
48	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket	5.309.880.310,00	5.513.630.600,00	4.309.956.600,00	9.282.798.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.836.910,00	14.796.429.451,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	313 Peserta Didik	485.753.200,00	298.253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.753.200,00	298.253.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	156.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.925.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
51	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	0,00	956.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.925.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2068 Peserta Didik	951.073.400,00	1.054.621.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.073.400,00	1.054.621.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1071 Orang	22.106.402.460,00	21.451.216.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.106.402.460,00	21.451.216.932,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
54	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	1.115.526.100,00	1.193.898.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.526.100,00	1.193.898.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
55	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	166.130.684,00	166.130.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.130.684,00	166.130.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
56	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	47.544.170.702,00	39.123.759.726,00	6.524.784.298,00	7.298.826.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.068.955.000,00	46.422.586.676,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	141.721.186,00	141.719.206,00	1.415.500,00	1.415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.136.686,00	143.134.706,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
58	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6290 Satuan Pendidikan	132.766.800,00	145.006.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.766.800,00	145.006.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	270 Orang	586.161.200,00	894.596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.161.200,00	894.596.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	16.565.984.464,00	17.778.854.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.984.464,00	17.778.854.871,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %											
61	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	10.287.332.700,00	9.240.060.478,00	17.910.020.000,00	15.588.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197.352.700,00	24.828.321.978,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	170.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.528.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
63	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD													
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	0,00	121.695.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.695.792,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
64	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	357 Paket	1.131.189.700,00	1.131.189.700,00	2.724.973.370,00	4.803.731.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.163.070,00	5.934.921.570,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
65	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	342 Peserta Didik	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
66	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	0,00	287.236.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.236.625,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
67	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	342 Peserta Didik	2.629.567.415,00	2.439.764.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.567.415,00	2.439.764.735,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
68	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	879.577.398,00	987.337.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.577.398,00	987.337.398,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
69	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	412.970.846,00	412.970.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.970.846,00	412.970.846,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
70	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	357 Satuan Pendidikan	118.047.950,00	118.047.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047.950,00	118.047.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
71	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	292 Satuan Pendidikan	13.829.672.036,00	15.444.272.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829.672.036,00	15.444.272.036,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	105.461.583,00	105.461.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.461.583,00	105.461.583,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	357 Dokumen	150.794.230,00	150.794.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.794.230,00	150.794.230,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	261.097.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.097.936,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
75	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0,00	206.713.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.713.869,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
76	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	174.340.832,00	331.277.832,00	6.599.000.000,00	6.699.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.340.832,00	7.030.277.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
77	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %											
78	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	69.806.294,00	69.806.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.806.294,00	69.806.294,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %											
80	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor													
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	155.420.500,00	147.920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.420.500,00	147.920.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula													
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	260 Orang	346.342.700,00	346.342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.342.700,00	346.342.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	153.712.100,00	141.212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.712.100,00	141.212.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda													
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	57.823.300,00	57.823.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.823.300,00	57.823.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %											
84	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	269.832.656,00	256.342.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.832.656,00	256.342.956,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %											
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %											
85	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3.854.758.800,00	6.469.523.954,00	5.000.000.000,00	15.036.294.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854.758.800,00	21.505.818.015,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %											
86	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.860.851.832,00	1.447.062.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.851.832,00	1.447.062.632,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.380.621.728,00	20.811.371.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380.621.728,00	20.811.371.728,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan													
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	115 Orang	2.051.376.040,00	3.533.376.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.376.040,00	3.533.376.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %											
89	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1221 Orang	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %											
90	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	3.102.059.503,00	3.217.297.403,00	29.546.700,00	34.958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.606.203,00	3.252.255.803,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %											
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %											
91	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	350.045.600,00	350.045.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.045.600,00	350.045.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
92	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	959.660.050,00	959.660.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.660.050,00	959.660.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
93	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	0,00	0,00	251.081.100,00	251.081.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.081.100,00	251.081.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
94	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	628.945.860,00	629.745.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.945.860,00	629.745.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
95	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	617.537.600,00	617.537.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.537.600,00	617.537.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
96	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
97	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
98	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
99	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	9.530.500,00	9.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530.500,00	9.530.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %											
100	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang/bulan	315.646.421.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.646.421.066,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
101	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2512 Orang/bulan	0,00	518.936.687.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.936.687.873,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yangtepat waktu	100 % 100 %											
102	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	24.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	24.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
105	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	3.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
107	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
108	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %											
109	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
110	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	3.594.636.200,00	3.641.786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.636.200,00	3.641.786.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
111	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	706.026.000,00	706.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.026.000,00	706.026.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
112	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	190.703.600,00	190.703.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.703.600,00	190.703.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
113	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
114	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %											
115	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	963.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.606.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
116	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	963.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.606.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
117	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	0,00	0,00	1.114.089.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.089.777,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	1.114.089.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.614.087,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
119	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
120	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
121	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	14.818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
122	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	14.818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
123	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
124	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %											
125	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	605.220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.220.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
126	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	605.220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.220.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
127	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.332.846.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332.846.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
128	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	15.332.846.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332.846.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
129	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.076.071.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.076.071.216,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
130	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	23.093.735.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093.735.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %											
131	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	151.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.219.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
132	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	151.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.219.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
133	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 Unit	6.023.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.907.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
134	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 Unit	0,00	6.068.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.307.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
135	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	915.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.242.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
136	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	0,00	915.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.242.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	338.400.000,00	0,00	3.427.301.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.701.352,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
138	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	0,00	338.400.000,00	0,00	3.427.301.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.701.352,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
139	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
140	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %											
141	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
142	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 % 100 %											
143	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
144	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	3.601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
145	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	0,00	401.234.864,00	0,00	9.878.766.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280.001.282,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
146	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	4.063.500,00	0,00	8.798.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802.997.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
147	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
148	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
149	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00	250.129.300,00	0,00	3.699.958.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.087.368,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
150	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	250.129.300,00	0,00	2.865.985.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.114.739,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
151	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	170.295.040,00	0,00	18.791.059.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961.354.968,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
152	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	251.481.760,00	0,00	8.204.540.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456.022.660,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
153	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2116 Unit	0,00	3.326.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.565.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
154	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2116 Unit	3.326.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.565.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
155	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	0,00	2.079.900,00	0,00	87.938.208.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.940.288.315,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
156	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit													
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	2.079.900,00	0,00	73.688.741.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.690.821.412,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
157	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	0,00	35.898.071.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.898.071.427,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
158	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	35.925.170.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925.170.567,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
159	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	0,00	3.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
160	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	3.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
161	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	0,00	264.542.752,00	0,00	79.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.886.352,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
162	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	259.742.752,00	0,00	79.343.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.086.352,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %											
163	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11317 Orang	591.845.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.845.360,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
164	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8450 Orang	0,00	564.746.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.746.220,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
165	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10803 Orang	166.769.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.769.620,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
166	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8414 Orang	0,00	166.843.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.843.420,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
167	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10288 Orang	515.068.960,00	487.965.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.068.960,00	487.965.420,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
168	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33879 Orang	113.553.900,00	113.553.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.553.900,00	113.553.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
169	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27248 Orang	98.452.400,00	98.452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.452.400,00	98.452.400,00	Insentif Fiskal
170	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337684 Orang	954.665.816,00	711.934.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.665.816,00	711.934.695,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
171	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79044 Orang	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
172	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8340 Orang	82.518.520,00	28.320.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.518.520,00	28.320.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
173	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2930 Orang	772.305.220,00	745.242.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.305.220,00	745.242.980,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
174	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	624 Orang	94.217.160,00	67.118.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.217.160,00	67.118.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
175	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4239 Orang	1.531.431.116,00	1.416.893.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.431.116,00	1.416.893.691,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
176	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17136 Orang	2.200.655.711,00	2.281.757.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.655.711,00	2.281.757.491,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
177	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	850.800,00	850.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.800,00	850.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
178	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	198.398.912,00	171.373.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.398.912,00	171.373.992,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
179	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	14.742.800,00	14.742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742.800,00	14.742.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
180	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	809.043.200,00	849.538.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.043.200,00	849.538.200,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
181	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	517.481.500,00	517.481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.481.500,00	517.481.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
182	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	206.013.312,00	178.988.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.013.312,00	178.988.392,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
183	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	474.224.400,00	257.505.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.224.400,00	257.505.080,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
184	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	4.584.900,00	4.584.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.900,00	4.584.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
185	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42785 Orang	157.408.000,00	157.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.408.000,00	157.408.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
186	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	18.759.076.817,00	12.368.974.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759.076.817,00	12.368.974.121,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
187	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	29.554.106.964,00	28.366.969.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.554.106.964,00	28.366.969.788,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
188	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	124.564.272.076,00	118.465.383.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.564.272.076,00	118.465.383.816,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
189	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah													
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2000 Orang	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
190	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	23.089.100,00	23.089.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.089.100,00	23.089.100,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
191	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	56.057.220,00	28.958.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.057.220,00	28.958.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
192	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
193	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	289.345.500,00	55.755.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.345.500,00	55.755.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
194	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
195	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	339.573.900,00	339.573.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.573.900,00	339.573.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
196	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12.458.400,00	12.458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458.400,00	12.458.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
197	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	411.840.000,00	411.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.840.000,00	411.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
198	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1878 Orang	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
199	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	206 Orang	93.657.400,00	93.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.657.400,00	93.657.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
200	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	103.797.700,00	103.797.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.797.700,00	103.797.700,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %											
201	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	1.381.903.916,00	0,00	407.562.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.465.941,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
202	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 Dokumen	1.510.801.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.801.136,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	80 %											
203	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit	1.757.700,00	1.757.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.700,00	1.757.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
204	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	287.038.512,00	178.789.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.038.512,00	178.789.972,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100 %											
205	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	287.465.304,00	206.390.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.465.304,00	206.390.124,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100 %											
206	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	378 Orang	17.041.783.760,00	8.875.099.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041.783.760,00	8.875.099.564,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
207	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	176.970.000,00	176.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.970.000,00	176.970.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	98 %											
208	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	1.390.127.800,00	1.427.979.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.127.800,00	1.427.979.600,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %											
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 % 98 %											
209	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	162.263.012,00	126.063.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.263.012,00	126.063.872,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi	94 % 100 %											
210	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	207.671.900,00	207.671.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.671.900,00	207.671.900,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi	92 % 100 %											
211	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	78.368.700,00	78.368.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.368.700,00	78.368.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	100 % 94 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 Unit	177.999.100,00	177.999.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.999.100,00	177.999.100,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbina Aktif	5 dokumen 100 %											
213	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	1.815.936.172,00	1.788.948.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.936.172,00	1.788.948.152,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat . Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70 % 100 %											
214	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	388.691.300,00	361.739.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.691.300,00	361.739.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;	100 % 85 %											
215	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	30.019.700,00	30.019.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019.700,00	30.019.700,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
		Rumah Sakit Daerah Mangusada													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu	100 % 100 %											
216	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang/bulan	203.290.266.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.290.266.807,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %											
217	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	0,00	0,00	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
218	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	586.400.000,00	3.711.253.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.400.000,00	3.711.253.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
219	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	100 %											
220	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
221	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.237.022.128,00	12.732.574.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237.022.128,00	12.732.574.128,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %											
222	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	0,00	0,00	22.065.669.700,00	32.412.396.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065.669.700,00	32.412.396.776,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
223	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	16.903.276.044,00	25.903.276.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.276.044,00	25.903.276.044,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	A 0,81											
224	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	167.800.000.000,00	189.525.662.168,00	17.000.000.000,00	8.636.566.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	Pendapatan dari BLUD
		UPTD. Puskesmas Abiansemal I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %											
225	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.525.481.706,00	0,00	119.018.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.500.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah
226	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	1.813.847.206,00	0,00	186.152.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
227	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
228	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
229	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93280 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
230	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	633 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
232	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	538 Dokumen	169.680.000,00	169.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.680.000,00	169.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
233	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
234	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197 Dokumen	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900.000,00	117.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
236	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	133.815.000,00	133.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.815.000,00	133.815.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
237	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
238	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
239	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	564 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
240	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
241	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	139 Dokumen	106.900.000,00	106.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900.000,00	106.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
242	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD. Puskesmas Abiansemal II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 % 100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %											
243	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	812.909.411,00	943.428.620,00	87.090.589,00	163.141.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
244	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
245	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
246	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
247	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2892 Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
250	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	113 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	457 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.882.000,00	171.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.882.000,00	171.882.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
254	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
255	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
256	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
257	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
258	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	107.700.000,00	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700.000,00	107.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	134.887.000,00	134.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.887.000,00	134.887.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
260	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
261	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
262	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
263	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
264	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900.000,00	74.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	12 Dokumen 70 %											
265	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Abiansemal III													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 %											
266	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	991.545.929,00	1.205.163.600,00	118.039.560,00	157.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
267	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
268	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
270	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
271	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
272	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	152.052.000,00	152.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.052.000,00	152.052.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
273	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
274	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500.000,00	91.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
276	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	117.735.000,00	117.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.735.000,00	117.735.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
277	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
278	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	169 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
279	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
280	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
281	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	56.900.000,00	56.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900.000,00	56.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
282	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD Puskesmas Abiansemal IV													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %											
283	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	996.128.375,00	1.145.883.357,00	134.074.546,00	178.296.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %											
284	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
285	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
286	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
288	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.969.000,00	179.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.969.000,00	179.969.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
290	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400.000,00	107.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	133.449.000,00	133.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.449.000,00	133.449.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
293	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Orang	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
294	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
295	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	41.480.000,00	41.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480.000,00	41.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
297	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Kuta I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined	100 % undefined											
298	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.303.125.070,00	1.441.254.717,00	336.874.930,00	308.745.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined											
299	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
300	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
301	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
302	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
303	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
304	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
305	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
306	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
307	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
308	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	166.528.000,00	166.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.528.000,00	166.528.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
309	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
310	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
311	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
312	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
313	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
314	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110.350.000,00	110.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.350.000,00	110.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
315	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	131.571.000,00	131.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.571.000,00	131.571.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
316	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
317	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
318	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
319	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
320	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
321	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
322	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
323	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Kuta II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %											
324	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	634.103.000,00	0,00	62.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah
325	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	881.255.337,00	0,00	99.212.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.467.613,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
326	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	269 Orang	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
327	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	257 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
328	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
329	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	223 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
330	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1304 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
331	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	126.318.000,00	126.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.318.000,00	126.318.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
334	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
336	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
337	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	101.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.043.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
338	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	101.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.043.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
339	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
340	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
342	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
343	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1304 Orang	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
344	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
345	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
346	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	35.025.000,00	35.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025.000,00	35.025.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
347	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
348	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Kuta Selatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %											
349	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.174.636.097,00	2.458.349.180,00	252.677.262,00	642.623.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %											
350	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2854 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
351	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
352	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15109 Orang	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00	87.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
353	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
354	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3217 Orang	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
355	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	260.489.000,00	260.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.489.000,00	260.489.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
357	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
358	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63 Dokumen	141.550.000,00	141.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.550.000,00	141.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
359	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	44 Dokumen	198.220.000,00	198.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.220.000,00	198.220.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
360	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
361	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
362	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	183 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
363	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1705 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
364	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	18 Dokumen	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
365	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	20 Dokumen	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	69.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
366	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
367	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Mengwi I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %											
368	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.956.645.670,00	2.120.456.484,00	343.028.330,00	363.187.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
369	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
371	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
372	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
373	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	231.710.000,00	231.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.710.000,00	231.710.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
374	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
375	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
376	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	166.950.000,00	166.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.950.000,00	166.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	180.067.000,00	180.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.067.000,00	180.067.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
379	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
380	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
381	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
382	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
383	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100.000,00	101.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
384	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Mengwi II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %											
385	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.328.778.220,00	1.501.118.055,00	111.432.979,00	155.615.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %											
386	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
387	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
388	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
389	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	0,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
390	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
391	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	0,00	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
393	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
394	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
395	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
396	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	229.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.835.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
397	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	0,00	229.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.835.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
398	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
399	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
402	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	149.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
403	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	0,00	149.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
404	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	179.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.752.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	179.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.752.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
409	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
410	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
411	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
412	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
414	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
415	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0,00	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
416	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Mengwi III													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %											
417	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	925.289.397,00	0,00	73.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.406.197,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah
418	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	1.239.018.188,00	0,00	154.176.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.194.592,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
419	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614 Orang	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
420	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
421	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2996 Orang	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
422	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	715 Orang	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
424	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185.722.000,00	185.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.722.000,00	185.722.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
426	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
427	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	111.900.000,00	111.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900.000,00	111.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
428	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	132.653.000,00	132.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.653.000,00	132.653.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
429	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
430	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
432	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
433	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
434	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
435	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD. Puskesmas Petang I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah undefined	100 % undefined undefined											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	100 % undefined undefined											
436	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	927.072.576,00	0,00	144.146.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.219.108,00	Lain-lain PAD Yang Sah
437	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	667.746.272,00	0,00	112.253.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 % undefined undefined											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined											
438	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
439	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Orang	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
440	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
441	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
442	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	371 Orang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
443	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.782.000,00	171.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.782.000,00	171.782.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
444	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
445	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
446	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
447	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	132.478.000,00	132.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.478.000,00	132.478.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
448	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
449	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
450	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
451	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
452	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Petang II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %											
453	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	653.148.969,00	865.408.909,00	107.091.031,00	100.591.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.240.000,00	966.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %											
454	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
455	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1357 Orang	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
456	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
457	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
458	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	152.856.000,00	152.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.856.000,00	152.856.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
459	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
460	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
461	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
462	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	117.604.000,00	117.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.604.000,00	117.604.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
463	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
464	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
465	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
466	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
467	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		UPTD. Puskesmas Kuta Utara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %											
468	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.539.087.361,00	0,00	166.402.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.490.089,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah
469	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	2.182.371.802,00	0,00	232.904.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.276.530,00	Lain-lain PAD Yang Sah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %											
470	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
471	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2047 Orang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
472	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
473	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
474	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
475	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	230.888.000,00	230.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.888.000,00	230.888.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
476	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
477	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
478	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	164.750.000,00	164.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.750.000,00	164.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
479	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	178.975.000,00	178.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.975.000,00	178.975.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
480	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
481	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
482	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
483	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
484	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
485	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
486	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
487	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %											
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
488	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.354.337,00	140.354.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.354.337,00	140.354.337,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
489	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	48.351.840,00	48.351.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351.840,00	48.351.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %											
490	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	26.344.949.764,00	26.896.949.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344.949.764,00	26.896.949.764,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
491	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	96.640.381,00	110.982.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.640.381,00	110.982.803,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
492	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	89.636.199,00	89.636.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.636.199,00	89.636.199,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
493	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.464.090,00	1.464.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.090,00	1.464.090,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
494	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	89.579.700,00	89.579.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.579.700,00	89.579.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %											
495	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	131.837.716,00	132.034.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.837.716,00	132.034.996,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %											
496	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.933.574,00	47.933.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.933.574,00	47.933.574,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
497	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.865.346,00	10.865.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865.346,00	10.865.346,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
498	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	284.723.655,00	284.723.655,00	151.331.850,00	151.331.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.055.505,00	436.055.505,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
499	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.512.809,00	16.990.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512.809,00	16.990.659,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
500	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	56.700.576,00	56.700.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700.576,00	56.700.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
501	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.504.160,00	2.504.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.160,00	2.504.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
502	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
503	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	113.732.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.732.838,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
504	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	113.798.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.798.118,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
505	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	330.792.256,00	794.260.324,00	0,00	15.145.999.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.792.256,00	15.940.259.376,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
506	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	10.854.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
507	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
508	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	0,00	0,00	38.991.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.991.192,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
509	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	298.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.257.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
510	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.156.000,00	162.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.156.000,00	162.156.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
511	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	598.803.738,00	599.195.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.803.738,00	599.195.418,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %											
512	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	125.460.000,00	125.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.460.000,00	125.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
513	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	103 Unit	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
514	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	38 Unit	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
515	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	42.790.000,00	42.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.790.000,00	42.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
516	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	62.426.400,00	262.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.426.400,00	262.226.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
517	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.230.000,00	62.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230.000,00	62.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik	100 %											
518	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	3.618.584.763,00	0,00	308.646.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927.231.363,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
519	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	0,00	3.713.506.263,00	0,00	321.942.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.448.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
520	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir													
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	837.756.210,00	818.889.010,00	0,00	2.958.589.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.756.210,00	3.777.478.714,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
521	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir													
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	1.262.166.502,00	1.260.341.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.166.502,00	1.260.341.302,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
522	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air													
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
523	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai													
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM	476.077.635,00	476.077.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.077.635,00	476.077.635,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
524	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	7,9 KM	27.383.293,00	27.383.293,00	98.352.177.000,00	98.352.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.379.560.293,00	98.379.560.293,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
525	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	605.854.140,00	605.854.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.854.140,00	605.854.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
526	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai													
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.05 KM	7.018.974,00	0,00	4.525.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.018.974,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
527	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai													
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.05 KM	0,00	8.563.474,00	0,00	9.725.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733.563.474,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
528	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.069 KM	570.663.443,00	570.663.443,00	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.088.443,00	590.088.443,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
529	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	1.574.399.453,00	1.576.700.253,00	34.091.601.000,00	39.491.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.666.000.453,00	41.068.301.253,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
530	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,9 KM	8.106.848,00	8.106.848,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
531	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.5 KM	10.546.725.297,00	11.448.005.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546.725.297,00	11.448.005.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
532	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi													
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Bendung	1.504.774.873,00	1.505.178.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.774.873,00	1.505.178.498,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
533	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi													
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	30 DI	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
534	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	448.241.745,00	448.241.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.241.745,00	448.241.745,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.5 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %											
535	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	2000 Unit	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
536	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	10 Dokumen	1.814.927.867,00	801.578.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.927.867,00	801.578.067,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75 %											
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
537	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605.906.912,00	3.655.906.912,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
538	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	1.410.562.388,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.562.388,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97.75 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100 %											
539	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	600 M³/Hari	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
540	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	700.495.334,00	891.387.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.495.334,00	891.387.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %											
541	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	104.485.166,00	104.485.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.485.166,00	104.485.166,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
542	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	1.367.381.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.381.392,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
543	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	0,00	1.572.060.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.060.397,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
544	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	6.168.471.943,00	118.999.414.981,00	81.837.945.000,00	98.569.454.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.006.416.943,00	217.568.869.541,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
545	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	2.905.791.714,00	2.986.847.714,00	0,00	97.997.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.791.714,00	3.084.845.421,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %											
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100 %											
546	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	7 Kawasan	842.266.277.178,00	842.266.277.178,00	46.985.472.000,00	55.782.546.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.251.749.178,00	898.048.823.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
547	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	691.664.073,00	691.664.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.664.073,00	691.664.073,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
548	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %											
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
549	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan													
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	6 Dokumen	593.339.341,00	593.339.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.339.341,00	593.339.341,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	27 Dokumen	764.448.480,00	1.192.661.981,00	1.886.335.700,00	1.004.813.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.784.180,00	2.197.475.181,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
551	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	87,08 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
552	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Diganti	65 Jembatan	10.873.117,00	10.873.117,00	29.650.528.300,00	29.650.528.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
553	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	11 KM	262.015.724,00	621.395.304,00	238.266.976.000,00	430.299.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.528.991.724,00	430.920.651.304,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
554	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	22 KM	19.978.572,00	20.278.572,00	24.691.345.700,00	32.861.698.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711.324.272,00	32.881.976.722,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
555	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	5.049.312,00	5.049.312,00	11.098.000.000,00	11.098.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.049.312,00	11.103.049.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
556	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1582.27 Jembatan	792.769.324,00	792.769.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.769.324,00	792.769.324,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
557	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	6.159.571,00	6.159.571,00	17.098.000.000,00	17.098.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
558	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	809,59 KM	703.724.195,00	703.724.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.724.195,00	703.724.195,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
559	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	114.081.466,00	128.719.065.466,00	289.665.749.200,00	318.223.749.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.779.830.666,00	446.942.814.666,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
560	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881.945 KM	19.949.023.073,00	20.385.065.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949.023.073,00	20.385.065.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %											
561	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	181.600.743,00	181.600.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600.743,00	181.600.743,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
562	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	8.941.851,00	8.941.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941.851,00	8.941.851,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
563	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	230.521.958,00	230.521.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.521.958,00	230.521.958,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %											
564	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	23.702.836,00	23.702.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.702.836,00	23.702.836,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
565	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi													
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	91.143.955,00	91.143.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143.955,00	91.143.955,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	100 %											
566	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	1.239.617.372,00	1.178.877.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.617.372,00	1.178.877.372,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung	100 %											
567	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota													
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	256.533.870,00	515.408.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.533.870,00	515.408.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
568	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	2.323.637,00	2.323.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.637,00	2.323.637,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100 %											
569	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	0,00	8.559.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559.051,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
570	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	18.149.525,00	136.934.125,00	118.784.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.934.125,00	136.934.125,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
571	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2.348.527,00	2.348.527,00	173.490.400,00	173.490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.838.927,00	175.838.927,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100 %											
572	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	1.204.889.940,00	1.246.099.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.889.940,00	1.246.099.023,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %											
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
573	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	335.612.144,00	298.815.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.612.144,00	298.815.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
574	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.815.036,00	3.815.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.036,00	3.815.036,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
575	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.470.200,00	2.470.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.200,00	2.470.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
576	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	2.694.868,00	2.694.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.868,00	2.694.868,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
577	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	2.673.662,00	2.673.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.662,00	2.673.662,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
578	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
579	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.737.623,00	7.737.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737.623,00	7.737.623,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
580	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	13.414.213.506,00	13.704.213.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414.213.506,00	13.704.213.518,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
581	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	3.870.156,00	3.870.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.156,00	3.870.156,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
582	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
583	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.336.423,00	18.336.423,00	8.991.000,00	8.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.327.423,00	27.327.423,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
584	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.314.319,00	3.314.319,00	682.650,00	682.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.969,00	3.996.969,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
585	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	325.345.479,00	325.952.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345.479,00	325.952.879,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
586	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.536.989,00	29.536.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536.989,00	29.536.989,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
587	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	54.495.600,00	54.495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.495.600,00	54.495.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
588	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.539.672,00	4.539.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539.672,00	4.539.672,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
589	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
590	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	238.510.140,00	238.510.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.510.140,00	238.510.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %											
591	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	132.419.448,00	320.445.000,00	320.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.445.000,00	452.864.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
592	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	234.406.248,00	234.406.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.406.248,00	234.406.248,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
593	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	35.189.520,00	35.189.520,00	920.991.225,00	1.423.914.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.180.745,00	1.459.103.745,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
594	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	45.837.006,00	45.837.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.837.006,00	45.837.006,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
595	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
596	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	353.635.912,00	353.635.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.635.912,00	353.635.912,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
597	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	120.618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.618.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
598	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.618.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
599	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	0,00	697.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.339.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
600	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	626.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.609.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
601	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
602	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
603	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	0,00	48.732.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
604	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	43.132.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132.024,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
605	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
606	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
607	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
608	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
609	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
610	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %											
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %											
611	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan													
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
612	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan													
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0,00	78.857.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.857.907,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
613	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani													
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	7.960.700,00	7.960.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960.700,00	7.960.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
614	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana													
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	286.977.564,00	292.363.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.977.564,00	292.363.564,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
615	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-											
616	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana													
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	7.296.576,00	7.296.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.576,00	7.296.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
617	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %											
618	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	25.256.200,00	25.256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.200,00	25.256.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
619	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	187.084.337,00	187.084.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.084.337,00	187.084.337,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %											
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %											
620	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	9.107.884,00	9.107.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107.884,00	9.107.884,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
621	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	15.816.704,00	15.816.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816.704,00	15.816.704,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %											
622	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	5.298.885,00	5.298.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298.885,00	5.298.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
623	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	102.190.844,00	102.190.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.190.844,00	102.190.844,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
624	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh													
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6 Kelompok Masyarakat	6.960.562,00	6.960.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.562,00	6.960.562,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
625	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
626	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	24.003.095,00	24.003.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.003.095,00	24.003.095,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-											
627	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU													
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
628	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	305.489.508,00	531.643.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.489.508,00	531.643.508,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
629	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	201.285.282,00	201.285.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.285.282,00	201.285.282,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
630	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh													
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 ha Ha	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %											
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %											
631	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	2.448.166.399,00	2.448.166.399,00	2.787.432,00	2.787.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %											
632	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	36 Dokumen	69.719.831,00	69.719.831,00	3.572.643.564,00	3.670.925.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
633	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	36 Lokasi	7.553.290.155,00	7.729.204.280,00	258.829.353.877,00	258.829.353.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
634	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	815.354.101,00	817.055.101,00	3.396.996.540,00	3.396.996.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
635	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang													
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	12 Laporan	40.472.712,00	40.472.712,00	4.038.100,00	4.038.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.812,00	44.510.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
636	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.509.500,00	4.509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.500,00	4.509.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
637	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
638	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.284.200,00	3.284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284.200,00	3.284.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
639	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan	36.647.108.569,00	36.932.247.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.647.108.569,00	36.932.247.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
640	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %											
641	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.025.950,00	24.025.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.025.950,00	24.025.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
642	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	376.339.500,00	376.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.339.500,00	376.339.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
643	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.649.450,00	15.649.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649.450,00	15.649.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
644	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	32.242.800,00	32.242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242.800,00	32.242.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
645	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
646	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
647	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
648	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	28.451.409,00	28.451.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.451.409,00	28.451.409,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
649	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
650	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	23.760.127,00	23.760.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760.127,00	23.760.127,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
651	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
652	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
653	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	82.195.500,00	82.195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195.500,00	82.195.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
654	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	929.568.654,00	973.968.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.568.654,00	973.968.654,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
655	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
656	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	89.123.400,00	89.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123.400,00	89.123.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
657	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
658	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	1.033.264.610,00	1.033.264.610,00	255.300.000,00	255.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.564.610,00	1.288.564.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
659	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31 Dokumen	5.564.100,00	36.164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.100,00	36.164.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
660	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Orang	0,00	122.232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.232.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
661	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	454 Orang	121.150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.150.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
662	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	9.133.200,00	9.133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133.200,00	9.133.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
663	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat													
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
664	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2482 laporan	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
665	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	36.561.400,00	36.561.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561.400,00	36.561.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
666	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %											
667	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	8.590.700,00	8.590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590.700,00	8.590.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
668	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	11.205.400,00	11.205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205.400,00	11.205.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23 Laporan	2.680.271.236,00	2.782.474.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.271.236,00	2.782.474.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-											
670	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
671	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.476.300,00	4.476.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.300,00	4.476.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
672	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
673	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.056.700,00	5.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.700,00	5.663.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
674	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	41.338.771.568,00	42.288.810.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338.771.568,00	42.288.810.072,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %											
675	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.532.400,00	7.532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532.400,00	7.532.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	100 %											
676	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	164.252.300,00	164.252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.252.300,00	164.252.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
677	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
678	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	74.025.600,00	74.025.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025.600,00	74.025.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
679	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	825.447.900,00	778.241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.447.900,00	778.241.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
680	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.954.800,00	14.954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954.800,00	14.954.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
681	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	708 Dokumen	43.309.200,00	43.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309.200,00	43.309.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
682	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %											
683	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
684	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	425.300,00	17.549.100,00	304.884.500,00	373.237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.309.800,00	390.786.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
685	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	21.642.200,00	21.642.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642.200,00	21.642.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
686	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	315.423.400,00	315.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.423.400,00	315.423.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
687	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	785.278.200,00	789.058.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.278.200,00	789.058.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
688	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	126.995.600,00	126.995.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.995.600,00	126.995.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
689	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	2.917.822.000,00	2.953.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.822.000,00	2.953.342.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
690	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.410.000,00	74.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
691	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %											
692	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	204.750.000,00	204.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.750.000,00	204.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
693	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
694	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	64.314.600,00	64.314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.314.600,00	64.314.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
695	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.269.200,00	2.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.200,00	2.269.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
696	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
697	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran													
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	180 Orang	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
698	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)													
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelu rahan	114.874.800,00	114.874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.874.800,00	114.874.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
699	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	540 Unit	4.651.033.000,00	4.664.863.000,00	4.516.912.000,00	4.516.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167.945.000,00	9.181.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
700	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1.188.400,00	1.188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.400,00	1.188.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
701	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	180 Keluarga	230.834.200,00	230.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.834.200,00	230.834.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran diperiksa	100 %											
702	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	50 Dokumen	5.642.100,00	5.642.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642.100,00	5.642.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
703	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	120 Dokumen	306.206.100,00	317.233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.206.100,00	317.233.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %											
704	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	10.595.800,00	6.155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595.800,00	6.155.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %											
705	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	63.135.600,00	63.135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.135.600,00	63.135.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
706	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran													
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	583.397.700,00	1.383.923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.397.700,00	1.383.923.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-											
708	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	2.833.500,00	2.833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.500,00	2.833.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
709	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6 Unit	549.401.500,00	581.229.000,00	1.728.565.000,00	1.728.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
710	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.298.252,00	5.298.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298.252,00	5.298.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
711	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
712	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.486.730,00	5.486.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486.730,00	5.486.730,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
713	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
714	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.878.120,00	1.878.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.120,00	1.878.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
715	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.580.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580.966,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
716	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0,00	6.521.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521.522,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
717	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	140.816.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.816.704,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
718	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	150.279.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.279.454,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
719	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.698.345,00	13.698.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698.345,00	13.698.345,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
720	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	35.964.000,00	35.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.964.000,00	35.964.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
721	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
722	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	1.775.271.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.271.951,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
723	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	2.876.191.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.611.049,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
724	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	0,00	34.678.620,00	0,00	1.030.846.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.524.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
725	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	34.678.620,00	0,00	968.685.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.364.076,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
726	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	8.808.627,00	8.808.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808.627,00	8.808.627,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
727	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.508.455,00	22.508.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508.455,00	22.508.455,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
728	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	279.100.000,00	279.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100.000,00	279.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
729	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	740.879.981,00	740.879.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.879.981,00	740.879.981,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
730	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	882.317.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.317.512,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
731	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	0,00	730.194.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.194.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
732	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	113.893.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.893.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
733	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	0,00	151.071.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.071.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
734	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	146.046.150,00	146.046.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.046.150,00	146.046.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %											
735	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0,00	19.071.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.171,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
736	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	192.239.609,00	192.239.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.239.609,00	192.239.609,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	100 %											
737	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan													
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Kawasan	163.390.564,00	163.390.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.390.564,00	163.390.564,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
738	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi													
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	22.122.408,00	22.122.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.122.408,00	22.122.408,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	220 Orang	3.692.262,00	3.692.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692.262,00	3.692.262,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
740	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	270 Kawasan	249.857.262,00	249.857.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.857.262,00	249.857.262,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %											
741	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas													
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	12.550.659,00	1.894.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550.659,00	1.894.659,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
742	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
743	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	666.737.817,00	680.057.817,00	3.845.928,00	3.845.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.583.745,00	683.903.745,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
744	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	137.611.029,00	137.611.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.611.029,00	137.611.029,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
745	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	13.862.124,00	2.762.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862.124,00	2.762.124,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %											
746	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1.989.231,00	1.989.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.231,00	1.989.231,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
747	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	29.239.731,00	29.239.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239.731,00	29.239.731,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
748	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	46.556.619,00	55.772.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556.619,00	55.772.619,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	0,00	124.787.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.787.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
750	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 Kegiatan	115.502.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.502.328,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
751	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.051.675,00	8.051.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051.675,00	8.051.675,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
752	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.329.888,00	4.329.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.888,00	4.329.888,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
753	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %											
754	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
755	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	172.556.764,00	172.760.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.556.764,00	172.760.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
756	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.718.036,00	23.718.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.718.036,00	23.718.036,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	21.795.600,00	21.795.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795.600,00	21.795.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
758	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
759	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
760	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
761	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	360.528,00	360.528,00	9.169.044,00	39.948.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.572,00	40.309.428,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
762	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.370.155,00	40.370.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.370.155,00	40.370.155,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
763	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.316.182,00	30.316.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.316.182,00	30.316.182,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
764	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	79.467.531,00	79.615.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.467.531,00	79.615.971,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
765	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	568.102.500,00	605.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.102.500,00	605.224.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
766	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	44.788.500,00	44.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.788.500,00	44.788.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
767	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.615.789,00	54.419.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.615.789,00	54.419.274,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %											
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %											
768	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Keluarga	252.207.624,00	265.531.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.207.624,00	265.531.189,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
769	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Lembaga	2.416.316.650,00	2.621.959.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.316.650,00	2.621.959.101,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %											
770	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	246.307.834,00	258.849.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.307.834,00	258.849.659,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
771	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	324.819.034,00	325.004.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.819.034,00	325.004.374,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	141.940.515,00	151.764.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.940.515,00	151.764.315,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
773	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	691.172.447,00	650.255.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.172.447,00	650.255.447,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	3.055.097,00	3.055.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.097,00	3.055.097,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %											
775	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	23.955.829,00	26.719.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955.829,00	26.719.554,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
776	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4700 Orang	4.838.462.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.462.185,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
777	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8100 Orang	0,00	7.695.868.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695.868.585,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
778	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.325.117,00	2.325.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.117,00	2.325.117,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %											
779	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 Orang	34.619.087,00	34.619.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619.087,00	34.619.087,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
780	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 Keluarga	77.418.006,00	97.923.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.418.006,00	97.923.459,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
781	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	1.599.379.086,00	1.687.382.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.379.086,00	1.687.382.602,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
782	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.976.248,00	171.917.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.976.248,00	171.917.707,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
783	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	80.455.241,00	155.034.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.455.241,00	155.034.961,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %											
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan											
784	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	90.752.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.752.441,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
785	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	90.985.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.985.521,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
786	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	169.547.085,00	169.850.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.547.085,00	169.850.925,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan											
787	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	39.895.901.028,00	41.900.479.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.895.901.028,00	41.900.479.421,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya admiistrasi umum perangkat daerah	12 Bulan											
788	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.494.256,00	27.494.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494.256,00	27.494.256,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
789	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.222.043,00	68.222.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.222.043,00	68.222.043,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
790	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.345.978,00	9.345.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345.978,00	9.345.978,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
791	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
792	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.993.612,00	24.979.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993.612,00	24.979.287,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
793	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	61.428.800,00	61.428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.428.800,00	61.428.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
794	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
795	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.757.350,00	3.757.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.350,00	3.757.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan											
796	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	3.107.050.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.050.395,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
797	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0,00	183.731.984,00	0,00	3.107.050.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.782.379,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
798	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0,00	40.959.000,00	63.198.960,00	107.598.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.198.960,00	148.557.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
799	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	252.461.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.461.952,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	0,00	0,00	0,00	930.573.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.573.828,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
801	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	109.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	524.393.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.393.859,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
803	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.671.200,00	5.671.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.200,00	5.671.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
804	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %											
805	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	127.478.720,00	127.478.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.478.720,00	127.478.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	212 Unit	1.520.568.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.568.660,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
807	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	217 Unit	0,00	1.565.374.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.374.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
808	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	7.545.700,00	7.545.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545.700,00	7.545.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	243 Unit	287.570.700,00	287.755.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.570.700,00	287.755.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	331.300.500,00	420.284.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.300.500,00	420.284.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan											
811	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	781.188.402,00	1.168.356.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.188.402,00	1.168.356.935,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
812	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK													
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	117.403.097,00	117.513.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.403.097,00	117.513.857,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan											
813	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	22 Laporan	135.011.381,00	108.180.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.011.381,00	108.180.761,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan											
814	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.846.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.653.201,00	95.846.281,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
815	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.846.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.653.201,00	95.846.281,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	12 Bulan											
816	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	156.995.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.995.557,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
817	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	0,00	156.995.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.995.557,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
818	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	18.575.683.896,00	18.987.145.236,00	0,00	120.403.138.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575.683.896,00	139.390.283.868,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %											
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	12 Bulan											
819	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	238.847.913,00	264.748.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.847.913,00	264.748.833,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan											
820	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	88.205.806,00	88.205.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.205.806,00	88.205.806,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan											
821	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	2.675.486,00	2.675.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.486,00	2.675.486,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
822	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	216 Badan Usaha	983.167.660,00	567.284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.167.660,00	567.284.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
823	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup													
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %											
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12 Bulan											
824	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH													
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	742.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.923,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %											
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan											
825	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	29.238.191,00	25.764.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.238.191,00	25.764.591,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
826	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %											
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12 Bulan											
827	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	60 Pengaduan	502.655.533,00	503.097.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.655.533,00	503.097.433,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota													
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	4.898.278,00	4.898.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.278,00	4.898.278,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	12 Bulan											
829	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	162.766.354,00	162.766.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.766.354,00	162.766.354,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
830	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	1.781.117,00	101.763.202,00	34.157.878.730,00	66.306.130.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.159.659.847,00	66.407.893.499,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
831	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	74525,07 Ton	105.622.611.786,00	103.872.091.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622.611.786,00	103.872.091.893,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
832	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah													
			Jumlah sampah yang terdaur ulang	29.390,17 Ton	2.114.727.679,00	1.523.769.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.727.679,00	1.523.769.768,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
833	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.359.857,00	5.359.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359.857,00	5.359.857,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
834	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
835	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.225.438,00	3.225.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.438,00	3.225.438,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
836	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	13.351.115.700,00	13.774.623.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351.115.700,00	13.774.623.126,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
837	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
838	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.309.910,00	19.792.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.910,00	19.792.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3.804.747,00	3.804.747,00	819.180,00	819.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.927,00	4.623.927,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	135.700.719,00	135.700.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700.719,00	135.700.719,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
841	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	144.073.116,00	144.073.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.073.116,00	144.073.116,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
842	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.932.020,00	47.932.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.932.020,00	47.932.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
843	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
844	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	693.721.855,00	1.044.110.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.721.855,00	1.044.110.865,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
845	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
846	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
847	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.910.849,00	17.910.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910.849,00	17.910.849,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
848	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	9.324.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324.000,00	9.324.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
849	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	82.999.176,00	82.999.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.999.176,00	82.999.176,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
850	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	95.769.220,00	46.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.769.220,00	46.844.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
851	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	502.664.680,00	498.492.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.664.680,00	498.492.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit	262.274.025,00	275.574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.274.025,00	275.574.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %											
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel											
854	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	565.458.477,00	565.458.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.458.477,00	565.458.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
855	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	1.626.725.592,00	1.905.212.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.725.592,00	1.905.212.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-											
856	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan													
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	62 desa/kel											
857	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	524.451.879,00	524.451.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.451.879,00	524.451.879,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %											
858	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10 Dokumen	243.886.758,00	243.886.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.886.758,00	243.886.758,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	1.431.545.522,00	1.434.214.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.545.522,00	1.434.214.432,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-											
860	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
861	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
862	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-											
863	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
864	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %											
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel											
865	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	124.355.723,00	124.495.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.355.723,00	124.495.093,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
866	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	85.846.692,00	85.976.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.846.692,00	85.976.362,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel											
867	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	123.265.104,00	123.265.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.265.104,00	123.265.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
868	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.351.600,00	4.351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.600,00	4.351.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
869	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.042.300,00	4.042.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.300,00	4.042.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
870	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.592.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
871	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	4.884.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
872	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	0,00	13.377.312.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377.312.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
873	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	12.863.357.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863.357.737,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.713.400,00	4.713.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.400,00	4.713.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
875	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.484.300,00	3.484.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.300,00	3.484.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
876	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.800.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
877	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	137.400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
878	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.842.700,00	9.842.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842.700,00	9.842.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
879	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	26.840.800,00	26.840.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840.800,00	26.840.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
880	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	25.997.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997.532,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
881	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	25.997.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.416.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
882	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	104.057.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.057.116,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
883	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	107.345.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.345.316,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
884	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.997.600,00	5.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997.600,00	5.997.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
885	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	117.264.220,00	117.264.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.264.220,00	117.264.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
886	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 mobil,12 spd motor Unit	393.874.252,00	429.526.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.874.252,00	429.526.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	28.570.000,00	28.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570.000,00	28.570.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %											
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %											
889	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa													
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	18.616.900,00	18.616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616.900,00	18.616.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %											
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa											
890	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	1.359.206.142,00	1.429.621.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.206.142,00	1.429.621.612,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
891	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	175.517.900,00	131.630.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.517.900,00	131.630.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
892	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	506.639.300,00	401.639.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.639.300,00	401.639.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
893	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	141.058.052,00	141.322.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.058.052,00	141.322.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
894	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	15.086.200,00	32.188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086.200,00	32.188.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
895	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	85.954.100,00	30.754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.954.100,00	30.754.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
896	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	689.368.800,00	689.728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.368.800,00	689.728.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa											
897	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	370.685.400,00	497.003.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.685.400,00	497.003.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
898	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	56.815.800,00	56.815.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815.800,00	56.815.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
899	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 Laporan	18.666.875,00	18.666.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666.875,00	18.666.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	3.145.778.116,00	2.973.736.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.778.116,00	2.973.736.416,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %											
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD	100 %											
901	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.475.508,00	52.518.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475.508,00	52.518.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
902	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	42.260.560,00	42.297.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260.560,00	42.297.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
903	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.000,00	3.887.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %											
904	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	16.386.587.390,00	16.961.111.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386.587.390,00	16.961.111.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
905	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	11.169.600,00	11.169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.600,00	11.169.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
906	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	2.787.100,00	2.787.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.100,00	2.787.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
907	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.000,00	6.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %											
908	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.381.200,00	17.381.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.200,00	17.381.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
909	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.017.000,00	186.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.017.000,00	186.017.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.762.400,00	7.762.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762.400,00	7.762.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
911	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	26.598.500,00	26.598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.598.500,00	26.598.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
912	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
913	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
914	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	11.087.000,00	11.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.000,00	11.087.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
915	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	23.421.200,00	271.918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.421.200,00	271.918.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan											
916	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	54.345.200,00	54.345.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.345.200,00	54.345.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
917	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %											
918	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77 Unit	911.141.920,00	875.706.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.141.920,00	875.706.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
919	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	46.509.300,00	90.909.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509.300,00	90.909.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
920	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
921	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %											
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah	31 %											
922	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.180.500,00	500.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.180.500,00	500.180.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
923	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	12.886.200,00	12.886.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886.200,00	12.886.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Akti pada Bidang Politik Hkum Sosial dan Ekonomi	100 %											
924	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %											
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %											
925	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
926	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	366.841.280,00	526.253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.841.280,00	526.253.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang terselesaikan	100 %											
927	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	235.480.000,00	235.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %											
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh	100 %											
928	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	14.888.600,00	304.710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888.600,00	304.710.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling	100 %											
929	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	243.175.880,00	243.286.580,00	8.588.200,00	8.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.764.080,00	251.874.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %											
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	45 buku											
930	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.901.330,00	53.901.330,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
931	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	9.043.800,00	9.043.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043.800,00	9.043.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.007.220,00	46.081.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007.220,00	46.081.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %											
933	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	54.528.400,00	54.528.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.528.400,00	54.528.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.056.300,00	15.056.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056.300,00	15.056.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.151.000,00	16.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151.000,00	16.151.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %											
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	0,016 %											
936	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	38 Orang	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
937	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus	0,0065 %											
938	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
939	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	25 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
940	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota													
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	19.594.900,00	19.594.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594.900,00	19.594.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga											
941	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	37.896.700,00	48.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.896.700,00	48.089.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
942	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal													
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	11.358.200,00	11.358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358.200,00	11.358.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen											
943	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
944	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
945	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	63.629.460,00	36.530.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.629.460,00	36.530.320,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %											
947	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	384.158.700,00	482.853.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.158.700,00	482.853.600,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
948	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana													
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
949	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
950	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
951	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	149.999.700,00	149.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.700,00	149.999.700,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
952	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	204.832.720,00	204.943.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832.720,00	204.943.960,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
953	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1 : (2-3) org/desa											
954	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	955 Orang	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
955	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62 Organisasi	148.781.600,00	45.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.781.600,00	45.731.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
956	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	812.265.500,00	544.691.080,00	180.988.000,00	184.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.253.500,00	729.556.080,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %											
957	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	68.080.000,00	68.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.080.000,00	68.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
958	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3927 Orang	339.140.000,00	361.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.140.000,00	361.815.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
959	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
960	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	71.486.100,00	71.486.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.486.100,00	71.486.100,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
961	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1500 Laporan	768.559.433,00	676.680.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.559.433,00	676.680.685,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	380 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
963	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan													
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	3000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB											
964	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
965	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	71.898.160,00	71.935.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.898.160,00	71.935.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
966	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %											
967	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	91.209.200,00	91.209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.209.200,00	91.209.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
969	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	12690 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	100 %											
970	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	58.948.700,00	58.948.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.948.700,00	58.948.700,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
971	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 laporan	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
972	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 laporan	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
		Dinas Perhubungan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %											
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
973	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	13.878.600,00	13.878.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878.600,00	13.878.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
975	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.491.200,00	5.491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.200,00	5.491.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
976	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	33.997.099.626,00	35.117.736.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.997.099.626,00	35.117.736.286,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	8.953.900,00	8.953.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.900,00	8.953.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
978	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.289.900,00	2.289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.900,00	2.289.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
979	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.118.200,00	5.118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.200,00	5.118.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %											
980	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	165.738.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.738.248,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
981	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket	0,00	240.113.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.113.648,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %											
982	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
983	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	460.620.316,00	462.335.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.620.316,00	462.335.716,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
984	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.745.700,00	8.745.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
985	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12.294.000,00	12.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294.000,00	12.294.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
986	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
987	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
988	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
989	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
990	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	995.700,00	0,00	13.857.377.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.373.340,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	33 Unit	0,00	133.415.148,00	0,00	13.857.377.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990.792.788,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
992	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	270.600,00	0,00	161.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.012.600,00	0,00	Pajak Daerah
993	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	0,00	20.250.600,00	0,00	257.622.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.873.552,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
994	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	72.426.320,00	0,00	2.070.061.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.487.996,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
995	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	129 Unit	0,00	72.426.320,00	0,00	2.297.056.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.482.996,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
996	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
997	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.227.500,00	12.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.227.500,00	12.227.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
998	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
999	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	348.230.404,00	349.736.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.230.404,00	349.736.464,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050.000,00	42.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1001	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	1.329.103.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.103.112,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1002	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 Unit	0,00	1.396.377.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.377.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1003	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	302.075.000,00	302.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.075.000,00	302.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45.315.695,00	45.315.695,00	529.347.649,00	818.411.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.663.344,00	863.726.991,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %											
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %											
1005	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	451.259.800,00	451.259.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.259.800,00	451.259.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1006	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1007	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %											
1008	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1200 Unit	38.208.177,00	38.208.177,00	19.514.000.000,00	20.044.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552.208.177,00	20.082.797.177,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1009	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000 Unit	22.703.371.608,00	0,00	65.371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768.742.838,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1010	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7000 Unit	0,00	27.905.716.323,00	0,00	65.371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.971.087.553,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %											
1011	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	19.265.845,00	19.515.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.265.845,00	19.515.845,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %											
1012	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	26397 Unit	359.059.576,00	103.359.043,00	0,00	1.258.029.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.059.576,00	1.361.389.033,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1013	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	757.027.784,00	757.916.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.027.784,00	757.916.744,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %											
1014	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1015	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	646.800,00	646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.800,00	646.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1016	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas													
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	230 Dokumen	1.386.231.992,00	0,00	396.259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.491.542,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1017	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas													
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	0,00	1.296.934.772,00	0,00	493.707.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.641.822,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1018	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	92.329.100,00	92.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.329.100,00	92.329.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %											
1019	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	1.456.100,00	1.456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.100,00	1.456.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1020	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan	1.558.300,00	1.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.300,00	1.558.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %											
1021	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal													
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.000,00	3.564.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1022	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan	63.643.400,00	63.643.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.643.400,00	63.643.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum													
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	14.463.800,00	14.463.800,00	286.759.500,00	286.759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.223.300,00	301.223.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %											
1024	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	193.248.265,00	193.248.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.248.265,00	193.248.265,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen											
1026	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	49.405.915,00	49.446.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405.915,00	49.446.595,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1027	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1028	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	47.082.375,00	47.123.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.082.375,00	47.123.055,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen											
1029	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	16.077.348.311,00	17.597.696.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077.348.311,00	17.597.696.516,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1030	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen	20.264.400,00	20.264.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264.400,00	20.264.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1031	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1032	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.079.600,00	9.079.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079.600,00	9.079.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen											
1033	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1034	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	83.949.603,00	84.166.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.949.603,00	84.166.455,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan											
1035	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.268.820,00	22.268.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.268.820,00	22.268.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1036	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	176.230.700,00	176.230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.230.700,00	176.230.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1037	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.788.300,00	11.788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.300,00	11.788.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1038	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.296.000,00	40.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296.000,00	40.296.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1039	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.711.379,00	2.711.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.379,00	2.711.379,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1040	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit											
1041	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1042	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	198.629.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.629.172,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1043	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	0,00	0,00	49.628.749,00	49.628.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.628.749,00	49.628.749,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1044	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	97 Unit	0,00	0,00	358.748.407,00	358.748.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.748.407,00	358.748.407,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1045	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan											
1046	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	129.704.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.704.480,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	129.815.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.815.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.452.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1049	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	167.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.452.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1050	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1051	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219 Unit											
1052	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	139.769.220,00	139.769.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.769.220,00	139.769.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1053	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	663.902.660,00	717.219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.902.660,00	717.219.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1054	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	122.696.824,00	121.031.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.696.824,00	121.031.824,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1055	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %											
1056	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen	170.225.121,00	170.335.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.225.121,00	170.335.821,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	203.143.164,00	203.143.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.143.164,00	203.143.164,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	5.785.222.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785.222.987,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	0,00	8.251.355.761,00	0,00	25.848.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277.204.731,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1060	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	19.119.142,00	19.119.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119.142,00	19.119.142,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1061	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	153.887.748,00	153.887.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.887.748,00	153.887.748,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1062	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	57.887.726,00	57.887.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.887.726,00	57.887.726,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1063	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	7.555.534,00	7.555.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555.534,00	7.555.534,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1064	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	44.920.344,00	44.920.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920.344,00	44.920.344,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	100 %											
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen											
1065	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	63.470.745,00	63.470.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470.745,00	63.470.745,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1066	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4.370.674.291,00	3.890.987.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.674.291,00	3.890.987.311,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1010 Unit	39.702.112.243,00	39.630.081.703,00	0,00	25.730.007.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.702.112.243,00	65.360.088.858,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen											
1068	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	970.322.600,00	970.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.322.600,00	970.412.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1069	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	1.757.004.950,00	1.539.561.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.004.950,00	1.539.561.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1070	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	177.883.900,00	177.883.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.883.900,00	177.883.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1071	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas													
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	3.054.200,00	3.054.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.200,00	3.054.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	15 Dokumen											
1072	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	7.083.700,00	7.083.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.700,00	7.083.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1073	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	62.750.890,00	62.750.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750.890,00	62.750.890,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1074	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral													
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8 Dokumen	9.924.825,00	9.924.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924.825,00	9.924.825,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen											
1075	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	2.112.380,00	2.112.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.380,00	2.112.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1076	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	3.872.580,00	3.872.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.580,00	3.872.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1077	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	184.936.865,00	4.936.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.936.865,00	4.936.865,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1078	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	1.968.600,00	1.968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.600,00	1.968.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota	4 Dokumen											
1079	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	4.094.800,00	4.094.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.800,00	4.094.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %											
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %											
1080	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.182.900,00	7.182.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.900,00	7.182.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1082	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.699.200,00	4.699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.200,00	4.699.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1083	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1084	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.619.000,00	8.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.000,00	8.619.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1085	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.880.000,00	8.880.000,00	262.607.574,00	410.037.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.487.574,00	418.917.552,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1086	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.254.100,00	6.254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254.100,00	6.254.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1087	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	213.297.300,00	213.297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.297.300,00	213.297.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.361.696,00	32.361.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361.696,00	32.361.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1089	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	468 Dokumen	50.833.116,00	50.833.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.833.116,00	50.833.116,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1090	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1091	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1092	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	106.206.327,00	51.381.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.206.327,00	51.381.447,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1093	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.396.000,00	28.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396.000,00	28.396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1094	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792.000,00	9.792.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %											
1095	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	102.769.220,00	121.869.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.769.220,00	121.869.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1096	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	525.121.500,00	623.943.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.121.500,00	623.943.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	29.369.712,00	29.369.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.369.712,00	29.369.712,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1098	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	159.834.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.834.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1099	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %											
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	60 Unit Usaha											
1100	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	10.054.700,00	10.054.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054.700,00	10.054.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	5 Unit Usaha											
1101	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	4.395.400,00	4.395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.400,00	4.395.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %											
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha											
1102	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha	160.766.500,00	360.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.766.500,00	360.766.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1103	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha	78.057.200,00	78.057.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.057.200,00	78.057.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %											
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha											
1104	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	178.257.420,00	72.150.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.257.420,00	72.150.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1105	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan													
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	31.594.300,00	31.594.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.594.300,00	31.594.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %											
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian	347 orang											
1106	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	347 Orang	418.327.700,00	583.619.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.327.700,00	583.619.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %											
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20 Unit Usaha											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1107	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	97.966.800,00	97.966.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.966.800,00	97.966.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha											
1108	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	12.811.900,00	12.811.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811.900,00	12.811.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1109	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	54.620.560,00	54.657.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.620.560,00	54.657.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1110	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	96.205.200,00	96.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.205.200,00	96.205.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1111	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro													
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	141.007.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.007.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1112	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil													
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	40 Unit Usaha	42.138.160,00	42.175.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.138.160,00	42.175.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	372 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1114	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	105 Orang	352.128.370,00	352.165.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.128.370,00	352.165.270,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	600 Unit Usaha											
1115	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	256 Unit Usaha	1.419.646.865,00	1.419.683.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.646.865,00	1.419.683.765,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1116	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	232.502.520,00	259.316.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.502.520,00	259.316.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit											
1117	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	49.942.800,00	21.128.200,00	150.798.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.847.942.800,00	120.128.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen											
1118	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.400,00	5.053.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %											
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokokdan barang penting	8 Laporan											
1119	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6.198.700,00	6.198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198.700,00	6.198.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1120	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	110 Laporan											
1121	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	32.056.100,00	32.056.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.056.100,00	32.056.100,00	Insentif Fiskal
1122	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14 Laporan	447.350.974,00	447.350.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.350.974,00	447.350.974,00	Insentif Fiskal
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan											
1123	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan													
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1124	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1125	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	8.153.700,00	8.153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153.700,00	8.153.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %											
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk											
1126	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	626.689.100,00	626.689.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.689.100,00	626.689.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1127	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1128	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	62.973.200,00	62.973.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.973.200,00	62.973.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan	100 %											
1129	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	567.761.104,00	509.926.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.761.104,00	509.926.964,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1130	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	11.635.600,00	11.635.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635.600,00	11.635.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %											
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	10 UMKM											
1131	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.006.100,00	251.006.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %											
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	100 %											
1132	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	5.245.600,00	5.245.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245.600,00	5.245.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1133	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1134	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	5.267.500,00	5.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.500,00	5.267.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %											
1135	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.317.100,00	10.317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317.100,00	10.317.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMTSP	100 %											
1137	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.042.200,00	3.042.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.200,00	3.042.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	983.709.300,00	1.342.839.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.709.300,00	1.342.839.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1139	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.640.600,00	16.640.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640.600,00	16.640.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1140	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.536.700,00	13.034.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536.700,00	13.034.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1141	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	530.781.280,00	530.781.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.781.280,00	530.781.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.008.800,00	90.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.008.800,00	90.008.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	85.656.000,00	85.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.656.000,00	85.656.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1144	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %											
1145	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	231.734.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.734.034,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1146	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1147	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1148	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	209.916.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.916.651,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1149	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1150	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %											
1151	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1152	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	684.365.000,00	679.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.365.000,00	679.365.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1153	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	122.544.220,00	122.544.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.544.220,00	122.544.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1154	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	0,00	829.152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.152.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1155	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	773.292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.292.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1156	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	190.555.000,00	190.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.555.000,00	190.555.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1157	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMTSP)	100 %											
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi­dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibi­dang penanaman modal	100 %											
1158	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	1.810.300,00	1.810.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.300,00	1.810.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1159	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15 Dokumen	77.631.300,00	77.631.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.631.300,00	77.631.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %											
1160	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.222.200,00	19.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.222.200,00	19.222.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1161	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.143.800,00	286.143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.143.800,00	286.143.800,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMTSP)	100 %											
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %											
1162	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.303.363.450,00	1.703.363.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.363.450,00	1.703.363.450,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1163	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0,00	546.705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.705.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1164	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	509.405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.405.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMTSP)	100 %											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %											
1165	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	18.131.600,00	11.831.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131.600,00	11.831.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1166	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	2.098.612.152,00	2.192.193.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.612.152,00	2.192.193.952,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1167	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	14.236.700,00	11.296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236.700,00	11.296.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1168	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha	396.066.400,00	263.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.066.400,00	263.496.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMTSP)	100 %											
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %											
1169	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha.	134.819.800,00	134.819.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.819.800,00	134.819.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1170	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	293.713.200,00	293.713.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.713.200,00	293.713.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	40.877.800,00	40.877.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877.800,00	40.877.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %											
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang terkelola dengan baik	100 %											
1172	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 Persen											
1173	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.320.400,00	4.320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.400,00	4.320.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.000,00	2.966.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7.295.700,00	7.295.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.700,00	7.295.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.722.100,00	1.722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.100,00	1.722.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	12 Bulan											
1177	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	17.789.675.181,00	18.709.705.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.789.675.181,00	18.709.705.181,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen											
1178	2.22.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.156.200,00	30.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156.200,00	30.156.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
1179	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.054.800,00	7.054.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054.800,00	7.054.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1180	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	715.688.289,00	715.688.289,00	115.230.000,00	115.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.918.289,00	830.918.289,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1181	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.988.200,00	25.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988.200,00	25.988.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1182	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1183	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket											
1184	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1185	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1186	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	28.364.900,00	60.479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.364.900,00	60.479.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1187	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	0,00	0,00	0,00	796.372.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.372.238,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1188	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	132.076.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.076.938,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan											
1189	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	32.211.200,00	36.956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.200,00	36.956.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1190	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	44.991.000,00	46.055.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.991.000,00	46.055.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1191	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1192	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	53.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan											
1193	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	135.024.220,00	137.351.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.024.220,00	137.351.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1194	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	899.283.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.283.956,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1195	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	0,00	738.121.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.121.946,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1196	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	69.752.000,00	48.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.752.000,00	48.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1197	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.884.000,00	39.884.000,00	196.600.000,00	1.341.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.484.000,00	1.380.984.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 paket											
1198	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	596 Objek	18.632.288.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632.288.740,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	720 Objek	0,00	19.748.556.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.556.430,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1200	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	596 Orang	1.636.473.400,00	1.700.473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.473.400,00	1.700.473.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	1 Paket											
1201	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2308 Objek	82.795.459.627,00	93.824.253.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.795.459.627,00	93.824.253.462,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1202	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	1 Paket											
1203	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	827.649.100,00	827.649.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.649.100,00	827.649.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1204	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat													
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1545 Orang	45.803.721.500,00	66.574.357.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.803.721.500,00	66.574.357.525,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1205	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	43 Unit	0,00	21.689.963.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689.963.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %											
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	1 Paket											
1206	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1495 Orang	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1207	2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	132 Sertifikat	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	30.657.388.540,00	66.717.239.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.657.388.540,00	66.717.239.642,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %											
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket											
1209	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1142 Orang	5.630.326.340,00	6.132.641.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630.326.340,00	6.132.641.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	1.843.218.200,00	4.267.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.218.200,00	4.267.737.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1211	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	426.010.000,00	426.010.000,00	1.415.500,00	1.415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.425.500,00	427.425.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 unit											
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	1 Paket											
1212	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	1.910.227.860,00	319.842.716.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.227.860,00	319.842.716.701,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1213	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	13 Objek	0,00	405.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1214	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	499.068.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.068.550,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	1 Paket											
1215	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	0,00	36.988.875.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.988.875.911,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1216	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	29.920.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920.563.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1217	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	14 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1218	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan	1 Paket											
1219	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1220	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit											
1221	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu													
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	572.143.920,00	573.153.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.143.920,00	573.153.955,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1222	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum													
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	680.413.600,00	680.413.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.413.600,00	681.413.600,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1223	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	650.272.692,00	663.298.907,00	6.000.000,00	63.302.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.272.692,00	63.965.298.907,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1224	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1.156.500,00	1.156.500,00	850.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.156.500,00	951.156.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %											
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1225	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.652.000,00	6.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652.000,00	6.652.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1226	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.209.700,00	3.209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.700,00	3.209.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1227	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1228	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.935.000,00	47.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.935.000,00	47.847.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1229	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.568.400,00	10.568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.400,00	10.568.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1230	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	206.928.428,00	206.928.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.928.428,00	206.928.428,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1231	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.950.700,00	10.950.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.700,00	10.950.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1232	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	65.575.692,00	65.575.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.575.692,00	65.575.692,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1233	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1234	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1235	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	23.866.887,00	23.866.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.866.887,00	23.866.887,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1236	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.804.400,00	12.804.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804.400,00	12.804.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1237	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.100.200,00	12.100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.200,00	12.100.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1238	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1239	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	77.219.500,00	77.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.219.500,00	77.219.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1240	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	468.924.300,00	527.947.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924.300,00	527.947.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1242	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	121.310.000,00	121.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.310.000,00	121.310.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1243	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek											
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang											
1244	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	82.806.940,00	82.880.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.806.940,00	82.880.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1245	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	0,00	1.314.800,00	0,00	6.796.240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.555.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1246	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	32.693.100,00	32.693.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.693.100,00	32.693.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1247	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	30 Layanan	2.822.700,00	2.822.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.700,00	2.822.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1248	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	550 Eksemplar	0,00	1.306.100,00	0,00	49.513.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.819.235,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1249	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	88.171.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.171.272,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1250	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	0,00	128.666.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.666.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1251	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	181.125.180,00	197.397.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.125.180,00	197.397.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,58											
1252	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	72.939.200,00	48.939.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.939.200,00	48.939.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1253	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	98.440.840,00	71.377.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440.840,00	71.377.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %											
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	30 Naskah											
1254	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno													
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	134.000.940,00	134.074.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.940,00	134.074.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	500 Eksemplar											
1255	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara													
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1256	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara													
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	250 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %											
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja											
1257	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis													
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	124.156.024,00	124.341.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.156.024,00	124.341.004,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1258	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis													
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	109.211.532,00	82.148.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.211.532,00	82.148.572,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1259	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	97.124.340,00	42.925.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.124.340,00	42.925.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi	1400 Arsip											
1260	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	137.470.892,00	137.618.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.470.892,00	137.618.192,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang diinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas											
1261	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	83.165.072,00	83.275.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.165.072,00	83.275.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	98.889.372,00	83.700.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889.372,00	83.700.132,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %											
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan	3 Unit Kearsipan											
1263	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	42.796.420,00	42.832.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.796.420,00	42.832.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang											
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	100 Berkas											
1264	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup													
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	47.283.533,00	47.320.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.283.533,00	47.320.073,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan											
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan											
1265	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	13.513.695,00	13.513.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513.695,00	13.513.695,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1266	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1267	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	6.873.120,00	6.873.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873.120,00	6.873.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan											
1268	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	13.851.309.189,00	13.916.824.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851.309.189,00	13.916.824.577,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis											
1269	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.796.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796.284,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1270	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	41.602.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.602.609,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1271	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.723.448,00	50.723.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.723.448,00	50.723.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.625.037,00	4.625.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.037,00	4.625.037,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1273	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	263.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.603.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1274	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	263.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.603.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.779.876,00	10.779.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779.876,00	10.779.876,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1276	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	36.511.200,00	36.511.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.511.200,00	36.511.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1277	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.000,00	3.471.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1278	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan											
1279	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1280	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	167.939.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.939.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1281	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	108.405.708,00	123.765.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.405.708,00	123.765.333,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1282	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan											
1283	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.631.324,00	37.323.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.631.324,00	37.323.934,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1285	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	298.949.760,00	306.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.949.760,00	306.432.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	99 Unit											
1286	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	130.889.700,00	130.889.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.889.700,00	130.889.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1287	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	359.241.267,00	359.241.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.241.267,00	359.241.267,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1288	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	46.542.600,00	46.542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.542.600,00	46.542.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1289	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22.022.400,00	13.142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022.400,00	13.142.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	12 bulan											
1290	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	289.572.396,00	136.300.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.572.396,00	136.300.702,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1291	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	1.373.442.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.442.064,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
1292	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	0,00	1.373.442.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.442.064,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen											
1293	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	340 Orang	0,00	530.606.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.606.307,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1294	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	340 Orang	530.606.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.606.307,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1295	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	9.682.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682.456,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1296	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	0,00	9.682.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682.456,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yangmemberikan layanan	2 Unit											
1297	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)													
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton											
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	63 Kelompok											
1298	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 Kelompok	605.507.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.507.674,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1299	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 Kelompok	0,00	605.507.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.507.674,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1300	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	48 Kelompok	5.393.157,00	5.393.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.157,00	5.393.157,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1301	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	17.989.736,00	17.989.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989.736,00	17.989.736,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan											
1302	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.388.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.388.548,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1303	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	100.388.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.388.548,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1304	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1305	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	302.053.700,00	0,00	99.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.120.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1306	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	0,00	458.519.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.519.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1307	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	458.519.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.519.380,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1308	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	62.669.988,00	64.371.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.669.988,00	64.371.408,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1309	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1310	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1311	3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan											
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan											
1312	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	186.837.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.837.147,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1313	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	186.837.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.837.147,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1314	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	20.807.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807.616,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1315	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.807.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807.616,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton											
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan	1 Dokumen											
1316	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.925.752,00	99.925.752,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku YangTersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	6742 Ton											
1317	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	325.763.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.763.318,00	0,00	Insentif Fiskal
1318	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	0,00	325.763.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.763.318,00	Insentif Fiskal
1319	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	235.999.915,00	882.350.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.999.915,00	882.350.917,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		Dinas Pariwisata													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %											
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %											
1320	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	482.898.500,00	601.790.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.898.500,00	601.790.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1321	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1322	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	4.590.800,00	4.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.800,00	4.590.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan											
1323	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	28.219.450.205,00	28.762.228.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219.450.205,00	28.762.228.188,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah DTW yang memungut retribusi	6 DTW											
1324	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	460.136.132,00	379.183.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.136.132,00	379.183.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan											
1325	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.513.400,00	5.312.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.400,00	5.312.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1326	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.655.300,00	83.655.300,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.955.300,00	83.655.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1327	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.793.600,00	11.793.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793.600,00	11.793.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1328	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	236.532.400,00	242.069.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.532.400,00	242.069.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1329	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.372.800,00	40.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.372.800,00	40.372.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1330	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	55.222.800,00	55.222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.222.800,00	55.222.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1331	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit											
1332	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.796.600,00	167.320.910,00	999.000.000,00	999.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.796.600,00	1.166.320.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1333	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	0,00	0,00	82.793.790,00	112.874.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.793.790,00	112.874.790,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1334	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	111.419.500,00	222.419.500,00	4.324.287.844,00	3.605.374.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.707.344,00	3.827.794.344,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan											
1335	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	16.210.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1336	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.949.284,00	198.208.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.949.284,00	198.208.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan											
1337	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	126.494.720,00	126.494.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.494.720,00	126.494.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1338	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	2.237.065.260,00	2.281.465.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.065.260,00	2.281.465.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	559 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1340	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	245.830.000,00	245.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.830.000,00	245.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1341	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	117.264.000,00	117.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.264.000,00	117.264.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	76.92 %											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	30 DTW											
1342	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	136.890.948,00	137.038.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.890.948,00	137.038.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan											
1343	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.189.600,00	4.189.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.600,00	4.189.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1344	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	8.697.365.100,00	8.764.145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697.365.100,00	8.764.145.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1345	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	94.289.200,00	94.289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.289.200,00	94.289.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1346	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	58.529.300,00	58.529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.529.300,00	58.529.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi											
1347	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1348	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	6.504.103.900,00	6.491.291.400,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1349	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	6.772.803.960,00	6.699.061.540,00	7.130.487.588,00	7.130.487.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903.291.548,00	13.829.549.128,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	215.701.600,00	215.701.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.701.600,00	215.701.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 usaha											
1351	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)													
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	75 Usaha	135.202.860,00	135.239.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.202.860,00	135.239.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1352	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	128.231.360,00	128.268.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.231.360,00	128.268.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang											
1353	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	547.213.200,00	547.213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.213.200,00	547.213.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1354	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	137.325.460,00	137.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.325.460,00	137.363.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	8.150.414.180,00	10.770.131.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.414.180,00	10.770.131.325,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1356	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %											
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha											
1357	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	76.465.360,00	76.502.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.465.360,00	76.502.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1358	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual													
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	55.932.000,00	55.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.932.000,00	55.932.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %											
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang											
1359	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	539.228.348,00	539.228.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.228.348,00	539.228.348,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1360	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI													
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	106.673.250,00	106.673.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.673.250,00	106.673.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1361	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	86 Orang	84.004.469,00	84.004.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.004.469,00	84.004.469,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1362	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	123.293.974,00	123.293.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.293.974,00	123.293.974,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pertanian dan Pangan													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %											
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	1 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1363	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %											
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton											
1364	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	5.651.427.204,00	5.872.025.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651.427.204,00	5.872.025.248,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1365	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia													
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1366	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan													
			Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	5.215.200,00	16.915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215.200,00	16.915.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1367	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	2.692.948.011,00	2.757.019.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.948.011,00	2.757.019.328,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik	100 %											
1368	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	8 Kelompok											
1369	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	78.414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.414.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1370	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0,00	1.881.431.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.431.485,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1371	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1.140.780.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.780.336,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %											
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutahirkan	1 Dokumen											
1372	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	2.248.200,00	2.248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.200,00	2.248.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan											
1373	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok											
1374	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1375	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan													
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1376	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	98.812.484,00	94.603.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.812.484,00	94.603.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	84,58											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen											
1377	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1378	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0,00	104.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.553.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1379	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.118.535.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535.869,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1380	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	0,00	1.803.917.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.917.618,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %											
1381	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	0,00	40.696.751.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696.751.629,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1382	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	47.858.013.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.858.013.568,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %											
1383	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	47.082.870,00	47.082.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.082.870,00	47.082.870,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1384	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	14.739.369,00	14.739.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739.369,00	14.739.369,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %											
1385	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1386	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84.530.607,00	84.530.607,00	1.439.147.479,00	1.626.769.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.678.086,00	1.711.299.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1387	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.938.359,00	35.938.359,00	279.802.917,00	405.897.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.741.276,00	441.836.166,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1388	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.114.128.718,00	1.036.633.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.128.718,00	1.036.633.978,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1389	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.566.714,00	52.566.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.566.714,00	52.566.714,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1390	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	76.218.372,00	76.218.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.218.372,00	76.218.372,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %											
1391	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0,00	231.734.034,00	0,00	967.853.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.587.434,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1392	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	967.853.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.853.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1393	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %											
1394	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1395	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	531.636.000,00	569.336.000,00	0,00	239.613.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.636.000,00	808.949.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1397	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	1.221.656.020,00	1.288.256.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.656.020,00	1.288.256.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1398	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	327.400.000,00	327.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.400.000,00	327.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	157.200.000,00	187.694.475,00	0,00	252.647.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.200.000,00	440.342.337,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelompok											
1400	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	4.936.864.927,00	0,00	1.188.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125.248.927,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1401	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	0,00	5.553.947.677,00	0,00	1.409.629.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963.576.910,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1402	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	0,00	9.491.528.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491.528.850,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1403	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	8.728.178.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728.178.650,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %											
1404	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	208.110.360,00	272.658.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.110.360,00	272.658.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1405	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	46.735.000,00	46.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735.000,00	46.735.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25 Sampel											
1406	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak													
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	34.070.600,00	34.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.070.600,00	34.070.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	7 Pengecer obat Hewan											
1407	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan													
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	3.221.100,00	3.221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.100,00	3.221.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	25 Kelompok											
1408	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan													
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	11.781.500,00	64.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781.500,00	64.269.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor											
1409	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1410	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	200 Ekor	653.837.998,00	2.773.046.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.837.998,00	2.773.046.598,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen											
1411	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	57.317.900,00	57.317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.317.900,00	57.317.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit											
1412	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	9.621.545.791,00	9.867.045.791,00	7.515.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136.545.791,00	9.867.045.791,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1413	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	3.333.900,00	37.468.318,00	1.587.236.687,00	1.587.236.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.570.587,00	1.624.705.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1414	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1415	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1417	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	17.690.693,00	22.190.693,00	0,00	4.386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690.693,00	4.408.190.693,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %											
1418	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak													
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	3.351.917.468,00	3.038.157.408,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.917.468,00	3.090.157.408,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	13 Laporan											
1419	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	13 Laporan	3.352.938.130,00	3.352.816.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.938.130,00	3.352.816.490,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1420	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	414.263.800,00	414.263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.263.800,00	414.263.800,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 Lokasi											
1421	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	53.314.306,00	53.314.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.314.306,00	53.314.306,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner													
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	84.174.160,00	84.174.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.174.160,00	84.174.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	430 Ha											
1423	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	0,00	609.313.532,00	0,00	11.828.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.141.692,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1424	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	707.122.652,00	0,00	11.828.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.950.812,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1425	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 Kali											
1426	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	1.688.703.170,00	1.484.895.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.703.170,00	1.484.895.890,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1427	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	29.723.500,00	29.723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.723.500,00	29.723.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1428	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32 Unit	67.162.500,00	67.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.162.500,00	67.162.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1429	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1430	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0,00	198.629.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.629.172,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1431	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	0,00	0,00	0,00	759.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.885.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1432	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82 Unit	0,00	0,00	0,00	1.175.789.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.789.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1433	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	432.251.200,00	494.351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.251.200,00	494.351.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	30, 30 orang, LPK											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1434	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6465 Orang	0,00	4.249.768.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.768.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1435	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6605 Orang	4.541.760.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541.760.460,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1436	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	841.707.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.707.060,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1437	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	0,00	114.607.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.607.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44 Lembaga											
1438	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44 Lembaga	101.228.760,00	96.400.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.228.760,00	96.400.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	8 Perizinan											
1439	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi													
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4 Perizinan	0,00	56.072.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.072.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1440	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi													
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8 Perizinan	81.235.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.235.260,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %											
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	90 orang											
1441	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	90 Orang	1.148.935.900,00	1.146.535.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.935.900,00	1.146.535.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1300 orang											
1442	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	167.254.840,00	167.402.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.254.840,00	167.402.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %											
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5126 perusahaan											
1443	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	87.187.716,00	87.274.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.187.716,00	87.274.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1444	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	238.954.200,00	238.954.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.954.200,00	238.954.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %											
1445	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	60 Perkara	90.270.816,00	49.653.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.270.816,00	49.653.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1446	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	173.473.200,00	173.473.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.473.200,00	173.473.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1447	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35000 Orang	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %											
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen											
1448	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	427.962.700,00	202.176.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.962.700,00	202.176.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1449	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1450	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	640.300,00	640.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.300,00	640.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1451	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.821.500,00	3.934.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.500,00	3.934.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1452	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.672.700,00	2.672.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.700,00	2.672.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1453	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	126.126.480,00	126.237.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.126.480,00	126.237.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun											
1454	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	14.285.342.558,00	13.785.706.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285.342.558,00	13.785.706.306,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92.787.920,00	97.678.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.787.920,00	97.678.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1456	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1457	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.716.900,00	26.716.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716.900,00	26.716.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1458	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	223.867.616,00	223.867.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.867.616,00	223.867.616,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1459	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.553.000,00	14.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553.000,00	14.553.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00	83.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1461	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00	8.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1462	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1463	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	135.081.480,00	135.192.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.081.480,00	135.192.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1464	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1465	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1466	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.974.720,00	90.974.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.974.720,00	90.974.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1467	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	68.062.000,00	68.062.000,00	891.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.453.600,00	68.062.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1,1,20 Dokumen, Gugus, IKM											
1468	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1469	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	694.222.360,00	694.259.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.222.360,00	694.259.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1470	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	364.940.720,00	88.304.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.940.720,00	88.304.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	6.066.268.764,00	4.324.573.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.268.764,00	4.324.573.464,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1472	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri													
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.318.700,00	3.461.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.700,00	3.461.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	100 %											
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Indsutri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	80 IKM											
1473	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	85.750.820,00	85.824.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.750.820,00	85.824.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIINas	100 %											
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKi dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	1 Dokumen											
1474	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.900,00	1.175.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Daerah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-											
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1475	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.165,00	1.458.165,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-											
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1476	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84.801.364,00	57.751.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.801.364,00	57.751.348,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-											
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-											
1477	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	7.251.287,00	7.251.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.287,00	7.251.287,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-											
1478	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong													
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	151.546.575,00	151.546.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.546.575,00	151.546.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1479	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	42.854.842,00	42.854.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.854.842,00	42.854.842,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.665.494,00	11.665.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665.494,00	11.665.494,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.949.754,00	6.949.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.754,00	6.949.754,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1482	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang/bulan	87.633.292.328,00	90.032.378.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.633.292.328,00	90.032.378.934,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	809.976.903,00	809.976.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.976.903,00	809.976.903,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1484	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1485	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	9.356.634,00	9.356.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356.634,00	9.356.634,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	123.797.384,00	123.797.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797.384,00	123.797.384,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1487	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	10.647.078,00	10.647.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.078,00	10.647.078,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1488	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	229.777.104,00	229.777.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.777.104,00	229.777.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1489	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1490	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1491	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	104.204.913,00	104.204.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.204.913,00	104.204.913,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1492	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1493	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.711.297.927,00	16.793.707.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711.297.927,00	16.793.707.527,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1494	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit	15.367.800.409,00	13.821.312.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367.800.409,00	13.821.312.409,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			0	19 0	0,00	532.445,00	0,00	153.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.433.945,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1497	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	141 Unit	0,00	1.329.780,00	0,00	3.499.584.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.913.873,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1498	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	664.890,00	0,00	312.601.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.266.753,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1499	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	177.103.951,00	177.103.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.103.951,00	177.103.951,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1500	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1502	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1503	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1504	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1505	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	177.632.976,00	177.632.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.632.976,00	177.632.976,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1506	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	433 Unit	0,00	2.033.950.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.950.945,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1507	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	2.023.170.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.170.945,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1508	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	11.064.838.613,00	12.282.905.613,00	696.306.410,00	856.306.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761.145.023,00	13.139.212.023,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1509	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	8.715.574.344,00	9.463.209.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.574.344,00	9.463.209.038,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.328.895.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328.895.824,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1511	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	4.248.738.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.738.525,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-											
1512	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1513	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12.874.629.825,00	19.321.523.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874.629.825,00	19.321.523.822,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-											
1514	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1515	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1516	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	20.640.990.370,00	35.145.271.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640.990.370,00	35.145.271.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1517	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	230.133.092,00	137.440.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.133.092,00	137.440.656,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1518	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	34.783.506,00	66.420.306,00	95.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.243.506,00	66.420.306,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1519	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	290.594.915,00	270.705.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.594.915,00	270.705.675,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1520	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	36.117.723,00	36.117.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117.723,00	36.117.723,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-											
1521	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1522	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1523	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-											
1524	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	3.278.579.761,00	3.608.338.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.579.761,00	3.608.338.541,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1525	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	439.875.024,00	412.782.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.875.024,00	412.782.216,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1526	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5.177.363.951,00	4.925.084.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.363.951,00	4.925.084.643,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-											
1527	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	424.599.851.294,00	844.088.853.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.599.851.294,00	844.088.853.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1528	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	113.734.606,00	114.000.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.734.606,00	114.000.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1529	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-											
1530	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	344.774.906,00	344.774.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.774.906,00	344.774.906,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1531	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	3.379.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.876.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	0,00	2.545.468.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.468.845,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1533	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	93.245.892,00	93.245.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.245.892,00	93.245.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-											
1534	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	81.292.808,00	81.425.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.292.808,00	81.425.553,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1535	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	131.551.159,00	131.949.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.551.159,00	131.949.394,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	97.012.806,00	97.278.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.012.806,00	97.278.296,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1537	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22 Dokumen	104.010.759,00	77.028.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010.759,00	77.028.989,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	171.843.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.843.097,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	0,00	171.975.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.975.842,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1540	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	49.829.324,00	49.962.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.829.324,00	49.962.069,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-											
1541	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	564.161.280,00	468.897.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.161.280,00	468.897.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1542	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	184.234.976,00	236.850.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.234.976,00	236.850.466,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	423.261.462,00	423.261.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.261.462,00	423.261.462,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-											
1544	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	97.381.309,00	97.381.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.381.309,00	97.381.309,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1545	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	748.991.208,00	349.391.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.991.208,00	349.391.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 Orang	135.577.560,00	168.991.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.577.560,00	168.991.635,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1547	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	698.613.991,00	698.613.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.613.991,00	698.613.991,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1548	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	7.131.528,00	7.131.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131.528,00	7.131.528,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	62.355.976,00	62.355.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.355.976,00	62.355.976,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-											
1550	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	445.513.084,00	445.513.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.513.084,00	445.513.084,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran	80											
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1551	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.368.900,00	7.368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368.900,00	7.368.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1552	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.967.500,00	2.967.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.500,00	2.967.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1553	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	10.480.842,00	10.480.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480.842,00	10.480.842,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1555	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	299.906.661,00	299.680.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.906.661,00	299.680.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1556	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.185.700,00	2.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1557	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	657.566.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.566.775,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1558	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	657.566.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.566.775,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	91.626.504,00	150.873.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.626.504,00	150.873.864,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	46.993.959,00	137.935.926,00	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.547.959,00	139.489.926,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.205.954.631,00	3.025.966.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.954.631,00	3.025.966.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1562	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	143.278.400,00	156.598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278.400,00	156.598.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	552.593.439,00	578.836.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.593.439,00	578.836.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1564	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	767.892.000,00	1.317.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.892.000,00	1.317.892.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	920.552.780,00	1.339.922.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.552.780,00	1.339.922.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1566	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.710.209.739,00	1.713.006.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.209.739,00	1.713.006.939,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1567	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	1.350.997.190,00	1.901.874.000,00	2.651.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.874.000,00	4.002.121.190,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1568	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	0,00	0,00	114.328.536,00	713.871.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.328.536,00	713.871.726,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	27.750.000,00	1.194.609.562,00	17.642.874.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.609.562,00	17.670.624.805,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1570	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	22.252.485.000,00	24.743.343.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.252.485.000,00	24.743.343.647,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1571	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	44.843.620,00	44.843.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.843.620,00	44.843.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1572	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	651.332.703,00	651.332.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.332.703,00	651.332.703,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1573	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	2.184.754.148,00	2.776.536.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.754.148,00	2.776.536.618,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.760.000,00	128.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1575	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495 Unit	452.979.012,00	694.748.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.979.012,00	694.748.112,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1576	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-											
1577	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	585 Orang/Bulan	45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1578	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	2.978.752.448,00	3.150.904.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.752.448,00	3.150.904.124,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1579	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	310.462.880,00	310.462.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.462.880,00	310.462.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-											
1580	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	501.984.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.984.732,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	0,00	501.690.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.690.779,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1582	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 pertsen											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-											
1583	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	2.682.864.374,00	2.709.712.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.864.374,00	2.709.712.974,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1584	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15.018.769.031,00	15.192.658.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018.769.031,00	15.192.658.031,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1585	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	171.060.492,00	263.143.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.060.492,00	263.143.623,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1586	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	3.172.158,00	162.207.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.158,00	162.207.669,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-											
1587	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	116.198.744,00	116.198.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.198.744,00	116.198.744,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1588	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	117.422.075,00	117.422.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.422.075,00	117.422.075,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	114.357.254,00	124.478.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.357.254,00	124.478.054,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1590	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	124.601.342,00	124.601.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.601.342,00	124.601.342,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	197.794.193,00	197.794.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.794.193,00	197.794.193,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-											
1592	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	825.535.248,00	1.377.036.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.535.248,00	1.377.036.728,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1593	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	574.956.982,00	772.037.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.956.982,00	772.037.725,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1594	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat													
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	790.595.792,00	1.322.913.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.595.792,00	1.322.913.214,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1595	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	479.948.925,00	603.391.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.948.925,00	603.391.869,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	416.325.554,00	689.539.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.325.554,00	689.539.008,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	318.472.166,00	577.729.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.472.166,00	577.729.966,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	827.969.130,00	1.105.119.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.969.130,00	1.105.119.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-											
1599	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	417.236.000,00	503.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.236.000,00	503.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	4.590.209.823,00	4.651.661.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.209.823,00	4.651.661.603,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1601	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	253.474.635,00	253.474.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.474.635,00	253.474.635,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1603	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1604	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD													
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	13.697.127,00	16.997.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697.127,00	16.997.127,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1605	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	4.363.308.899,00	5.588.514.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.308.899,00	5.588.514.835,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-											
1606	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	10.394.489,00	10.394.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394.489,00	10.394.489,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1607	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	6.510.568.000,00	5.883.723.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.568.000,00	5.883.723.771,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-											
1608	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	1.567.027.487,00	1.464.447.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.027.487,00	1.464.447.987,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-											
1609	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	103 Dokumen	0,00	20.523.951.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523.951.061,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	18.886.721.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886.721.039,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1611	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	5.939.024.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939.024.070,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1612	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen	0,00	8.599.341.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599.341.452,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1613	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.879.247,00	17.879.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879.247,00	17.879.247,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1614	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1615	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1616	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.720.862,00	14.720.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720.862,00	14.720.862,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1617	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	98.458.575,00	98.458.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.458.575,00	98.458.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %											
1618	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1619	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.978.464,00	1.978.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.464,00	1.978.464,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1620	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	71.087.649,00	72.275.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.087.649,00	72.275.898,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1621	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.996.264,00	17.996.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996.264,00	17.996.264,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1622	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.334.308,00	2.334.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.308,00	2.334.308,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
1623	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.942.605,00	7.942.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942.605,00	7.942.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1624	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	58.791.297,00	0,00	290.650.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.441.947,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	0,00	78.698.037,00	0,00	1.459.727.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.425.496,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1626	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	4.703.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.292,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0,00	5.874.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1628	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	197.041.674,00	197.041.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.041.674,00	197.041.674,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	38.641.764,00	38.641.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.641.764,00	38.641.764,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1630	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.400.000,00	210.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	210.154.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1631	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	549.856.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.380.570,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1632	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	14.914.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914.293,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1633	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	0,00	0,00	0,00	132.129.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.129.183,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
1634	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %											
1636	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	121.550.700,00	134.570.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550.700,00	134.570.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1637	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	444.931.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.931.260,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	0,00	550.981.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.981.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1639	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1641	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %											
1642	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	213.973.532,00	102.043.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.973.532,00	102.043.716,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1643	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	7.967.000,00	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00	3.267.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1644	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	68.118.614,00	38.718.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.118.614,00	38.718.614,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	36.436.995,00	12.200.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.436.995,00	12.200.995,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1646	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	738.077.644,00	353.540.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.077.644,00	353.540.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %											
1647	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0,00	128.916.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.916.376,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1648	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	50.100.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100.376,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %											
1649	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	77.251.130,00	56.205.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.251.130,00	56.205.530,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1650	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	235.001.740,00	151.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.001.740,00	151.884.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	100 %											
1651	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	13.885.547,00	13.885.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885.547,00	13.885.547,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1652	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	6.755.577,00	6.755.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755.577,00	6.755.577,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1653	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.760.559,00	5.760.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.559,00	5.760.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1654	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	7.034.520,00	7.034.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.520,00	7.034.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1655	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	12.791.236,00	81.891.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791.236,00	81.891.236,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1656	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	5.962.742,00	5.962.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962.742,00	5.962.742,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1657	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	49.306.963,00	49.306.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.306.963,00	49.306.963,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	144.458.131,00	570.800.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.458.131,00	570.800.131,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %											
1659	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	0,00	258.340.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.340.168,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1660	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	21.973.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973.968,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1661	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	48.267.518,00	48.267.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.267.518,00	48.267.518,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1662	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	21.843.971,00	21.843.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843.971,00	21.843.971,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1663	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	0,00	19.400.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1664	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	48.253.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.253.310,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1665	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	0,00	201.709.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.709.455,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1666	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	23.685.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685.255,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1667	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	48.021.875,00	48.021.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.021.875,00	48.021.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1668	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	21.501.980,00	21.501.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501.980,00	21.501.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1669	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	48.031.643,00	48.031.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.031.643,00	48.031.643,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %											
1670	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	116.576.758,00	305.933.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.576.758,00	305.933.658,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1671	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	46.580.268,00	46.580.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.580.268,00	46.580.268,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1672	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	961.023.762,00	961.023.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.023.762,00	961.023.762,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1673	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	45.890.150,00	71.751.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.890.150,00	71.751.110,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1674	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	88.547.580,00	88.547.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.547.580,00	88.547.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1675	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	45.431.214,00	45.431.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.431.214,00	45.431.214,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1676	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	30.165.206,00	30.165.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.165.206,00	30.165.206,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1677	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	103.249.616,00	74.396.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.249.616,00	74.396.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%											
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %											
1678	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.593.835,00	15.593.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593.835,00	15.593.835,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1679	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.015.539,00	1.015.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.539,00	1.015.539,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1680	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.724.382,00	4.724.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.382,00	4.724.382,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan											
1681	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	56.833.948.588,00	57.870.663.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.833.948.588,00	57.870.663.533,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1682	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	48.181.770,00	48.181.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.181.770,00	48.181.770,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1683	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	11.879.220,00	11.879.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.220,00	11.879.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1684	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.262.291,00	2.262.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.291,00	2.262.291,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan											
1685	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.919.850,00	7.919.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919.850,00	7.919.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1686	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	1.333.770.921,00	1.292.197.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.770.921,00	1.292.197.536,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1687	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.293.029,00	11.293.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293.029,00	11.293.029,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1688	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	391.866.691,00	391.866.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.866.691,00	391.866.691,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1689	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	292.005.002,00	292.005.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.005.002,00	292.005.002,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1690	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	41.696.928,00	41.696.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696.928,00	41.696.928,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1691	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.111.000,00	6.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.000,00	6.438.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	1 unit											
1692	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	320.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.445.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1693	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1694	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23.620.843,00	23.620.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620.843,00	23.620.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1695	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	402.930.000,00	402.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.930.000,00	402.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1696	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1697	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	214.990.000,00	214.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.990.000,00	214.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan											
1698	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.623.820,00	111.084.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.623.820,00	111.084.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1699	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	261.237.700,00	405.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.237.700,00	405.983.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1700	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210.000,00	12.210.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1701	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	298.139.800,00	298.139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.139.800,00	298.139.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1702	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	173 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%											
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %											
1703	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	261.325.652,00	261.325.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.325.652,00	261.325.652,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1704	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	225.090.726,00	225.090.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.090.726,00	225.090.726,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1705	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	362.872.320,00	362.872.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.872.320,00	362.872.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1706	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	358.979.550,00	358.979.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.979.550,00	358.979.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1707	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35 Dokumen	29.937.144,00	179.027.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937.144,00	179.027.144,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1708	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %											
1709	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 Dokumen	285.531.960,00	231.853.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.531.960,00	231.853.803,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1710	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	5.432.451,00	5.432.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432.451,00	5.432.451,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1711	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	1.686.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.729.228.438,00	0,00	942.730.914.528,00	0,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1712	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	0,00	1.686.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.692.045.762,00	0,00	1.244.693.731.852,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1713	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	227.235.426,00	307.731.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.235.426,00	307.731.516,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %											
1714	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	30.920.604,00	30.920.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920.604,00	30.920.604,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1715	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	159.757.854,00	159.757.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.757.854,00	159.757.854,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1716	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	28.190.781,00	127.990.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.190.781,00	127.990.781,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1717	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	411.323.931,00	411.323.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.323.931,00	411.323.931,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1718	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	12.537.561,00	12.537.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.561,00	12.537.561,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1719	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	33.694.938,00	33.694.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.694.938,00	33.694.938,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %											
1720	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	70.756.644,00	100.868.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.320.473.189,00	1.192.582.509.620,00	650.391.229.833,00	1.192.683.378.264,00	Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1721	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	0,00	0,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %											
1722	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	276.548.175,00	276.548.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.548.175,00	276.548.175,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1723	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.071.571,00	24.071.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.071.571,00	24.071.571,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1724	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	125.079.673,00	125.079.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.079.673,00	125.079.673,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1725	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.381.699,00	30.381.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.381.699,00	30.381.699,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1726	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	148.539.487,00	148.539.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.539.487,00	148.539.487,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1727	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38 Laporan	1.071.295.240,00	1.074.995.240,00	73.615.200,00	73.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.910.440,00	1.148.610.440,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1728	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.569.575.194,00	3.569.575.194,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.575.194,00	3.729.575.194,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1729	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	483.170.068,00	698.270.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.170.068,00	698.270.068,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1730	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	27.150.158,00	27.150.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150.158,00	27.150.158,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1731	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.367.243.793,00	1.197.143.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.243.793,00	1.197.143.793,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1732	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	16.012.231,00	16.012.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012.231,00	16.012.231,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1733	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	26.437.893,00	26.437.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437.893,00	26.437.893,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1734	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	12.566.958,00	12.566.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566.958,00	12.566.958,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pendapatan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen											
1735	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	12.861.568,00	12.861.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861.568,00	12.861.568,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1736	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.271.835,00	4.271.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.835,00	4.271.835,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1737	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	6.375.001,00	6.375.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.001,00	6.375.001,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan											
1738	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	205.897.571.725,00	181.626.379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.897.571.725,00	181.626.379.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan											
1739	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.397.810,00	14.397.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397.810,00	14.397.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1740	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.409.887,00	36.409.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.409.887,00	36.409.887,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1741	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	550.255.473,00	550.255.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.255.473,00	550.255.473,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1742	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.943.060,00	75.464.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.943.060,00	75.464.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1743	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	516 Dokumen	66.848.400,00	66.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.848.400,00	66.848.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1744	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %											
1745	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1746	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1747	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	170.372.568,00	472.613.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.372.568,00	472.613.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1748	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	866.194.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.194.605,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1749	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	0,00	0,00	0,00	1.670.119.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.119.209,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %											
1750	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1751	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	168.426.600,00	168.426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.426.600,00	168.426.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan											
1752	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.444.500,00	59.764.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.444.500,00	59.764.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1753	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	820.662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.662.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1754	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	0,00	856.182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.182.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1755	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	0,00	545.598.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.598.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1756	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	807.008.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.008.452,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1757	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1758	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	136.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.308.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak											
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %											
1759	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.291.303,00	133.807.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.291.303,00	133.807.903,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1760	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	353.064.678,00	338.912.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.064.678,00	338.912.178,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1761	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700 Unit	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1762	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	881.052.444,00	881.052.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.052.444,00	881.052.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1763	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1764	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212267 Obyek Pajak	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1765	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	102.119.001,00	116.919.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.119.001,00	116.919.001,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1766	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	3.135.084,00	3.135.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.084,00	3.135.084,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1767	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	823.889.925,00	823.889.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.889.925,00	823.889.925,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1768	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	810.291.117,00	851.760.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.291.117,00	851.760.417,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1769	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	9.457.496,00	9.457.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457.496,00	9.457.496,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1770	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.978.839.096,00	2.014.359.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.839.096,00	2.014.359.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1771	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	456.747.795,00	456.747.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.747.795,00	456.747.795,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1772	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	2.027.304,00	2.027.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.304,00	2.027.304,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
1773	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.044.130,00	13.044.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044.130,00	13.044.130,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1774	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.462.692,00	13.462.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462.692,00	13.462.692,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
1775	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	23.000.221.932,00	27.367.057.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.221.932,00	27.367.057.999,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1776	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1777	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.091.750,00	25.091.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.091.750,00	25.091.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1778	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1779	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	152.254.000,00	152.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.254.000,00	152.254.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1780	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.536.600,00	37.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.536.600,00	37.536.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1781	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.454.800,00	57.454.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454.800,00	57.454.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1782	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	132.419.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.419.448,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1783	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	77 Unit	0,00	0,00	0,00	894.510.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.510.092,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1784	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	9.812.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1785	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.379.500,00	47.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379.500,00	47.379.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1786	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1787	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.975.200,00	90.975.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.975.200,00	90.975.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1788	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	231.060.000,00	266.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.060.000,00	266.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1789	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1790	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	61.970.000,00	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.970.000,00	61.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1791	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %											
1792	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.722.908,00	11.116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722.908,00	11.116.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1793	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	350.800.248,00	343.197.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800.248,00	343.197.748,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1794	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	465 Dokumen	13.246.202,00	13.246.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246.202,00	13.246.202,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1795	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	33.558.308,00	28.492.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.558.308,00	28.492.008,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1796	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	84.791.300,00	180.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.791.300,00	180.791.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %											
1797	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	4.403.636,00	4.403.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.636,00	4.403.636,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1798	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3200 Dokumen	180.181.680,00	196.205.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.181.680,00	196.205.089,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1799	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	74.104.649,00	78.500.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.104.649,00	78.500.249,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %											
1800	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	646.937.700,00	1.123.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.937.700,00	1.123.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1801	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	17.485.100,00	10.081.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.100,00	10.081.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1802	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	395.994.500,00	3.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.994.500,00	3.994.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1803	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	17.131.700,00	17.131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.131.700,00	17.131.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1804	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	15.824.900,00	14.188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824.900,00	14.188.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1805	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN													
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	29.533.500,00	9.061.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533.500,00	9.061.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %											
1806	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	14.569.361,00	14.569.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569.361,00	14.569.361,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1807	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	8.569.361,00	8.569.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569.361,00	8.569.361,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1808	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	3.200.936,00	3.200.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.936,00	3.200.936,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1809	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	810 Orang	1.259.654.296,00	624.236.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.654.296,00	624.236.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1810	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 Orang	3.376.500,00	7.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.500,00	7.376.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1811	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai													
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1.616.400,00	1.616.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.400,00	1.616.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %											
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %											
1812	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	56.021.460,00	56.021.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021.460,00	56.021.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1813	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	298 Orang	0,00	10.832.073.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832.073.296,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1814	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	587 Orang	8.240.247.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.247.416,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi	100 %											
1815	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	1.002.595.000,00	502.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.595.000,00	502.595.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1816	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12 Dokumen	15.529.100,00	15.529.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529.100,00	15.529.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1817	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	6.503.672.300,00	6.503.655.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503.672.300,00	6.503.655.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %											
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen											
1818	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414.567,00	18.414.567,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah	2 Laporan											
1819	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1820	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	13.632.893,00	14.315.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632.893,00	14.315.636,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Paket											
1821	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.377.700,00	7.377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.700,00	7.377.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1822	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	285.195.855,00	285.195.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.195.855,00	285.195.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1823	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.730.227,00	42.730.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730.227,00	42.730.227,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ketersediaan barang milik daerah	8 Unit											
1824	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	387.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.750.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1825	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	146.985.587,00	0,00	387.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.735.587,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1826	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	29.303.456,00	199.738.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303.456,00	199.738.073,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan											
1827	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	42.314.804,00	42.314.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.314.804,00	42.314.804,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1828	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.519.400,00	14.519.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519.400,00	14.519.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1829	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	87.901.416,00	87.901.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.901.416,00	87.901.416,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan											
1830	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.974.720,00	90.974.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.974.720,00	90.974.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1831	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	459.649.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.649.064,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1832	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	0,00	455.479.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.479.376,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1833	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.844.375,00	45.118.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.375,00	45.118.031,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1834	5.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	72.069.192,00	72.069.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.069.192,00	72.069.192,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %											
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan											
1835	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	24.538.512,00	24.538.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538.512,00	24.538.512,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1836	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0,00	1.693.196.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.196.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1837	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1.746.402.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.402.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1838	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	444.855.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.855.060,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1839	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	0,00	325.500.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen											
1840	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	524.731.100,00	524.731.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.731.100,00	524.731.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1841	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	82.080.697,00	82.080.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.080.697,00	82.080.697,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1842	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	213.688.800,00	213.688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.688.800,00	213.688.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1843	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	230.950.242,00	230.950.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.950.242,00	230.950.242,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1844	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1845	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	251.715.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.715.737,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1846	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	233.024.832,00	233.024.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.024.832,00	233.024.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen											
1847	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	315.943.455,00	315.943.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.943.455,00	315.943.455,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1848	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	240.208.900,00	240.208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.208.900,00	240.208.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1849	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	207.851.355,00	207.851.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.851.355,00	207.851.355,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1850	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	237.818.165,00	237.818.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.818.165,00	237.818.165,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1851	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	335.078.106,00	335.078.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.078.106,00	335.078.106,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1852	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	239.430.800,00	239.430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.430.800,00	239.430.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan											
1853	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	627.726.240,00	579.426.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.726.240,00	579.426.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1854	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0,00	1.151.413.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.413.687,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1855	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1.195.481.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.481.187,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1856	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	2.003.887.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.887.205,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1857	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	0,00	1.945.046.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.046.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1858	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	134.213.825,00	134.213.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.213.825,00	134.213.825,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1859	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	199.016.860,00	199.016.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.016.860,00	199.016.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
1860	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.039.042,00	9.039.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039.042,00	9.039.042,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1861	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1862	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.133.476,00	5.133.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133.476,00	5.133.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
1863	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	0,00	33.642.044.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.642.044.345,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1864	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	33.456.306.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456.306.755,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1865	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.309.460,00	10.215.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309.460,00	10.215.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1866	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	190.825.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.825.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1867	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	189.878.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.878.780,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1868	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	53.039.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.039.345,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1869	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.518.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.518.520,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1870	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	41.743.200,00	41.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.743.200,00	41.743.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1871	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1872	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			[object Object]	[object Object]	0,00	198.629.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.629.172,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1873	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0,00	0,00	714.143.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.143.142,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1874	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	0,00	0,00	0,00	900.742.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.742.689,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1875	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %											
1876	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.942.708,00	22.632.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942.708,00	22.632.708,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1877	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1878	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.329.634,00	45.954.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.329.634,00	45.954.634,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1879	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	73.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1880	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	73.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.970.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1881	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	360.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1882	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	271.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1883	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	36.870.000,00	36.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.870.000,00	36.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1884	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1885	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	6.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %											
1886	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	208.610.968,00	208.610.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.610.968,00	208.610.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1887	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	75.376.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.376.563,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1888	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	0,00	110.385.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385.063,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1889	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	81.753.589,00	81.753.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.753.589,00	81.753.589,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1890	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	15.250.432,00	15.250.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250.432,00	15.250.432,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1891	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	52.195.658,00	52.195.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195.658,00	52.195.658,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1892	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	5.983.722,00	5.983.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.722,00	5.983.722,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %											
1893	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	590.222.458,00	1.225.468.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.222.458,00	1.225.468.458,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %											
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %											
1894	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	882.098.421,00	882.098.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.098.421,00	882.098.421,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1895	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	2.207.553,00	2.207.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.553,00	2.207.553,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1896	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.812.291.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.291.549,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1897	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	0,00	7.520.499.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.499.621,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1898	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	5.949.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.659,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1899	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	0,00	390.695.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.695.659,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Petang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1900	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.555.700,00	11.555.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555.700,00	11.555.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1901	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1902	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.921.200,00	8.921.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921.200,00	8.921.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1903	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8.213.042.692,00	8.227.044.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213.042.692,00	8.227.044.092,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1904	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1905	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1906	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	347.734.200,00	347.734.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.734.200,00	347.734.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1907	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.316.900,00	21.316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.316.900,00	21.316.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1908	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.636.800,00	40.636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636.800,00	40.636.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1909	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1910	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	33.104.862,00	0,00	581.312.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.417.112,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1911	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	10.576.635,00	10.576.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576.635,00	10.576.635,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1912	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00	24.908.400,00	5.829.720,00	140.407.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829.720,00	165.315.519,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1913	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1914	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1915	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.057.760,00	21.057.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057.760,00	21.057.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1916	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.270.000,00	79.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.270.000,00	79.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1917	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1918	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	354.836.300,00	402.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.836.300,00	402.116.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1919	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870.000,00	23.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1920	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	53.992.000,00	53.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.992.000,00	53.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1921	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	undefined											
1922	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	8.857.500,00	8.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857.500,00	8.857.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											
1923	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	1.835.600,00	1.835.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.600,00	1.835.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1924	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	683.558.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.558.716,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1925	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	0,00	684.363.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.363.496,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-											
1926	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	31.141.133,00	31.141.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.141.133,00	31.141.133,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1927	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	50.638.200,00	50.638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.638.200,00	50.638.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1928	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	0,00	2.804.955.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.955.046,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1929	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	2.099.159.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.159.750,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-											
1930	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.648.500,00	10.648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648.500,00	10.648.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-											
1931	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	78.125.300,00	78.125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.125.300,00	78.125.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											
1932	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	301.862.468,00	301.862.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.862.468,00	301.862.468,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1933	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	37.312.800,00	37.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.800,00	37.312.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket											
1934	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	29.116.100,00	29.116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.116.100,00	29.116.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1935	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	26.707.400,00	26.707.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.707.400,00	26.707.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1936	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kecamatan Abiansemal													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Paket											
1937	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.930.900,00	7.930.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.900,00	7.930.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1938	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1939	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	5.574.300,00	5.574.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.300,00	5.574.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 Paket											
1940	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket											
1941	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1942	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	389.544.028,00	389.544.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.544.028,00	389.544.028,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1943	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.613.600,00	21.613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.613.600,00	21.613.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1944	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1945	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104 Unit											
1946	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	33.104.862,00	0,00	623.896.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.001.452,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1947	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	0,00	0,00	272.888.616,00	272.888.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.888.616,00	272.888.616,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1948	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	11.474.265,00	11.474.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474.265,00	11.474.265,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1949	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1950	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1951	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	221.495.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.495.613,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan											
1952	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.240.073,00	27.240.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.073,00	27.240.073,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1953	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.272.040,00	90.272.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.272.040,00	90.272.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1954	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	457.689.272,00	457.687.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.689.272,00	457.687.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Paket											
1955	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	348.676.020,00	398.154.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.676.020,00	398.154.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1956	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	35.677.500,00	35.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.677.500,00	35.677.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1957	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	221.200.000,00	221.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200.000,00	221.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Paket											
1958	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	12.338.700,00	12.338.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338.700,00	12.338.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7186 Paket											
1959	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	260 Dokumen	1.624.900,00	1.281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.900,00	1.281.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1960	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6926 Laporan	576.984.416,00	577.317.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.984.416,00	577.317.056,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket											
1961	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	32.951.900,00	32.951.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.951.900,00	32.951.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1962	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	55.582.900,00	55.582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.582.900,00	55.582.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1963	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.590.268.400,00	3.692.896.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.268.400,00	3.692.896.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitasi Penegembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35 Paket											
1964	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	17.240.600,00	17.240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240.600,00	17.240.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan											
1965	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00	27.562.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241 Paket											
1966	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 Orang	375.624.377,00	375.624.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.624.377,00	375.624.377,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1967	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	67.490.600,00	67.490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.490.600,00	67.490.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket											
1968	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	26.656.700,00	26.656.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656.700,00	26.656.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1969	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	83.072.300,00	83.072.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.072.300,00	83.072.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Mengwi													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Paket											
1970	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	9.070.484,00	9.070.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.484,00	9.070.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1971	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1972	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.743.304,00	5.743.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.304,00	5.743.304,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114 Paket											
1973	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket											
1974	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.652.984,00	17.609.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652.984,00	17.609.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1975	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1976	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.006.135,00	35.006.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006.135,00	35.006.135,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1977	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	73.286.640,00	73.286.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.286.640,00	73.286.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1978	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180 Unit											
1979	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	0,00	33.104.862,00	3.414.187.950,00	4.552.254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.187.950,00	4.585.359.162,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1980	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	356 Unit	388.500,00	388.500,00	1.760.992.911,00	1.735.769.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.381.411,00	1.736.158.111,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1981	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit	5.815.513,00	5.815.513,00	4.677.302.682,00	3.930.413.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.118.195,00	3.936.228.953,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1982	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1983	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	28.010.184,00	28.010.184,00	736.715.719,00	1.157.146.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.725.903,00	1.185.156.643,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan											
1984	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	62.117.949,00	70.617.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.117.949,00	70.617.949,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1985	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	492.470.600,00	644.994.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.470.600,00	644.994.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1986	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.358.298.044,00	2.362.454.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.298.044,00	2.362.454.364,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169 Paket											
1987	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	609.884.524,00	619.993.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.884.524,00	619.993.364,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1988	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	49.945.000,00	49.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.945.000,00	49.292.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1989	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	235.801.278,00	1.367.138.053,00	1.745.778.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10 Paket											
1990	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.203.436,00	8.203.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.436,00	8.203.436,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13 Paket											
1991	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Paket											
1992	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	37.273.132,00	37.273.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273.132,00	37.273.132,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1993	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	54.049.183,00	54.049.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.049.183,00	54.049.183,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1994	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	2.225.951.910,00	3.121.112.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.951.910,00	3.121.112.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Paket											
1995	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	9.769.400,00	9.769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769.400,00	9.769.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan											
1996	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	67.156.600,00	67.156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.156.600,00	67.156.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151 Paket											
1997	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	476.448.081,00	476.448.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.448.081,00	476.448.081,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1998	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	67.537.500,00	67.537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.537.500,00	67.537.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Paket											
1999	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	20.949.536,00	305.679.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949.536,00	305.679.736,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2000	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	11.794.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794.036,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2001	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	54.612.100,00	54.612.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.612.100,00	54.612.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kapal													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2002	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	13.366.700,00	13.366.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366.700,00	13.366.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1890 Unit	4.741.483.222,00	4.926.897.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.483.222,00	4.926.897.522,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	1.224.355.375,00	5.474.595.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.355.375,00	5.474.595.504,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Sempidi													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2005	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.196.500,00	13.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196.500,00	13.196.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2006	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1303 Unit	652.454.485,00	652.454.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.454.485,00	652.454.485,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2007	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.339.366.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.366.307,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2008	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.804.646.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.646.533,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Abianbase													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2009	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.566.700,00	10.566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566.700,00	10.566.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2010	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.429.300.609,00	2.560.677.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.300.609,00	2.560.677.754,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Sading													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2011	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.116.700,00	11.116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116.700,00	11.116.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2012	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95 Unit	255.658.500,00	98.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.658.500,00	98.578.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2013	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	1.108.198.434,00	2.255.937.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.198.434,00	2.255.937.034,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Lukluk													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2014	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.116.700,00	10.116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116.700,00	10.116.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2015	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	658.991.472,00	1.289.862.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.991.472,00	1.289.862.677,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kuta Utara													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket											
2016	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	140.966.015,00	141.002.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.966.015,00	141.002.555,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2017	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.902.998,00	9.902.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902.998,00	9.902.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81 orang											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	17.469.210.635,00	18.106.441.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469.210.635,00	18.106.441.036,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket											
2019	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.972.690,00	11.721.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.690,00	11.721.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2020	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	725.895.500,00	736.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.895.500,00	736.439.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2021	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.295.886,00	40.295.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.295.886,00	40.295.886,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2022	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	396 Dokumen	58.185.600,00	58.185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.185.600,00	58.185.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2023	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27 Unit	0,00	33.104.862,00	2.116.422.570,00	3.606.170.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.422.570,00	3.639.275.082,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2024	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Unit	0,00	0,00	151.890.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.890.846,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2025	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Unit	0,00	0,00	0,00	421.520.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.520.003,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2026	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	308 Unit	110.211.567,00	74.002.923,00	1.413.553.809,00	1.313.659.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.765.376,00	1.387.661.949,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan											
2027	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	61.480.955,00	61.480.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.480.955,00	61.480.955,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2028	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	279.740.316,00	423.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.740.316,00	423.886.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2029	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	759.406.435,00	764.377.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.406.435,00	764.377.315,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131 Paket											
2030	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	124.425.320,00	124.425.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.425.320,00	124.425.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2031	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	424.267.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.267.852,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2032	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	0,00	445.682.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.682.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2033	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	87.700.212,00	87.700.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700.212,00	87.700.212,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2034	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	323.165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.165.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2035	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	176.007.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.007.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Paket											
2036	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	22.127.500,00	22.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127.500,00	22.127.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	3 Paket											
2037	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	734.104.314,00	735.217.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.104.314,00	735.217.614,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20 Paket											
2038	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket											
2039	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	47.473.818,00	47.473.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.473.818,00	47.473.818,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2040	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	47.080.958,00	47.080.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080.958,00	47.080.958,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2041	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.514.779.681,00	3.245.074.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.779.681,00	3.245.074.133,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-											
2042	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.465.831,00	10.465.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465.831,00	10.465.831,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-											
2043	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	71.871.942,00	71.871.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.871.942,00	71.871.942,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Paket											
2044	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Orang	420.523.066,00	420.523.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.523.066,00	420.523.066,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2045	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	106.348.515,00	57.148.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.348.515,00	57.148.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Paket											
2046	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	801.928.050,00	801.928.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.928.050,00	801.928.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2047	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	13.160.800,00	13.160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160.800,00	13.160.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2048	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	23.558.300,00	23.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558.300,00	23.558.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kerobokan Kelod													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	3 Paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket											
2049	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.919.744,00	6.919.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.744,00	6.919.744,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2050	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	124.542.000,00	0,00	178.571.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.113.250,00	0,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2051	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	0,00	0,00	0,00	344.918.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.918.625,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2052	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.188.579.067,00	1.235.826.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.579.067,00	1.235.826.707,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kerobokan Kaja													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	3 Paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket											
2053	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.722.139,00	6.722.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722.139,00	6.722.139,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2054	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2.253.300,00	2.253.300,00	496.226.615,00	496.226.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.479.915,00	498.479.915,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2055	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	578.801.364,00	844.270.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.801.364,00	844.270.073,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kerobokan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	3 Paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket											
2056	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.434.768,00	6.434.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434.768,00	6.434.768,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2057	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	285 Unit	321.702.975,00	357.933.375,00	101.458.440,00	101.458.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.161.415,00	459.391.815,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2058	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.138.499.060,00	1.344.312.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.499.060,00	1.344.312.055,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kuta													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen											
2059	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.403.800,00	7.403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403.800,00	7.403.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2060	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2061	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.980.200,00	5.980.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.200,00	5.980.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Paket											
2062	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket											
2063	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	347.765.900,00	19.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.765.900,00	19.852.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2064	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.087.068.200,00	1.036.603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.068.200,00	1.036.603.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2065	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.934.700,00	54.934.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.934.700,00	54.934.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2066	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	108.031.200,00	108.031.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.031.200,00	108.031.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2067	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	38.034.000,00	38.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.034.000,00	38.034.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit											
2068	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	4.314.612.682,00	5.137.848.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.612.682,00	5.137.848.733,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2069	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	867.265.200,00	1.307.746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.265.200,00	1.307.746.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2070	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	148.811.817,00	148.811.817,00	2.420.729.144,00	2.855.848.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.540.961,00	3.004.660.184,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2071	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	499.500.000,00	499.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.500.000,00	499.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan											
2072	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	124.662.400,00	109.053.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.662.400,00	109.053.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2073	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	465.378.900,00	465.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.378.900,00	465.378.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2074	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 paket											
2075	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.677.200,00	122.377.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.677.200,00	122.377.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2076	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	620.640.700,00	874.502.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.640.700,00	874.502.296,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2077	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	262.764.400,00	262.764.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.764.400,00	262.764.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2078	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.402.000.000,00	3.720.849.893,00	197.575.000,00	197.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.575.000,00	3.918.424.893,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	100 %											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8 paket											
2079	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2080	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	70.466.352,00	70.466.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.466.352,00	70.466.352,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 paket											
2081	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket											
2082	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	23.456.700,00	23.456.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456.700,00	23.456.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2083	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	23.636.000,00	23.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.636.000,00	23.636.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2084	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00	2.806.587.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.587.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2085	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.476.775.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.775.560,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2086	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2087	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2088	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 paket											
2089	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	20.308.100,00	20.308.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308.100,00	20.308.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 laporan											
2090	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	98.906.400,00	98.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.906.400,00	98.906.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 paket											
2091	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	219.961.400,00	219.961.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.961.400,00	219.961.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2092	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	54.311.200,00	54.311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.311.200,00	54.311.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kelurahan Tuban													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2093	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2094	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	199.474.000,00	199.474.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.874.000,00	285.874.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2095	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.038.347.230,00	1.266.457.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.347.230,00	1.266.457.630,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kuta													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket											
2096	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2097	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	452.247.000,00	833.941.400,00	185.605.500,00	134.355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.852.500,00	968.296.900,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2098	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.658.147.400,00	1.903.728.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.147.400,00	1.903.728.900,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kedonganan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2099	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2100	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	307.920.000,00	307.920.000,00	332.428.200,00	332.428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.348.200,00	640.348.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2101	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.389.888.064,00	1.944.130.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.888.064,00	1.944.130.030,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Legian													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2102	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2103	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	726.996.500,00	726.996.500,00	16.797.600,00	16.797.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.794.100,00	743.794.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2104	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.183.175.030,00	1.462.817.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.175.030,00	1.462.817.030,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Seminyak													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2105	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2106	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	18.113.000,00	18.113.000,00	30.419.700,00	30.419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.532.700,00	48.532.700,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
2107	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	191.217.200,00	264.491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.217.200,00	264.491.200,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kuta Selatan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	14 Paket											
2108	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.393.800,00	10.393.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393.800,00	10.393.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2109	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2110	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	654.610.500,00	553.090.500,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.610.500,00	652.090.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined	1 Paket undefined undefined											
2111	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.253.943.149,00	14.247.378.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253.943.149,00	14.247.378.222,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket											
2112	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.906.400,00	14.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906.400,00	14.906.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2113	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	710.532.355,00	874.773.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.532.355,00	874.773.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2114	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69.019.000,00	72.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.019.000,00	72.339.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2115	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	71.808.000,00	71.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.808.000,00	71.808.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2116	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2117	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	98.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.441.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2118	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	73.492.794,00	1.871.689.770,00	2.375.602.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2119	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	428 Unit	0,00	0,00	449.963.364,00	914.403.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.963.364,00	914.403.237,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2120	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	0,00	0,00	875.022.990,00	1.625.717.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.022.990,00	1.625.717.877,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2121	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2122	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan											
2123	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	82.018.424,00	83.107.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.018.424,00	83.107.088,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2124	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	351.843.196,00	516.708.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.843.196,00	516.708.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2125	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	933.642.996,00	860.888.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.642.996,00	860.888.112,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDaerah	120 paket											
2126	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	121.374.320,00	121.374.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.374.320,00	121.374.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2127	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	625.728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.728.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2128	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	0,00	683.658.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.658.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2129	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	603 Unit	83.250.000,00	90.170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	90.170.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2130	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	326.910.000,00	0,00	751.005.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.915.145,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2131	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	489.890.000,00	0,00	751.005.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.895.145,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2132	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.132.100,00	11.132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132.100,00	11.132.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 paket											
2133	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	625.688.480,00	633.276.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.688.480,00	633.276.527,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 paket											
2134	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	5.230.681.744,00	5.014.517.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.681.744,00	5.014.517.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket											
2135	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	35.438.775,00	35.438.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438.775,00	35.438.775,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2136	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	999.400,00	999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.400,00	999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2137	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.764.938.886,00	5.430.493.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.938.886,00	5.430.493.136,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2138	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	138.825.900,00	953.281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.825.900,00	953.281.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentrman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Keteriban Umum	12 Laporan											
2139	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	419.756.480,00	419.756.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.756.480,00	419.756.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang,Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65 Orang											
2140	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	308.761.010,00	308.761.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.761.010,00	308.761.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2141	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	96.374.000,00	67.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.374.000,00	67.574.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 paket											
2142	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	376.322.691,00	836.485.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.322.691,00	836.485.639,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2143	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	7.014.700,00	7.014.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014.700,00	7.014.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2144	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	23.729.600,00	23.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729.600,00	23.729.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Benoa													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket											
2145	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.596.050,00	4.596.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2146	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2359 Unit	306.523.000,00	306.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.523.000,00	306.523.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2147	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	910.005.058,00	1.266.135.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.005.058,00	1.266.135.782,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Tanjung Benoa													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket											
2148	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.596.050,00	4.596.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2149	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	372 Unit	367.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.965.000,00	0,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2150	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	373 Unit	0,00	371.628.000,00	0,00	1.665.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.628.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2151	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.612.779.051,00	534.727.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.779.051,00	534.727.187,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Jimbaran													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket											
2152	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.596.050,00	4.596.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2153	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1444 Unit	191.489.400,00	191.489.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.489.400,00	191.489.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2154	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %											
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
2155	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.643.800,00	5.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.800,00	5.643.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2156	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.066.400,00	4.066.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.400,00	4.066.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
2157	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	12.853.095.744,00	13.749.995.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853.095.744,00	13.749.995.756,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %											
2158	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.688.500,00	33.453.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688.500,00	33.453.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2159	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	544.200,00	544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00	544.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2160	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.869.600,00	126.433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.869.600,00	126.433.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2161	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.791.800,00	26.262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.791.800,00	26.262.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2162	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	24.125.000,00	24.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125.000,00	24.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2163	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.524.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2164	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125 Unit	0,00	0,00	0,00	658.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2165	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	0,00	736.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.315.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
2166	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	39.584.900,00	38.113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.584.900,00	38.113.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2167	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.570.000,00	1.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	1.501.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2168	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	349.974.600,00	467.462.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.974.600,00	467.462.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2169	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	19.510.000,00	19.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510.000,00	19.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2170	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	267.373.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.373.846,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %											
2171	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	139.815.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.815.050,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2172	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	0,00	149.913.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.913.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2173	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2500 Orang	0,00	1.084.527.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.527.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2174	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7500 Orang	910.869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.869.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2175	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2.998.300,00	2.998.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.300,00	2.998.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2176	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka													
			Jumlah Paskibraka	79 Orang	0,00	3.309.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.467.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2177	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka													
			Jumlah Paskibraka	79 Orang	3.259.035.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.035.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik	100 %											
2178	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	20.660.225.700,00	19.742.325.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660.225.700,00	19.742.325.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2179	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	663.292.500,00	966.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.292.500,00	966.268.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2180	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	104.679.500,00	32.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.679.500,00	32.679.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %											
2181	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	2.461.985.600,00	5.013.039.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.985.600,00	5.013.039.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2182	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	12.546.600,00	12.546.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546.600,00	12.546.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %											
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2183	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5500 Orang	2.508.070.732,00	3.072.559.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.070.732,00	3.072.559.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2184	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	400.985.200,00	401.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.985.200,00	401.770.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalnya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100 %											

2185	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	878.400.500,00	451.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.400.500,00	451.336.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2186	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.532.900,00	15.397.896.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.532.900,00	15.397.896.698,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



 I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	811.623.813.854,00	766.910.236.817,00	552.737.538,00	552.737.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.176.551.392,00	767.462.974.355,00
1	01	1	02	Kesehatan	615.416.108.810,00	619.402.401.934,00	15.128.964.396,00	19.210.648.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.545.073.206,00	638.613.050.642,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.078.829.422,00	35.406.882.002,00	190.323.042,00	15.606.441.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269.152.464,00	51.013.323.928,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.715.587.879,00	16.189.148.043,00	1.485.516.123,00	1.988.439.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	96.404.560.522,00	97.998.858.174,00	3.086.101.943,00	4.317.535.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490.662.465,00	102.316.393.411,00
1	01	1	06	Sosial	13.003.774.237,00	13.188.470.906,00	9.169.044,00	39.948.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012.943.281,00	13.228.419.806,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	432.251.200,00	692.980.372,00	0,00	1.935.674.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.251.200,00	2.628.655.152,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.834.827.678,00	18.583.919.718,00	34.508.200,00	283.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869.335.878,00	18.866.925.118,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	45.607.651.081,00	48.005.571.573,00	3.532.601.307,00	4.669.617.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140.252.388,00	52.675.188.615,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.083.721.059,00	21.249.148.408,00	10.809.180,00	10.809.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094.530.239,00	21.259.957.588,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.298.582.710,00	20.823.119.835,00	25.997.532,00	25.997.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.324.580.242,00	20.849.117.367,00
1	01	2	15	Perhubungan	60.199.524.653,00	61.617.432.301,00	16.618.528.965,00	17.230.468.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.818.053.618,00	78.847.900.865,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	17.768.798.587,00	19.539.836.776,00	408.377.156,00	408.377.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177.175.743,00	19.948.213.932,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.901.534.353,00	21.130.156.083,00	262.607.574,00	569.872.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.141.927,00	21.700.028.085,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	30.003.341.585,00	31.879.313.019,00	0,00	209.916.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003.341.585,00	32.089.229.670,00
1	01	2	20	Statistik	79.759.415,00	79.759.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.759.415,00	79.759.415,00
1	01	2	22	Kebudayaan	19.851.433.246,00	20.770.820.806,00	472.271.838,00	2.313.181.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323.705.084,00	23.084.002.344,00
1	01	2	23	Perpustakaan	24.826.730.664,00	25.052.190.474,00	23.866.887,00	23.866.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850.597.551,00	25.076.057.361,00
1	01	2	24	Kearsipan	740.097.185,00	644.162.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.097.185,00	644.162.105,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	15.164.983.700,00	15.412.539.711,00	108.405.708,00	123.765.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273.389.408,00	15.536.305.044,00
1	01	3	26	Pariwisata	32.618.135.301,00	33.562.371.410,00	5.439.381.634,00	4.717.249.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00
1	01	3	27	Pertanian	55.040.663.486,00	48.951.112.065,00	2.686.803.796,00	3.492.781.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.727.467.282,00	52.443.893.839,00
1	01	3	31	Perindustrian	15.621.200.074,00	14.901.003.672,00	891.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512.591.674,00	14.901.003.672,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	714.112.193.489,00	1.170.150.416.403,00	1.104.368.273,00	4.509.792.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.216.561.762,00	1.174.660.208.406,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	149.709.461.450,00	157.967.541.999,00	25.464.851.098,00	45.752.768.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.174.312.548,00	203.720.310.177,00
1	01	5	01	Perencanaan	24.809.833.173,00	26.601.642.092,00	305.564.943,00	2.141.712.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00
1	01	5	02	Keuangan	292.411.545.362,00	269.787.373.759,00	2.924.398.294,00	3.668.545.525,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	1.960.471.678.529,00	2.785.730.474.666,00
1	01	5	03	Kepegawaian	26.962.713.789,00	31.024.355.739,00	9.812.400,00	894.510.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.972.526.189,00	31.918.865.831,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	25.461.411.984,00	25.071.699.725,00	417.053.456,00	587.488.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00
1	01	6	01	Inspektorat	37.930.182.147,00	45.219.240.686,00	4.062.014.714,00	4.248.614.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992.196.861,00	49.467.854.947,00
1	01	7	01	Kecamatan	196.801.665.934,00	213.438.246.367,00	29.992.885.056,00	37.751.235.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.794.550.990,00	251.189.482.073,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	45.579.901.626,00	64.567.339.460,00	0,00	1.394.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.579.901.626,00	65.961.954.460,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.020.157.699,00	34.185.950.480,00	6.504.622.928,00	6.504.622.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.524.780.627,00	40.690.573.408,00
2	03	1	06	Sosial	211.431.489,00	326.952.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.431.489,00	326.952.668,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	901.132.144.850,00	1.144.996.760.678,00	880.177.201.500,00	1.147.254.778.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.309.346.350,00	2.292.251.539.222,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	14.528.640.912,00	10.952.684.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528.640.912,00	10.952.684.320,00
3	04	2	09	Pangan	9.669.846.235,00	10.624.242.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669.846.235,00	10.624.242.945,00
3	04	2	15	Perhubungan	33.303.823.108,00	38.027.906.948,00	20.262.390.280,00	22.148.456.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.566.213.388,00	60.176.363.718,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	53.486.484.695,00	55.183.656.849,00	0,00	25.755.856.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.486.484.695,00	80.939.512.974,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.330.480.795,00	3.475.619.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.480.795,00	3.475.619.785,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	6.497.435.152,00	6.886.506.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497.435.152,00	6.886.506.952,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	04	2	21	Persandian	196.985.225,00	16.985.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.985.225,00	16.985.225,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	4.323.105.454,00	5.119.939.882,00	0,00	99.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.105.454,00	5.219.006.882,00
3	04	3	27	Pertanian	35.684.421.453,00	38.969.735.321,00	10.302.448.847,00	7.446.694.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.986.870.300,00	46.416.429.401,00
3	04	3	30	Perdagangan	2.068.820.778,00	1.982.172.038,00	150.798.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00
3	04	3	31	Perindustrian	7.214.677.264,00	5.197.598.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214.677.264,00	5.197.598.964,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.551.203.168,00	18.758.960.472,00	2.542.275.000,00	173.490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093.478.168,00	18.932.450.872,00
4	05	2	10	Pertanahan	245.057.391,00	218.007.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.057.391,00	218.007.375,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	129.709.907.461,00	127.846.950.752,00	34.157.878.730,00	186.709.268.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.867.786.191,00	314.556.219.681,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.806.504.589,00	27.294.517.621,00	265.805.819.513,00	265.904.101.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.612.324.102,00	293.198.619.015,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	444.776.069.951,00	452.601.349.173,00	132.703.214.651,00	161.843.861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.479.284.602,00	614.445.210.973,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.664.294.173,00	6.306.402.205,00	480.988.000,00	484.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145.282.173,00	6.791.267.205,00
7				PARIWISATA										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
7	08	3	26	Pariwisata	35.253.290.669,00	37.853.529.354,00	7.130.487.588,00	7.230.487.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.383.778.257,00	45.084.016.942,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	292.264.821.992,00	278.768.612.326,00	475.892.598.555,00	481.644.061.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.157.420.547,00	760.412.673.610,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	44.953.022.027,00	50.495.996.081,00	5.280.627.800,00	15.322.333.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233.649.827,00	65.818.329.642,00
8	10	2	22	Kebudayaan	227.961.038.889,00	646.538.514.398,00	858.415.500,00	64.254.415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.819.454.389,00	710.792.929.898,00
8	10	2	23	Perpustakaan	693.000.172,00	701.471.692,00	0,00	6.845.753.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000.172,00	7.547.225.327,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	10.651.978.511,00	13.821.257.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651.978.511,00	13.821.257.586,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.761.775.210,00	3.211.194.750,00	8.588.200,00	8.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.363.410,00	3.219.782.950,00
				TOTAL	5.869.717.700.125,00	7.002.923.689.527,00	2.108.154.868.789,00	2.578.409.319.383,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,00	9.643.008.303.787,00	12.093.607.564.292,00

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.474.540.634,00	4.474.640.634,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	347.814.680,00	348.619.960,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.565.984.464,00	17.778.854.871,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	305.871.671,00	305.871.671,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	156.925.000,00	956.925.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.754.165.300,00	17.408.294.800,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.136.686,00	143.134.706,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.928.178.700,00	5.521.678.700,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	67.459.796.584,00	56.192.368.264,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	199.886.292.352,00	159.933.623.610,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.032.636.000,00	1.086.689.100,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	485.753.200,00	298.253.200,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.106.402.460,00	21.451.216.932,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	586.161.200,00	894.596.200,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	584.528.400,00	580.162.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	166.130.684,00	166.130.684,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.115.526.100,00	1.193.898.100,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000,00	700.000.000,00
Total			336.199.844.115,00	289.434.959.232,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	170.528.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	118.047.950,00	118.047.950,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.773.340.832,00	7.030.277.832,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.794.230,00	150.794.230,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	879.577.398,00	987.337.398,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	287.236.625,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	206.713.869,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	412.970.846,00	412.970.846,00
Total			10.451.406.880,00	11.500.583.202,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			346.651.250.995,00	300.935.542.434,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	584.352.400,00	584.352.400,00
Total			584.352.400,00	584.352.400,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	954.665.816,00	711.934.695,00
Total			954.665.816,00	711.934.695,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00
Total			1.105.243.800,00	1.105.243.800,00
4.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82.518.520,00	28.320.240,00
Total			82.518.520,00	28.320.240,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	772.305.220,00	745.242.980,00
Total			772.305.220,00	745.242.980,00
6.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.217.160,00	67.118.020,00
Total			94.217.160,00	67.118.020,00
7.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.622.531.116,00	1.507.993.691,00
Total			1.622.531.116,00	1.507.993.691,00
8.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.293.605.711,00	2.374.707.491,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
Total			2.293.605.711,00	2.374.707.491,00
9.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	709.795.360,00	682.696.220,00
Total			709.795.360,00	682.696.220,00
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	324.969.620,00	325.043.420,00
Total			324.969.620,00	325.043.420,00
11.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	515.068.960,00	487.965.420,00
Total			515.068.960,00	487.965.420,00
12.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.553.900,00	113.553.900,00
Total			113.553.900,00	113.553.900,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			9.172.827.583,00	8.734.172.277,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.814.927.867,00	801.578.067,00
Total			9.844.395.882,00	8.831.046.082,00
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	700.495.334,00	891.387.312,00
Total			13.000.488.369,00	13.191.380.347,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			22.844.884.251,00	22.022.426.429,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0,00	78.857.907,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00
Total			3.591.806.370,00	3.670.664.277,00
2.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.296.576,00	7.296.576,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.960.700,00	7.960.700,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	286.977.564,00	292.363.564,00
Total			302.234.840,00	307.620.840,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			3.894.041.210,00	3.978.285.117,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	121.150.300,00	122.232.300,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	0,00
Total			2.895.940.400,00	2.952.210.604,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	19.071.171,00
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	192.239.609,00	192.239.609,00
Total			192.239.609,00	211.310.780,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.857.262,00	249.857.262,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi	22.122.408,00	22.122.408,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.692.262,00	3.692.262,00
Total			275.671.932,00	275.671.932,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137.611.029,00	137.611.029,00
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.862.124,00	2.762.124,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	670.583.745,00	683.903.745,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12.550.659,00	1.894.659,00
Total			4.216.110.032,00	4.321.713.434,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	583.397.700,00	1.383.923.400,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	63.135.600,00	63.135.600,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.314.600,00	64.314.600,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	0,00	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.833.500,00	2.833.500,00
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.269.200,00	2.269.200,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.750.000,00	204.750.000,00
Total			17.710.963.135,00	18.524.090.335,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			25.290.925.108,00	26.284.997.085,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	691.172.447,00	650.255.447,00
		Penyediaan Permakanan	246.307.834,00	258.849.659,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00
		Penyediaan Alat Bantu	324.819.034,00	325.004.374,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.940.515,00	151.764.315,00
Total			1.407.294.927,00	1.388.928.892,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	246.307.834,00	258.849.659,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.940.515,00	151.764.315,00
		Penyediaan Alat Bantu	324.819.034,00	325.004.374,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	691.172.447,00	650.255.447,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
Total			1.407.294.927,00	1.388.928.892,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.940.515,00	151.764.315,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00
		Penyediaan Alat Bantu	324.819.034,00	325.004.374,00
		Penyediaan Permakanan	246.307.834,00	258.849.659,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	691.172.447,00	650.255.447,00
Total			1.407.294.927,00	1.388.928.892,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlanter di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.940.515,00	151.764.315,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	691.172.447,00	650.255.447,00
		Penyediaan Permakanan	246.307.834,00	258.849.659,00
		Penyediaan Alat Bantu	324.819.034,00	325.004.374,00
Total			1.407.294.927,00	1.388.928.892,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	130.976.248,00	171.917.707,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	80.455.241,00	155.034.961,00
Total			211.431.489,00	326.952.668,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.840.611.197,00	5.882.668.236,00

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	812.176.551.392,00	767.462.974.355,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	854.842.485.860,00	768.157.420.547,00	760.412.673.610,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	630.545.073.206,00	638.613.050.642,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	564.977.553.549,00	555.673.087.854,00	600.939.060.501,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	621.680.773,00	18.896.346.864,00	10.686.439.288,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	742.985.378,00	626.302.712,00	590.103.572,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.815.499.739,00	2.283.547.172,00	2.229.607.612,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	34.269.152.464,00	51.013.323.928,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.816.388.383,00	161.584.132.094,00	176.135.775.940,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.231.470.113,00	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	850.000.000,00	7.316.469.300,00	3.655.906.912,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.000.000.000,00	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	9.619.692.342,00	0,00	0,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	352.290.873.911,00	92.384.075.215,00	222.330.260.525,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	43.539.671.945,00	889.987.213.251,00	898.784.287.757,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	66.986.759.916,00	635.578.397.075,00	993.286.426.285,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.318.501.441,00	1.775.528.715,00	1.714.788.715,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.660.210.743,00	1.776.520.499,00	2.085.163.613,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.344.771,00	4.106.381.747,00	4.190.625.654,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	252.275.905,00	11.773.119.644,00	11.999.273.644,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	297.839.980,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.082.658.124,00	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	99.490.662.465,00	102.316.393.411,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.014.946.119,00	6.935.831.046,00	7.124.904.074,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.392.289.502,00	5.040.700.046,00	5.183.875.499,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.344.280.374,00	27.548.249.535,00	28.381.793.835,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	13.012.943.281,00	13.228.419.806,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.188.598.734,00	2.668.524.274,00	2.887.490.290,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.037.244.359,00	6.272.038.058,00	9.113.842.148,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	65.775.482.028,00	1.711.416.179,00	1.819.925.148,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	36.306.871,00	211.431.489,00	326.952.668,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	432.251.200,00	2.628.655.152,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	381.011.393,00	0,00	0,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	101.493.588,00	5.565.931.540,00	4.516.849.000,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	401.028.094,00	1.316.190.740,00	1.313.938.340,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	446.044.427,00	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	17.869.335.878,00	18.866.925.118,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	160.417.322,00	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	533.874.673,00	703.821.280,00	863.233.900,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	290.601.660,00	266.652.680,00	556.585.380,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60.582.453,00	53.901.330,00	53.901.330,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	315.345.271,00	140.786.720,00	140.860.940,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	198.124.200,00	90.319.900,00	90.319.900,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	568.350.382,00	0,00	0,00
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.637.168.729,00	9.568.785.551,00	10.527.391.261,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.550.000,00	2.248.200,00	2.248.200,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	47.017.566,00	98.812.484,00	94.603.484,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	229.272.437,00	1.458.165,00	1.458.165,00
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	436.311.638,00	84.801.364,00	57.751.348,00
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	27.648.416,00	158.797.862,00	158.797.862,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	49.140.252.388,00	52.675.188.615,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.787.770.700,00	1.224.909.282,00	1.585.744.115,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	17.744.398.320,00	18.732.679.453,00	139.547.279.425,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	31.028.600,00	327.053.719,00	352.954.639,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	723.022.843,00	985.843.146,00	569.959.686,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	276.472.560,00	742.923,00	0,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	302.482.951,00	29.238.191,00	25.764.591,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	111.900.921,00	0,00	0,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	692.384.189,00	507.553.811,00	507.995.711,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	90.563.182.200,00	142.059.765.666,00	171.966.521.514,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	15.368.994.492,00	16.252.996.991,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.978.929.084,00	2.716.635.948,00	2.995.122.848,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.042.459.239,00	1.675.432.280,00	1.678.101.190,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	40.545.588,00	333.467.519,00	333.736.559,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	13.741.186.657,00	14.427.392.912,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	14.197.532,00	18.616.900,00	18.616.900,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.152.814.817,00	2.972.830.494,00	2.856.885.164,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.834.050.000,00	3.591.946.191,00	3.546.222.391,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	134.702.886,00	288.084.360,00	271.177.520,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.620.125.456,00	3.742.139.913,00	3.405.031.785,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	249.472.973,00	3.115.057.900,00	3.115.057.900,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	76.818.053.618,00	78.847.900.865,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.635.687.593,00	53.566.213.388,00	60.176.363.718,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	18.177.175.743,00	19.948.213.932,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.544.928.451,00	6.441.961.766,00	8.934.054.210,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	65.587.531.284,00	47.044.522.929,00	72.005.458.764,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	21.164.141.927,00	21.700.028.085,00
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	16.009.076,00	14.450.100,00	14.450.100,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	165.399.332,00	238.823.700,00	438.823.700,00
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	192.507.229,00	209.851.720,00	103.744.310,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	209.324.224,00	418.327.700,00	583.619.900,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	392.763.712,00	97.966.800,00	97.966.800,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	414.656.788,00	698.911.390,00	558.014.890,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	283.593.173,00	1.652.149.385,00	1.679.000.085,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	30.003.341.585,00	32.089.229.670,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	267.786.310,00	384.807.600,00	384.807.600,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	256.178.174,00	1.812.769.050,00	2.250.069.050,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.073.641.534,00	2.527.046.852,00	2.478.818.652,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	124.232.755,00	469.410.800,00	469.410.800,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.534.633.450,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	858.711.909,00	983.131.256,00	949.641.556,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	36.735.422.934,00	47.060.785.961,00	62.678.155.476,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	717.026.468,00	2.189.732.610,00	2.190.532.610,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	457.587.290,00	79.759.415,00	79.759.415,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	577.186.637,00	196.985.225,00	16.985.225,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	20.323.705.084,00	23.084.002.344,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	109.873.428.326,00	149.695.592.367,00	204.365.253.622,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	11.816.997.169,00	36.132.045.260,00	72.191.896.362,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3.817.907.905,00	7.900.970.040,00	10.827.804.340,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	28.193.039.963,00	32.329.860.010,00	357.236.952.612,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	969.332.887,00	2.760.986.712,00	66.171.022.962,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	24.850.597.551,00	25.076.057.361,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	809.268.098,00	558.999.232,00	7.413.151.307,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	161.000.000,00	134.000.940,00	134.074.020,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.158.930.992,00	650.017.232,00	554.009.072,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	143.000.000,00	42.796.420,00	42.832.960,00
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	123.000.000,00	47.283.533,00	47.320.073,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	15.273.389.408,00	15.536.305.044,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.606.774.444,00	2.203.303.223,00	2.050.031.529,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	771.492.365,00	1.250.468.483,00	1.653.290.603,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	177.646.700,00	207.644.763,00	207.644.763,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	344.240.050,00	661.688.985,00	1.308.039.987,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	68.360.051.515,00	29.877.795.416,00	29.958.242.316,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.612.951.822,00	11.520.385.440,00	14.140.140.325,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	277.745.444,00	132.397.360,00	132.434.260,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.253.029.572,00	853.200.041,00	853.200.041,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	57.727.467.282,00	52.443.893.839,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	29.494.095.061,00	15.811.184.135,00	19.649.106.918,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.539.153.902,00	22.154.042.439,00	19.047.416.797,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.740.250.000,00	3.904.690.396,00	3.904.568.756,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	884.709.141,00	2.231.364.160,00	2.133.555.040,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.256.988.070,00	1.885.589.170,00	1.681.781.890,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.636.477.703,00	150.852.996.200,00	125.181.600,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	72.690.543,00	493.759.474,00	493.759.474,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	71.308.784,00	689.662.300,00	689.662.300,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	568.006.510,00	579.396.704,00	521.562.564,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	635.361.320,00	251.006.100,00	251.006.100,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	16.512.591.674,00	14.901.003.672,00
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	677.116.338,00	7.127.750.544,00	5.110.598.444,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	42.024.233,00	85.750.820,00	85.824.620,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	113.692.883,00	1.175.900,00	1.175.900,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	271.542.893.953,00	307.554.597.142,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.637.729.773,00	440.426.275.339,00	864.293.769.509,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.934.874.064,00	3.247.392.470,00	2.811.841.755,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	104.352.443.297,00	125.614.535.770,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	57.589.220.060,00	70.821.869.251,00	78.105.774.407,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	21.723.471.736,00	24.864.234.002,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.544.350.828,00	1.426.927.031,00	846.777.463,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.165.454.829,00	1.964.999.349,00	3.032.343.529,00
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	270.604.654.173,00	248.048.432.288,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	658.115.128.403,00	1.670.690.596.583,00	2.518.135.237.025,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.357.675.789,00	7.411.687.340,00	7.460.387.340,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.236.320.391,00	11.764.740.433,00	12.086.418.013,00
5	03		KEPEGAWAIAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	23.805.823.004,00	29.225.296.211,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.074.930.700,00	3.166.703.185,00	2.693.569.620,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.885.861.895,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	16.389.822.262,00	16.746.029.177,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.850.105.496,00	9.488.643.178,00	8.913.158.621,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	38.260.256.289,00	38.972.705.803,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	463.684.067,00	1.029.393.390,00	1.699.647.890,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	125.440.323,00	2.702.547.182,00	8.795.501.254,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	149.410.081.329,00	158.251.032.128,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.632.634.474,00	24.653.849.639,00	24.400.588.413,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.663.899.901,00	47.490.550.386,00	62.642.692.784,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	570.625.154,00	763.379.222,00	763.379.222,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.249.428.665,00	2.532.555.017,00	2.454.555.017,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	985.470.695,00	1.944.135.397,00	2.677.234.509,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.112.202.157.786,00	13.486.464.544,00	16.324.625.612,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	16.753.344,00	4.312.717.850,00	4.546.906.550,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.871.244.860,00	21.428.197.700,00	20.741.273.400,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	35.822.691,00	2.474.532.200,00	5.025.586.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	228.610.337,00	2.909.055.932,00	3.474.330.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	429.680.296,00	968.933.400,00	15.849.232.898,00

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.530.820.222.139,00	1.530.820.222.139,00	1.593.693.977.607,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.466.408.382.397,00	1.466.408.382.397,00	1.527.875.647.965,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.466.408.382.397,00	1.466.408.382.397,00	1.527.875.647.965,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	761.169.086.845,00	761.169.086.845,00	760.412.673.610,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	388.114.223.834,00	388.114.223.834,00	388.365.119.530,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.614.000,00	159.614.000,00	159.614.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	932.022.400,00	932.022.400,00	932.072.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	196.986.271.532,00	196.986.271.532,00	196.992.401.532,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	8.589.380.500,00	8.589.380.500,00	8.589.630.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00	7.957.962.284,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.360.413.156,00	11.360.413.156,00	11.360.463.156,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	470.415.600,00	470.415.600,00	580.162.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.707.235.600,00	2.707.235.600,00	2.934.825.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	56.283.924.968,00	56.283.924.968,00	56.192.368.264,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	861.489.100,00	861.489.100,00	1.086.689.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	347.819.960,00	347.819.960,00	348.619.960,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	71.888.343.560,00	71.888.343.560,00	71.888.343.560,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	269.823.000,00	269.823.000,00	269.823.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	305.871.671,00	305.871.671,00	305.871.671,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	17.635.959.600,00	17.635.959.600,00	17.408.294.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.181.741.269,00	6.181.741.269,00	6.181.841.269,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.474.540.634,00	4.474.540.634,00	4.474.640.634,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	311.051.254.955,00	311.051.254.955,00	309.966.186.024,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	167.320.015.145,00	167.320.015.145,00	159.933.623.610,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	28.622.824.159,00	28.622.824.159,00	28.622.824.159,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.521.678.700,00	5.521.678.700,00	5.521.678.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	3.926.988.800,00	3.926.988.800,00	10.586.405.135,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.592.679.161,00	15.592.679.161,00	14.796.429.451,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	298.253.200,00	298.253.200,00	298.253.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	956.925.000,00	956.925.000,00	956.925.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	908.221.800,00	908.221.800,00	1.054.621.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.464.882.460,00	21.464.882.460,00	21.451.216.932,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.169.391.100,00	1.169.391.100,00	1.193.898.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	166.130.684,00	166.130.684,00	166.130.684,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.422.586.676,00	46.422.586.676,00	46.422.586.676,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.134.706,00	143.134.706,00	143.134.706,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	145.006.800,00	145.006.800,00	145.006.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	894.596.200,00	894.596.200,00	894.596.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	17.497.940.364,00	17.497.940.364,00	17.778.854.871,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60.558.358.832,00	60.558.358.832,00	60.636.118.832,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	24.828.321.978,00	24.828.321.978,00	24.828.321.978,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	170.528.000,00	170.528.000,00	170.528.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	121.695.792,00	121.695.792,00	121.695.792,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	5.934.921.570,00	5.934.921.570,00	5.934.921.570,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	287.236.625,00	287.236.625,00	287.236.625,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.439.764.735,00	2.439.764.735,00	2.439.764.735,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	909.577.398,00	909.577.398,00	987.337.398,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	412.970.846,00	412.970.846,00	412.970.846,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	118.047.950,00	118.047.950,00	118.047.950,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.444.272.036,00	15.444.272.036,00	15.444.272.036,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	105.461.583,00	105.461.583,00	105.461.583,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.794.230,00	150.794.230,00	150.794.230,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	261.097.936,00	261.097.936,00	261.097.936,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	206.713.869,00	206.713.869,00	206.713.869,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	7.030.277.832,00	7.030.277.832,00	7.030.277.832,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.044.498.886,00	1.044.498.886,00	1.044.498.886,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.445.249.224,00	1.445.249.224,00	1.445.249.224,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	69.806.294,00	69.806.294,00	69.806.294,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	705.239.295.552,00	705.239.295.552,00	767.462.974.355,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.563.936,00	63.563.936,00	63.563.936,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.406.812,00	7.406.812,00	7.406.812,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.040.612,00	11.040.612,00	11.040.612,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.129.112,00	15.129.112,00	15.129.112,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.987.400,00	29.987.400,00	29.987.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	698.081.146.645,00	698.081.146.645,00	760.347.125.448,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	697.974.921.216,00	697.974.921.216,00	760.240.900.019,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.225.429,00	106.225.429,00	106.225.429,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	851.283.022,00	851.283.022,00	926.283.022,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	851.283.022,00	851.283.022,00	926.283.022,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.159.344.058,00	2.159.344.058,00	2.042.044.058,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	886.256.512,00	886.256.512,00	768.956.512,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.283.901,00	37.283.901,00	37.283.901,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	509.959.200,00	509.959.200,00	509.959.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	379.466.045,00	379.466.045,00	379.466.045,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.378.400,00	346.378.400,00	346.378.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	554.553.003,00	554.553.003,00	554.553.003,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.028.693,00	389.028.693,00	389.028.693,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.752.383.588,00	1.752.383.588,00	1.752.383.588,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.121.600,00	151.121.600,00	151.121.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.777.021.300,00	1.777.021.300,00	1.777.021.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.434.000,00	76.434.000,00	76.434.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	895.707.700,00	895.707.700,00	895.707.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.410.000,00	206.410.000,00	206.410.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	598.469.600,00	598.469.600,00	598.469.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	64.411.839.742,00	64.411.839.742,00	65.818.329.642,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	64.411.839.742,00	64.411.839.742,00	65.818.329.642,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	949.641.556,00	949.641.556,00	949.641.556,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	693.298.600,00	693.298.600,00	693.298.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	147.920.500,00	147.920.500,00	147.920.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	346.342.700,00	346.342.700,00	346.342.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	141.212.100,00	141.212.100,00	141.212.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	57.823.300,00	57.823.300,00	57.823.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.342.956,00	256.342.956,00	256.342.956,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	256.342.956,00	256.342.956,00	256.342.956,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.272.465.576,00	61.272.465.576,00	62.678.155.476,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.582.128.115,00	21.582.128.115,00	21.505.818.015,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	21.582.128.115,00	21.582.128.115,00	21.505.818.015,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.309.810.400,00	24.309.810.400,00	25.791.810.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.447.062.632,00	1.447.062.632,00	1.447.062.632,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20.811.371.728,00	20.811.371.728,00	20.811.371.728,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.051.376.040,00	2.051.376.040,00	3.533.376.040,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12.128.271.258,00	12.128.271.258,00	12.128.271.258,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	12.128.271.258,00	12.128.271.258,00	12.128.271.258,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.252.255.803,00	3.252.255.803,00	3.252.255.803,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.252.255.803,00	3.252.255.803,00	3.252.255.803,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00	2.190.532.610,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00	2.190.532.610,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	350.045.600,00	350.045.600,00	350.045.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	959.660.050,00	959.660.050,00	959.660.050,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	251.081.100,00	251.081.100,00	251.081.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	628.945.860,00	628.945.860,00	629.745.860,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	926.508.081.728,00	926.508.081.728,00	925.616.867.403,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	926.508.081.728,00	926.508.081.728,00	925.616.867.403,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	926.508.081.728,00	926.508.081.728,00	925.616.867.403,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	336.756.007.268,00	336.756.007.268,00	335.839.167.943,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	161.144.924.712,00	161.144.924.712,00	160.703.876.712,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	10.280.001.282,00	10.280.001.282,00	10.280.001.282,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.950.087.368,00	3.950.087.368,00	3.950.087.368,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.436.829.968,00	19.436.829.968,00	18.961.354.968,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.292.138.000,00	3.292.138.000,00	3.326.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	87.940.288.315,00	87.940.288.315,00	87.940.288.315,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	35.898.071.427,00	35.898.071.427,00	35.898.071.427,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	3.622.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	343.886.352,00	343.886.352,00	343.886.352,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	173.644.477.618,00	173.644.477.618,00	173.165.277.618,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	564.746.220,00	564.746.220,00	564.746.220,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	166.843.420,00	166.843.420,00	166.843.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	487.965.420,00	487.965.420,00	487.965.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.553.900,00	113.553.900,00	113.553.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.452.400,00	98.452.400,00	98.452.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	711.934.695,00	711.934.695,00	711.934.695,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	28.320.240,00	28.320.240,00	28.320.240,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	745.242.980,00	745.242.980,00	745.242.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	67.118.020,00	67.118.020,00	67.118.020,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.416.893.691,00	1.416.893.691,00	1.416.893.691,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.281.757.491,00	2.281.757.491,00	2.281.757.491,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	850.800,00	850.800,00	850.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.373.992,00	171.373.992,00	171.373.992,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.742.800,00	14.742.800,00	14.742.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	849.538.200,00	849.538.200,00	849.538.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	517.481.500,00	517.481.500,00	517.481.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	178.988.392,00	178.988.392,00	178.988.392,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	257.505.080,00	257.505.080,00	257.505.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.584.900,00	4.584.900,00	4.584.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	157.408.000,00	157.408.000,00	157.408.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12.848.174.121,00	12.848.174.121,00	12.368.974.121,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.366.969.788,00	28.366.969.788,00	28.366.969.788,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	118.465.383.816,00	118.465.383.816,00	118.465.383.816,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	23.089.100,00	23.089.100,00	23.089.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	28.958.920,00	28.958.920,00	28.958.920,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.755.500,00	55.755.500,00	55.755.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	339.573.900,00	339.573.900,00	339.573.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	12.458.400,00	12.458.400,00	12.458.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	411.840.000,00	411.840.000,00	411.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.938.643.032,00	2.938.643.032,00	2.938.643.032,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	93.657.400,00	93.657.400,00	93.657.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	103.797.700,00	103.797.700,00	103.797.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.786.057.266,00	1.786.057.266,00	1.789.465.941,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.786.057.266,00	1.786.057.266,00	1.789.465.941,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.547.672,00	180.547.672,00	180.547.672,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1.757.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	178.789.972,00	178.789.972,00	178.789.972,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.686.439.288,00	10.686.439.288,00	10.686.439.288,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	206.390.124,00	206.390.124,00	206.390.124,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	206.390.124,00	206.390.124,00	206.390.124,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.052.069.564,00	9.052.069.564,00	9.052.069.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.875.099.564,00	8.875.099.564,00	8.875.099.564,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	176.970.000,00	176.970.000,00	176.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.427.979.600,00	1.427.979.600,00	1.427.979.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.427.979.600,00	1.427.979.600,00	1.427.979.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	590.103.572,00	590.103.572,00	590.103.572,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	126.063.872,00	126.063.872,00	126.063.872,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	126.063.872,00	126.063.872,00	126.063.872,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	207.671.900,00	207.671.900,00	207.671.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	207.671.900,00	207.671.900,00	207.671.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	78.368.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	78.368.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	177.999.100,00	177.999.100,00	177.999.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	177.999.100,00	177.999.100,00	177.999.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.180.707.612,00	2.180.707.612,00	2.180.707.612,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.788.948.152,00	1.788.948.152,00	1.788.948.152,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.788.948.152,00	1.788.948.152,00	1.788.948.152,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	361.739.760,00	361.739.760,00	361.739.760,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	361.739.760,00	361.739.760,00	361.739.760,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.019.700,00	30.019.700,00	30.019.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.019.700,00	30.019.700,00	30.019.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	576.294.823.988,00	576.294.823.988,00	576.320.448.988,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	627.068.100,00	627.068.100,00	627.068.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	617.537.600,00	617.537.600,00	617.537.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.500,00	9.530.500,00	9.530.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	518.936.687.873,00	518.936.687.873,00	518.936.687.873,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	518.936.687.873,00	518.936.687.873,00	518.936.687.873,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.866.000,00	27.866.000,00	27.866.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.542.500,00	24.542.500,00	24.542.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.323.500,00	3.323.500,00	3.323.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.512.890.700,00	4.512.890.700,00	4.538.515.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.616.161.100,00	3.616.161.100,00	3.641.786.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	706.026.000,00	706.026.000,00	706.026.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.703.600,00	190.703.600,00	190.703.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.258.038.587,00	2.258.038.587,00	2.258.038.587,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	963.606.000,00	963.606.000,00	963.606.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.279.614.087,00	1.279.614.087,00	1.279.614.087,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.818.500,00	14.818.500,00	14.818.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.031.802.376,00	39.031.802.376,00	39.031.802.376,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	605.220.200,00	605.220.200,00	605.220.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.093.735.576,00	23.093.735.576,00	23.093.735.576,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.900.470.352,00	10.900.470.352,00	10.900.470.352,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.219.500,00	151.219.500,00	151.219.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.068.307.500,00	6.068.307.500,00	6.068.307.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	915.242.000,00	915.242.000,00	915.242.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.765.701.352,00	3.765.701.352,00	3.765.701.352,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0100						Rumah Sakit Daerah Mangusada	297.160.047.042,00	297.160.047.042,00	297.160.047.042,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	256.477.901.558,00	256.477.901.558,00	256.477.901.558,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.315.672.820,00	58.315.672.820,00	58.315.672.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32.412.396.776,00	32.412.396.776,00	32.412.396.776,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	25.903.276.044,00	25.903.276.044,00	25.903.276.044,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.162.228.738,00	198.162.228.738,00	198.162.228.738,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	198.162.228.738,00	198.162.228.738,00	198.162.228.738,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.682.145.484,00	40.682.145.484,00	40.682.145.484,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.805.004.940,00	10.805.004.940,00	10.805.004.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	7.093.750.990,00	7.093.750.990,00	7.093.750.990,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.711.253.950,00	3.711.253.950,00	3.711.253.950,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.877.140.544,00	29.877.140.544,00	29.877.140.544,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.732.574.128,00	12.732.574.128,00	12.732.574.128,00
1.02.0.00.0.00.01.0200						UPTD. Puskesmas Abiansemal I	2.619.838.000,00	2.619.838.000,00	2.617.088.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	619.838.000,00	619.838.000,00	617.088.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	618.985.000,00	618.985.000,00	616.235.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.350.000,00	10.350.000,00	7.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.680.000,00	169.680.000,00	169.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	117.900.000,00	117.900.000,00	117.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.815.000,00	133.815.000,00	133.815.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	106.900.000,00	106.900.000,00	106.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	853.000,00	853.000,00	853.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	853.000,00	853.000,00	853.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300						UPTD. Puskesmas Abiansemal II	1.733.723.787,00	1.733.723.787,00	1.733.723.787,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	627.154.000,00	627.154.000,00	627.154.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	626.429.000,00	626.429.000,00	626.429.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.882.000,00	171.882.000,00	171.882.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.700.000,00	107.700.000,00	107.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	134.887.000,00	134.887.000,00	134.887.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	74.900.000,00	74.900.000,00	74.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	725.000,00	725.000,00	725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	725.000,00	725.000,00	725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.106.569.787,00	1.106.569.787,00	1.106.569.787,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.106.569.787,00	1.106.569.787,00	1.106.569.787,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.106.569.787,00	1.106.569.787,00	1.106.569.787,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0400						UPTD. Puskesmas Abiansema III	1.908.125.100,00	1.908.125.100,00	1.908.125.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	545.926.000,00	545.926.000,00	545.926.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	545.637.000,00	545.637.000,00	545.637.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.052.000,00	152.052.000,00	152.052.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	117.735.000,00	117.735.000,00	117.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	56.900.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	289.000,00	289.000,00	289.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	289.000,00	289.000,00	289.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.362.199.100,00	1.362.199.100,00	1.362.199.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.362.199.100,00	1.362.199.100,00	1.362.199.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.362.199.100,00	1.362.199.100,00	1.362.199.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0500						UPTD Puskesmas Abiansema IV	1.941.820.585,00	1.941.820.585,00	1.941.820.585,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	617.641.000,00	617.641.000,00	617.641.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	617.598.000,00	617.598.000,00	617.598.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.969.000,00	179.969.000,00	179.969.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.400.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.449.000,00	133.449.000,00	133.449.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	41.480.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00	1.324.179.585,00
1.02.0.00.0.00.01.0600						UPTD. Puskesmas Kuta I	2.357.723.000,00	2.357.723.000,00	2.357.723.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	595.173.000,00	595.173.000,00	595.173.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	595.049.000,00	595.049.000,00	595.049.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.528.000,00	166.528.000,00	166.528.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.350.000,00	110.350.000,00	110.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.571.000,00	131.571.000,00	131.571.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	85.200.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700						UPTD. Puskesmas Kuta II	1.448.683.613,00	1.448.683.613,00	1.448.683.613,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	457.416.000,00	457.416.000,00	457.416.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	457.336.000,00	457.336.000,00	457.336.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.318.000,00	126.318.000,00	126.318.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.700.000,00	60.700.000,00	60.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	101.043.000,00	101.043.000,00	101.043.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.025.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.467.613,00	980.467.613,00	980.467.613,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	980.467.613,00	980.467.613,00	980.467.613,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	980.467.613,00	980.467.613,00	980.467.613,00
1.02.0.00.0.00.01.0800						UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	4.018.545.549,00	4.018.545.549,00	4.018.545.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	909.473.000,00	909.473.000,00	909.473.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	909.409.000,00	909.409.000,00	909.409.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	260.489.000,00	260.489.000,00	260.489.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.550.000,00	141.550.000,00	141.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	198.220.000,00	198.220.000,00	198.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	69.800.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.100.972.549,00	3.100.972.549,00	3.100.972.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.100.972.549,00	3.100.972.549,00	3.100.972.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.100.972.549,00	3.100.972.549,00	3.100.972.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0900						UPTD. Puskesmas Mengwi I	3.320.123.134,00	3.320.123.134,00	3.320.123.134,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	836.479.000,00	836.479.000,00	836.479.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	836.327.000,00	836.327.000,00	836.327.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.100.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.710.000,00	231.710.000,00	231.710.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.950.000,00	166.950.000,00	166.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	180.067.000,00	180.067.000,00	180.067.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	101.100.000,00	101.100.000,00	101.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.483.644.134,00	2.483.644.134,00	2.483.644.134,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.483.644.134,00	2.483.644.134,00	2.483.644.134,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.483.644.134,00	2.483.644.134,00	2.483.644.134,00
1.02.0.00.0.00.01.1000						UPTD. Puskesmas Mengwi II	2.489.367.172,00	2.489.367.172,00	2.489.167.172,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	832.634.000,00	832.634.000,00	832.434.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	832.337.000,00	832.337.000,00	832.137.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	229.835.000,00	229.835.000,00	229.835.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.800.000,00	149.800.000,00	149.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	179.952.000,00	179.952.000,00	179.752.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	137.400.000,00	137.400.000,00	137.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.656.733.172,00	1.656.733.172,00	1.656.733.172,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.656.733.172,00	1.656.733.172,00	1.656.733.172,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.656.733.172,00	1.656.733.172,00	1.656.733.172,00
1.02.0.00.0.00.01.1100						UPTD. Puskesmas Mengwi III	2.007.169.592,00	2.007.169.592,00	2.007.169.592,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	613.975.000,00	613.975.000,00	613.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.955.000,00	613.955.000,00	613.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	185.722.000,00	185.722.000,00	185.722.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.900.000,00	111.900.000,00	111.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.653.000,00	132.653.000,00	132.653.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.380.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.393.194.592,00	1.393.194.592,00	1.393.194.592,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.393.194.592,00	1.393.194.592,00	1.393.194.592,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.393.194.592,00	1.393.194.592,00	1.393.194.592,00
1.02.0.00.0.00.01.1200						UPTD. Puskesmas Petang I	1.684.479.108,00	1.684.479.108,00	1.684.479.108,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	601.060.000,00	601.060.000,00	601.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	601.010.000,00	601.010.000,00	601.010.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.782.000,00	171.782.000,00	171.782.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.450.000,00	92.450.000,00	92.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.478.000,00	132.478.000,00	132.478.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	44.550.000,00	44.550.000,00	44.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.071.219.108,00	1.071.219.108,00	1.071.219.108,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.071.219.108,00	1.071.219.108,00	1.071.219.108,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.071.219.108,00	1.071.219.108,00	1.071.219.108,00
1.02.0.00.0.00.01.1300						UPTD. Puskesmas Petang II	1.510.462.000,00	1.510.462.000,00	1.510.462.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	544.462.000,00	544.462.000,00	544.462.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	544.410.000,00	544.410.000,00	544.410.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.856.000,00	152.856.000,00	152.856.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.950.000,00	99.950.000,00	99.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	117.604.000,00	117.604.000,00	117.604.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	117.800.000,00	117.800.000,00	117.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	966.000.000,00	966.000.000,00	966.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	966.000.000,00	966.000.000,00	966.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	966.000.000,00	966.000.000,00	966.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400						UPTD. Puskesmas Kuta Utara	3.244.236.530,00	3.244.236.530,00	3.244.236.530,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY KESEHATAN MASYARAKAT	823.710.000,00	823.710.000,00	823.710.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	823.613.000,00	823.613.000,00	823.613.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.800.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.888.000,00	230.888.000,00	230.888.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	164.750.000,00	164.750.000,00	164.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	178.975.000,00	178.975.000,00	178.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.326.317.994.488,00	2.326.317.994.488,00	2.371.028.360.104,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.326.317.994.488,00	2.326.317.994.488,00	2.371.028.360.104,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	176.156.646.204,00	176.156.646.204,00	176.135.775.940,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.288.083.959,00	118.288.083.959,00	118.268.324.038,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.051.586.266,00	4.051.586.266,00	4.035.448.480,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	3.780.726.354,00	3.780.726.354,00	3.777.478.714,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.260.676.142,00	1.260.676.142,00	1.260.341.302,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	476.077.635,00	476.077.635,00	476.077.635,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	98.379.560.293,00	98.379.560.293,00	98.379.560.293,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	605.854.140,00	605.854.140,00	605.854.140,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	9.733.603.129,00	9.733.603.129,00	9.733.563.474,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.868.562.245,00	57.868.562.245,00	57.867.451.902,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	590.088.443,00	590.088.443,00	590.088.443,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	41.068.391.541,00	41.068.391.541,00	41.068.301.253,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	11.448.005.797,00	11.448.005.797,00	11.448.005.797,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.506.198.553,00	1.506.198.553,00	1.505.178.498,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	448.241.745,00	448.241.745,00	448.241.745,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.831.046.082,00	8.831.046.082,00	8.831.046.082,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.831.046.082,00	8.831.046.082,00	8.831.046.082,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	801.578.067,00	801.578.067,00	801.578.067,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00	3.655.906.912,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13.191.380.347,00	13.191.380.347,00	13.191.380.347,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.191.380.347,00	13.191.380.347,00	13.191.380.347,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	891.387.312,00	891.387.312,00	891.387.312,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	222.336.660.525,00	222.336.660.525,00	222.330.260.525,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	222.336.660.525,00	222.336.660.525,00	222.330.260.525,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	104.485.166,00	104.485.166,00	104.485.166,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1.572.060.397,00	1.572.060.397,00	1.572.060.397,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	217.568.869.541,00	217.568.869.541,00	217.568.869.541,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3.091.245.421,00	3.091.245.421,00	3.084.845.421,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	898.784.287.757,00	898.784.287.757,00	898.784.287.757,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	898.784.287.757,00	898.784.287.757,00	898.784.287.757,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	898.048.823.684,00	898.048.823.684,00	898.048.823.684,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	691.664.073,00	691.664.073,00	691.664.073,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	948.482.352.285,00	948.482.352.285,00	993.286.426.285,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	948.482.352.285,00	948.482.352.285,00	993.286.426.285,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	593.339.341,00	593.339.341,00	593.339.341,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.197.475.181,00	2.197.475.181,00	2.197.475.181,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	388.920.651.304,00	388.920.651.304,00	430.920.651.304,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	32.881.976.722,00	32.881.976.722,00	32.881.976.722,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	11.103.049.312,00	11.103.049.312,00	11.103.049.312,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	792.769.324,00	792.769.324,00	792.769.324,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	703.724.195,00	703.724.195,00	703.724.195,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	444.130.814.666,00	444.130.814.666,00	446.942.814.666,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	20.392.991.252,00	20.392.991.252,00	20.385.065.252,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.714.788.715,00	1.714.788.715,00	1.714.788.715,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	421.064.552,00	421.064.552,00	421.064.552,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	181.600.743,00	181.600.743,00	181.600.743,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	8.941.851,00	8.941.851,00	8.941.851,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	230.521.958,00	230.521.958,00	230.521.958,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	114.846.791,00	114.846.791,00	114.846.791,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	23.702.836,00	23.702.836,00	23.702.836,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	91.143.955,00	91.143.955,00	91.143.955,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.178.877.372,00	1.178.877.372,00	1.178.877.372,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1.178.877.372,00	1.178.877.372,00	1.178.877.372,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.155.595.733,00	2.155.595.733,00	2.085.163.613,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	587.764.607,00	587.764.607,00	517.732.487,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	585.440.970,00	585.440.970,00	515.408.850,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	2.323.637,00	2.323.637,00	2.323.637,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	321.732.103,00	321.732.103,00	321.332.103,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	8.959.051,00	8.959.051,00	8.559.051,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	136.934.125,00	136.934.125,00	136.934.125,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	175.838.927,00	175.838.927,00	175.838.927,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.246.099.023,00	1.246.099.023,00	1.246.099.023,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.246.099.023,00	1.246.099.023,00	1.246.099.023,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.009.329.928,00	51.009.329.928,00	51.013.323.928,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.706.177,00	188.706.177,00	188.706.177,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.354.337,00	140.354.337,00	140.354.337,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.351.840,00	48.351.840,00	48.351.840,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.184.750.556,00	27.184.750.556,00	27.188.612.556,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.896.949.764,00	26.896.949.764,00	26.896.949.764,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.120.803,00	107.120.803,00	110.982.803,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.636.199,00	89.636.199,00	89.636.199,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.464.090,00	1.464.090,00	1.464.090,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89.579.700,00	89.579.700,00	89.579.700,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.902.996,00	131.902.996,00	132.034.996,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.902.996,00	131.902.996,00	132.034.996,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.847.938,00	684.847.938,00	684.847.938,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.933.574,00	47.933.574,00	47.933.574,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.865.346,00	10.865.346,00	10.865.346,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	436.055.505,00	436.055.505,00	436.055.505,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.990.659,00	16.990.659,00	16.990.659,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.700.576,00	56.700.576,00	56.700.576,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.504.160,00	2.504.160,00	2.504.160,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	113.798.118,00	113.798.118,00	113.798.118,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.249.370.400,00	16.249.370.400,00	16.249.370.400,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.940.259.376,00	15.940.259.376,00	15.940.259.376,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.854.024,00	10.854.024,00	10.854.024,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.257.000,00	298.257.000,00	298.257.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.351.418,00	761.351.418,00	761.351.418,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.156.000,00	162.156.000,00	162.156.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.195.418,00	599.195.418,00	599.195.418,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.808.400.443,00	5.808.400.443,00	5.808.400.443,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.460.000,00	125.460.000,00	125.460.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.537.213.671,00	2.537.213.671,00	2.537.213.671,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.777.850.372,00	2.777.850.372,00	2.777.850.372,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.790.000,00	42.790.000,00	42.790.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.226.400,00	262.226.400,00	262.226.400,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.860.000,00	62.860.000,00	62.860.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	311.376.206.181,00	311.376.206.181,00	311.376.206.181,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	311.376.206.181,00	311.376.206.181,00	311.376.206.181,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.190.625.654,00	4.190.625.654,00	4.190.625.654,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.970.988.541,00	3.970.988.541,00	3.970.988.541,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	78.857.907,00	78.857.907,00	78.857.907,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.960.700,00	7.960.700,00	7.960.700,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	292.363.564,00	292.363.564,00	292.363.564,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	212.340.537,00	212.340.537,00	212.340.537,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25.256.200,00	25.256.200,00	25.256.200,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	187.084.337,00	187.084.337,00	187.084.337,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.999.273.644,00	11.999.273.644,00	11.999.273.644,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	24.924.588,00	24.924.588,00	24.924.588,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	9.107.884,00	9.107.884,00	9.107.884,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15.816.704,00	15.816.704,00	15.816.704,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5.298.885,00	5.298.885,00	5.298.885,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	102.190.844,00	102.190.844,00	102.190.844,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6.960.562,00	6.960.562,00	6.960.562,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	24.003.095,00	24.003.095,00	24.003.095,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.834.283.672,00	10.834.283.672,00	10.834.283.672,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	531.643.508,00	531.643.508,00	531.643.508,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	201.285.282,00	201.285.282,00	201.285.282,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	274.557.765.886,00	274.557.765.886,00	274.557.765.886,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	274.557.765.886,00	274.557.765.886,00	274.557.765.886,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.740.645.276,00	3.740.645.276,00	3.740.645.276,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	266.558.558.157,00	266.558.558.157,00	266.558.558.157,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.214.051.641,00	4.214.051.641,00	4.214.051.641,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	44.510.812,00	44.510.812,00	44.510.812,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.177.587.166,00	18.177.587.166,00	18.177.587.166,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.206.837,00	318.206.837,00	318.206.837,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	298.815.448,00	298.815.448,00	298.815.448,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.815.036,00	3.815.036,00	3.815.036,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.470.200,00	2.470.200,00	2.470.200,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.694.868,00	2.694.868,00	2.694.868,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.673.662,00	2.673.662,00	2.673.662,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.737.623,00	7.737.623,00	7.737.623,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.708.083.674,00	13.708.083.674,00	13.708.083.674,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.704.213.518,00	13.704.213.518,00	13.704.213.518,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.870.156,00	3.870.156,00	3.870.156,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.359.672,00	684.359.672,00	684.359.672,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.327.423,00	27.327.423,00	27.327.423,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.996.969,00	3.996.969,00	3.996.969,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	325.952.879,00	325.952.879,00	325.952.879,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.536.989,00	29.536.989,00	29.536.989,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.495.600,00	54.495.600,00	54.495.600,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.539.672,00	4.539.672,00	4.539.672,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	238.510.140,00	238.510.140,00	238.510.140,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.146.374.441,00	2.146.374.441,00	2.146.374.441,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.864.448,00	452.864.448,00	452.864.448,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	234.406.248,00	234.406.248,00	234.406.248,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.459.103.745,00	1.459.103.745,00	1.459.103.745,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.872.918,00	410.872.918,00	410.872.918,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.837.006,00	45.837.006,00	45.837.006,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.635.912,00	353.635.912,00	353.635.912,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.689.624,00	909.689.624,00	909.689.624,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.618.600,00	120.618.600,00	120.618.600,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	697.339.000,00	697.339.000,00	697.339.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.732.024,00	48.732.024,00	48.732.024,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	45.885.826.671,00	45.885.826.671,00	45.885.826.671,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	45.885.826.671,00	45.885.826.671,00	45.885.826.671,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.124.904.074,00	7.124.904.074,00	7.124.904.074,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.322.633.914,00	4.322.633.914,00	4.322.633.914,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.288.564.610,00	1.288.564.610,00	1.288.564.610,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.164.100,00	36.164.100,00	36.164.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	122.232.300,00	122.232.300,00	122.232.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.133.200,00	9.133.200,00	9.133.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.829.978.304,00	2.829.978.304,00	2.829.978.304,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	36.561.400,00	36.561.400,00	36.561.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.802.270.160,00	2.802.270.160,00	2.802.270.160,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.590.700,00	8.590.700,00	8.590.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	11.205.400,00	11.205.400,00	11.205.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.782.474.060,00	2.782.474.060,00	2.782.474.060,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.760.922.597,00	38.760.922.597,00	38.760.922.597,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.793.700,00	7.793.700,00	7.793.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.509.500,00	4.509.500,00	4.509.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.284.200,00	3.284.200,00	3.284.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.932.247.797,00	36.932.247.797,00	36.932.247.797,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.932.247.797,00	36.932.247.797,00	36.932.247.797,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.257.700,00	448.257.700,00	448.257.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.025.950,00	24.025.950,00	24.025.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.339.500,00	376.339.500,00	376.339.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	15.649.450,00	15.649.450,00	15.649.450,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.242.800,00	32.242.800,00	32.242.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.975.719,00	193.975.719,00	193.975.719,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.451.409,00	28.451.409,00	28.451.409,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.360.127,00	33.360.127,00	33.360.127,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.760.127,00	23.760.127,00	23.760.127,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.287.554,00	1.145.287.554,00	1.145.287.554,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.195.500,00	82.195.500,00	82.195.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	973.968.654,00	973.968.654,00	973.968.654,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.123.400,00	89.123.400,00	89.123.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000						Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	76.681.109.955,00	76.681.109.955,00	76.692.137.055,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	28.354.416.735,00	28.354.416.735,00	28.381.793.835,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.293.076.235,00	24.293.076.235,00	24.293.076.235,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.750.000,00	204.750.000,00	204.750.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.846.330.435,00	12.846.330.435,00	12.846.330.435,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.314.600,00	64.314.600,00	64.314.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.269.200,00	2.269.200,00	2.269.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.646.739.600,00	1.646.739.600,00	1.646.739.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	114.874.800,00	114.874.800,00	114.874.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.181.775.000,00	9.181.775.000,00	9.181.775.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.188.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	230.834.200,00	230.834.200,00	230.834.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	311.848.200,00	311.848.200,00	322.875.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.642.100,00	5.642.100,00	5.642.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	306.206.100,00	306.206.100,00	317.233.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	6.155.800,00	6.155.800,00	6.155.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6.155.800,00	6.155.800,00	6.155.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.430.709.000,00	1.430.709.000,00	1.447.059.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	63.135.600,00	63.135.600,00	63.135.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1.367.573.400,00	1.367.573.400,00	1.383.923.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2.312.627.500,00	2.312.627.500,00	2.312.627.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.309.794.000,00	2.309.794.000,00	2.309.794.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.326.693.220,00	48.326.693.220,00	48.310.343.220,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.139.800,00	10.139.800,00	10.139.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.476.300,00	4.476.300,00	4.476.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.663.500,00	5.663.500,00	5.663.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.305.160.072,00	42.305.160.072,00	42.288.810.072,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.305.160.072,00	42.305.160.072,00	42.288.810.072,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.252.300,00	164.252.300,00	164.252.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.252.300,00	164.252.300,00	164.252.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	925.531.400,00	925.531.400,00	925.531.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.025.600,00	74.025.600,00	74.025.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	778.241.800,00	778.241.800,00	778.241.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.954.800,00	14.954.800,00	14.954.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.309.200,00	43.309.200,00	43.309.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.205.848,00	523.205.848,00	523.205.848,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.786.400,00	390.786.400,00	390.786.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.123.800,00	1.126.123.800,00	1.126.123.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.642.200,00	21.642.200,00	21.642.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.423.400,00	315.423.400,00	315.423.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	789.058.200,00	789.058.200,00	789.058.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.264.747.600,00	3.264.747.600,00	3.264.747.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.995.600,00	126.995.600,00	126.995.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.953.342.000,00	2.953.342.000,00	2.953.342.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.410.000,00	74.410.000,00	74.410.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.429.003.093,00	20.429.003.093,00	20.429.003.093,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.183.875.499,00	5.183.875.499,00	5.183.875.499,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	211.310.780,00	211.310.780,00	211.310.780,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	19.071.171,00	19.071.171,00	19.071.171,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	192.239.609,00	192.239.609,00	192.239.609,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	439.062.496,00	439.062.496,00	439.062.496,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	163.390.564,00	163.390.564,00	163.390.564,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	22.122.408,00	22.122.408,00	22.122.408,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.692.262,00	3.692.262,00	3.692.262,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.857.262,00	249.857.262,00	249.857.262,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.321.713.434,00	4.321.713.434,00	4.321.713.434,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.894.659,00	1.894.659,00	1.894.659,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.495.541.877,00	3.495.541.877,00	3.495.541.877,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	683.903.745,00	683.903.745,00	683.903.745,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137.611.029,00	137.611.029,00	137.611.029,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.762.124,00	2.762.124,00	2.762.124,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	211.788.789,00	211.788.789,00	211.788.789,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.989.231,00	1.989.231,00	1.989.231,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	29.239.731,00	29.239.731,00	29.239.731,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	55.772.619,00	55.772.619,00	55.772.619,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	124.787.208,00	124.787.208,00	124.787.208,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.245.127.594,00	15.245.127.594,00	15.245.127.594,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.784.982,00	10.784.982,00	10.784.982,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.298.252,00	5.298.252,00	5.298.252,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.486.730,00	5.486.730,00	5.486.730,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.878.691,00	198.878.691,00	198.878.691,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.878.120,00	1.878.120,00	1.878.120,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.521.522,00	6.521.522,00	6.521.522,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.816.704,00	140.816.704,00	140.816.704,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.698.345,00	13.698.345,00	13.698.345,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.964.000,00	35.964.000,00	35.964.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.082.944.596,00	4.082.944.596,00	4.082.944.596,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.008.611.049,00	3.008.611.049,00	3.008.611.049,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.065.524.920,00	1.065.524.920,00	1.065.524.920,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.808.627,00	8.808.627,00	8.808.627,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.488.436,00	1.042.488.436,00	1.042.488.436,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.508.455,00	22.508.455,00	22.508.455,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.100.000,00	279.100.000,00	279.100.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.879.981,00	740.879.981,00	740.879.981,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.311.970,00	1.027.311.970,00	1.027.311.970,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	730.194.120,00	730.194.120,00	730.194.120,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.071.700,00	151.071.700,00	151.071.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.046.150,00	146.046.150,00	146.046.150,00
1.06.0.00.0.00.01.0000						Dinas Sosial	24.521.473.478,00	24.521.473.478,00	27.376.630.060,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.521.473.478,00	24.521.473.478,00	27.376.630.060,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.887.490.290,00	2.887.490.290,00	2.887.490.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.887.490.290,00	2.887.490.290,00	2.887.490.290,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	265.531.189,00	265.531.189,00	265.531.189,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.621.959.101,00	2.621.959.101,00	2.621.959.101,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.256.435.748,00	6.256.435.748,00	9.113.842.148,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.388.928.892,00	1.388.928.892,00	1.388.928.892,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	258.849.659,00	258.849.659,00	258.849.659,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	325.004.374,00	325.004.374,00	325.004.374,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	151.764.315,00	151.764.315,00	151.764.315,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	650.255.447,00	650.255.447,00	650.255.447,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00	3.055.097,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.867.506.856,00	4.867.506.856,00	7.724.913.256,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	26.719.554,00	26.719.554,00	26.719.554,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.838.462.185,00	4.838.462.185,00	7.695.868.585,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.325.117,00	2.325.117,00	2.325.117,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.822.072.805,00	1.822.072.805,00	1.819.925.148,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.822.072.805,00	1.822.072.805,00	1.819.925.148,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.619.087,00	34.619.087,00	34.619.087,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.071.116,00	100.071.116,00	97.923.459,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.687.382.602,00	1.687.382.602,00	1.687.382.602,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	327.054.829,00	327.054.829,00	326.952.668,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	327.054.829,00	327.054.829,00	326.952.668,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	172.019.868,00	172.019.868,00	171.917.707,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	155.034.961,00	155.034.961,00	155.034.961,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.228.419.806,00	13.228.419.806,00	13.228.419.806,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.381.563,00	12.381.563,00	12.381.563,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.051.675,00	8.051.675,00	8.051.675,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.329.888,00	4.329.888,00	4.329.888,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.273.696,00	218.273.696,00	218.273.696,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.760.060,00	172.760.060,00	172.760.060,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.718.036,00	23.718.036,00	23.718.036,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.795.600,00	21.795.600,00	21.795.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.728.876,00	172.728.876,00	172.728.876,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.309.428,00	40.309.428,00	40.309.428,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.302.308,00	150.302.308,00	150.302.308,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.370.155,00	40.370.155,00	40.370.155,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.316.182,00	30.316.182,00	30.316.182,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.615.971,00	79.615.971,00	79.615.971,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.432.274,00	704.432.274,00	704.432.274,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	605.224.500,00	605.224.500,00	605.224.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.788.500,00	44.788.500,00	44.788.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.419.274,00	54.419.274,00	54.419.274,00
2.11.0.00.0.00.12.0000						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	368.746.947.288,00	368.746.947.288,00	367.231.408.296,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	368.746.947.288,00	368.746.947.288,00	367.231.408.296,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	368.746.947.288,00	368.746.947.288,00	367.231.408.296,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.949.878.715,00	1.949.878.715,00	1.585.744.115,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.650.005.392,00	1.650.005.392,00	1.285.870.792,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.532.491.535,00	1.532.491.535,00	1.168.356.935,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	117.513.857,00	117.513.857,00	117.513.857,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	108.180.761,00	108.180.761,00	108.180.761,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	108.180.761,00	108.180.761,00	108.180.761,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	191.692.562,00	191.692.562,00	191.692.562,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	95.846.281,00	95.846.281,00	95.846.281,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	95.846.281,00	95.846.281,00	95.846.281,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	140.208.123.543,00	140.208.123.543,00	139.547.279.425,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	140.208.123.543,00	140.208.123.543,00	139.547.279.425,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	631.102.385,00	631.102.385,00	156.995.557,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	139.577.021.158,00	139.577.021.158,00	139.390.283.868,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	352.954.639,00	352.954.639,00	352.954.639,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	264.748.833,00	264.748.833,00	264.748.833,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	264.748.833,00	264.748.833,00	264.748.833,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.205.806,00	88.205.806,00	88.205.806,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	88.205.806,00	88.205.806,00	88.205.806,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	569.959.686,00	569.959.686,00	569.959.686,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	569.959.686,00	569.959.686,00	569.959.686,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	2.675.486,00	2.675.486,00	2.675.486,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	567.284.200,00	567.284.200,00	567.284.200,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.764.591,00	25.764.591,00	25.764.591,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.764.591,00	25.764.591,00	25.764.591,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	25.764.591,00	25.764.591,00	25.764.591,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	507.995.711,00	507.995.711,00	507.995.711,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	507.995.711,00	507.995.711,00	507.995.711,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	503.097.433,00	503.097.433,00	503.097.433,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4.898.278,00	4.898.278,00	4.898.278,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	173.160.667.646,00	173.160.667.646,00	171.966.521.514,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	173.160.667.646,00	173.160.667.646,00	171.966.521.514,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	162.766.354,00	162.766.354,00	162.766.354,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	67.907.893.499,00	67.907.893.499,00	66.407.893.499,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	103.412.628.425,00	103.412.628.425,00	103.872.091.893,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	1.677.379.368,00	1.677.379.368,00	1.523.769.768,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.971.602.757,00	51.971.602.757,00	52.675.188.615,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.836.446,00	260.836.446,00	260.836.446,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.985.521,00	90.985.521,00	90.985.521,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.850.925,00	169.850.925,00	169.850.925,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.237.852.563,00	41.237.852.563,00	41.900.479.421,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.237.852.563,00	41.237.852.563,00	41.900.479.421,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.903.127.038,00	1.903.127.038,00	1.903.127.038,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.494.256,00	27.494.256,00	27.494.256,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.222.043,00	68.222.043,00	68.222.043,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.345.978,00	9.345.978,00	9.345.978,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.707.899.324,00	1.707.899.324,00	1.707.899.324,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.979.287,00	24.979.287,00	24.979.287,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.428.800,00	61.428.800,00	61.428.800,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.757.350,00	3.757.350,00	3.757.350,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.853.349.026,00	4.853.349.026,00	4.894.308.026,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.290.782.379,00	3.290.782.379,00	3.290.782.379,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	107.598.960,00	107.598.960,00	148.557.960,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.573.828,00	930.573.828,00	930.573.828,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	524.393.859,00	524.393.859,00	524.393.859,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.999.224,00	1.307.999.224,00	1.307.999.224,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.671.200,00	5.671.200,00	5.671.200,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.302.328.024,00	1.302.328.024,00	1.302.328.024,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.408.438.460,00	2.408.438.460,00	2.408.438.460,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.478.720,00	127.478.720,00	127.478.720,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.565.374.020,00	1.565.374.020,00	1.565.374.020,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.545.700,00	7.545.700,00	7.545.700,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287.755.680,00	287.755.680,00	287.755.680,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.284.340,00	420.284.340,00	420.284.340,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.256.957.698,00	21.256.957.698,00	21.259.957.588,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.256.957.698,00	21.256.957.698,00	21.259.957.588,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.994.474.498,00	2.994.474.498,00	2.995.122.848,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.470.022.619,00	2.470.022.619,00	2.470.670.969,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	565.458.477,00	565.458.477,00	565.458.477,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.904.564.142,00	1.904.564.142,00	1.905.212.492,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	524.451.879,00	524.451.879,00	524.451.879,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	524.451.879,00	524.451.879,00	524.451.879,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.676.407.700,00	1.676.407.700,00	1.678.101.190,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	1.676.407.700,00	1.676.407.700,00	1.678.101.190,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	243.886.758,00	243.886.758,00	243.886.758,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.432.520.942,00	1.432.520.942,00	1.434.214.432,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	333.467.519,00	333.467.519,00	333.736.559,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	210.202.415,00	210.202.415,00	210.471.455,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	124.355.723,00	124.355.723,00	124.495.093,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	85.846.692,00	85.846.692,00	85.976.362,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.252.607.981,00	16.252.607.981,00	16.252.996.991,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.585.295,00	8.585.295,00	8.585.295,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.857,00	5.359.857,00	5.359.857,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.225.438,00	3.225.438,00	3.225.438,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.774.623.126,00	13.774.623.126,00	13.774.623.126,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.774.623.126,00	13.774.623.126,00	13.774.623.126,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.395.844.047,00	1.395.844.047,00	1.396.233.057,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.792.410,00	19.792.410,00	19.792.410,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.623.927,00	4.623.927,00	4.623.927,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.700.719,00	135.700.719,00	135.700.719,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.073.116,00	144.073.116,00	144.073.116,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.932.020,00	47.932.020,00	47.932.020,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.043.721.855,00	1.043.721.855,00	1.044.110.865,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.409.448,00	142.409.448,00	142.409.448,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.234.025,00	110.234.025,00	110.234.025,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.910.849,00	17.910.849,00	17.910.849,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.324.000,00	9.324.000,00	9.324.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.999.176,00	82.999.176,00	82.999.176,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	820.912.040,00	820.912.040,00	820.912.040,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.844.500,00	46.844.500,00	46.844.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	498.492.940,00	498.492.940,00	498.492.940,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.574.600,00	275.574.600,00	275.574.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.888.376.967,00	20.881.858.367,00	20.849.117.367,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.888.376.967,00	20.881.858.367,00	20.849.117.367,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	18.616.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	18.616.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	18.616.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.856.525.464,00	2.856.525.464,00	2.856.885.164,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.856.525.464,00	2.856.525.464,00	2.856.885.164,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.429.621.612,00	1.429.621.612,00	1.429.621.612,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	131.630.600,00	131.630.600,00	131.630.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	401.639.400,00	401.639.400,00	401.639.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	141.322.052,00	141.322.052,00	141.322.052,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	32.188.900,00	32.188.900,00	32.188.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.754.100,00	30.754.100,00	30.754.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	689.368.800,00	689.368.800,00	689.728.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.589.193.191,00	3.582.674.591,00	3.546.222.391,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.589.193.191,00	3.582.674.591,00	3.546.222.391,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	409.708.000,00	409.708.000,00	497.003.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.815.800,00	56.815.800,00	56.815.800,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18.666.875,00	18.666.875,00	18.666.875,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.104.002.516,00	3.097.483.916,00	2.973.736.416,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.424.041.412,00	14.424.041.412,00	14.427.392.912,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.278.200,00	13.278.200,00	13.278.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.351.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.884.300,00	4.884.300,00	4.884.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.382.025.844,00	13.382.025.844,00	13.382.025.844,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.377.312.444,00	13.377.312.444,00	13.377.312.444,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.713.400,00	4.713.400,00	4.713.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.568.500,00	177.568.500,00	177.568.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.484.300,00	3.484.300,00	3.484.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.400.700,00	137.400.700,00	137.400.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.842.700,00	9.842.700,00	9.842.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.840.800,00	26.840.800,00	26.840.800,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.416.980,00	158.416.980,00	158.416.980,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.416.980,00	158.416.980,00	158.416.980,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.991.416,00	109.991.416,00	113.342.916,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.993.816,00	103.993.816,00	107.345.316,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.997.600,00	5.997.600,00	5.997.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.760.472,00	582.760.472,00	582.760.472,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.264.220,00	117.264.220,00	117.264.220,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429.526.252,00	429.526.252,00	429.526.252,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.570.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.877.975.273,00	28.877.975.273,00	28.877.975.273,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.086.708.068,00	22.086.708.068,00	22.086.708.068,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	513.066.700,00	513.066.700,00	513.066.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	500.180.500,00	500.180.500,00	500.180.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	12.886.200,00	12.886.200,00	12.886.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	863.233.900,00	863.233.900,00	863.233.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	627.753.900,00	627.753.900,00	627.753.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	526.253.900,00	526.253.900,00	526.253.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	556.585.380,00	556.585.380,00	556.585.380,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	304.710.600,00	304.710.600,00	304.710.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	304.710.600,00	304.710.600,00	304.710.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.874.780,00	251.874.780,00	251.874.780,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.874.780,00	251.874.780,00	251.874.780,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	53.901.330,00	53.901.330,00	53.901.330,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.901.330,00	53.901.330,00	53.901.330,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	53.901.330,00	53.901.330,00	53.901.330,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.860.940,00	140.860.940,00	140.860.940,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.125.240,00	55.125.240,00	55.125.240,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.043.800,00	9.043.800,00	9.043.800,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.081.440,00	46.081.440,00	46.081.440,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.735.700,00	85.735.700,00	85.735.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.528.400,00	54.528.400,00	54.528.400,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.056.300,00	15.056.300,00	15.056.300,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.151.000,00	16.151.000,00	16.151.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	90.319.900,00	90.319.900,00	90.319.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.614.900,00	88.614.900,00	88.614.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	19.594.900,00	19.594.900,00	19.594.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.866.925.118,00	18.866.925.118,00	18.866.925.118,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.702.760,00	98.702.760,00	98.702.760,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.518.300,00	52.518.300,00	52.518.300,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.297.460,00	42.297.460,00	42.297.460,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.887.000,00	3.887.000,00	3.887.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.981.842.908,00	16.981.842.908,00	16.981.842.908,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.961.111.208,00	16.961.111.208,00	16.961.111.208,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.169.600,00	11.169.600,00	11.169.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.787.100,00	2.787.100,00	2.787.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.775.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.759.100,00	237.759.100,00	237.759.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.381.200,00	17.381.200,00	17.381.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.017.000,00	186.017.000,00	186.017.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.762.400,00	7.762.400,00	7.762.400,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.598.500,00	26.598.500,00	26.598.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.529.710,00	448.529.710,00	448.529.710,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	11.087.000,00	11.087.000,00	11.087.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.918.400,00	271.918.400,00	271.918.400,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.955.200,00	62.955.200,00	62.955.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.345.200,00	54.345.200,00	54.345.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.037.135.440,00	1.037.135.440,00	1.037.135.440,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	875.706.140,00	875.706.140,00	875.706.140,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.909.300,00	90.909.300,00	90.909.300,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.791.267.205,00	6.791.267.205,00	6.791.267.205,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	271.177.520,00	271.177.520,00	271.177.520,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59.447.200,00	59.447.200,00	59.447.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	48.089.000,00	48.089.000,00	48.089.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	11.358.200,00	11.358.200,00	11.358.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	211.730.320,00	211.730.320,00	211.730.320,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	175.200.000,00	175.200.000,00	175.200.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.530.320,00	36.530.320,00	36.530.320,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.405.031.785,00	3.405.031.785,00	3.405.031.785,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.095.797.260,00	1.095.797.260,00	1.095.797.260,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	482.853.600,00	482.853.600,00	482.853.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149.999.700,00	149.999.700,00	149.999.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	204.943.960,00	204.943.960,00	204.943.960,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	961.287.680,00	961.287.680,00	961.287.680,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	45.731.600,00	45.731.600,00	45.731.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	729.556.080,00	729.556.080,00	729.556.080,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.178.061.785,00	1.178.061.785,00	1.178.061.785,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	68.080.000,00	68.080.000,00	68.080.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	361.815.000,00	361.815.000,00	361.815.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	71.486.100,00	71.486.100,00	71.486.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	676.680.685,00	676.680.685,00	676.680.685,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	169.885.060,00	169.885.060,00	169.885.060,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	71.935.060,00	71.935.060,00	71.935.060,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	94.200.000,00	94.200.000,00	94.200.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.115.057.900,00	3.115.057.900,00	3.115.057.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	391.209.200,00	391.209.200,00	391.209.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	91.209.200,00	91.209.200,00	91.209.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.723.848.700,00	2.723.848.700,00	2.723.848.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	58.948.700,00	58.948.700,00	58.948.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	139.080.612.066,00	139.080.612.066,00	139.024.264.583,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	139.080.612.066,00	139.080.612.066,00	139.024.264.583,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	60.176.363.718,00	60.176.363.718,00	60.176.363.718,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6.451.624.279,00	6.451.624.279,00	6.451.624.279,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	451.259.800,00	451.259.800,00	451.259.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.643.328.241,00	1.643.328.241,00	1.643.328.241,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.357.036.238,00	4.357.036.238,00	4.357.036.238,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	48.053.884.730,00	48.053.884.730,00	48.053.884.730,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20.082.797.177,00	20.082.797.177,00	20.082.797.177,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27.971.087.553,00	27.971.087.553,00	27.971.087.553,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	19.515.845,00	19.515.845,00	19.515.845,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19.515.845,00	19.515.845,00	19.515.845,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.119.305.777,00	2.119.305.777,00	2.119.305.777,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.361.389.033,00	1.361.389.033,00	1.361.389.033,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	757.916.744,00	757.916.744,00	757.916.744,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.967.339.722,00	2.967.339.722,00	2.967.339.722,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	646.800,00	646.800,00	646.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.790.641.822,00	1.790.641.822,00	1.790.641.822,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	92.329.100,00	92.329.100,00	92.329.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.014.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1.456.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	1.558.300,00	1.558.300,00	1.558.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	368.430.700,00	368.430.700,00	368.430.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3.564.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	63.643.400,00	63.643.400,00	63.643.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	301.223.300,00	301.223.300,00	301.223.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.248.265,00	193.248.265,00	193.248.265,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	193.248.265,00	193.248.265,00	193.248.265,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.904.248.348,00	78.904.248.348,00	78.847.900.865,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.369.800,00	19.369.800,00	19.369.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.878.600,00	13.878.600,00	13.878.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.491.200,00	5.491.200,00	5.491.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.177.687.086,00	35.177.687.086,00	35.134.098.286,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.161.325.086,00	35.161.325.086,00	35.117.736.286,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.953.900,00	8.953.900,00	8.953.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.289.900,00	2.289.900,00	2.289.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.118.200,00	5.118.200,00	5.118.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240.113.648,00	240.113.648,00	240.113.648,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	240.113.648,00	240.113.648,00	240.113.648,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.375.416,00	483.375.416,00	483.375.416,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	462.335.716,00	462.335.716,00	462.335.716,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.294.000,00	12.294.000,00	12.294.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.742.878.019,00	16.742.878.019,00	16.638.149.336,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.990.792.788,00	13.990.792.788,00	13.990.792.788,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	449.424.235,00	449.424.235,00	277.873.552,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.302.660.996,00	2.302.660.996,00	2.369.482.996,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.728.564.596,00	23.728.564.596,00	23.728.564.596,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.227.500,00	12.227.500,00	12.227.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.736.464,00	349.736.464,00	349.736.464,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.512.259.783,00	2.512.259.783,00	2.604.229.783,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.465.257.792,00	1.465.257.792,00	1.396.377.792,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.475.000,00	335.475.000,00	302.075.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.476.991,00	669.476.991,00	863.726.991,00
2.16.2.20.2.21.04.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	125.062.901.173,00	125.062.901.173,00	100.984.471.546,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	124.869.906.533,00	124.869.906.533,00	100.887.726.906,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.970.904.560,00	8.970.904.560,00	8.934.054.210,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.970.904.560,00	8.970.904.560,00	8.934.054.210,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	170.335.821,00	170.335.821,00	170.335.821,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	203.143.164,00	203.143.164,00	203.143.164,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	8.314.055.081,00	8.314.055.081,00	8.277.204.731,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19.119.142,00	19.119.142,00	19.119.142,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	153.887.748,00	153.887.748,00	153.887.748,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	57.887.726,00	57.887.726,00	57.887.726,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	7.555.534,00	7.555.534,00	7.555.534,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	44.920.344,00	44.920.344,00	44.920.344,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	97.600.637.541,00	97.600.637.541,00	72.005.458.764,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95.018.447.291,00	95.018.447.291,00	69.314.546.914,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	63.470.745,00	63.470.745,00	63.470.745,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.962.070.191,00	3.962.070.191,00	3.890.987.311,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90.992.906.355,00	90.992.906.355,00	65.360.088.858,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.582.190.250,00	2.582.190.250,00	2.690.911.850,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	970.412.000,00	970.412.000,00	970.412.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.430.840.150,00	1.430.840.150,00	1.539.561.750,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	177.883.900,00	177.883.900,00	177.883.900,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.054.200,00	3.054.200,00	3.054.200,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.298.364.432,00	18.298.364.432,00	19.948.213.932,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.569.650,00	96.569.650,00	96.569.650,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.446.595,00	49.446.595,00	49.446.595,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.123.055,00	47.123.055,00	47.123.055,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.981.704.016,00	15.981.704.016,00	17.629.888.516,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.949.512.016,00	15.949.512.016,00	17.597.696.516,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.264.400,00	20.264.400,00	20.264.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.079.600,00	9.079.600,00	9.079.600,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.166.455,00	84.166.455,00	84.166.455,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84.166.455,00	84.166.455,00	84.166.455,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.295.199,00	253.295.199,00	253.295.199,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.268.820,00	22.268.820,00	22.268.820,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.230.700,00	176.230.700,00	176.230.700,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.788.300,00	11.788.300,00	11.788.300,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.296.000,00	40.296.000,00	40.296.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.711.379,00	2.711.379,00	2.711.379,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	607.006.328,00	607.006.328,00	607.006.328,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.629.172,00	198.629.172,00	198.629.172,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.628.749,00	49.628.749,00	49.628.749,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.748.407,00	358.748.407,00	358.748.407,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.267.180,00	299.267.180,00	299.267.180,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.815.180,00	129.815.180,00	129.815.180,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.452.000,00	167.452.000,00	167.452.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	976.355.604,00	976.355.604,00	978.020.604,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.769.220,00	139.769.220,00	139.769.220,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	717.219.560,00	717.219.560,00	717.219.560,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.366.824,00	119.366.824,00	121.031.824,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	79.759.415,00	79.759.415,00	79.759.415,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	79.759.415,00	79.759.415,00	79.759.415,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	79.759.415,00	79.759.415,00	79.759.415,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7.083.700,00	7.083.700,00	7.083.700,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	62.750.890,00	62.750.890,00	62.750.890,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	9.924.825,00	9.924.825,00	9.924.825,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	113.235.225,00	113.235.225,00	16.985.225,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	113.235.225,00	113.235.225,00	16.985.225,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	109.140.425,00	109.140.425,00	12.890.425,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.112.380,00	2.112.380,00	2.112.380,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.872.580,00	3.872.580,00	3.872.580,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	101.186.865,00	101.186.865,00	4.936.865,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	27.256.690.238,00	27.256.690.238,00	27.256.819.908,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	25.175.518.200,00	25.175.518.200,00	25.175.647.870,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	14.450.100,00	14.450.100,00	14.450.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.054.700,00	10.054.700,00	10.054.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.054.700,00	10.054.700,00	10.054.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.395.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.395.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	438.823.700,00	438.823.700,00	438.823.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	438.823.700,00	438.823.700,00	438.823.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	360.766.500,00	360.766.500,00	360.766.500,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	78.057.200,00	78.057.200,00	78.057.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	103.614.640,00	103.614.640,00	103.744.310,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.614.640,00	103.614.640,00	103.744.310,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.020.340,00	72.020.340,00	72.150.010,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	31.594.300,00	31.594.300,00	31.594.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	583.619.900,00	583.619.900,00	583.619.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	583.619.900,00	583.619.900,00	583.619.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	583.619.900,00	583.619.900,00	583.619.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	97.966.800,00	97.966.800,00	97.966.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.966.800,00	97.966.800,00	97.966.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	97.966.800,00	97.966.800,00	97.966.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	558.014.890,00	558.014.890,00	558.014.890,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	558.014.890,00	558.014.890,00	558.014.890,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.811.900,00	12.811.900,00	12.811.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	54.657.460,00	54.657.460,00	54.657.460,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	96.205.200,00	96.205.200,00	96.205.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	42.175.060,00	42.175.060,00	42.175.060,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	352.165.270,00	352.165.270,00	352.165.270,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.679.000.085,00	1.679.000.085,00	1.679.000.085,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.679.000.085,00	1.679.000.085,00	1.679.000.085,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	1.419.683.765,00	1.419.683.765,00	1.419.683.765,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	259.316.320,00	259.316.320,00	259.316.320,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.700.028.085,00	21.700.028.085,00	21.700.028.085,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.882.100,00	11.882.100,00	11.882.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.182.900,00	7.182.900,00	7.182.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.699.200,00	4.699.200,00	4.699.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	730.282.764,00	730.282.764,00	730.282.764,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.619.000,00	8.619.000,00	8.619.000,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.917.552,00	418.917.552,00	418.917.552,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.254.100,00	6.254.100,00	6.254.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.297.300,00	213.297.300,00	213.297.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.361.696,00	32.361.696,00	32.361.696,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.833.116,00	50.833.116,00	50.833.116,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.569.447,00	89.569.447,00	89.569.447,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.381.447,00	51.381.447,00	51.381.447,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.396.000,00	28.396.000,00	28.396.000,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.017.182,00	935.017.182,00	935.017.182,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.869.220,00	121.869.220,00	121.869.220,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623.943.800,00	623.943.800,00	623.943.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.369.712,00	29.369.712,00	29.369.712,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.834.450,00	159.834.450,00	159.834.450,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.081.172.038,00	2.081.172.038,00	2.081.172.038,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.081.172.038,00	2.081.172.038,00	2.081.172.038,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	125.181.600,00	125.181.600,00	125.181.600,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	120.128.200,00	120.128.200,00	120.128.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	120.128.200,00	120.128.200,00	120.128.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5.053.400,00	5.053.400,00	5.053.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.053.400,00	5.053.400,00	5.053.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	493.759.474,00	493.759.474,00	493.759.474,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.198.700,00	6.198.700,00	6.198.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.198.700,00	6.198.700,00	6.198.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	479.407.074,00	479.407.074,00	479.407.074,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	32.056.100,00	32.056.100,00	32.056.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	447.350.974,00	447.350.974,00	447.350.974,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.153.700,00	8.153.700,00	8.153.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	8.153.700,00	8.153.700,00	8.153.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	689.662.300,00	689.662.300,00	689.662.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	689.662.300,00	689.662.300,00	689.662.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	626.689.100,00	626.689.100,00	626.689.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	62.973.200,00	62.973.200,00	62.973.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	521.562.564,00	521.562.564,00	521.562.564,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	521.562.564,00	521.562.564,00	521.562.564,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	509.926.964,00	509.926.964,00	509.926.964,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.635.600,00	11.635.600,00	11.635.600,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	251.006.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	251.006.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	251.006.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.975.736.622,00	38.975.736.622,00	38.975.736.622,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.975.736.622,00	38.975.736.622,00	38.975.736.622,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	38.975.736.622,00	38.975.736.622,00	38.975.736.622,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	384.807.600,00	384.807.600,00	384.807.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	79.441.600,00	79.441.600,00	79.441.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.810.300,00	1.810.300,00	1.810.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	77.631.300,00	77.631.300,00	77.631.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	305.366.000,00	305.366.000,00	305.366.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.222.200,00	19.222.200,00	19.222.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	286.143.800,00	286.143.800,00	286.143.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.250.069.050,00	2.250.069.050,00	2.250.069.050,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.250.069.050,00	2.250.069.050,00	2.250.069.050,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.703.363.450,00	1.703.363.450,00	1.703.363.450,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	546.705.600,00	546.705.600,00	546.705.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.478.818.652,00	2.478.818.652,00	2.478.818.652,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.478.818.652,00	2.478.818.652,00	2.478.818.652,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	11.831.600,00	11.831.600,00	11.831.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.192.193.952,00	2.192.193.952,00	2.192.193.952,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	11.296.700,00	11.296.700,00	11.296.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	263.496.400,00	263.496.400,00	263.496.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	469.410.800,00	469.410.800,00	469.410.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	469.410.800,00	469.410.800,00	469.410.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	134.819.800,00	134.819.800,00	134.819.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	293.713.200,00	293.713.200,00	293.713.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	40.877.800,00	40.877.800,00	40.877.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.089.229.670,00	32.089.229.670,00	32.089.229.670,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.513.100,00	10.513.100,00	10.513.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.245.600,00	5.245.600,00	5.245.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.267.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.476.396.785,00	27.476.396.785,00	27.476.396.785,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.466.079.685,00	27.466.079.685,00	27.466.079.685,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.317.100,00	10.317.100,00	10.317.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.345.881.400,00	1.345.881.400,00	1.345.881.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.042.200,00	3.042.200,00	3.042.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.342.839.200,00	1.342.839.200,00	1.342.839.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.120.880,00	736.120.880,00	736.120.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.640.600,00	16.640.600,00	16.640.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.034.200,00	13.034.200,00	13.034.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	530.781.280,00	530.781.280,00	530.781.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.008.800,00	90.008.800,00	90.008.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.656.000,00	85.656.000,00	85.656.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	691.400.685,00	691.400.685,00	691.400.685,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.734.034,00	231.734.034,00	231.734.034,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.916.651,00	209.916.651,00	209.916.651,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.750.000,00	249.750.000,00	249.750.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.665.000,00	686.665.000,00	686.665.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	679.365.000,00	679.365.000,00	679.365.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.251.820,00	1.142.251.820,00	1.142.251.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.544.220,00	122.544.220,00	122.544.220,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	829.152.600,00	829.152.600,00	829.152.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.555.000,00	190.555.000,00	190.555.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	742.085.114.095,00	746.402.784.621,00	733.876.932.242,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	742.085.114.095,00	746.402.784.621,00	733.876.932.242,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	201.787.810.717,00	204.507.598.322,00	204.365.253.622,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.443.183.830,00	21.443.183.830,00	21.449.029.830,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	19.806.710.430,00	19.806.710.430,00	19.748.556.430,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.636.473.400,00	1.636.473.400,00	1.700.473.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.784.231.662,00	92.784.231.662,00	93.824.253.462,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	92.784.231.662,00	92.784.231.662,00	93.824.253.462,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.560.395.225,00	90.280.182.830,00	89.091.970.330,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	827.649.100,00	827.649.100,00	827.649.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	66.772.230.025,00	66.894.170.025,00	66.574.357.525,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	19.960.516.100,00	22.558.363.705,00	21.689.963.705,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	77.238.102.922,00	77.464.978.922,00	72.191.896.362,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.238.102.922,00	77.464.978.922,00	72.191.896.362,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	71.763.446.202,00	71.990.322.202,00	66.717.239.642,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	10.764.605.340,00	10.794.605.340,00	10.827.804.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.764.605.340,00	10.794.605.340,00	10.827.804.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	6.209.892.640,00	6.209.892.640,00	6.132.641.640,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4.127.287.200,00	4.157.287.200,00	4.267.737.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	427.425.500,00	427.425.500,00	427.425.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	363.981.856.585,00	365.322.863.506,00	357.236.952.612,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	326.992.980.674,00	328.333.987.595,00	320.248.076.701,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	326.587.620.674,00	327.928.627.595,00	319.842.716.701,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	405.360.000,00	405.360.000,00	405.360.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	36.988.875.911,00	36.988.875.911,00	36.988.875.911,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	36.988.875.911,00	36.988.875.911,00	36.988.875.911,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	66.158.314.162,00	66.158.314.162,00	66.171.022.962,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	66.158.314.162,00	66.158.314.162,00	66.171.022.962,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	572.542.155,00	572.542.155,00	573.153.955,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	681.413.600,00	681.413.600,00	681.413.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	63.953.201.907,00	63.953.201.907,00	63.965.298.907,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	951.156.500,00	951.156.500,00	951.156.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.154.424.369,00	22.154.424.369,00	23.084.002.344,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.304.200,00	16.304.200,00	16.304.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.320.400,00	4.320.400,00	4.320.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.295.700,00	7.295.700,00	7.295.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.722.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.867.720.466,00	18.867.720.466,00	18.709.705.181,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.867.720.466,00	18.867.720.466,00	18.709.705.181,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.156.200,00	30.156.200,00	30.156.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.156.200,00	30.156.200,00	30.156.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.961.289,00	863.961.289,00	863.961.289,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.054.800,00	7.054.800,00	7.054.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	830.918.289,00	830.918.289,00	830.918.289,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.988.200,00	25.988.200,00	25.988.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	755.602.848,00	755.602.848,00	1.022.375.848,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	60.479.300,00	60.479.300,00	60.479.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	529.599.238,00	529.599.238,00	796.372.238,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.537.200,00	135.537.200,00	136.601.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.956.200,00	36.956.200,00	36.956.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.991.000,00	44.991.000,00	46.055.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.590.000,00	53.590.000,00	53.590.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.485.142.166,00	1.485.142.166,00	2.304.897.726,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.024.220,00	135.024.220,00	137.351.780,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	949.381.946,00	949.381.946,00	738.121.946,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.752.000,00	69.752.000,00	48.440.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.984.000,00	330.984.000,00	1.380.984.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.02.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33.267.444.793,00	33.267.444.793,00	33.267.444.793,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	32.623.282.688,00	32.623.282.688,00	32.623.282.688,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.413.151.307,00	7.413.151.307,00	7.413.151.307,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.292.834.227,00	7.292.834.227,00	7.292.834.227,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	82.880.020,00	82.880.020,00	82.880.020,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.797.555.300,00	6.797.555.300,00	6.797.555.300,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.693.100,00	32.693.100,00	32.693.100,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	2.822.700,00	2.822.700,00	2.822.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	50.819.235,00	50.819.235,00	50.819.235,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	128.666.832,00	128.666.832,00	128.666.832,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	197.397.040,00	197.397.040,00	197.397.040,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.317.080,00	120.317.080,00	120.317.080,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	48.939.200,00	48.939.200,00	48.939.200,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	71.377.880,00	71.377.880,00	71.377.880,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	134.074.020,00	134.074.020,00	134.074.020,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	134.074.020,00	134.074.020,00	134.074.020,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	134.074.020,00	134.074.020,00	134.074.020,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.076.057.361,00	25.076.057.361,00	25.076.057.361,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.861.700,00	9.861.700,00	9.861.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.209.700,00	3.209.700,00	3.209.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.870.220,00	341.870.220,00	341.870.220,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.847.000,00	47.847.000,00	47.847.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.568.400,00	10.568.400,00	10.568.400,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.928.428,00	206.928.428,00	206.928.428,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.950.700,00	10.950.700,00	10.950.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.575.692,00	65.575.692,00	65.575.692,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.391.197,00	189.391.197,00	189.391.197,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.904.600,00	29.904.600,00	29.904.600,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.804.400,00	12.804.400,00	12.804.400,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.100.200,00	12.100.200,00	12.100.200,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.477.300,00	759.477.300,00	759.477.300,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.219.500,00	77.219.500,00	77.219.500,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	527.947.800,00	527.947.800,00	527.947.800,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.310.000,00	121.310.000,00	121.310.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	644.162.105,00	644.162.105,00	644.162.105,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	554.009.072,00	554.009.072,00	554.009.072,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	249.414.916,00	249.414.916,00	249.414.916,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	124.341.004,00	124.341.004,00	124.341.004,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	82.148.572,00	82.148.572,00	82.148.572,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42.925.340,00	42.925.340,00	42.925.340,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	137.618.192,00	137.618.192,00	137.618.192,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	137.618.192,00	137.618.192,00	137.618.192,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	166.975.964,00	166.975.964,00	166.975.964,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	83.275.832,00	83.275.832,00	83.275.832,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	83.700.132,00	83.700.132,00	83.700.132,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	42.832.960,00	42.832.960,00	42.832.960,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	42.832.960,00	42.832.960,00	42.832.960,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	42.832.960,00	42.832.960,00	42.832.960,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	47.320.073,00	47.320.073,00	47.320.073,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	47.320.073,00	47.320.073,00	47.320.073,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	47.320.073,00	47.320.073,00	47.320.073,00
3.25.0.00.0.00.02.0000						Dinas Perikanan	20.624.436.926,00	20.624.436.926,00	20.755.311.926,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.624.436.926,00	20.624.436.926,00	20.755.311.926,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.624.436.926,00	20.624.436.926,00	20.755.311.926,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.219.156.529,00	2.219.156.529,00	2.050.031.529,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.678.867.766,00	1.678.867.766,00	1.509.742.766,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	136.300.702,00	136.300.702,00	136.300.702,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.542.567.064,00	1.542.567.064,00	1.373.442.064,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	540.288.763,00	540.288.763,00	540.288.763,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	530.606.307,00	530.606.307,00	530.606.307,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	9.682.456,00	9.682.456,00	9.682.456,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.353.290.603,00	1.353.290.603,00	1.653.290.603,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	628.890.567,00	628.890.567,00	628.890.567,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	605.507.674,00	605.507.674,00	605.507.674,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	5.393.157,00	5.393.157,00	5.393.157,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	17.989.736,00	17.989.736,00	17.989.736,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	724.400.036,00	724.400.036,00	1.024.400.036,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.388.548,00	100.388.548,00	100.388.548,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.120.700,00	101.120.700,00	401.120.700,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	458.519.380,00	458.519.380,00	458.519.380,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.371.408,00	64.371.408,00	64.371.408,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	186.837.147,00	186.837.147,00	186.837.147,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.807.616,00	20.807.616,00	20.807.616,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.308.039.987,00	1.308.039.987,00	1.308.039.987,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.208.114.235,00	1.208.114.235,00	1.208.114.235,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.763.318,00	325.763.318,00	325.763.318,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	882.350.917,00	882.350.917,00	882.350.917,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.536.305.044,00	15.536.305.044,00	15.536.305.044,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.386.815,00	20.386.815,00	20.386.815,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.513.695,00	13.513.695,00	13.513.695,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.873.120,00	6.873.120,00	6.873.120,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.916.824.577,00	13.916.824.577,00	13.916.824.577,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.916.824.577,00	13.916.824.577,00	13.916.824.577,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.316.970,00	411.316.970,00	411.316.970,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.602.609,00	41.602.609,00	41.602.609,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.723.448,00	50.723.448,00	50.723.448,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.625.037,00	4.625.037,00	4.625.037,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.603.800,00	263.603.800,00	263.603.800,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.779.876,00	10.779.876,00	10.779.876,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.511.200,00	36.511.200,00	36.511.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.471.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.704.781,00	291.704.781,00	291.704.781,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.939.448,00	167.939.448,00	167.939.448,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.765.333,00	123.765.333,00	123.765.333,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.255.934,00	346.255.934,00	346.255.934,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.323.934,00	37.323.934,00	37.323.934,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.432.000,00	306.432.000,00	306.432.000,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.815.967,00	549.815.967,00	549.815.967,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.889.700,00	130.889.700,00	130.889.700,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.241.267,00	359.241.267,00	359.241.267,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.542.600,00	46.542.600,00	46.542.600,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.142.400,00	13.142.400,00	13.142.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	83.388.277.986,00	83.388.277.986,00	83.363.637.986,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	83.388.277.986,00	83.388.277.986,00	83.363.637.986,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	29.982.882.316,00	29.982.882.316,00	29.958.242.316,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.038.968,00	137.038.968,00	137.038.968,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.038.968,00	137.038.968,00	137.038.968,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.945.793.200,00	8.945.793.200,00	8.921.153.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.189.600,00	4.189.600,00	4.189.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.788.785.100,00	8.788.785.100,00	8.764.145.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	94.289.200,00	94.289.200,00	94.289.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	58.529.300,00	58.529.300,00	58.529.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20.636.542.128,00	20.636.542.128,00	20.636.542.128,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.591.291.400,00	6.591.291.400,00	6.591.291.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.829.549.128,00	13.829.549.128,00	13.829.549.128,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	215.701.600,00	215.701.600,00	215.701.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	263.508.020,00	263.508.020,00	263.508.020,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	135.239.760,00	135.239.760,00	135.239.760,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	128.268.260,00	128.268.260,00	128.268.260,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	14.140.140.325,00	14.140.140.325,00	14.140.140.325,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.140.140.325,00	14.140.140.325,00	14.140.140.325,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	547.213.200,00	547.213.200,00	547.213.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	137.363.200,00	137.363.200,00	137.363.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	10.770.131.325,00	10.770.131.325,00	10.770.131.325,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	132.434.260,00	132.434.260,00	132.434.260,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	132.434.260,00	132.434.260,00	132.434.260,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	76.502.260,00	76.502.260,00	76.502.260,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	55.932.000,00	55.932.000,00	55.932.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	853.200.041,00	853.200.041,00	853.200.041,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	853.200.041,00	853.200.041,00	853.200.041,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	539.228.348,00	539.228.348,00	539.228.348,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	106.673.250,00	106.673.250,00	106.673.250,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	84.004.469,00	84.004.469,00	84.004.469,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	123.293.974,00	123.293.974,00	123.293.974,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.279.621.044,00	38.279.621.044,00	38.279.621.044,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	606.381.200,00	606.381.200,00	606.381.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	601.790.400,00	601.790.400,00	601.790.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.590.800,00	4.590.800,00	4.590.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.762.228.188,00	28.762.228.188,00	28.762.228.188,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.762.228.188,00	28.762.228.188,00	28.762.228.188,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	379.183.040,00	379.183.040,00	379.183.040,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	379.183.040,00	379.183.040,00	379.183.040,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.366.100,00	439.366.100,00	439.366.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.312.200,00	5.312.200,00	5.312.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.655.300,00	83.655.300,00	83.655.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.793.600,00	11.793.600,00	11.793.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.069.400,00	242.069.400,00	242.069.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.372.800,00	40.372.800,00	40.372.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.222.800,00	55.222.800,00	55.222.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	940.000,00	940.000,00	940.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.106.990.044,00	5.106.990.044,00	5.106.990.044,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.166.320.910,00	1.166.320.910,00	1.166.320.910,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	112.874.790,00	112.874.790,00	112.874.790,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.827.794.344,00	3.827.794.344,00	3.827.794.344,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.418.492,00	214.418.492,00	214.418.492,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.208.492,00	198.208.492,00	198.208.492,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.771.053.980,00	2.771.053.980,00	2.771.053.980,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.494.720,00	126.494.720,00	126.494.720,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.281.465.260,00	2.281.465.260,00	2.281.465.260,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.830.000,00	245.830.000,00	245.830.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.264.000,00	117.264.000,00	117.264.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000						Dinas Pertanian dan Pangan	115.518.949.734,00	115.918.949.734,00	109.484.566.185,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.636.342.500,00	10.636.342.500,00	10.624.242.945,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.636.342.500,00	10.636.342.500,00	10.624.242.945,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.539.490.816,00	10.539.490.816,00	10.527.391.261,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.642.294.331,00	8.642.294.331,00	8.645.959.776,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5.868.692.248,00	5.868.692.248,00	5.872.025.248,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	16.915.200,00	16.915.200,00	16.915.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	2.756.686.883,00	2.756.686.883,00	2.757.019.328,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.897.196.485,00	1.897.196.485,00	1.881.431.485,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.897.196.485,00	1.897.196.485,00	1.881.431.485,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.248.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.248.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.248.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	94.603.484,00	94.603.484,00	94.603.484,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	94.603.484,00	94.603.484,00	94.603.484,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	94.603.484,00	94.603.484,00	94.603.484,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	104.882.607.234,00	105.282.607.234,00	98.860.323.240,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	104.882.607.234,00	105.282.607.234,00	98.860.323.240,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.046.685.718,00	18.446.685.718,00	19.649.106.918,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	16.059.205.160,00	16.059.205.160,00	16.455.105.760,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.733.576.910,00	6.733.576.910,00	6.963.576.910,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9.325.628.250,00	9.325.628.250,00	9.491.528.850,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	299.282.760,00	299.282.760,00	319.393.360,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	252.547.760,00	252.547.760,00	272.658.360,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	46.735.000,00	46.735.000,00	46.735.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.070.600,00	34.070.600,00	34.070.600,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	34.070.600,00	34.070.600,00	34.070.600,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.221.100,00	3.221.100,00	3.221.100,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.221.100,00	3.221.100,00	3.221.100,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.709.500,00	46.709.500,00	64.269.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	46.709.500,00	46.709.500,00	64.269.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.604.196.598,00	2.004.196.598,00	2.773.046.598,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.604.196.598,00	2.004.196.598,00	2.773.046.598,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	26.574.416.797,00	26.574.416.797,00	19.047.416.797,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	57.317.900,00	57.317.900,00	57.317.900,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	57.317.900,00	57.317.900,00	57.317.900,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	23.426.941.489,00	23.426.941.489,00	15.899.941.489,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17.394.045.791,00	17.394.045.791,00	9.867.045.791,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.624.705.005,00	1.624.705.005,00	1.624.705.005,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	4.408.190.693,00	4.408.190.693,00	4.408.190.693,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.090.157.408,00	3.090.157.408,00	3.090.157.408,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.090.157.408,00	3.090.157.408,00	3.090.157.408,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.904.690.396,00	3.904.690.396,00	3.904.568.756,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00	3.352.816.490,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00	3.352.816.490,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	414.263.800,00	414.263.800,00	414.263.800,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	414.263.800,00	414.263.800,00	414.263.800,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.488.466,00	137.488.466,00	137.488.466,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	53.314.306,00	53.314.306,00	53.314.306,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	84.174.160,00	84.174.160,00	84.174.160,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.133.555.040,00	2.133.555.040,00	2.133.555.040,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.133.555.040,00	2.133.555.040,00	2.133.555.040,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	621.141.692,00	621.141.692,00	621.141.692,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.681.781.890,00	1.681.781.890,00	1.681.781.890,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.681.781.890,00	1.681.781.890,00	1.681.781.890,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.484.895.890,00	1.484.895.890,00	1.484.895.890,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	29.723.500,00	29.723.500,00	29.723.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	67.162.500,00	67.162.500,00	67.162.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.541.477.393,00	52.541.477.393,00	52.443.893.839,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.913.414.172,00	1.913.414.172,00	1.908.470.618,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.553.000,00	104.553.000,00	104.553.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.808.861.172,00	1.808.861.172,00	1.803.917.618,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.696.751.629,00	40.696.751.629,00	40.696.751.629,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.696.751.629,00	40.696.751.629,00	40.696.751.629,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.822.239,00	61.822.239,00	61.822.239,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.082.870,00	47.082.870,00	47.082.870,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.739.369,00	14.739.369,00	14.739.369,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.496.195.062,00	3.496.195.062,00	3.403.555.062,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.711.299.832,00	1.711.299.832,00	1.711.299.832,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	441.836.166,00	441.836.166,00	441.836.166,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.129.273.978,00	1.129.273.978,00	1.036.633.978,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.566.714,00	52.566.714,00	52.566.714,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.218.372,00	76.218.372,00	76.218.372,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.199.587.434,00	1.199.587.434,00	1.199.587.434,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.199.587.434,00	1.199.587.434,00	1.199.587.434,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.117.708.500,00	3.117.708.500,00	3.117.708.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	808.949.480,00	808.949.480,00	808.949.480,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.055.998.357,00	2.055.998.357,00	2.055.998.357,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.288.256.020,00	1.288.256.020,00	1.288.256.020,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	327.400.000,00	327.400.000,00	327.400.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.342.337,00	440.342.337,00	440.342.337,00
3.31.2.07.0.00.05.0000						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	36.233.673.694,00	36.233.673.694,00	33.679.942.108,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.581.327.172,00	13.581.327.172,00	13.581.339.472,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13.581.327.172,00	13.581.327.172,00	13.581.339.472,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.516.836.700,00	4.516.836.700,00	4.516.849.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.364.363.880,00	4.364.363.880,00	4.364.376.180,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.249.768.260,00	4.249.768.260,00	4.249.768.260,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	114.595.620,00	114.595.620,00	114.607.920,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	96.400.660,00	96.400.660,00	96.400.660,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	96.400.660,00	96.400.660,00	96.400.660,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	56.072.160,00	56.072.160,00	56.072.160,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	56.072.160,00	56.072.160,00	56.072.160,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.313.938.340,00	1.313.938.340,00	1.313.938.340,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.146.535.900,00	1.146.535.900,00	1.146.535.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	1.146.535.900,00	1.146.535.900,00	1.146.535.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.402.440,00	167.402.440,00	167.402.440,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	167.402.440,00	167.402.440,00	167.402.440,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.121.896.980,00	5.121.896.980,00	5.121.896.980,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.228.820,00	326.228.820,00	326.228.820,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	87.274.620,00	87.274.620,00	87.274.620,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	238.954.200,00	238.954.200,00	238.954.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.795.668.160,00	4.795.668.160,00	4.795.668.160,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.653.660,00	49.653.660,00	49.653.660,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	173.473.200,00	173.473.200,00	173.473.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.572.541.300,00	4.572.541.300,00	4.572.541.300,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.628.655.152,00	2.628.655.152,00	2.628.655.152,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.134.303.952,00	2.134.303.952,00	2.134.303.952,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.629.172,00	198.629.172,00	198.629.172,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	759.885.200,00	759.885.200,00	759.885.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.175.789.580,00	1.175.789.580,00	1.175.789.580,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.351.200,00	494.351.200,00	494.351.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.351.200,00	494.351.200,00	494.351.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.652.346.522,00	22.652.346.522,00	20.098.602.636,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	22.652.346.522,00	22.652.346.522,00	20.098.602.636,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.650.255.044,00	7.650.255.044,00	5.110.598.444,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.650.255.044,00	7.650.255.044,00	5.110.598.444,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.060.159.460,00	1.060.159.460,00	694.259.260,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	521.471.220,00	521.471.220,00	88.304.620,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.066.305.664,00	6.066.305.664,00	4.324.573.464,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.318.700,00	2.318.700,00	3.461.100,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	85.824.620,00	85.824.620,00	85.824.620,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	85.824.620,00	85.824.620,00	85.824.620,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	85.824.620,00	85.824.620,00	85.824.620,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.915.090.958,00	14.915.090.958,00	14.901.003.672,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.643.730,00	337.643.730,00	337.757.130,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.176.850,00	202.176.850,00	202.176.850,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.300,00	640.300,00	640.300,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.821.500,00	3.821.500,00	3.934.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.672.700,00	2.672.700,00	2.672.700,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.237.180,00	126.237.180,00	126.237.180,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.897.585.812,00	13.897.585.812,00	13.883.385.126,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.799.906.992,00	13.799.906.992,00	13.785.706.306,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	97.678.820,00	97.678.820,00	97.678.820,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.714.696,00	506.714.696,00	506.714.696,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.716.900,00	26.716.900,00	26.716.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.867.616,00	223.867.616,00	223.867.616,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.553.000,00	14.553.000,00	14.553.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.160.000,00	83.160.000,00	83.160.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	135.192.180,00	135.192.180,00	135.192.180,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.036.720,00	159.036.720,00	159.036.720,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.062.000,00	68.062.000,00	68.062.000,00
4.01.2.10.7.01.02.0000						Sekretariat Daerah	1.180.526.225.253,00	1.160.161.418.945,00	1.175.323.728.865,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	218.007.375,00	218.007.375,00	218.007.375,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	218.007.375,00	218.007.375,00	218.007.375,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	57.751.348,00	57.751.348,00	57.751.348,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.751.348,00	57.751.348,00	57.751.348,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.751.348,00	57.751.348,00	57.751.348,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	158.797.862,00	158.797.862,00	158.797.862,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	7.251.287,00	7.251.287,00	7.251.287,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.251.287,00	7.251.287,00	7.251.287,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	151.546.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	151.546.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.179.862.704.794,00	1.159.497.898.486,00	1.174.660.208.406,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	1.179.862.704.794,00	1.159.497.898.486,00	1.174.660.208.406,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	843.660.217.710,00	850.210.101.709,00	864.293.769.509,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	8.914.324.600,00	8.914.324.600,00	8.946.205.400,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	3.352.705.541,00	3.352.705.541,00	3.608.338.541,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	412.782.216,00	412.782.216,00	412.782.216,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.148.836.843,00	5.148.836.843,00	4.925.084.643,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	831.293.750.224,00	837.843.634.223,00	852.053.421.223,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	823.329.182.106,00	829.879.066.105,00	844.088.853.105,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	114.000.096,00	114.000.096,00	114.000.096,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.850.568.022,00	7.850.568.022,00	7.850.568.022,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.141.489.643,00	3.141.489.643,00	2.983.489.643,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	344.774.906,00	344.774.906,00	344.774.906,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.703.468.845,00	2.703.468.845,00	2.545.468.845,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	93.245.892,00	93.245.892,00	93.245.892,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	310.653.243,00	310.653.243,00	310.653.243,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	81.425.553,00	81.425.553,00	81.425.553,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	131.949.394,00	131.949.394,00	131.949.394,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	97.278.296,00	97.278.296,00	97.278.296,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.811.841.755,00	2.811.841.755,00	2.811.841.755,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	298.966.900,00	298.966.900,00	298.966.900,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	77.028.989,00	77.028.989,00	77.028.989,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	171.975.842,00	171.975.842,00	171.975.842,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.962.069,00	49.962.069,00	49.962.069,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.129.009.208,00	1.129.009.208,00	1.129.009.208,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	468.897.280,00	468.897.280,00	468.897.280,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	236.850.466,00	236.850.466,00	236.850.466,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	423.261.462,00	423.261.462,00	423.261.462,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	615.764.152,00	615.764.152,00	615.764.152,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	97.381.309,00	97.381.309,00	97.381.309,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	349.391.208,00	349.391.208,00	349.391.208,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	168.991.635,00	168.991.635,00	168.991.635,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	768.101.495,00	768.101.495,00	768.101.495,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	698.613.991,00	698.613.991,00	698.613.991,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7.131.528,00	7.131.528,00	7.131.528,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	62.355.976,00	62.355.976,00	62.355.976,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	333.390.645.329,00	306.475.955.022,00	307.554.597.142,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.470.090,00	61.470.090,00	61.470.090,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.854.842,00	42.854.842,00	42.854.842,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.665.494,00	11.665.494,00	11.665.494,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.949.754,00	6.949.754,00	6.949.754,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.975.509.855,00	90.975.509.855,00	90.975.509.855,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90.032.378.934,00	90.032.378.934,00	90.032.378.934,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	809.976.903,00	809.976.903,00	809.976.903,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.356.634,00	9.356.634,00	9.356.634,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	123.797.384,00	123.797.384,00	123.797.384,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.977.554.440,00	15.977.554.440,00	17.979.442.440,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.204.913,00	104.204.913,00	104.204.913,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.081.530.000,00	1.081.530.000,00	1.081.530.000,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.791.819.527,00	14.791.819.527,00	16.793.707.527,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.871.239.117,00	23.871.239.117,00	22.324.751.117,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.367.800.409,00	15.367.800.409,00	13.821.312.409,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	154.433.945,00	154.433.945,00	154.433.945,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.913.873,00	3.500.913.873,00	3.500.913.873,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	177.103.951,00	177.103.951,00	177.103.951,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.466.880.768,00	37.466.880.768,00	37.478.137.088,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	177.632.976,00	177.632.976,00	177.632.976,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.033.950.945,00	2.033.950.945,00	2.033.950.945,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.139.212.023,00	13.139.212.023,00	13.139.212.023,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.451.952.718,00	9.451.952.718,00	9.463.209.038,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.248.738.525,00	4.248.738.525,00	4.248.738.525,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48.033.665.671,00	21.118.975.364,00	21.118.975.364,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46.236.214.129,00	19.321.523.822,00	19.321.523.822,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	37.817.848.176,00	37.817.848.176,00	38.429.833.976,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.976.775.535,00	1.976.775.535,00	1.976.775.535,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.307.787.171,00	1.307.787.171,00	1.307.787.171,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	34.533.285.470,00	34.533.285.470,00	35.145.271.270,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	510.684.360,00	510.684.360,00	510.684.360,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	137.440.656,00	137.440.656,00	137.440.656,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.420.306,00	66.420.306,00	66.420.306,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	270.705.675,00	270.705.675,00	270.705.675,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.117.723,00	36.117.723,00	36.117.723,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	21.928.797.651,00	21.928.797.651,00	21.928.797.651,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.480.781.273,00	3.480.781.273,00	3.480.781.273,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	17.314.820.208,00	17.314.820.208,00	17.314.820.208,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	445.513.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01				KECAMATAN	445.513.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	445.513.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	445.513.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	445.513.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	203.683.020.213,00	203.683.020.213,00	203.720.310.177,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	203.683.020.213,00	203.683.020.213,00	203.720.310.177,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	203.683.020.213,00	203.683.020.213,00	203.720.310.177,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78.148.390.882,00	78.148.390.882,00	78.105.774.407,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	18.327.722.297,00	18.327.722.297,00	18.327.722.297,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.709.712.974,00	2.709.712.974,00	2.709.712.974,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.192.658.031,00	15.192.658.031,00	15.192.658.031,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	263.143.623,00	263.143.623,00	263.143.623,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	162.207.669,00	162.207.669,00	162.207.669,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	717.672.880,00	717.672.880,00	680.494.408,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	125.198.744,00	125.198.744,00	116.198.744,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	126.422.075,00	126.422.075,00	117.422.075,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	124.478.054,00	124.478.054,00	124.478.054,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	124.601.342,00	124.601.342,00	124.601.342,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	216.972.665,00	216.972.665,00	197.794.193,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.458.891.624,00	6.458.891.624,00	6.447.768.120,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.377.530.328,00	1.377.530.328,00	1.377.036.728,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	772.037.725,00	772.037.725,00	772.037.725,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.322.913.214,00	1.322.913.214,00	1.322.913.214,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	603.629.925,00	603.629.925,00	603.391.869,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	692.968.456,00	692.968.456,00	689.539.008,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	582.211.166,00	582.211.166,00	577.729.966,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.107.600.810,00	1.107.600.810,00	1.105.119.610,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	16.167.134.598,00	16.167.134.598,00	16.167.930.822,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	503.550.000,00	503.550.000,00	503.550.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.649.665.379,00	4.649.665.379,00	4.651.661.603,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	253.474.635,00	253.474.635,00	253.474.635,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.834.272.641,00	2.834.272.641,00	2.834.272.641,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	18.197.127,00	18.197.127,00	16.997.127,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.588.514.835,00	5.588.514.835,00	5.588.514.835,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.894.162.489,00	5.894.162.489,00	5.894.118.260,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.394.489,00	10.394.489,00	10.394.489,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	5.883.768.000,00	5.883.768.000,00	5.883.723.771,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.462.906.863,00	1.462.906.863,00	1.464.447.987,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.462.906.863,00	1.462.906.863,00	1.464.447.987,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	29.119.900.131,00	29.119.900.131,00	29.123.292.513,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.523.951.061,00	20.523.951.061,00	20.523.951.061,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8.595.949.070,00	8.595.949.070,00	8.599.341.452,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.534.629.331,00	125.534.629.331,00	125.614.535.770,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.336.400,00	10.336.400,00	10.336.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.368.900,00	7.368.900,00	7.368.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.967.500,00	2.967.500,00	2.967.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.472.345.614,00	18.472.345.614,00	18.472.119.890,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.159.772.411,00	18.159.772.411,00	18.159.772.411,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.480.842,00	10.480.842,00	10.480.842,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	299.906.661,00	299.906.661,00	299.680.937,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.185.700,00	2.185.700,00	2.185.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.379.119.717,00	8.379.119.717,00	9.080.153.692,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.182.800,00	17.182.800,00	657.566.775,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.873.864,00	150.873.864,00	150.873.864,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	139.489.926,00	139.489.926,00	139.489.926,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.025.966.998,00	3.025.966.998,00	3.025.966.998,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.598.400,00	156.598.400,00	156.598.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	578.836.010,00	578.836.010,00	578.836.010,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.317.892.000,00	1.317.892.000,00	1.317.892.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.279.272.780,00	1.279.272.780,00	1.339.922.780,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.713.006.939,00	1.713.006.939,00	1.713.006.939,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.136.887.768,00	47.136.887.768,00	47.129.961.368,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.002.121.190,00	4.002.121.190,00	4.002.121.190,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	720.798.126,00	720.798.126,00	713.871.726,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.670.624.805,00	17.670.624.805,00	17.670.624.805,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.743.343.647,00	24.743.343.647,00	24.743.343.647,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.176.323,00	696.176.323,00	696.176.323,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.843.620,00	44.843.620,00	44.843.620,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.332.703,00	651.332.703,00	651.332.703,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.245.495.610,00	4.245.495.610,00	3.600.044.730,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.776.677.898,00	2.776.677.898,00	2.776.536.618,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	128.760.000,00	128.760.000,00	128.760.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	608.168.112,00	608.168.112,00	694.748.112,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	731.889.600,00	731.889.600,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.822.821.338,00	44.822.821.338,00	44.849.777.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.388.410.684,00	41.388.410.684,00	41.388.410.684,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	3.123.947.774,00	3.123.947.774,00	3.150.904.124,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	310.462.880,00	310.462.880,00	310.462.880,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.771.446.561,00	1.771.446.561,00	1.775.965.679,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	497.171.661,00	497.171.661,00	501.690.779,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.274.274.900,00	1.274.274.900,00	1.274.274.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.743.354.994,00	28.743.354.994,00	28.743.354.994,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28.743.354.994,00	28.743.354.994,00	28.743.354.994,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	28.743.354.994,00	28.743.354.994,00	28.743.354.994,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	846.777.463,00	846.777.463,00	846.777.463,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	509.771.057,00	509.771.057,00	509.771.057,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	102.043.716,00	102.043.716,00	102.043.716,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	3.267.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	38.718.614,00	38.718.614,00	38.718.614,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.200.995,00	12.200.995,00	12.200.995,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	353.540.732,00	353.540.732,00	353.540.732,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	128.916.376,00	128.916.376,00	128.916.376,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	128.916.376,00	128.916.376,00	128.916.376,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	208.090.030,00	208.090.030,00	208.090.030,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	56.205.530,00	56.205.530,00	56.205.530,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	151.884.500,00	151.884.500,00	151.884.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.032.343.529,00	3.032.343.529,00	3.032.343.529,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	741.397.275,00	741.397.275,00	741.397.275,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.885.547,00	13.885.547,00	13.885.547,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.755.577,00	6.755.577,00	6.755.577,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.760.559,00	5.760.559,00	5.760.559,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.034.520,00	7.034.520,00	7.034.520,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.891.236,00	81.891.236,00	81.891.236,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.962.742,00	5.962.742,00	5.962.742,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.306.963,00	49.306.963,00	49.306.963,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	570.800.131,00	570.800.131,00	570.800.131,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	667.116.880,00	667.116.880,00	667.116.880,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	258.340.168,00	258.340.168,00	258.340.168,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.267.518,00	48.267.518,00	48.267.518,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.843.971,00	21.843.971,00	21.843.971,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	19.400.270,00	19.400.270,00	19.400.270,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	201.709.455,00	201.709.455,00	201.709.455,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48.021.875,00	48.021.875,00	48.021.875,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.501.980,00	21.501.980,00	21.501.980,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	48.031.643,00	48.031.643,00	48.031.643,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.623.829.374,00	1.623.829.374,00	1.623.829.374,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.933.658,00	305.933.658,00	305.933.658,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.580.268,00	46.580.268,00	46.580.268,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	961.023.762,00	961.023.762,00	961.023.762,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	71.751.110,00	71.751.110,00	71.751.110,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.547.580,00	88.547.580,00	88.547.580,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	45.431.214,00	45.431.214,00	45.431.214,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.165.206,00	30.165.206,00	30.165.206,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	74.396.576,00	74.396.576,00	74.396.576,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.864.234.002,00	24.864.234.002,00	24.864.234.002,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.058.684,00	131.058.684,00	131.058.684,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.879.247,00	17.879.247,00	17.879.247,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.720.862,00	14.720.862,00	14.720.862,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.458.575,00	98.458.575,00	98.458.575,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.088.703.194,00	21.088.703.194,00	21.088.703.194,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.014.448.832,00	21.014.448.832,00	21.014.448.832,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.978.464,00	1.978.464,00	1.978.464,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.275.898,00	72.275.898,00	72.275.898,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.996.264,00	17.996.264,00	17.996.264,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.996.264,00	17.996.264,00	17.996.264,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.334.308,00	2.334.308,00	2.334.308,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.334.308,00	2.334.308,00	2.334.308,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.573.277.899,00	1.573.277.899,00	1.998.079.839,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.942.605,00	7.942.605,00	7.942.605,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.113.623.556,00	1.113.623.556,00	1.538.425.496,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.874.300,00	5.874.300,00	5.874.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.041.674,00	197.041.674,00	197.041.674,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.641.764,00	38.641.764,00	38.641.764,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.154.000,00	210.154.000,00	210.154.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847.509.753,00	847.509.753,00	847.509.753,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	715.380.570,00	715.380.570,00	715.380.570,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	132.129.183,00	132.129.183,00	132.129.183,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.353.900,00	1.188.353.900,00	763.551.960,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.611.200,00	97.611.200,00	134.570.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587.940.760,00	587.940.760,00	550.981.260,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	432.801.940,00	432.801.940,00	8.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.767.232.080.529,00	2.677.232.080.529,00	2.587.194.740.382,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	2.767.232.080.529,00	2.677.232.080.529,00	2.587.194.740.382,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.699.209.292.117,00	2.609.209.292.117,00	2.518.135.237.025,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.436.883.470,00	4.436.883.470,00	4.436.883.470,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	261.325.652,00	261.325.652,00	261.325.652,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.090.726,00	225.090.726,00	225.090.726,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	362.872.320,00	362.872.320,00	362.872.320,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	358.979.550,00	358.979.550,00	358.979.550,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	179.027.144,00	179.027.144,00	179.027.144,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.423.855.514.286,00	1.333.855.514.286,00	1.245.238.749.622,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	231.853.803,00	231.853.803,00	231.853.803,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.432.451,00	5.432.451,00	5.432.451,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.423.310.496.516,00	1.333.310.496.516,00	1.244.693.731.852,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	307.731.516,00	307.731.516,00	307.731.516,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	776.225.669,00	776.225.669,00	776.225.669,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	30.920.604,00	30.920.604,00	30.920.604,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	159.757.854,00	159.757.854,00	159.757.854,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	127.990.781,00	127.990.781,00	127.990.781,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	411.323.931,00	411.323.931,00	411.323.931,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.537.561,00	12.537.561,00	12.537.561,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.694.938,00	33.694.938,00	33.694.938,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.270.140.668.692,00	1.270.140.668.692,00	1.267.683.378.264,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.195.140.668.692,00	1.195.140.668.692,00	1.192.683.378.264,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.460.387.340,00	7.460.387.340,00	7.460.387.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.460.387.340,00	7.460.387.340,00	7.460.387.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	276.548.175,00	276.548.175,00	276.548.175,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.071.571,00	24.071.571,00	24.071.571,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	125.079.673,00	125.079.673,00	125.079.673,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.381.699,00	30.381.699,00	30.381.699,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	148.539.487,00	148.539.487,00	148.539.487,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.148.610.440,00	1.148.610.440,00	1.148.610.440,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.729.575.194,00	3.729.575.194,00	3.729.575.194,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	698.270.068,00	698.270.068,00	698.270.068,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.150.158,00	27.150.158,00	27.150.158,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.197.143.793,00	1.197.143.793,00	1.197.143.793,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.012.231,00	16.012.231,00	16.012.231,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.437.893,00	26.437.893,00	26.437.893,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12.566.958,00	12.566.958,00	12.566.958,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.562.401.072,00	60.562.401.072,00	61.599.116.017,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.333.756,00	21.333.756,00	21.333.756,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.593.835,00	15.593.835,00	15.593.835,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.015.539,00	1.015.539,00	1.015.539,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.724.382,00	4.724.382,00	4.724.382,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.896.271.869,00	56.896.271.869,00	57.932.986.814,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.833.948.588,00	56.833.948.588,00	57.870.663.533,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.181.770,00	48.181.770,00	48.181.770,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.879.220,00	11.879.220,00	11.879.220,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.262.291,00	2.262.291,00	2.262.291,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.043.417.036,00	2.043.417.036,00	2.043.417.036,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.919.850,00	7.919.850,00	7.919.850,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.292.197.536,00	1.292.197.536,00	1.292.197.536,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.293.029,00	11.293.029,00	11.293.029,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	391.866.691,00	391.866.691,00	391.866.691,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	292.005.002,00	292.005.002,00	292.005.002,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.696.928,00	41.696.928,00	41.696.928,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.438.000,00	6.438.000,00	6.438.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.540.843,00	641.540.843,00	641.540.843,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.620.843,00	23.620.843,00	23.620.843,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.930.000,00	402.930.000,00	402.930.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.990.000,00	214.990.000,00	214.990.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	827.418.120,00	827.418.120,00	827.418.120,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.084.720,00	111.084.720,00	111.084.720,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.983.600,00	405.983.600,00	405.983.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.139.800,00	298.139.800,00	298.139.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	214.381.800.353,00	214.381.800.353,00	198.535.734.284,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12.211.053.913,00	12.211.053.913,00	12.086.418.013,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.211.053.913,00	12.211.053.913,00	12.086.418.013,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	250.291.303,00	250.291.303,00	133.807.903,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	353.064.678,00	353.064.678,00	338.912.178,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	881.052.444,00	881.052.444,00	881.052.444,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	116.919.001,00	116.919.001,00	116.919.001,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.135.084,00	3.135.084,00	3.135.084,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	823.889.925,00	823.889.925,00	823.889.925,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	845.760.417,00	845.760.417,00	851.760.417,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.457.496,00	9.457.496,00	9.457.496,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.014.359.096,00	2.014.359.096,00	2.014.359.096,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	456.747.795,00	456.747.795,00	456.747.795,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2.027.304,00	2.027.304,00	2.027.304,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.170.746.440,00	202.170.746.440,00	186.449.316.271,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.508.404,00	23.508.404,00	23.508.404,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.861.568,00	12.861.568,00	12.861.568,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.271.835,00	4.271.835,00	4.271.835,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.375.001,00	6.375.001,00	6.375.001,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	197.849.641.590,00	197.849.641.590,00	181.626.379.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	197.849.641.590,00	197.849.641.590,00	181.626.379.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	775.854.630,00	775.854.630,00	743.376.030,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.397.810,00	14.397.810,00	14.397.810,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.409.887,00	36.409.887,00	36.409.887,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.255.473,00	550.255.473,00	550.255.473,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.943.060,00	107.943.060,00	75.464.460,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.848.400,00	66.848.400,00	66.848.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.754.350.116,00	1.754.350.116,00	2.275.152.237,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	468.340.080,00	468.340.080,00	472.613.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.153.590.588,00	1.153.590.588,00	1.670.119.209,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.046.600,00	183.046.600,00	183.046.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.620.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.426.600,00	168.426.600,00	168.426.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.345.100,00	1.584.345.100,00	1.597.853.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.764.500,00	59.764.500,00	59.764.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	856.182.300,00	856.182.300,00	856.182.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	545.598.300,00	545.598.300,00	545.598.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.800.000,00	122.800.000,00	136.308.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.829.118.995,00	49.829.118.995,00	49.828.740.587,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	31.919.244.239,00	31.919.244.239,00	31.918.865.831,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.693.569.620,00	2.693.569.620,00	2.693.569.620,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	576.844.158,00	576.844.158,00	576.844.158,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	11.116.900,00	11.116.900,00	11.116.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	343.197.748,00	343.197.748,00	343.197.748,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.246.202,00	13.246.202,00	13.246.202,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	28.492.008,00	28.492.008,00	28.492.008,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.791.300,00	180.791.300,00	180.791.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	279.108.974,00	279.108.974,00	279.108.974,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.403.636,00	4.403.636,00	4.403.636,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	196.205.089,00	196.205.089,00	196.205.089,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	78.500.249,00	78.500.249,00	78.500.249,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.178.047.300,00	1.178.047.300,00	1.178.047.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	1.123.590.000,00	1.123.590.000,00	1.123.590.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	10.081.100,00	10.081.100,00	10.081.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	17.131.700,00	17.131.700,00	17.131.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	14.188.300,00	14.188.300,00	14.188.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	9.061.700,00	9.061.700,00	9.061.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	659.569.188,00	659.569.188,00	659.569.188,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.569.361,00	14.569.361,00	14.569.361,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.569.361,00	8.569.361,00	8.569.361,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.200.936,00	3.200.936,00	3.200.936,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	624.236.630,00	624.236.630,00	624.236.630,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	7.376.500,00	7.376.500,00	7.376.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.616.400,00	1.616.400,00	1.616.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.225.674.619,00	29.225.674.619,00	29.225.296.211,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.506.822,00	26.506.822,00	26.506.822,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.044.130,00	13.044.130,00	13.044.130,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.462.692,00	13.462.692,00	13.462.692,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.377.057.999,00	27.377.057.999,00	27.377.057.999,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.367.057.999,00	27.367.057.999,00	27.367.057.999,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.337.150,00	272.337.150,00	272.337.150,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.091.750,00	25.091.750,00	25.091.750,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.254.000,00	152.254.000,00	152.254.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.536.600,00	37.536.600,00	37.536.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.454.800,00	57.454.800,00	57.454.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.027.307.948,00	1.027.307.948,00	1.026.929.540,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.419.448,00	132.419.448,00	132.419.448,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	894.888.500,00	894.888.500,00	894.510.092,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.779.500,00	67.779.500,00	67.779.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.379.500,00	47.379.500,00	47.379.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.685.200,00	454.685.200,00	454.685.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.975.200,00	90.975.200,00	90.975.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.580.000,00	266.580.000,00	266.580.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.970.000,00	61.970.000,00	61.970.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.600.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17.909.874.756,00	17.909.874.756,00	17.909.874.756,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.909.874.756,00	17.909.874.756,00	17.909.874.756,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	10.888.094.756,00	10.888.094.756,00	10.888.094.756,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	56.021.460,00	56.021.460,00	56.021.460,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	10.832.073.296,00	10.832.073.296,00	10.832.073.296,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7.021.780.000,00	7.021.780.000,00	7.021.780.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	502.595.000,00	502.595.000,00	502.595.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	15.529.100,00	15.529.100,00	15.529.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.503.655.900,00	6.503.655.900,00	6.503.655.900,00
5.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.659.187.798,00	25.659.187.798,00	25.659.187.798,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.659.187.798,00	25.659.187.798,00	25.659.187.798,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.913.158.621,00	8.913.158.621,00	8.913.158.621,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.043.234.952,00	2.043.234.952,00	2.043.234.952,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	24.538.512,00	24.538.512,00	24.538.512,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.693.196.020,00	1.693.196.020,00	1.693.196.020,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	325.500.420,00	325.500.420,00	325.500.420,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.284.475.671,00	1.284.475.671,00	1.284.475.671,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	524.731.100,00	524.731.100,00	524.731.100,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.080.697,00	82.080.697,00	82.080.697,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	213.688.800,00	213.688.800,00	213.688.800,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	230.950.242,00	230.950.242,00	230.950.242,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	233.024.832,00	233.024.832,00	233.024.832,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.576.330.781,00	1.576.330.781,00	1.576.330.781,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	315.943.455,00	315.943.455,00	315.943.455,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	240.208.900,00	240.208.900,00	240.208.900,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	207.851.355,00	207.851.355,00	207.851.355,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	237.818.165,00	237.818.165,00	237.818.165,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	335.078.106,00	335.078.106,00	335.078.106,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	239.430.800,00	239.430.800,00	239.430.800,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.009.117.217,00	4.009.117.217,00	4.009.117.217,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	579.426.240,00	579.426.240,00	579.426.240,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1.151.413.687,00	1.151.413.687,00	1.151.413.687,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.945.046.605,00	1.945.046.605,00	1.945.046.605,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	134.213.825,00	134.213.825,00	134.213.825,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	199.016.860,00	199.016.860,00	199.016.860,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.746.029.177,00	16.746.029.177,00	16.746.029.177,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.849.460.229,00	14.849.460.229,00	14.849.460.229,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.315.636,00	14.315.636,00	14.315.636,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.303.782,00	335.303.782,00	335.303.782,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.377.700,00	7.377.700,00	7.377.700,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.195.855,00	285.195.855,00	285.195.855,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.730.227,00	42.730.227,00	42.730.227,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	734.473.660,00	734.473.660,00	734.473.660,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.735.587,00	534.735.587,00	534.735.587,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.738.073,00	199.738.073,00	199.738.073,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.735.620,00	144.735.620,00	144.735.620,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.314.804,00	42.314.804,00	42.314.804,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.519.400,00	14.519.400,00	14.519.400,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.901.416,00	87.901.416,00	87.901.416,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.641.319,00	663.641.319,00	663.641.319,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.479.376,00	455.479.376,00	455.479.376,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.118.031,00	45.118.031,00	45.118.031,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	72.069.192,00	72.069.192,00	72.069.192,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	47.926.810.947,00	47.926.810.947,00	49.467.854.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	47.926.810.947,00	47.926.810.947,00	49.467.854.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	47.926.810.947,00	47.926.810.947,00	49.467.854.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.699.647.890,00	1.699.647.890,00	1.699.647.890,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	474.179.432,00	474.179.432,00	474.179.432,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	208.610.968,00	208.610.968,00	208.610.968,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110.385.063,00	110.385.063,00	110.385.063,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	81.753.589,00	81.753.589,00	81.753.589,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	15.250.432,00	15.250.432,00	15.250.432,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	52.195.658,00	52.195.658,00	52.195.658,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5.983.722,00	5.983.722,00	5.983.722,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.225.468.458,00	1.225.468.458,00	1.225.468.458,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.225.468.458,00	1.225.468.458,00	1.225.468.458,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.254.457.254,00	7.254.457.254,00	8.795.501.254,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	7.254.457.254,00	7.254.457.254,00	8.795.501.254,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	882.098.421,00	882.098.421,00	882.098.421,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.207.553,00	2.207.553,00	2.207.553,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5.979.455.621,00	5.979.455.621,00	7.520.499.621,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	390.695.659,00	390.695.659,00	390.695.659,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.972.705.803,00	38.972.705.803,00	38.972.705.803,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.172.518,00	14.172.518,00	14.172.518,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.039.042,00	9.039.042,00	9.039.042,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.133.476,00	5.133.476,00	5.133.476,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.642.044.345,00	33.642.044.345,00	33.642.044.345,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.642.044.345,00	33.642.044.345,00	33.642.044.345,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.823.165,00	295.823.165,00	295.823.165,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.215.040,00	10.215.040,00	10.215.040,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.825.580,00	190.825.580,00	190.825.580,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.039.345,00	53.039.345,00	53.039.345,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.743.200,00	41.743.200,00	41.743.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.447.243.433,00	4.447.243.433,00	4.447.243.433,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.629.172,00	198.629.172,00	198.629.172,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.742.689,00	900.742.689,00	900.742.689,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.587.342,00	95.587.342,00	95.587.342,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.632.708,00	22.632.708,00	22.632.708,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.954.634,00	45.954.634,00	45.954.634,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.835.000,00	477.835.000,00	477.835.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.970.000,00	73.970.000,00	73.970.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.890.000,00	360.890.000,00	360.890.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.870.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Petang	15.128.817.761,00	15.128.817.761,00	15.126.619.961,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	15.128.817.761,00	15.128.817.761,00	15.126.619.961,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	15.128.817.761,00	15.128.817.761,00	15.126.619.961,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	695.056.596,00	695.056.596,00	695.056.596,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.857.500,00	8.857.500,00	8.857.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.857.500,00	8.857.500,00	8.857.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	686.199.096,00	686.199.096,00	686.199.096,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.835.600,00	1.835.600,00	1.835.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	684.363.496,00	684.363.496,00	684.363.496,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.897.382.879,00	2.897.382.879,00	2.897.382.879,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.886.734.379,00	2.886.734.379,00	2.886.734.379,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.141.133,00	31.141.133,00	31.141.133,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50.638.200,00	50.638.200,00	50.638.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.804.955.046,00	2.804.955.046,00	2.804.955.046,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.648.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.648.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.125.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.125.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.125.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	339.175.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	339.175.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	301.862.468,00	301.862.468,00	301.862.468,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.312.800,00	37.312.800,00	37.312.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.823.500,00	55.823.500,00	55.823.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.823.500,00	55.823.500,00	55.823.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.116.100,00	29.116.100,00	29.116.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.707.400,00	26.707.400,00	26.707.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.063.254.218,00	11.063.254.218,00	11.061.056.418,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.476.900,00	20.476.900,00	20.476.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.555.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.921.200,00	8.921.200,00	8.921.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.227.044.092,00	8.227.044.092,00	8.227.044.092,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.227.044.092,00	8.227.044.092,00	8.227.044.092,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.797.900,00	411.797.900,00	411.797.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.734.200,00	347.734.200,00	347.734.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.316.900,00	21.316.900,00	21.316.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.636.800,00	40.636.800,00	40.636.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	818.059.266,00	818.059.266,00	818.059.266,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.417.112,00	614.417.112,00	614.417.112,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.576.635,00	10.576.635,00	10.576.635,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.315.519,00	165.315.519,00	165.315.519,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.699.760,00	1.103.699.760,00	1.103.699.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.057.760,00	21.057.760,00	21.057.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.270.000,00	79.270.000,00	79.270.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.372.000,00	1.003.372.000,00	1.003.372.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.176.300,00	482.176.300,00	479.978.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.314.300,00	404.314.300,00	402.116.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.870.000,00	23.870.000,00	23.870.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.992.000,00	53.992.000,00	53.992.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Abiansemai	20.841.569.339,00	20.841.569.339,00	20.841.557.499,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	590.948.016,00	590.948.016,00	590.937.656,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.338.700,00	12.338.700,00	12.338.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.338.700,00	12.338.700,00	12.338.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	578.609.316,00	578.609.316,00	578.598.956,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.624.900,00	1.624.900,00	1.281.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	576.984.416,00	576.984.416,00	577.317.056,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.798.671.600,00	3.798.671.600,00	3.798.671.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.781.431.000,00	3.781.431.000,00	3.781.431.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.951.900,00	32.951.900,00	32.951.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	55.582.900,00	55.582.900,00	55.582.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.692.896.200,00	3.692.896.200,00	3.692.896.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.240.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17.240.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.562.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27.562.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.562.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	443.114.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	443.114.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	375.624.377,00	375.624.377,00	375.624.377,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.490.600,00	67.490.600,00	67.490.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.729.000,00	109.729.000,00	109.729.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.729.000,00	109.729.000,00	109.729.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26.656.700,00	26.656.700,00	26.656.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	83.072.300,00	83.072.300,00	83.072.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.871.543.246,00	15.871.543.246,00	15.871.541.766,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.505.200,00	13.505.200,00	13.505.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.930.900,00	7.930.900,00	7.930.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.574.300,00	5.574.300,00	5.574.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.585.628,00	445.585.628,00	445.585.628,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	768.000,00	768.000,00	768.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.544.028,00	389.544.028,00	389.544.028,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.613.600,00	21.613.600,00	21.613.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.162.859.946,00	1.162.859.946,00	1.162.859.946,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	657.001.452,00	657.001.452,00	657.001.452,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	272.888.616,00	272.888.616,00	272.888.616,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.474.265,00	11.474.265,00	11.474.265,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.495.613,00	221.495.613,00	221.495.613,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.201.385,00	575.201.385,00	575.199.905,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.240.073,00	27.240.073,00	27.240.073,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.272.040,00	90.272.040,00	90.272.040,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.689.272,00	457.689.272,00	457.687.792,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.031.520,00	655.031.520,00	655.031.520,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.154.020,00	398.154.020,00	398.154.020,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.677.500,00	35.677.500,00	35.677.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Mengwi	54.242.171.018,00	54.242.171.018,00	53.667.434.158,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.675.780.314,00	6.675.780.314,00	6.675.780.314,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.667.576.878,00	6.667.576.878,00	6.667.576.878,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.667.576.878,00	6.667.576.878,00	6.667.576.878,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.365.995.235,00	3.365.995.235,00	3.222.203.875,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.356.225.835,00	3.356.225.835,00	3.212.434.475,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.273.132,00	37.273.132,00	37.273.132,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	54.049.183,00	54.049.183,00	54.049.183,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.264.903.520,00	3.264.903.520,00	3.121.112.160,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.156.600,00	67.156.600,00	67.156.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	67.156.600,00	67.156.600,00	67.156.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	67.156.600,00	67.156.600,00	67.156.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	543.985.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	543.985.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	476.448.081,00	476.448.081,00	476.448.081,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.537.500,00	67.537.500,00	67.537.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	360.291.836,00	360.291.836,00	360.291.836,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	360.291.836,00	360.291.836,00	360.291.836,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	305.679.736,00	305.679.736,00	305.679.736,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	54.612.100,00	54.612.100,00	54.612.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.228.961.452,00	43.228.961.452,00	42.798.015.952,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.813.788,00	14.813.788,00	14.813.788,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.070.484,00	9.070.484,00	9.070.484,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.743.304,00	5.743.304,00	5.743.304,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.283.102,00	1.149.283.102,00	1.149.283.102,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.609.040,00	17.609.040,00	17.609.040,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.023.381.287,00	1.023.381.287,00	1.023.381.287,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.006.135,00	35.006.135,00	35.006.135,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.286.640,00	73.286.640,00	73.286.640,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.873.848.369,00	11.873.848.369,00	11.442.902.869,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.984.936.962,00	4.984.936.962,00	4.585.359.162,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.736.158.111,00	1.736.158.111,00	1.736.158.111,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.967.596.653,00	3.967.596.653,00	3.936.228.953,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.185.156.643,00	1.185.156.643,00	1.185.156.643,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.078.066.913,00	3.078.066.913,00	3.078.066.913,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.617.949,00	70.617.949,00	70.617.949,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.994.600,00	644.994.600,00	644.994.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.362.454.364,00	2.362.454.364,00	2.362.454.364,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.036.423.917,00	2.036.423.917,00	2.036.423.917,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	619.993.364,00	619.993.364,00	619.993.364,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.292.500,00	49.292.500,00	49.292.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.367.138.053,00	1.367.138.053,00	1.367.138.053,00
7.01.0.00.0.00.03.1001						Kelurahan Kapal	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00	10.414.859.726,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00	10.414.859.726,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.415.868.726,00	10.415.868.726,00	10.414.859.726,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.366.700,00	13.366.700,00	13.366.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.926.897.522,00	4.926.897.522,00	4.926.897.522,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.475.604.504,00	5.475.604.504,00	5.474.595.504,00
7.01.0.00.0.00.03.1002						Kelurahan Sempidi	2.470.297.518,00	2.470.297.518,00	2.470.297.518,00
7.01.0.00.0.00.03.1002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.196.500,00	13.196.500,00	13.196.500,00
7.01.0.00.0.00.03.1002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	652.454.485,00	652.454.485,00	652.454.485,00
7.01.0.00.0.00.03.1002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.804.646.533,00	1.804.646.533,00	1.804.646.533,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.1003						Kelurahan Abianbase	2.571.244.454,00	2.571.244.454,00	2.571.244.454,00
7.01.0.00.0.00.03.1003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.566.700,00	10.566.700,00	10.566.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.560.677.754,00	2.560.677.754,00	2.560.677.754,00
7.01.0.00.0.00.03.1004						Kelurahan Sading	2.365.632.234,00	2.365.632.234,00	2.365.632.234,00
7.01.0.00.0.00.03.1004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.116.700,00	11.116.700,00	11.116.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	98.578.500,00	98.578.500,00	98.578.500,00
7.01.0.00.0.00.03.1004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.255.937.034,00	2.255.937.034,00	2.255.937.034,00
7.01.0.00.0.00.03.1005						Kelurahan Lukluk	1.304.235.777,00	1.304.235.777,00	1.299.979.377,00
7.01.0.00.0.00.03.1005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.116.700,00	10.116.700,00	10.116.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.294.119.077,00	1.294.119.077,00	1.289.862.677,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Kuta Utara	37.531.379.503,00	37.531.379.503,00	37.460.056.053,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.085.764.907,00	6.085.764.907,00	6.085.764.907,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.127.500,00	22.127.500,00	22.127.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.127.500,00	22.127.500,00	22.127.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	735.217.614,00	735.217.614,00	735.217.614,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	735.217.614,00	735.217.614,00	735.217.614,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.328.419.793,00	5.328.419.793,00	5.328.419.793,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.328.419.793,00	5.328.419.793,00	5.328.419.793,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.308.870.740,00	3.308.870.740,00	3.350.094.740,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.298.404.909,00	3.298.404.909,00	3.339.628.909,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.473.818,00	47.473.818,00	47.473.818,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	47.080.958,00	47.080.958,00	47.080.958,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.203.850.133,00	3.203.850.133,00	3.245.074.133,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.465.831,00	10.465.831,00	10.465.831,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.465.831,00	10.465.831,00	10.465.831,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.871.942,00	71.871.942,00	71.871.942,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	71.871.942,00	71.871.942,00	71.871.942,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	71.871.942,00	71.871.942,00	71.871.942,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	477.671.581,00	477.671.581,00	477.671.581,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	477.671.581,00	477.671.581,00	477.671.581,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420.523.066,00	420.523.066,00	420.523.066,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	57.148.515,00	57.148.515,00	57.148.515,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	838.647.150,00	838.647.150,00	838.647.150,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	838.647.150,00	838.647.150,00	838.647.150,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	801.928.050,00	801.928.050,00	801.928.050,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.160.800,00	13.160.800,00	13.160.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.558.300,00	23.558.300,00	23.558.300,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.748.553.183,00	26.748.553.183,00	26.636.005.733,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.905.553,00	150.905.553,00	150.905.553,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.002.555,00	141.002.555,00	141.002.555,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.902.998,00	9.902.998,00	9.902.998,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.106.441.036,00	18.106.441.036,00	18.106.441.036,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.106.441.036,00	18.106.441.036,00	18.106.441.036,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	856.742.586,00	856.742.586,00	846.642.586,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.721.600,00	11.721.600,00	11.721.600,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746.539.500,00	746.539.500,00	736.439.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.295.886,00	40.295.886,00	40.295.886,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.185.600,00	58.185.600,00	58.185.600,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.432.578.484,00	5.432.578.484,00	5.448.457.034,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.639.275.082,00	3.639.275.082,00	3.639.275.082,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	375.671.453,00	375.671.453,00	421.520.003,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.417.631.949,00	1.417.631.949,00	1.387.661.949,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.249.744.770,00	1.249.744.770,00	1.249.744.770,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.480.955,00	61.480.955,00	61.480.955,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	423.886.500,00	423.886.500,00	423.886.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.377.315,00	764.377.315,00	764.377.315,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	952.140.754,00	952.140.754,00	833.814.754,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.425.320,00	124.425.320,00	124.425.320,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	445.682.072,00	445.682.072,00	445.682.072,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.700.212,00	87.700.212,00	87.700.212,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	294.333.150,00	294.333.150,00	176.007.150,00
7.01.0.00.0.00.04.1001						Kelurahan Kerobokan Kelod	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.919.744,00	6.919.744,00	6.919.744,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	344.918.625,00	344.918.625,00	344.918.625,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.235.826.707,00	1.235.826.707,00	1.235.826.707,00
7.01.0.00.0.00.04.1002						Kelurahan Kerobokan Kaja	1.349.472.127,00	1.349.472.127,00	1.349.472.127,00
7.01.0.00.0.00.04.1002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.722.139,00	6.722.139,00	6.722.139,00
7.01.0.00.0.00.04.1002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	498.479.915,00	498.479.915,00	498.479.915,00
7.01.0.00.0.00.04.1002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	844.270.073,00	844.270.073,00	844.270.073,00
7.01.0.00.0.00.04.1003						Kelurahan Kerobokan	1.810.138.638,00	1.810.138.638,00	1.810.138.638,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.434.768,00	6.434.768,00	6.434.768,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	459.391.815,00	459.391.815,00	459.391.815,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.344.312.055,00	1.344.312.055,00	1.344.312.055,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Kuta	46.208.097.310,00	46.208.097.310,00	46.211.057.310,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.694.123.261,00	4.694.123.261,00	4.694.123.261,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.466.352,00	70.466.352,00	70.466.352,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.557.681.609,00	3.557.681.609,00	3.557.681.609,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.557.681.609,00	3.557.681.609,00	3.557.681.609,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.084.531.560,00	4.084.531.560,00	4.087.491.560,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.850.719.960,00	2.850.719.960,00	2.853.679.960,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.456.700,00	23.456.700,00	23.456.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23.636.000,00	23.636.000,00	23.636.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.803.627.260,00	2.803.627.260,00	2.806.587.260,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.308.100,00	20.308.100,00	20.308.100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.308.100,00	20.308.100,00	20.308.100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98.906.400,00	98.906.400,00	98.906.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98.906.400,00	98.906.400,00	98.906.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98.906.400,00	98.906.400,00	98.906.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	274.272.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	274.272.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	219.961.400,00	219.961.400,00	219.961.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.311.200,00	54.311.200,00	54.311.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.056.263.489,00	37.056.263.489,00	37.056.263.489,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.384.000,00	13.384.000,00	13.384.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.403.800,00	7.403.800,00	7.403.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.980.200,00	5.980.200,00	5.980.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.257.455.800,00	1.257.455.800,00	1.257.455.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.852.500,00	19.852.500,00	19.852.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.036.603.400,00	1.036.603.400,00	1.036.603.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.934.700,00	54.934.700,00	54.934.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.031.200,00	108.031.200,00	108.031.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.034.000,00	38.034.000,00	38.034.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.949.755.417,00	9.949.755.417,00	9.949.755.417,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.137.848.733,00	5.137.848.733,00	5.137.848.733,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.307.746.500,00	1.307.746.500,00	1.307.746.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.004.660.184,00	3.004.660.184,00	3.004.660.184,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.500.000,00	499.500.000,00	499.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.881.716,00	1.960.881.716,00	1.960.881.716,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.053.600,00	109.053.600,00	109.053.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	465.378.900,00	465.378.900,00	465.378.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.386.449.216,00	1.386.449.216,00	1.386.449.216,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.178.068.789,00	5.178.068.789,00	5.178.068.789,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.377.200,00	122.377.200,00	122.377.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	874.502.296,00	874.502.296,00	874.502.296,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.764.400,00	262.764.400,00	262.764.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.918.424.893,00	3.918.424.893,00	3.918.424.893,00
7.01.0.00.0.00.05.1001						Kelurahan Tuban	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00	1.559.197.430,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	285.874.000,00	285.874.000,00	285.874.000,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.266.457.630,00	1.266.457.630,00	1.266.457.630,00
7.01.0.00.0.00.05.1002						Kelurahan Kuta	2.878.891.600,00	2.878.891.600,00	2.878.891.600,00
7.01.0.00.0.00.05.1002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	968.296.900,00	968.296.900,00	968.296.900,00
7.01.0.00.0.00.05.1002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.903.728.900,00	1.903.728.900,00	1.903.728.900,00
7.01.0.00.0.00.05.1003						Kelurahan Kedonganan	2.591.344.030,00	2.591.344.030,00	2.591.344.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	640.348.200,00	640.348.200,00	640.348.200,00
7.01.0.00.0.00.05.1003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.944.130.030,00	1.944.130.030,00	1.944.130.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1004						Kelurahan Legian	2.213.476.930,00	2.213.476.930,00	2.213.476.930,00
7.01.0.00.0.00.05.1004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	743.794.100,00	743.794.100,00	743.794.100,00
7.01.0.00.0.00.05.1004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.462.817.030,00	1.462.817.030,00	1.462.817.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1005						Kelurahan Seminyak	319.889.700,00	319.889.700,00	319.889.700,00
7.01.0.00.0.00.05.1005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.865.800,00	6.865.800,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	48.532.700,00	48.532.700,00	48.532.700,00
7.01.0.00.0.00.05.1005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	264.491.200,00	264.491.200,00	264.491.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Kuta Selatan	38.647.486.889,00	38.647.486.889,00	38.570.608.889,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.649.613.679,00	5.649.613.679,00	5.658.925.679,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	11.132.100,00	11.132.100,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	11.132.100,00	11.132.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	633.276.527,00	633.276.527,00	633.276.527,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	633.276.527,00	633.276.527,00	633.276.527,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.005.205.052,00	5.005.205.052,00	5.014.517.052,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.005.205.052,00	5.005.205.052,00	5.014.517.052,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.420.213.011,00	6.420.213.011,00	6.420.213.011,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.466.931.311,00	5.466.931.311,00	5.466.931.311,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.438.775,00	35.438.775,00	35.438.775,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	999.400,00	999.400,00	999.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.430.493.136,00	5.430.493.136,00	5.430.493.136,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	953.281.700,00	953.281.700,00	953.281.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	953.281.700,00	953.281.700,00	953.281.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	419.756.480,00	419.756.480,00	419.756.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	419.756.480,00	419.756.480,00	419.756.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	419.756.480,00	419.756.480,00	419.756.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	376.335.010,00	376.335.010,00	376.335.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	376.335.010,00	376.335.010,00	376.335.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	308.761.010,00	308.761.010,00	308.761.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.574.000,00	67.574.000,00	67.574.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	874.429.939,00	874.429.939,00	867.229.939,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	874.429.939,00	874.429.939,00	867.229.939,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	843.685.639,00	843.685.639,00	836.485.639,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.014.700,00	7.014.700,00	7.014.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.729.600,00	23.729.600,00	23.729.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.907.138.770,00	24.907.138.770,00	24.828.148.770,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	662.484.300,00	662.484.300,00	662.484.300,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.393.800,00	10.393.800,00	10.393.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	652.090.500,00	652.090.500,00	652.090.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.247.378.222,00	14.247.378.222,00	14.247.378.222,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.247.378.222,00	14.247.378.222,00	14.247.378.222,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.268.255,00	1.132.268.255,00	1.132.268.255,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.906.400,00	14.906.400,00	14.906.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	874.773.855,00	874.773.855,00	874.773.855,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.339.000,00	72.339.000,00	72.339.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.808.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.441.000,00	98.441.000,00	98.441.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.189.215.928,00	5.189.215.928,00	5.189.215.928,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.449.094.814,00	2.449.094.814,00	2.449.094.814,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	914.403.237,00	914.403.237,00	914.403.237,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.625.717.877,00	1.625.717.877,00	1.625.717.877,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.703.300,00	1.460.703.300,00	1.460.703.300,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.107.088,00	83.107.088,00	83.107.088,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	516.708.100,00	516.708.100,00	516.708.100,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	860.888.112,00	860.888.112,00	860.888.112,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.215.088.765,00	2.215.088.765,00	2.136.098.765,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.374.320,00	121.374.320,00	121.374.320,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	762.648.700,00	762.648.700,00	683.658.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.170.600,00	90.170.600,00	90.170.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.240.895.145,00	1.240.895.145,00	1.240.895.145,00
7.01.0.00.0.00.06.1004						Kelurahan Benoa	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.596.050,00	4.596.050,00	4.596.050,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	306.523.000,00	306.523.000,00	306.523.000,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.266.135.782,00	1.266.135.782,00	1.266.135.782,00
7.01.0.00.0.00.06.1005						Kelurahan Tanjung Benoa	2.575.951.237,00	2.575.951.237,00	2.575.951.237,00
7.01.0.00.0.00.06.1005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.596.050,00	4.596.050,00	4.596.050,00
7.01.0.00.0.00.06.1005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.036.628.000,00	2.036.628.000,00	2.036.628.000,00
7.01.0.00.0.00.06.1005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	534.727.187,00	534.727.187,00	534.727.187,00
7.01.0.00.0.00.06.1006						Kelurahan Jimbaran	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00
7.01.0.00.0.00.06.1006	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.596.050,00	4.596.050,00	4.596.050,00
7.01.0.00.0.00.06.1006	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	191.489.400,00	191.489.400,00	191.489.400,00
7.01.0.00.0.00.06.1006	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.541.784.260,00	78.897.184.260,00	65.961.954.460,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	77.541.784.260,00	78.897.184.260,00	65.961.954.460,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.541.784.260,00	78.897.184.260,00	65.961.954.460,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.546.906.550,00	4.546.906.550,00	4.546.906.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.546.906.550,00	4.546.906.550,00	4.546.906.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	149.913.250,00	149.913.250,00	149.913.250,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.084.527.900,00	1.084.527.900,00	1.084.527.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.998.300,00	2.998.300,00	2.998.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	3.309.467.100,00	3.309.467.100,00	3.309.467.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	20.739.778.600,00	20.739.778.600,00	20.741.273.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	20.739.778.600,00	20.739.778.600,00	20.741.273.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.740.831.100,00	19.740.831.100,00	19.742.325.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	966.268.000,00	966.268.000,00	966.268.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.679.500,00	32.679.500,00	32.679.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.726.433.200,00	5.081.833.200,00	5.025.586.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.726.433.200,00	5.081.833.200,00	5.025.586.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.713.886.600,00	5.069.286.600,00	5.013.039.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.546.600,00	12.546.600,00	12.546.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.774.330.000,00	2.774.330.000,00	3.474.330.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.774.330.000,00	2.774.330.000,00	3.474.330.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.372.559.400,00	2.372.559.400,00	3.072.559.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	401.770.600,00	401.770.600,00	401.770.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	29.429.710.298,00	29.429.710.298,00	15.849.232.898,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	29.429.710.298,00	29.429.710.298,00	15.849.232.898,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	449.800.500,00	449.800.500,00	451.336.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	28.979.909.798,00	28.979.909.798,00	15.397.896.698,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.324.625.612,00	16.324.625.612,00	16.324.625.612,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.710.200,00	9.710.200,00	9.710.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.643.800,00	5.643.800,00	5.643.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.066.400,00	4.066.400,00	4.066.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.749.995.756,00	13.749.995.756,00	13.749.995.756,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.749.995.756,00	13.749.995.756,00	13.749.995.756,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.415.000,00	209.415.000,00	210.819.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.453.200,00	33.453.200,00	33.453.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	544.200,00	544.200,00	544.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.433.800,00	126.433.800,00	126.433.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.858.800,00	24.858.800,00	26.262.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.560.139.310,00	1.560.139.310,00	1.560.139.310,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.524.310,00	165.524.310,00	165.524.310,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	658.300.000,00	658.300.000,00	658.300.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	736.315.000,00	736.315.000,00	736.315.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.019.400,00	41.019.400,00	39.615.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.517.900,00	39.517.900,00	38.113.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.501.500,00	1.501.500,00	1.501.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.345.946,00	754.345.946,00	754.345.946,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.462.100,00	467.462.100,00	467.462.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.510.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	267.373.846,00	267.373.846,00	267.373.846,00
TOTAL							12.238.243.162.179,00	12.133.944.907.797,00	12.093.607.564.292,00

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



 I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM

PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.759.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.759.415,00	0,00
2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.853.500,00	0,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.941.449.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941.449.358,00	0,00
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.017.232,00	0,00
5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	38.237.407.650,00	0,00	28.451.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265.859.059,00	0,00
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	827.649.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.649.100,00	0,00
7	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.001.814.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.814.800,00	0,00
8	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Abiansemal	109.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.729.000,00	0,00
9	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	1.525.481.706,00	0,00	119.018.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.500.000,00	0,00
10	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah	208.554.096.611,00	0,00	1.036.567.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.590.663.784,00	0,00
11	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	5.256.046.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.046.577,00	0,00
12	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mengwi	87.355.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.355.672,00	0,00
13	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	11.520.385.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.385.440,00	0,00
14	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.201.483.603,00	0,00	587.665.589.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.867.072.803,00	0,00
15	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.841.280,00	0,00
16	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.620.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.620.560,00	0,00
17	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	9.303.400,00	0,00	73.688.741.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698.044.912,00	0,00
18	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	6.412.732.488,00	0,00	552.737.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965.470.026,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
19	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.752.004.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752.004.055,00	0,00
20	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.715.189.125,00	0,00	25.997.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.186.657,00	0,00
21	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91.209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.209.200,00	0,00
22	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Petang	2.191.587.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.587.583,00	0,00
23	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.823.700,00	0,00
24	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.400,00	0,00
25	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	211.431.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.431.489,00	0,00
26	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.758.083.085,00	0,00	73.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.698.285,00	0,00
27	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	58.730.092.738,00	0,00	320.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.050.537.738,00	0,00
28	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.006.100,00	0,00
30	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	6.680.531.046,00	0,00	255.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.831.046,00	0,00
31	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.927.031,00	0,00
32	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.137.624.213,00	0,00	417.053.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.677.669,00	0,00
33	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mengwi	30.345.697.789,00	0,00	12.334.977.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.680.675.784,00	0,00
34	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.395.882,00	0,00
35	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	7.145.513.660,00	0,00	7.130.487.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276.001.248,00	0,00
36	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Petang	29.116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.116.100,00	0,00
37	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	428.434.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.434.700,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
38	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	62.973.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.973.200,00	0,00
39	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta II	634.103.000,00	0,00	62.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000.000,00	0,00
40	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	520.779.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.779.218,00	0,00
41	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD. Puskesmas Kuta I	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,00
42	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Petang	78.125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.125.300,00	0,00
43	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta Selatan	2.940.202.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.202.961,00	0,00
44	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD. Puskesmas Abiansemai II	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
45	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	33.303.823.108,00	0,00	20.262.390.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.566.213.388,00	0,00
46	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	46.866.639.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.866.639.029,00	0,00
47	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mengwi	2.327.043.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.043.625,00	0,00
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.502.324,00	0,00
49	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan	5.474.656.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474.656.720,00	0,00
50	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.960.024.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.024.873,00	0,00
51	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	906.948.846,00	0,00	0,00	0,00	72.086.033.246,00	0,00	0,00	0,00	72.992.982.092,00	0,00
52	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Jimbaran	1.281.340.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.340.210,00	0,00
53	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.239.200,00	0,00
54	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	21.302.772.535,00	0,00	6.245.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548.249.535,00	0,00
55	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.996.200,00	0,00	150.798.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.852.996.200,00	0,00
56	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.582.255.359,00	0,00	1.485.516.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.771.482,00	0,00
57	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.901.330,00	0,00
59	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	232.502.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.502.520,00	0,00
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	513.066.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.066.700,00	0,00
61	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	567.761.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.761.104,00	0,00
62	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	249.936.948.466,00	0,00	49.610.861.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.547.809.666,00	0,00
63	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	469.410.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.410.800,00	0,00
64	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Petang	339.175.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.175.268,00	0,00
65	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.577.817.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.817.860,00	0,00
66	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan	1.156.500,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.156.500,00	0,00
67	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.931.540,00	0,00
68	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.078.829.422,00	0,00	190.323.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269.152.464,00	0,00
69	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.786.720,00	0,00
70	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.003.341.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003.341.585,00	0,00
71	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.112.001.916,00	0,00	891.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.393.516,00	0,00
72	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.775.528.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.528.715,00	0,00
73	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.031.239.261,00	0,00	5.029.546.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.785.961,00	0,00
74	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	996.128.375,00	0,00	134.074.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.202.921,00	0,00
75	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	287.465.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.465.304,00	0,00
76	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.972.830.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.830.494,00	0,00
77	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kuta Selatan	407.066.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.066.991,00	0,00
78	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Abiansemal	14.659.205.300,00	0,00	284.362.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943.568.181,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
79	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.758.985.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.985.777,00	0,00
80	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.488.369,00	0,00
81	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00	0,00
82	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Mengwi I	1.956.645.670,00	0,00	343.028.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.674.000,00	0,00
83	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	812.909.411,00	0,00	87.090.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00
84	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.254.900,00	0,00
85	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.940,00	0,00
86	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.172.902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172.902.800,00	0,00
87	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	46.843.823.468,00	0,00	304.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.148.707.968,00	0,00
88	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.234.848.832,00	0,00	14.914.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.249.763.125,00	0,00
89	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Benoa	1.221.124.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.124.108,00	0,00
90	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646.518.632,00	0,00
91	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.466.095.974,00	0,00	173.490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.586.374,00	0,00
92	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.261.614,00	0,00
93	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	36.055.644.197,00	0,00	14.386.725.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442.369.486,00	0,00
94	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	509.405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.405.600,00	0,00
95	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.135.010,00	0,00
96	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Benoa	1.985.340.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.340.101,00	0,00
97	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.873.463.554,00	0,00	3.845.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.309.482,00	0,00
98	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.283.533,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
99	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Abiansemal	590.948.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.948.016,00	0,00
100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.591.946.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.946.191,00	0,00
101	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	34.619.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619.087,00	0,00
102	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	22.640.221.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640.221.377,00	0,00
103	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.066.469.300,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316.469.300,00	0,00
104	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.750.820,00	0,00
105	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.478.836.799,00	0,00	265.803.032.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.281.868.880,00	0,00
106	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	8.439.011.700,00	0,00	2.092.514.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531.525.977,00	0,00
107	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.174.636.097,00	0,00	252.677.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.313.359,00	0,00
108	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	694.251.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.251.816,00	0,00
109	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	167.254.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.254.840,00	0,00
110	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	842.310.077.178,00	0,00	46.985.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.295.549.178,00	0,00
111	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.148.935.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.935.900,00	0,00
112	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	419.756.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.756.480,00	0,00
113	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.390.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.390.564,00	0,00
114	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.127.750.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.750.544,00	0,00
115	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.114.977,00	0,00
116	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.938.651.510,00	0,00	251.081.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.732.610,00	0,00
117	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	359.048.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.048.223,00	0,00
118	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.328.778.220,00	0,00	111.432.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.211.199,00	0,00
119	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	983.131.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.131.256,00	0,00
120	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	1.539.087.361,00	0,00	166.402.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.490.089,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
121	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	11.872.946.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872.946.006,00	0,00
122	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.851.720,00	0,00
123	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	698.658.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.658.672,00	0,00
124	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mengwi	67.156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.156.600,00	0,00
125	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Petang II	653.148.969,00	0,00	107.091.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.240.000,00	0,00
126	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kuta Selatan	17.309.980.840,00	0,00	3.947.681.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257.662.109,00	0,00
127	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebudayaan	1.092.722.109,00	0,00	311.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.552.109,00	0,00
128	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.900,00	0,00
129	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Abiansemal	2.696.043.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.043.800,00	0,00
130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.888.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888.600,00	0,00
131	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	991.545.929,00	0,00	118.039.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.585.489,00	0,00
132	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.546.130.215,00	0,00	81.837.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.384.075.215,00	0,00
133	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.648.810.678,00	0,00	34.508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683.318.878,00	0,00
134	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299.900,00	0,00
135	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kuta Utara	424.267.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.267.852,00	0,00
136	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Daerah Mangusada	167.800.000.000,00	0,00	39.065.669.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.865.669.700,00	0,00
137	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Petang	9.176.233.552,00	0,00	16.406.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.639.907,00	0,00
138	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Petang I	667.746.272,00	0,00	112.253.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	0,00
139	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.985.581,00	0,00
140	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616.900,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
141	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.796.420,00	0,00
142	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta I	1.303.125.070,00	0,00	336.874.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000.000,00	0,00
143	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.985.225,00	0,00
144	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.826.730.664,00	0,00	23.866.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850.597.551,00	0,00
145	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	989.239.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.239.193,00	0,00
146	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	2.204.627.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.627.472,00	0,00
147	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.441.961.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441.961.766,00	0,00
148	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.950.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950.060,00	0,00
149	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.438.155.077,00	0,00	408.377.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.532.233,00	0,00
150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.999.232,00	0,00
151	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	798.833.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.833.426,00	0,00
152	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata	76.465.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.465.360,00	0,00
TOTAL					2.324.842.886.473,00	0,00	1.379.040.957.841,00	0,00	72.086.033.246,00	0,00	0,00	0,00	3.775.969.877.560,00	0,00

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati



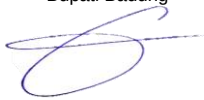
 I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PER SEPTEMBER 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL		STAF	
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Golongan IV/c	-	26	2	-	-	66	28	9	131
Golongan IV/b	-	8	42	1	-	433	75	39	600
Golongan IV/a	-	1	91	35	2	225	66	97	558
JUMLAH GOLONGAN IV	-	35	135	36	2	724	173	145	1.293
Golongan III/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/d	-	-	21	102	1	317	320	183	1.231
Golongan III/c	-	-	2	78	-	155	150	66	789
Golongan III/b	-	-	-	23	-	229	193	19	1.343
Golongan III/a	-	-	-	2	-	9	76	9	513
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	23	205	1	710	739	277	3.876
Golongan II/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/d	-	-	-	-	-	1	72	5	509
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	-	1	180
Golongan II/b	-	-	-	-	-	2	-	-	138
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	34
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	6	72	6	861
Golongan I/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	14	14
PPPK									
Golongan III						2.707	513	145	3.365
Golongan II							613	19	632
JUMLAH PPPK									3.997
TOTAL	-	35	158	241	3	1.440	984	428	10.041

Kab. Badung, 12 Desember 2024

Bupati Badung

I NYOMAN GIRI PRASTA

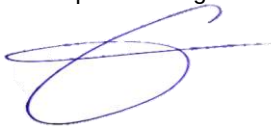
LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 12 September 2024

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun 31 Desember 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan tahun 2024	Perkiraan Saldo Akhir per 31 Agustus 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Reklame	2024	284.854.290,83	3.188.973.789,64	2.643.657.153,74	830.170.926,73
2	Piutang PBJT	2024	359.819.387.239,23	3.345.062.935.139,87	3.438.313.717.546,53	266.568.604.832,57
3	Piutang Pajak Air Tanah	2024	24.855.108.081,27	47.415.919.624,03	44.618.948.505,88	27.652.079.199,42
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	2024	100.894.250,00	40.093.750,00	42.033.750,00	98.954.250,00
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2024	425.203.546.259,00	280.884.184.980,00	47.038.691.410,00	659.049.039.829,00
6	Piutang BPHTB	2024				-
7	Piutang Sewa Hasil Tanah	2024	70.362.505,60			70.362.505,60
						-
Jumlah			810.334.152.625,94	3.676.592.107.283,54	3.532.657.048.366,15	954.269.211.543,33

Kab. Badung, 12 September 2024

Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu (2023)	Penyertaan Modal Tahun ini (2024)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (2024)	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (2024)	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini (2024)	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2012	PT JASA MARGA BALI	SK BUPATI NO 2050/01/HK/2015	SAHAM	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	-	-	100.000.000.000,00
2	2014	PT PENJAMINAN KREDIT BALI MANDARA	KEPUTUSAN BUPATI NO. 2569/01/HK/2014	SAHAM	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	47.239.180,00	-	5.000.000.000,00
3	2021-2025	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA	PERDA NO 1 TAHUN 2021	MODAL PENYERTAAN	446.028.643.763,00	193.207.843.274,00	50.000.000.000	243.207.843.274,00	202.820.800.489,00	25.159.263.396,85		243.207.843.274,00
4	2014-2023	PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU GIRI SEDANA	PERDA NO 2 TAHUN 2021 SK BUPATI NO 756/01/HK/2023	MODAL PENYERTAAN	87.000.000.000,00	58.401.745.616,00	4.298.254.382	62.699.999.998,00	24.300.000.002,00	-	-	62.699.999.998,00
5	2015- 2022	BPD BALI	PERDA NO 15 TAHUN 2022 SK BUPATI NO 1056/01/HK/2022	SAHAM	1.800.000.000.000,00	850.617.000.000,00	200.000.000.000	1.050.617.000.000,00	749.383.000.000,00	234.474.652.333,00	-	1.050.617.000.000,00
Jumlah					2.438.028.643.763,00	1.207.226.588.890,00	254.298.254.382,00	1.461.524.843.272,00	976.503.800.491,00	259.681.154.909,85	-	1.461.524.843.272,00

Kab. Badung, 12 September 2024
Bupati Badung



NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XIII (I) : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 12 September 2024

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun 2023	Perkiraan penambahan tahun 2024	perkiraan pengurangan tahun 2024	Perkiraan saldo pada akhir tahun 2024
1	Aset Tetap Lainnya	118.913.450.115,32	14.563.566.511	233.212.500	133.243.804.126
2	Gedung dan Bangunan	3.338.808.155.589,13	677.005.209.370	62.153.661.256	3.953.659.703.703
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.812.372.185.388,71	866.238.881.451	31.596.655.000	4.647.014.411.840
4	Peralatan dan Mesin	2.235.666.301.675,47	367.281.365.094	30.692.291.197	2.572.255.375.573
5	Tanah - Pengadaan Tanah	6.222.562.995.438,89	652.949.808.850	-	6.875.512.804.289
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.296.074.276,67	-	-	32.296.074.277
7	Aset Lainnya	558.673.176.090,78	370.488.107	-	559.043.664.198
JUMLAH		16.319.292.338.575,00	2.578.409.319.383,00	124.675.819.952,68	18.773.025.838.005

Kab. Badung, 12 September 2024
Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024 PERUBAHAN

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA 2022(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2023 (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA 2023 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA 2022	Perubahan APBD TA 2022		APBD TA 2023	Perubahan APBD TA 2023		APBD TA 2024	Perubahan APBD TA 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-		-	-		-		-
2				-		-	-				-
3											-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

Kab. Badung, 12 September 2024
Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

Kab. Badung, 12 September 2024
Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

Kab. Badung, 12 September 2024
Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA